



# **RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2026**



**H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si  
BUPATI BLORA**



**TRI YULI SETYOWATI, ST., MM  
WAKIL BUPATI BLORA**

*"Sesarengan mBangun Blora Unggul dan Berdaya Saing"*

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021**



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | I-1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....  | I-5          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....  | I-8          |
| 1.4 Maksud Dan Tujuan .....   | I-13         |
| 1.5 Sistematika Laporan .....   | I-13         |
| <br>  |              |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>                              | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Aspek Geografis dan Demografis .....                                      | II-1         |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                       | II-6         |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum.....   | II-20        |
| 2.4 Aspek Daya Saing .....  | II-82        |
| 2.5 Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021.....                                 | II-87        |
| <br>  |              |
| <b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....</b>                                  | <b>III-1</b> |
| 3.1 Kinerja Masa Lalu .....   | III-1        |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu .....                            | III-9        |
| 3.3 Kerangka Pendanaan .....  | III-18       |
| <br>  |              |
| <b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>                      | <b>IV-1</b>  |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan .....  | IV-1         |
| 4.2 Isu Strategis .....   | IV-15        |
| <br>  |              |
| <b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                             | <b>V-1</b>   |
| 5.1 Visi .....  | V-1          |
| 5.2 Misi .....  | V-3          |
| 5.3 Tujuan Dan Sasaran .....  | V-6          |
| <br>  |              |
| <b>BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM<br/>PEMBANGUNAN DAERAH.....</b> | <b>VI-1</b>  |
| 6.1 Strategi .....  | VI-1         |
| 6.2 Arah kebijakan Tahunan .....  | VI-6         |
| 6.3 Program Unggulan Kabupaten Blora .....                                    | VI-8         |
| 6.3 Arah pengembangan Wilayah .....   | VI-21        |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN<br/>PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b> | <b>VII-1</b> |
| <b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH .....</b>               | <b>VIII-</b> |
| <b>BAB IX PENUTUP .....</b>   | <b>IX-1</b>  |
| 9.1 Pedoman Transisi .....  | IX-1         |
| 9.2 Kaidah Pelaksanaan .....  | IX-1         |



## **BAB I**

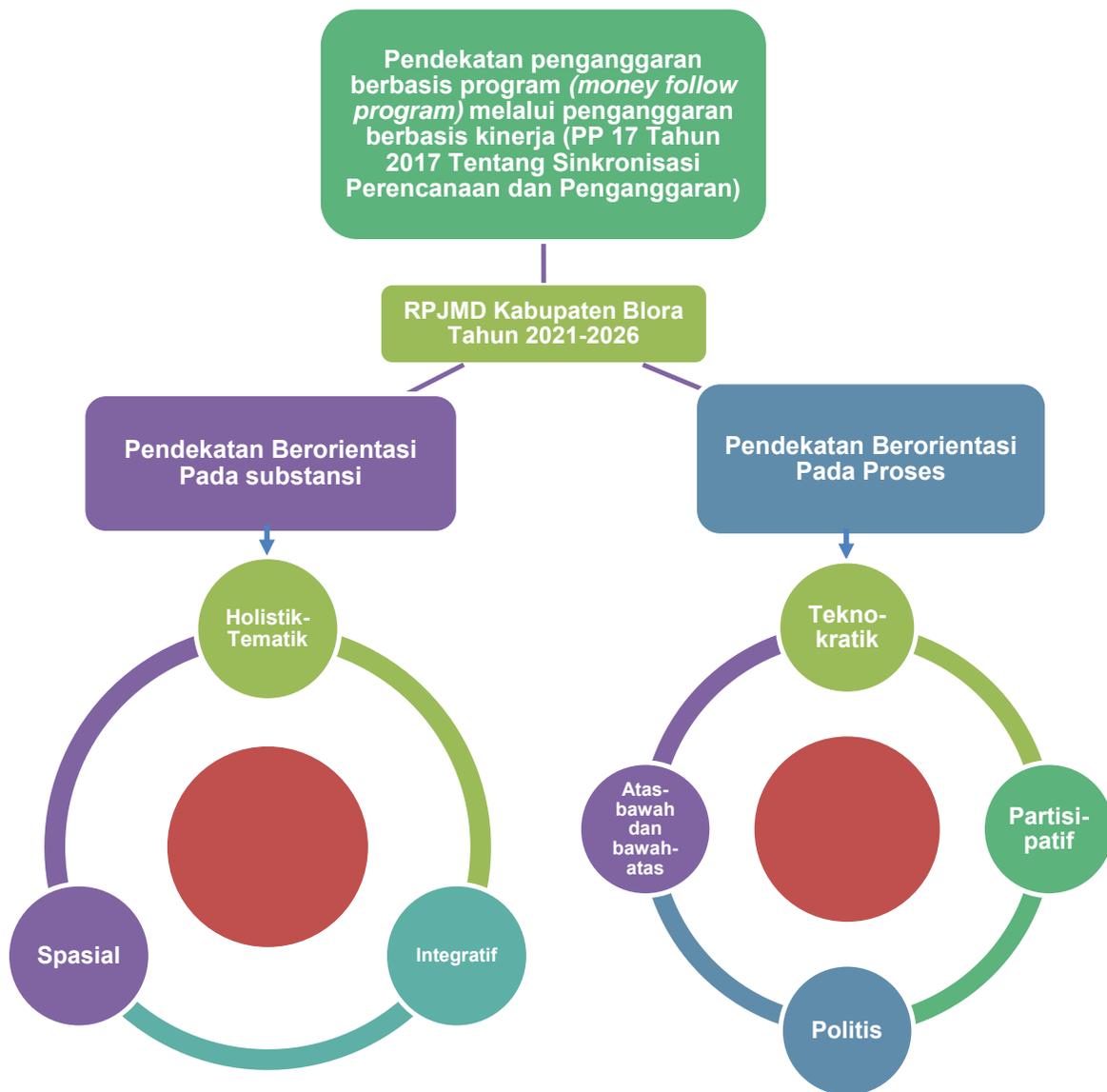
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blora yang dilaksanakan pada tahun 2020 menetapkan Bapak H. Arief Rohman, M.Si sebagai Bupati dan Ibu Tri Yuli Setyowati, S.T, M.M. sebagai Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Blora. Setelah terpilih dan dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora**

Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai



tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.

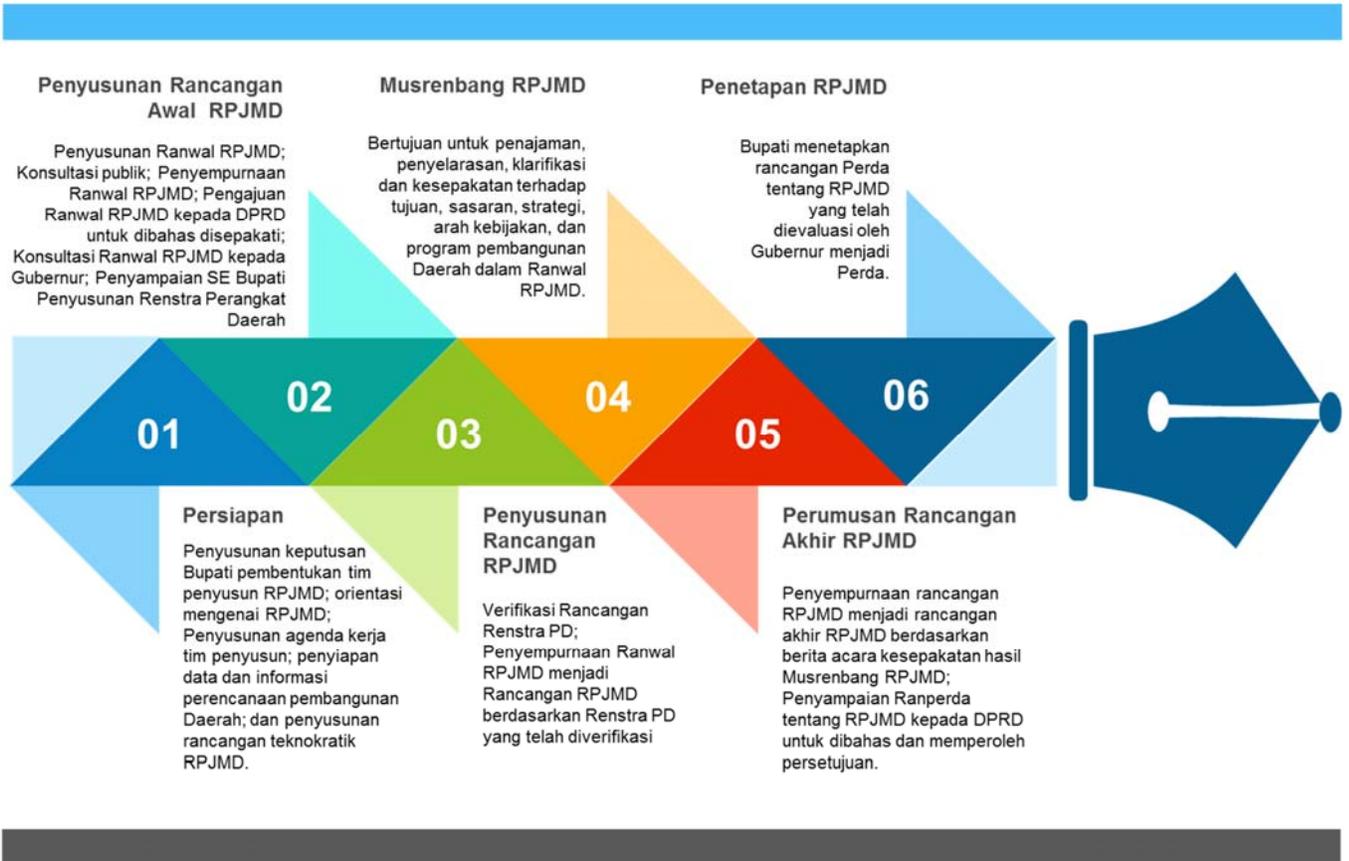
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.
4. Pendekatan *Top-down dan Bottom Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.

Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.



Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan sebagaimana tercantum pada gambar 1.2



**Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa

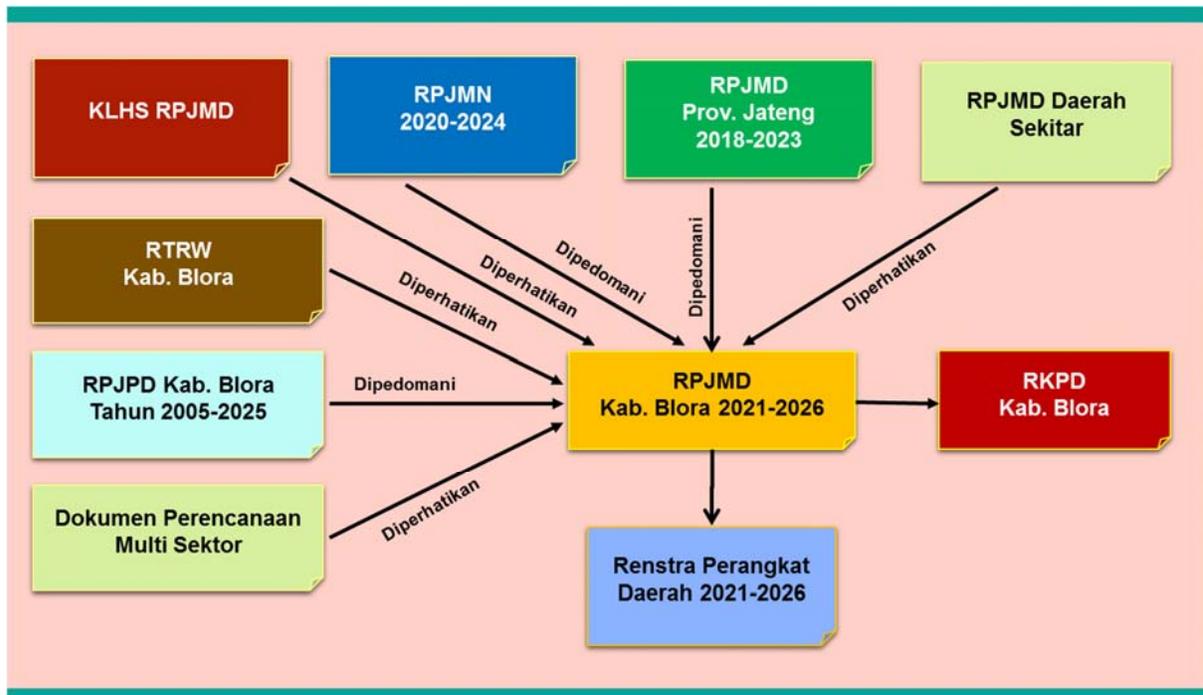


- Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blora dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada gambar 1.3

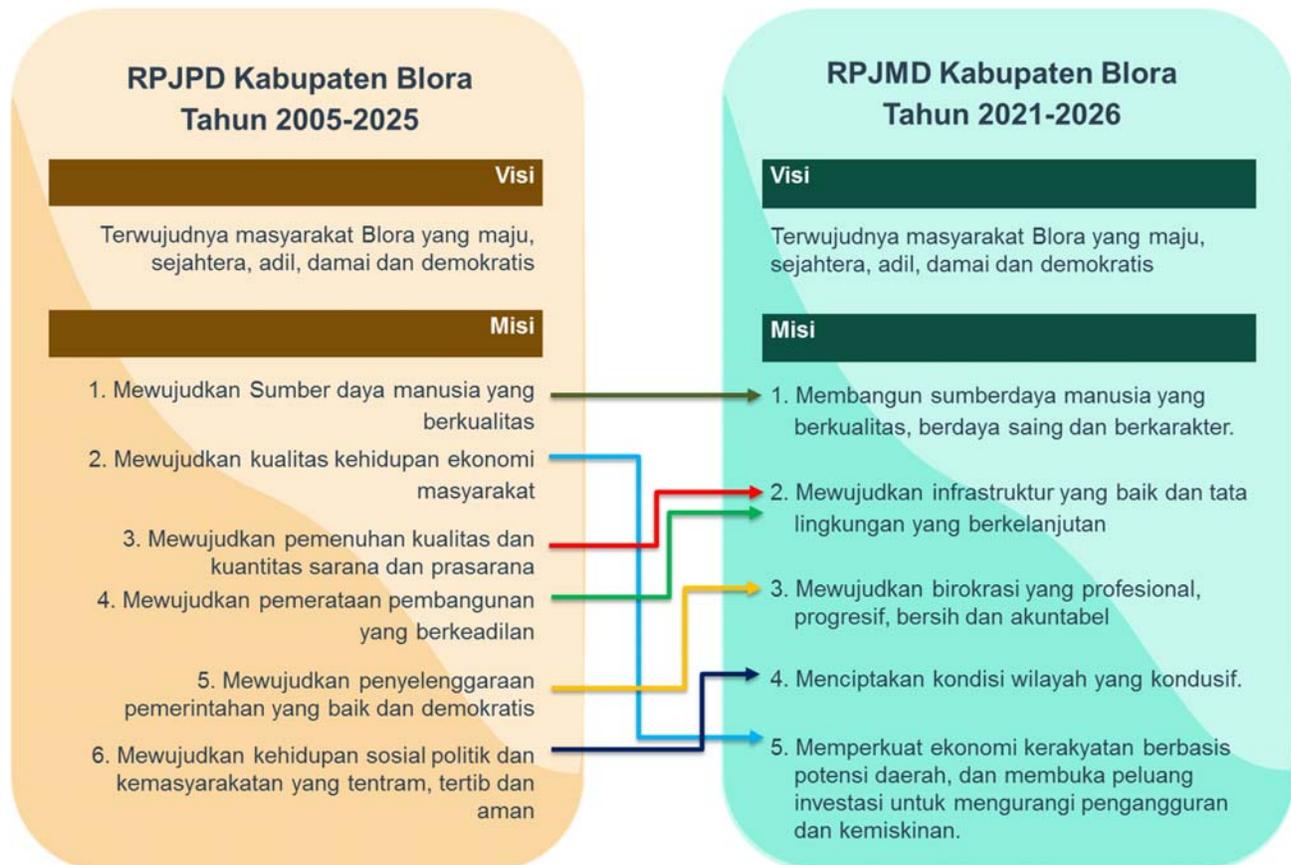


**Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-4 dalam dokumen RPJPD.



**Gambar 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD Kabupaten Blora**

## **2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Blora tahun 2011-2031, terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2021-2026.

## **3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD**

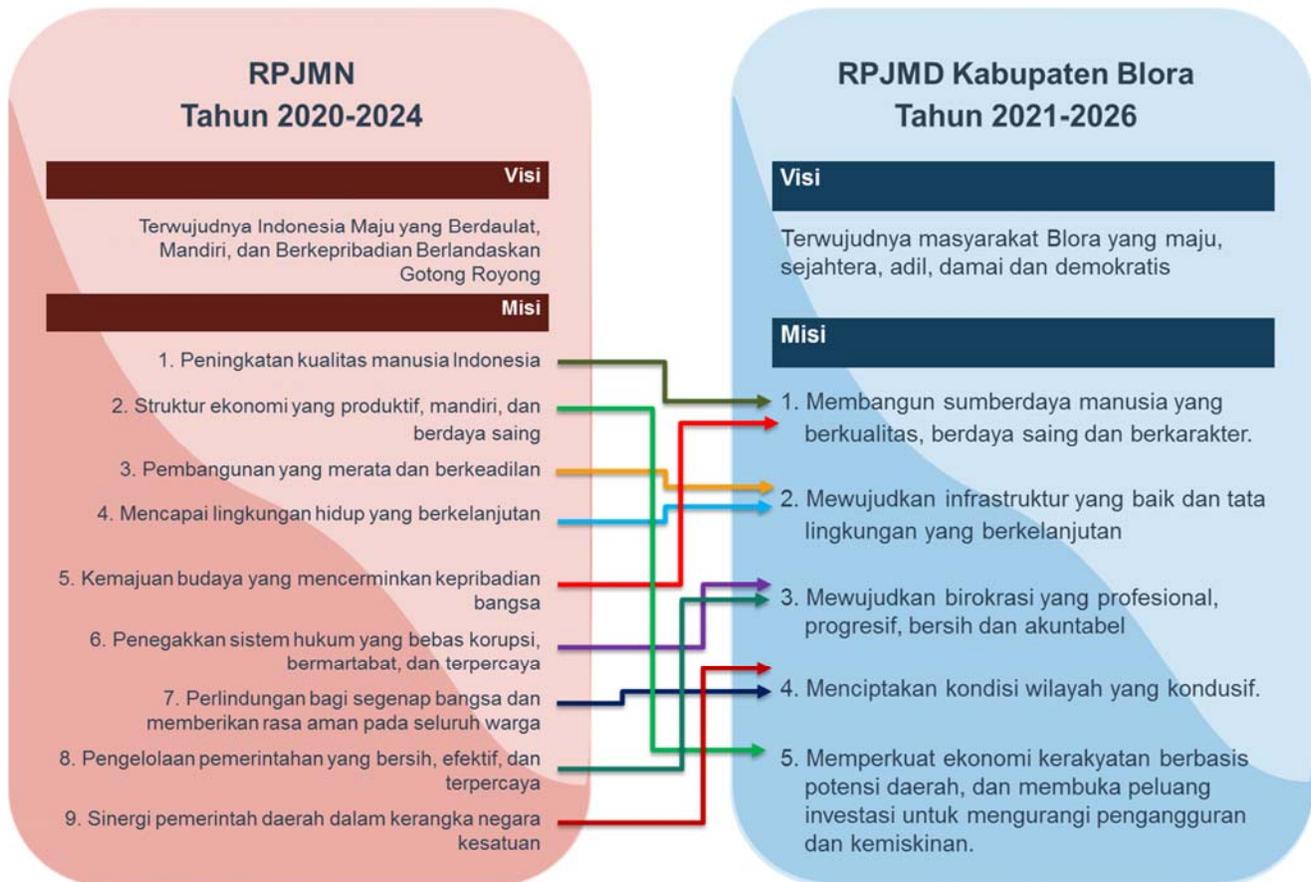
Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Blora, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD.

## **4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi



presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.



**Gambar 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora dengan RPJMN**

### **5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Banglor (Rembang dan Blora) dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 1.6 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah**

## **6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Ngawi) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Blora yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Blora.

## **7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, Kajian Penguatan Pangan dan Pengurangan Kerentanan Pangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam



perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

#### **8. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

#### **9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021-2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Blora agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- Bab V Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan pembangunan, Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah.
- Bab IX Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

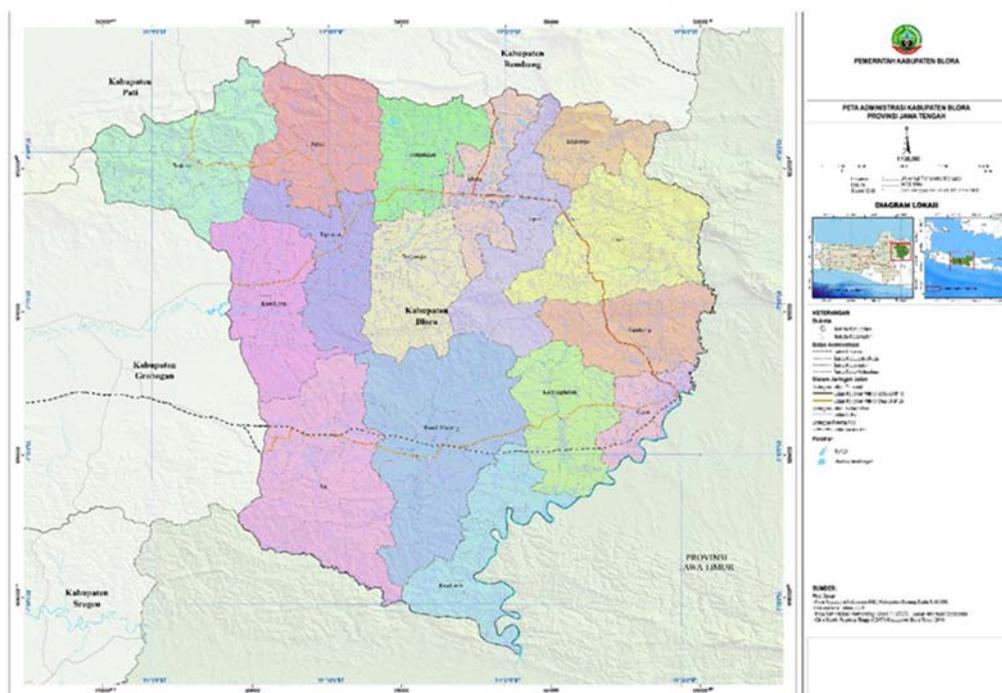
## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografis dan Demografis

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km<sup>2</sup> atau 195.582.19 ha (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111°16' s.d. 111°338' Bujur Timur dan 6°528' s.d. 7°248' Lintang Selatan.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora

**Gambar 2.1** Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan.



Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 meter dpl, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kelerengannya 0-2 % sebesar 35,06 %, 2-5 % sebesar 12,81 %, 5-15 % sebesar 43,64 %, 15-40 % sebesar 8,27 %, dan >40 % sebesar 0,22 %.

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 % tanah gromosol, 39 % mediteran, dan 5 % alluvial. Kawasan Karst yang ada di Kabupaten Blora meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antara lain: batu gamping, batu lempung / tanah liat, pasir kuarsa, *phospat*, *ball clay*, dan *gypsum*.

Berdasar data Klimatologi, kondisi iklim Kabupaten Blora merupakan iklim tropis dengan curah hujan berada di antara 1.182 mm pada tahun 2016 sampai dengan 1.877 mm pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata hari hujan 113 hari, sedangkan kecepatan angin antara 10,52 km/jam sampai dengan 77 km/jam.

Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.

Penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2020 paling besar adalah kawasan hutan, sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46 % dari total wilayah. Luas sawah sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31 %. Sedangkan untuk bangunan dan pekarangan hanya 25.363,04 hektar atau sekitar 13%. Secara lengkap penggunaan lahan di Kabupaten Blora tersaji pada [tabel 2.1](#)

**Tabel 2.1**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Jenis Penggunaan Lahan  | Luas (ha)  |            |           |           |           |
|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                         | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      |
| A.  | Lahan Sawah             | 45.948,191 | 45.948,191 | 60.266,10 | 60.266,10 | 60.266,10 |
| 1.  | Irigasi teknis          | 7.449,000  | 7.449,000  |           |           |           |
| 2.  | Irigasi setengah teknis | 967,000    | 967,000    |           |           |           |

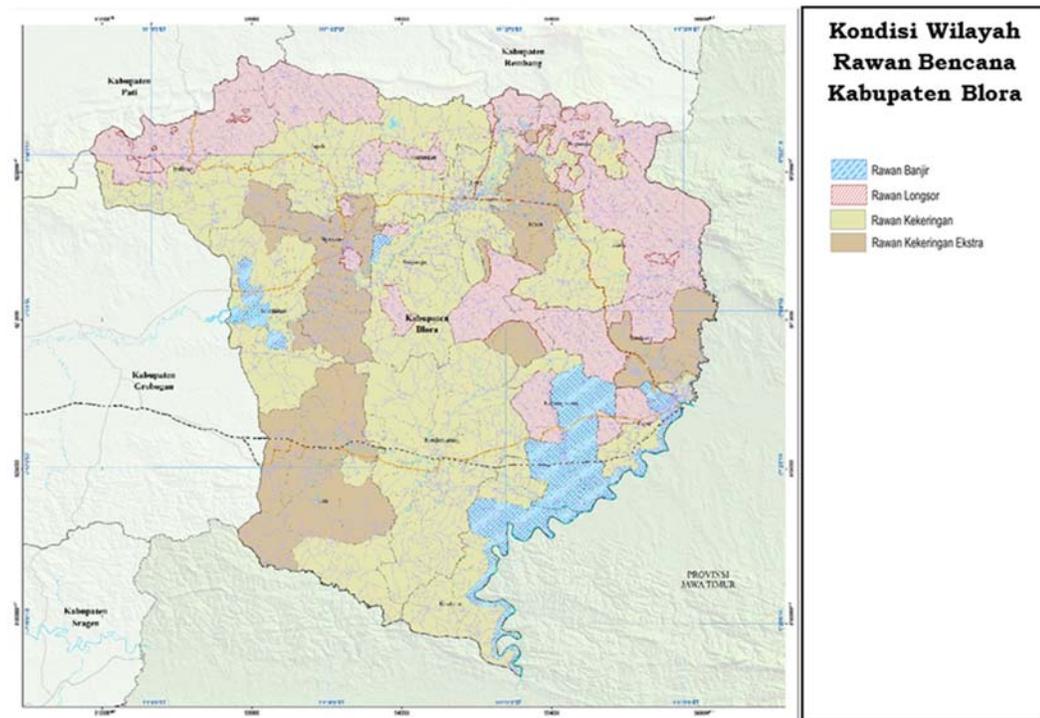


| No.       | Jenis Penggunaan Lahan   | Luas (ha)          |                    |                   |                   |                   |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                          | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              | 2020              |
| 3.        | Irigasi sederhana        | 4.114,000          | 4.114,000          |                   |                   |                   |
| 4.        | Irigasi desa/Non PU      | 1.640,000          | 1.640,000          |                   |                   |                   |
| 5.        | Tadah hujan              | 29.522,191         | 29.522,191         |                   |                   |                   |
| 6.        | P2AT                     | 2.256,000          | 2.256,000          |                   |                   |                   |
| <b>B.</b> | <b>Lahan Bukan Sawah</b> | <b>136.110,604</b> | <b>136.110,604</b> | <b>135.316,09</b> | <b>135.316,09</b> | <b>135.316,09</b> |
| 1.        | Bangunan dan pekarangan  | 17.049,323         | 17.049,323         | 25.363,04         | 25.363,04         | 25.363,04         |
| 2.        | Tegal/kebun              | 26.188,372         | 26.188,372         | 15.708,30         | 15.708,30         | 15.708,30         |
| 3.        | Waduk                    | 56,962             | 56,962             | 331,41            | 331,41            | 331,41            |
| 4.        | Hutan                    | 90.416,521         | 90.416,521         | 90.426,81         | 90.426,81         | 90.426,81         |
| 5.        | Perkebunan               | 4,000              | 4,000              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.        | Lainnya                  | 2.395,430          | 2.395,430          | 3.486,52          | 3.486,52          | 3.486,52          |
|           | <b>Jumlah (A+B)</b>      | <b>167.867,192</b> | <b>182.058,797</b> | <b>195.582,19</b> | <b>195.582,19</b> | <b>195.582,19</b> |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pengembangan suatu wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi sumber daya yang tersedia dan memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis Kabupaten Blora menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sehingga dalam proses pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan daerah-daerah rawan terjadinya bencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Kabupaten Blora. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora antara lain: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan angin topan sebagaimana terlihat pada [peta 2.2](#)



Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora

**Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora**

### 2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 tercatat sebesar 938.814 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 % atau bertambah 13.172 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2019.



Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam [tabel 2.2](#)

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Jenis Kelamin      |                  | Jumlah (Jiwa) | Perubahan (Jiwa) | Pertumbuhan (%) |
|-------|--------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|       | Laki - Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |               |                  |                 |
| 2016  | 495.467            | 496.110          | 991.577       | 6.729            | 0,683           |
| 2017  | 498.514            | 499.318          | 997.832       | 6.255            | 0,631           |
| 2018  | 453.433            | 452.947          | 906.380       | -91.452          | -9,165          |
| 2019  | 463.252            | 462.390          | 925.642       | 19.262           | 2,12            |
| 2020  | 469.730            | 469.084          | 938.814       | 13.172           | 1,42            |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Dilihat dari distribusinya, penduduk terbanyak di Kecamatan Blora sejumlah 98.155 jiwa, selanjutnya Kecamatan Randublatung sejumlah 82.771 jiwa, dan Kecamatan Cepu sebanyak 79.142 jiwa. Sementara itu penduduk paling sedikit di Kecamatan Bogorejo sebanyak 26.240 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat pada [tabel 2.3](#)

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Kecamatan     | Tahun          |                |                |                |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |               | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| 1.  | Jati          | 56.942         | 57.309         | 50.886         | 51.923         | 52.702         |
| 2.  | Randublatung  | 90.962         | 91.384         | 79.570         | 81.457         | 82.771         |
| 3.  | Kradenan      | 46.535         | 46.683         | 41.761         | 42.816         | 43.497         |
| 4.  | Kedungtuban   | 65.069         | 65.607         | 58.867         | 59.817         | 61.535         |
| 5.  | Cepu          | 85.884         | 86.184         | 76.587         | 78.175         | 79.142         |
| 6.  | Sambong       | 31.311         | 31.460         | 28.476         | 29.070         | 29.456         |
| 7.  | Jiken         | 41.980         | 42.332         | 39.235         | 39.793         | 40.428         |
| 8.  | Bogorejo      | 26.650         | 26.795         | 26.925         | 24.324         | 26.240         |
| 9.  | Jepon         | 68.882         | 69.510         | 94.606         | 65.252         | 66.193         |
| 10. | Blora         | 103.666        | 104.113        | 49.033         | 96.522         | 98.155         |
| 11. | Banjarejo     | 68.519         | 69.184         | 64.059         | 65.454         | 65.861         |
| 12. | Tunjungan     | 52.418         | 52.921         | 63.137         | 50.043         | 50.706         |
| 13. | Japah         | 38.905         | 39.208         | 68.994         | 37.224         | 37.759         |
| 14. | Ngawen        | 68.640         | 69.219         | 65.047         | 64.416         | 65.212         |
| 15. | Kunduran      | 73.940         | 74.472         | 25.501         | 70.245         | 71.233         |
| 16. | Todanan       | 70.848         | 71.451         | 36.696         | 66.837         | 67.924         |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>991.201</b> | <b>997.832</b> | <b>906.380</b> | <b>925.642</b> | <b>938.814</b> |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. PDRB

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari Rp 19.993.647,30 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 25.977.446,33 juta pada tahun 2019. Kondisi yang sama juga terjadi berdasarkan harga konstan dari sebesar Rp 15.913.432,03 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 18.322.129,66 pada tahun 2020. Seiring dengan hal tersebut, PDRB ADHK per kapita cenderung meningkat dari Rp 18.632.511,74 pada tahun 2016 menjadi Rp 19.793,969,00 pada tahun 2019. Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada [tabel 2.4](#)

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Blora**

| Tahun | PDRB ADHB        | PDRB ADHK        |                 | Jumlah Penduduk Tengah Tahun (jiwa) | PDRB ADHK per kapita |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       | Nilai (Rp. Juta) | Nilai (Rp. Juta) | Pertumbuhan (%) |                                     | Nilai (Rp. Juta)     |
| 2016  | 19.993.647,30    | 15.913.432,03    | 23,53           | 854.068                             | 18.632.511,74        |
| 2017  | 21.797.101,52    | 16.843.360,54    | 5,84            | 862.301                             | 19.533.040,71        |
| 2018  | 24.137.910,00    | 17.607.940,00    | 4,40            | 862.110                             | 20.448.350,00        |
| 2019  | 25.977.446,33    | 18.322.129,66    | 4,05            | 925.642                             | 19.793,969,00        |
| 2020  | NA               | NA               | NA              | NA                                  | NA                   |

Sumber : BPS Kabupaten Blora tahun 2020

Dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan lapangan usaha, terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi meningkat dari 23,31% pada tahun 2016 menjadi 25,00% pada tahun 2019, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kontribusi semakin menurun dari 24,51% pada tahun 2016 menjadi 21,82% pada tahun 2019, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi cenderung menurun dari 16,47% pada tahun 2016 menjadi 15,39% pada tahun 2019. Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat pada [tabel 2.5](#)



**Tabel 2.5**  
**Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**  
**(Persen)**

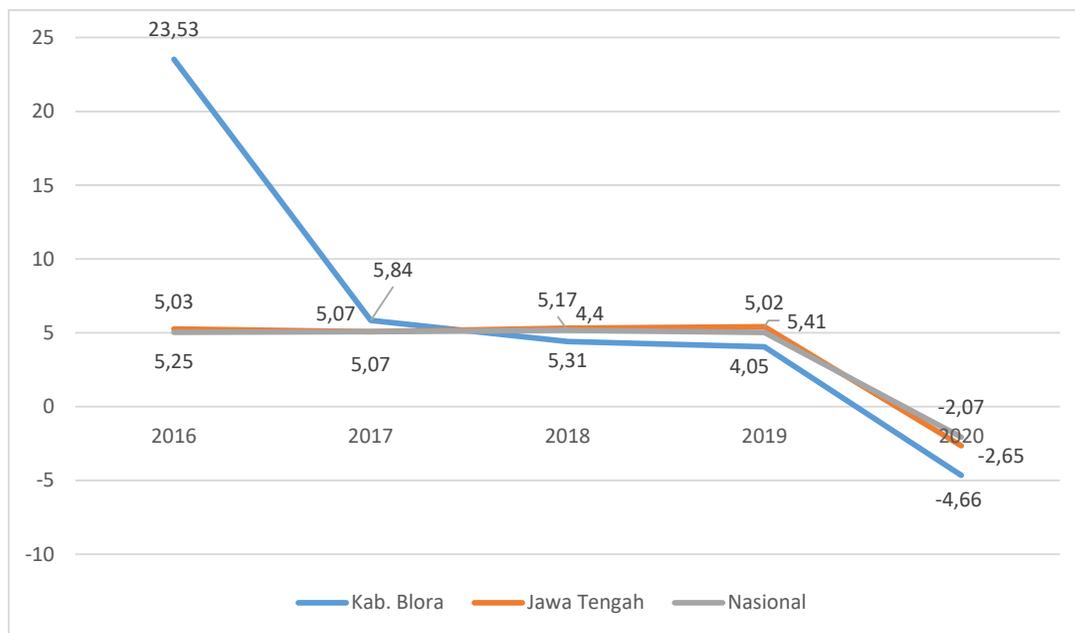
| Kategori  | Klasifikasi Lapangan Usaha                                     | Tahun  |        |        |        |      |
|---|--|--------|--------|--------|--------|------|
|   |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 24,51  | 23,30  | 22,91  | 21,82  | NA   |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 23,31  | 24,12  | 25,24  | 25,00  | NA   |
| C   | Industri Pengolahan  | 9,67   | 9,80   | 9,74   | 9,93   | NA   |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,06   | NA   |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,04   | 0,04   | 0,03   | 0,03   | NA   |
| F   | Konstruksi   | 3,98   | 4,08   | 4,1    | 4,21   | NA   |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 16,47  | 15,14  | 15,05  | 15,39  | NA   |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,56   | 2,61   | 2,46   | 2,54   | NA   |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3,21   | 3,24   | 3,12   | 3,34   | NA   |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 0,96   | 0,97   | 1,06   | 1,10   | NA   |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,00   | 3,04   | 2,92   | 2,92   | NA   |
| L   | Real Estate  | 1,23   | 1,22   | 1,2    | 1,22   | NA   |
| M, N  | Jasa Perusahaan  | 0,28   | 0,28   | 0,3    | 0,32   | NA   |
| O   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,42   | 3,30   | 3,12   | 3,05   | NA   |
| P   | Jasa Pendidikan  | 5,76   | 5,86   | 5,54   | 6,11   | NA   |
| Q   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,87   | 0,87   | 0,86   | 0,89   | NA   |
| R,S,T,U   | Jasa lainnya   | 2,00   | 2,03   | 2      | 2,08   | NA   |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA   |

Sumber : PDRB Kab.Blora Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung menurun dari sebesar 23,53% pada tahun 2016 menjadi 4,05% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 mengalami kontraksi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, **pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen**. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana non alam wabah virus corona yang juga melanda Indonesia bahkan dunia, pandemi covid 19 berpengaruh besar pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Turunnya ekonomi penyebab utamanya adalah lemahnya konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi sebagai akibat kebijakan



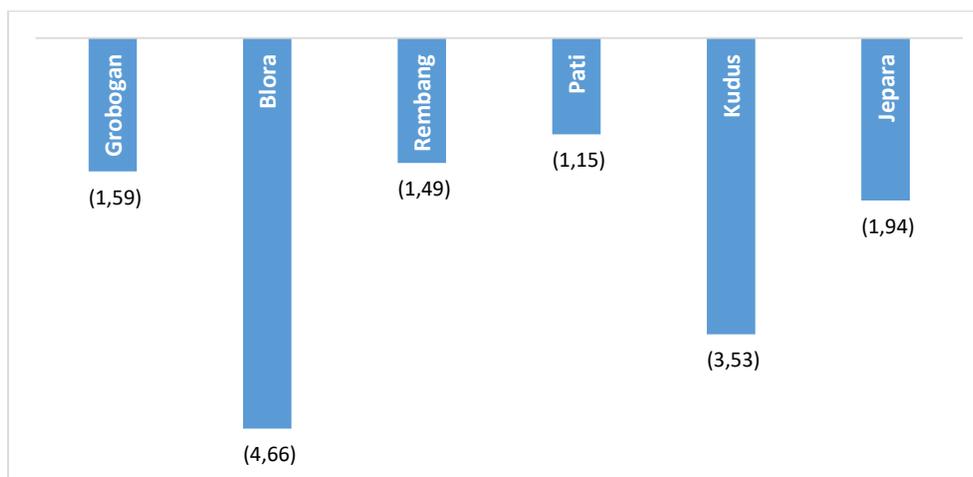
pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang mengalami penurunan -2,65%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora juga mengalami penurunan menjadi 4,66%.



\*\*): angka sangat sementara

**Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

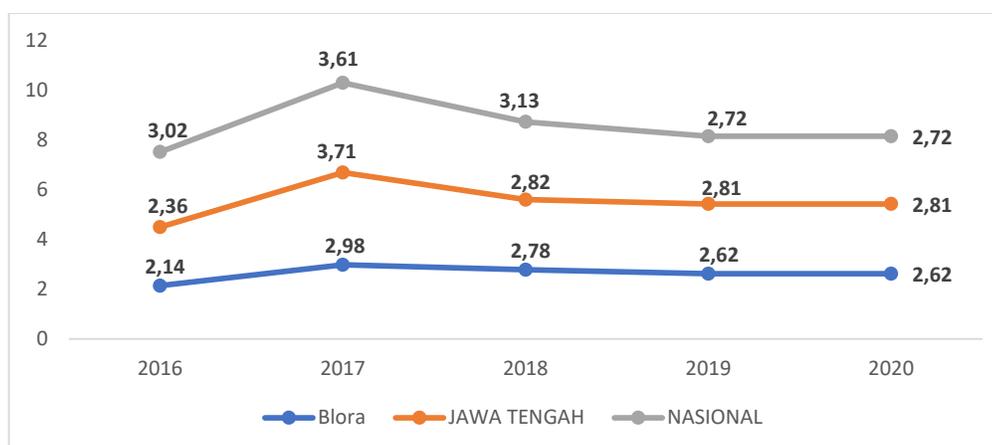
Dibandingkan daerah sekitar, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2020 masih dibawah Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, Jepara dan Kudus, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2019**

## 2. Inflasi

Selama tahun 2016–2020, tingkat inflasi Kabupaten Blora terkendali hanya berkisar di angka 2,14% – 2,98%. Dibanding inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata, hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat inflasi berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.



**Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Blora tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus dan Grobogan, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020**

### 3. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Angka indeks gini di Kabupaten Blora menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang terus meningkat, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ketidakmerataan pendapatan Kabupaten Blora memiliki tren yang sama. Hal ini menggambarkan gejala perubahan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah berimbas juga pada perubahan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora atau sebaliknya. Dalam beberapa tahun ke depan, diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat. Peningkatan tingkat kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Secara rinci Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blora dikemukakan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Besarnya Indeks Gini Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

| No | Uraian      | Tahun |      |       |       |        |
|----|-------------|-------|------|-------|-------|--------|
|    |             | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020*) |
| 1  | Kab. Blora  | 0,39  | 0,39 | 0,39  | 0,39  | 0,39   |
| 2  | Jawa Tengah | 0,38  | 0,38 | 0,378 | 0,359 | 0,359  |

Sumber : BPS Kabupaten Blora

\*) Angka sementara



Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil pengolahan Indeks Williamson PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Blora cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nilai indeks Williamson pada Tahun 2016 sebesar 0,420 terus mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai angka 0,415 . Jika melihat nilai indeks Williamson di Kabupaten Blora, maka bisa dilihat bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang perkembangannya cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan. Pemerintah Kabupaten Blora mulai Tahun 2016 berupaya meningkatkan Pembangunan melalui Program Percepatan Pertumbuhan Wilayah Selatan agar Ketimpangan wilayah dapat diminimalisir, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Indeks wiliamson Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, seperti terlihat pada **Error! Reference source not found**.berikut:

**Tabel 2.7**  
**Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

| Tahun  | Blora | Jawa Tengah |
|--------|-------|-------------|
| 2016   | 0,420 | 0,669       |
| 2017   | 0,415 | 0,669       |
| 2018   | 0,415 | 0,669       |
| 2019   | 0,415 | 0,600       |
| 2020*) | 0,415 | 0,600       |

Sumber: BPS Kabupaten Blora tahun 2020

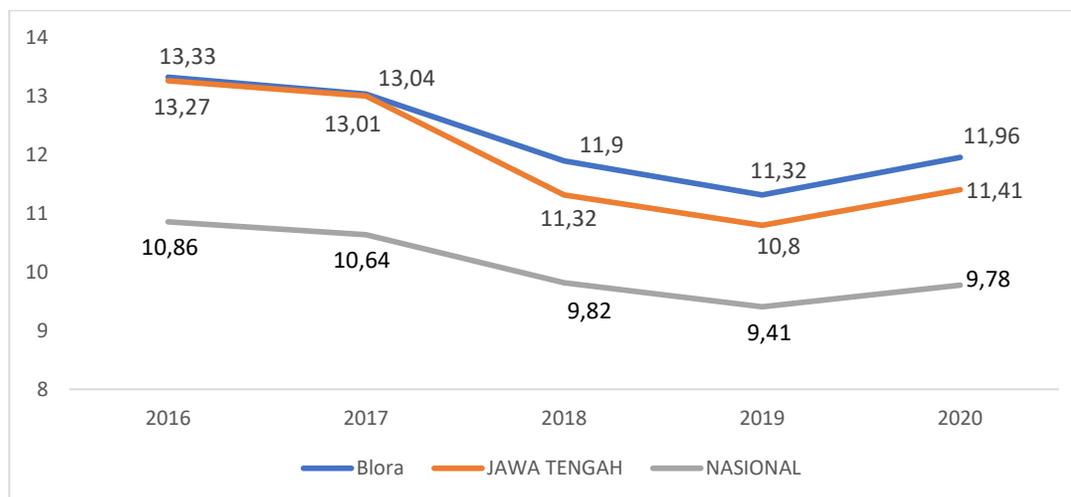
\*) Angka sementara

#### 4. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata 0,78% pertahun dikarenakan intervensi pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat guna penurunan kemiskinan cukup berhasil, akan tetapi periode Tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Blora mengalami kenaikan 0,64%. Meningkatnya persentase penduduk miskin pada 2020 disebabkan meningkatnya

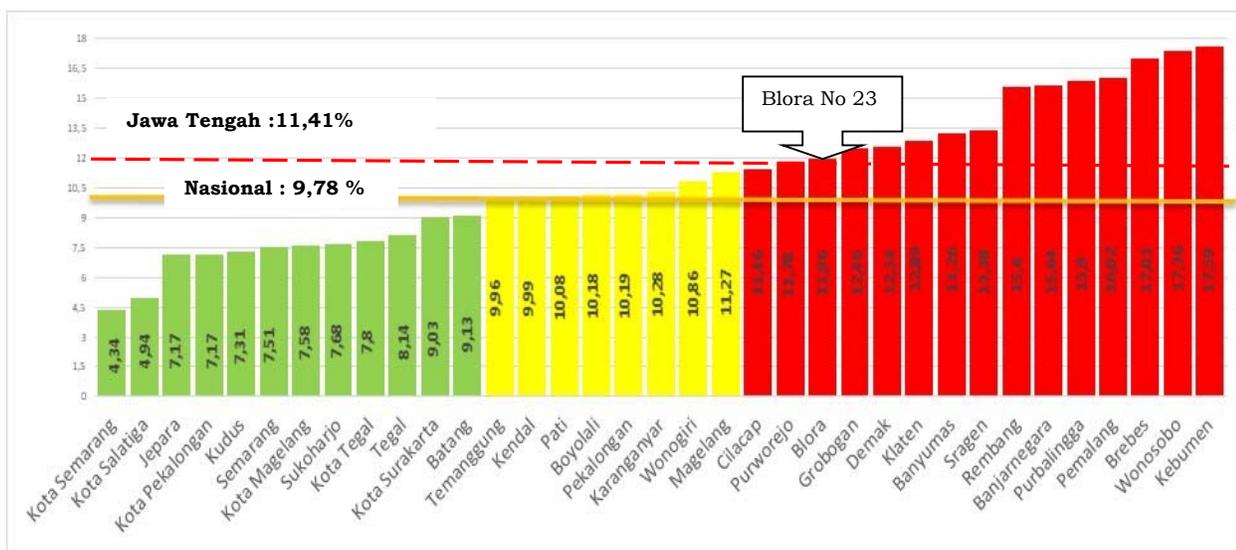


jumlah penduduk miskin secara absolut menjadi 103,73 ribu jiwa. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya meningkatnya harga-harga bahan pokok, harga BBM, serta dipicu adanya awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020. Data selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :



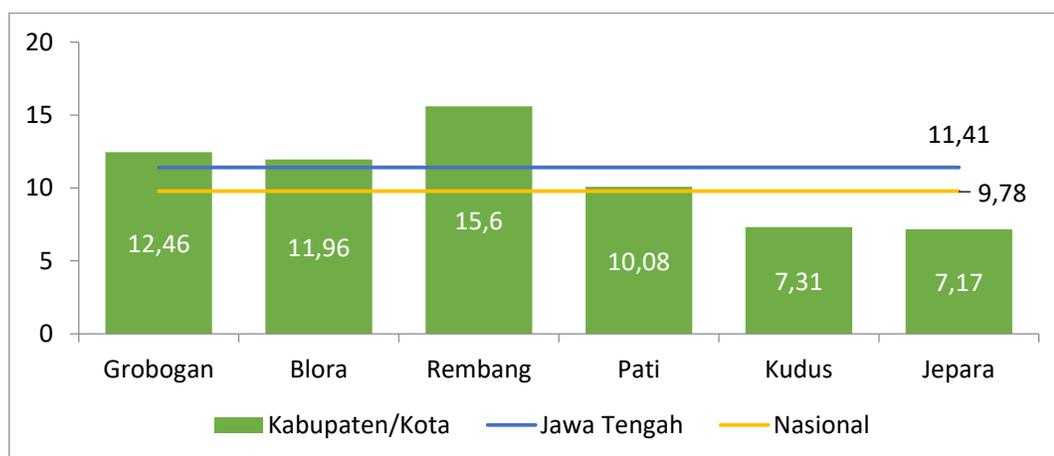
**Gambar 2.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blora dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Grafik kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2020 dibanding dengan Kabupaten Lain di Jawa Tengah dan Nasional berada pada urutan 23 naik dibanding Tahun 2019 yang berada pada posisi ke-21 se-Jawa Tengah. Data selengkapnya terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten se Jawa Tengah Tahun 2020**

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, persentase penduduk Miskin Kabupaten Blora lebih baik dibandingkan Kabupaten Rembang dan Grobogan, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020**



Data penduduk miskin Kabupaten Blora dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian  | Tahun   |         |         |        |         |
|-----|---|---------|---------|---------|--------|---------|
|     |   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019   | 2020    |
| 1.  | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)                       | 113.900 | 111.880 | 102.500 | 97.860 | 103.730 |
| 2.  | Persentase Penduduk Miskin (%)                      | 13,33   | 13,04   | 11,90   | 11,32  | 11,96   |
| 3.  | Peringkat Kemiskinan Kabupaten Blora di Jawa Tengah | 21      | 21      | 21      | 21     | 23      |

Sumber: BPS kab Blora Tahun 2020

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan pada periode 2016 – 2020 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 (terhadap tahun sebelumnya).

Pada Tahun 2020 garis kemiskinan di Kabupaten Blora tercatat sebesar Rp 353,259 per kapita per bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, garis kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,18%.

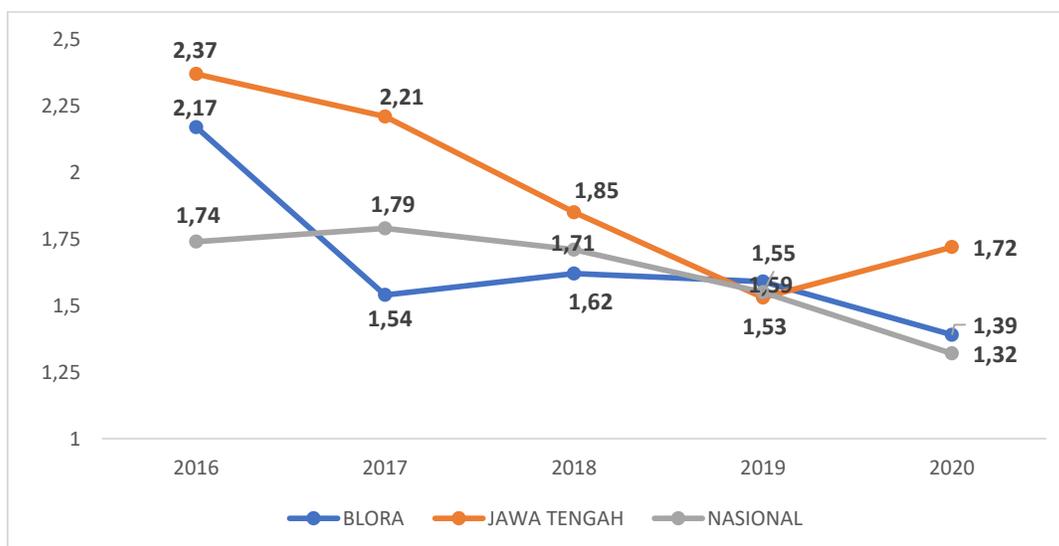
**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora**  
**Tahun 2015-2020**

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp) | Perubahan (%) |
|-------|-----------------------|---------------|
| 2016  | 279 972               | 8,69          |
| 2017  | 291 114               | 3,96          |
| 2018  | 308 520               | 5,98          |
| 2019  | 335 837               | 8,85          |
| 2020  | 353,259               | 5,18          |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha pemerintah untuk mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Blora pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2016 sebesar 2,17 menjadi 1,39 pada Tahun 2019. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Blora lebih baik dibandingkan Nasional namun lebih buruk dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



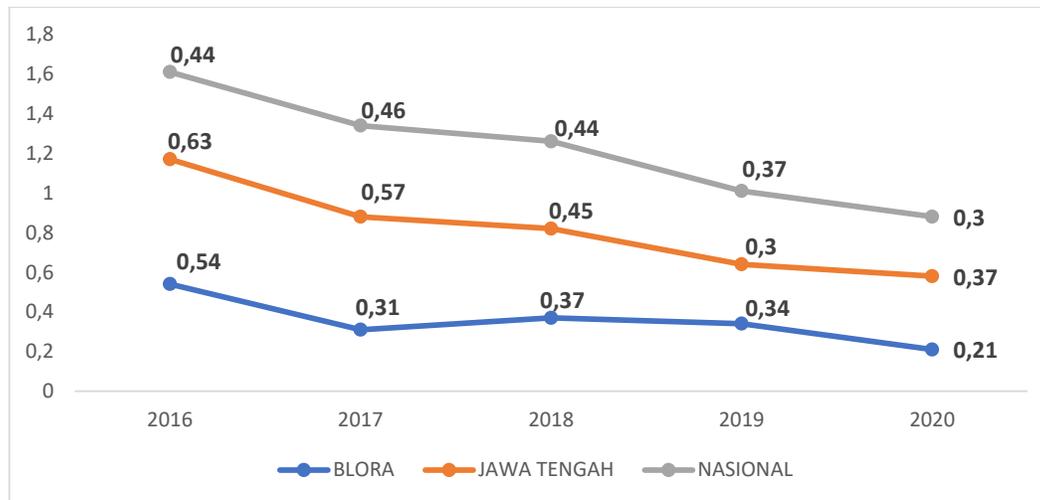
Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

**Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Indeks Keparahannya Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan



kecenderungan menurun dari sebesar 0,54 pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,21 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun. Dibandingkan nasional dan provinsi, capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Blora kondisinya lebih baik, yaitu Blora sebesar 0,21, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,37, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

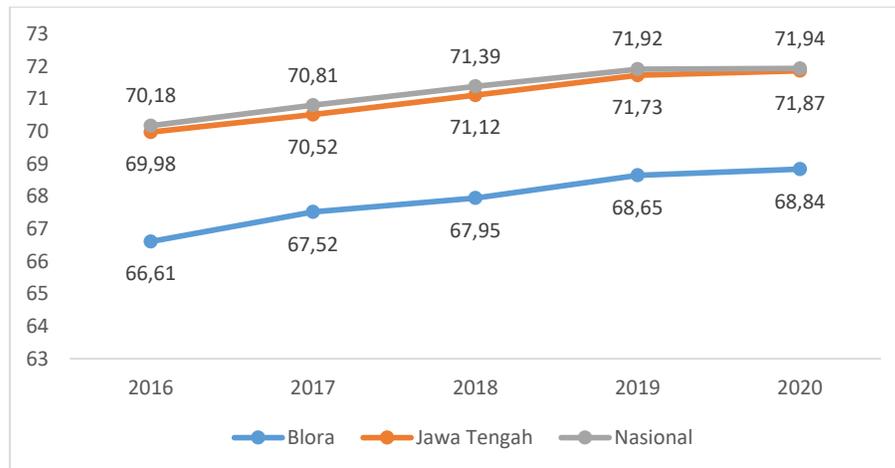
**Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

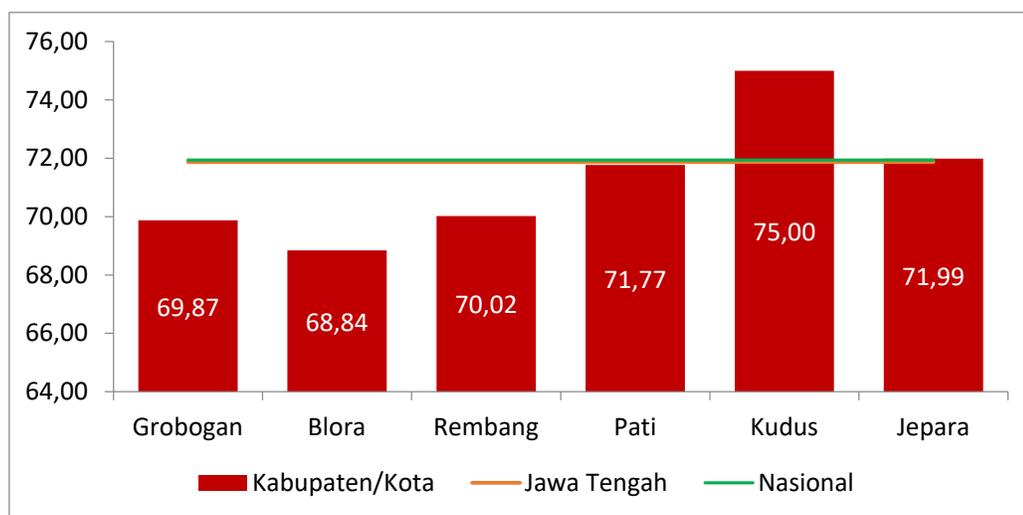
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,61 menjadi 68,84. IPM Kabupaten Blora masih dibandingkan capaian nasional dan Jawa Tengah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

IPM Kabupaten Blora Tahun 2020 masih menempati peringkat ke-29, dan merupakan yang terendah nilainya di bandingkan dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Blora dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini.





### Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020

Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora kesemuanya meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2018-2020 Namun demikian pencapaian indikator komposit IPM, baik angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan masih dibawah target tahunan RPJMD Tahun 2016-2021.

Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten Blora mengalami peningkatan kecuali pada komponen indeks pengeluaran per kapita menurun hal ini disebabkan bencana non alam pandemi covid 19 yang menurunkan pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2019-2020**

| Komponen IPM/Tahun | AHH (tahun)  |              | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) |             | Harapan Lama Sekolah (tahun) |             | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp PPP) |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|--------------|
|                    | 2019         | 2020         | 2019                           | 2020        | 2019                         | 2020        | 2019  | 2020         |
| Kab. Grobogan      | 74,61        | 74,75        | 6,86                           | 6,91        | 12,29                        | 12,3        | 10 350  | 10.221       |
| <b>Kab. Blora</b>  | <b>74,23</b> | <b>74,41</b> | <b>6,58</b>                    | <b>6,83</b> | <b>12,19</b>                 | <b>12,2</b> | <b>9 795</b>                                    | <b>9.571</b> |
| Kab. Rembang       | 74,43        | 74,55        | 7,15                           | 7,16        | 12,10                        | 12,11       | 10 551  | 10.328       |
| Kab. Pati          | 76,04        | 76,22        | 7,19                           | 7,44        | 12,41                        | 12,65       | 10 660  | 10.390       |
| Kab. Kudus         | 76,50        | 76,60        | 8,63                           | 8,75        | 13,22                        | 13,23       | 11 318  | 11.160       |
| Kab. Jepara        | 75,74        | 75,84        | 7,44                           | 7,68        | 12,74                        | 12,79       | 10 609  | 10.343       |

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2020

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari sebesar 3,82% pada tahun 2019 menjadi 4,89% pada tahun 2020. Pada tahun 2020



terdapat sebanyak 6.932 orang pengangguran karena Covid-19, sebanyak 2.286 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi Covid-19. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini.

Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

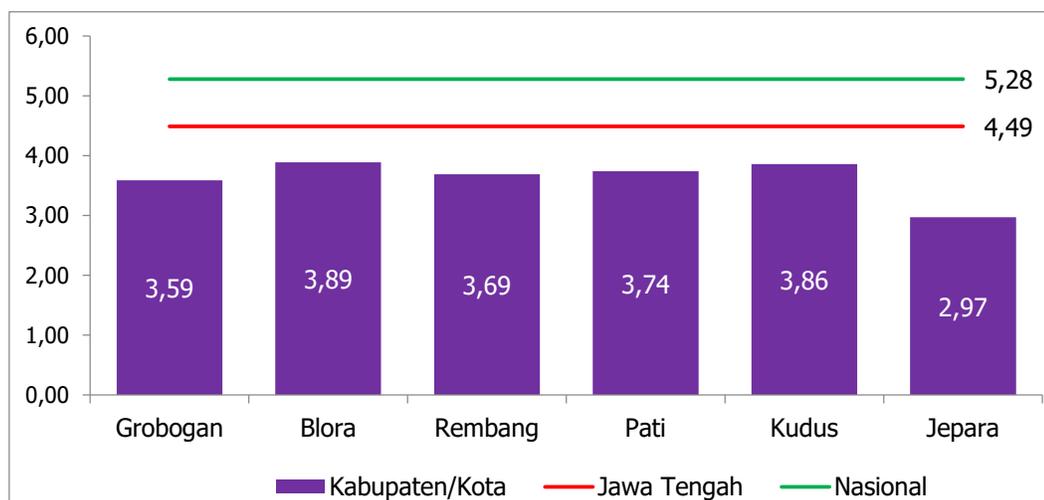
**Tabel 2.11**  
**TPT dan TPAK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |           |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | TPT       | %      | 4,00  | 2,85  | 3,26  | 3,82  | 4,89  |
| 2.  | TPAK      | %      | 70,50 | 70,21 | 72,81 | 68,35 | 71,90 |

Sumber: Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

\*) Angka prediksi

Dibandingkan kabupaten sekitar, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara, Grobogan, Rembang, Pati, dan Kudus, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020**



### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada Kabupaten/Kota diatur dalam lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pendidikan adalah di bidang manajemen yang mencakup kewenangan pengelolaan Pendidikan dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; Sub urusan kurikulum meliputi kewenangan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; Sub urusan Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewenangan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; sub urusan perizinan Pendidikan meliputi kewenangan penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Bahasa dan sastra yang meliputi kewenangan Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Blora sesuai dengan kewenangan dalam UU No 23 tahun 2014 tersebut diukur dengan menggunakan beberapa indicator antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Lembaga PAUD terakreditasi; SD terakreditasi minimal B; SMP terakreditasi minimal B; Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP; dan beberapa indicator lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) suatu daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.



Kinerja indikator tersebut selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami beberapa peningkatan, beberapa fluktuatif dan beberapa mengalami penurunan. Capaian indikator pada urusan Pendidikan terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12.**  
**Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No.       | Indikator   | Satuan   | Tahun     |             |              |           |          |
|-----------|---|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|
|           |   |          | 2016      | 2017        | 2018         | 2019      | 2020     |
| 1.        | APK SD/MI   | %        | 104       | 103,61      | 110,88       | 107,20    | 102,62   |
| 2.        | APM SD/MI   | %        | 94,20     | 94,26       | 95,73        | 94,47     | 95,20    |
| 3.        | APK SMP/MTs   | %        | 105,73    | 104,34      | 100,95       | 100,71    | 101,85   |
| 4.        | APM SMP/MTs   | %        | 84,10     | 85,38       | 76,16        | 74,46     | 80,01    |
| <b>5.</b> | <b>Angka Melek Huruf</b>                                | <b>%</b> | <b>95</b> | <b>99,9</b> | <b>95,79</b> | <b>96</b> | <b>-</b> |
| 6.        | Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI/paket A               | %        | 0,19      | 0,07        | 0,07         | 0,02      | 0,04     |
| 7.        | Angka Putus Sekolah tingkat SMP/MTs/PAKET B             | %        | 0,55      | 0,3         | 0,61         | 0,11      | 0,09     |
| 8.        | Rasio guru /1.000 murid                                 | %        | 90,05     | 72,8        | 66,46        | 61,11     | 61,11    |
| 9.        | Rasio guru/murid per kelas rata - rata                  | %        | 82,3      | 82,31       | 78,02        | 73,77     | 73,77    |
| 10.       | Guru TK yang memenuhi kualifikasi D IV/S1               | %        | 98,79     | 71          | 57,63        | 62,00     | 82,00    |
| 11.       | Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi D IV/S1            | %        | 90,36     | 94,79       | 96,10        | 95,5      | 92,00    |
| 12.       | Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D IV/S1          | %        | 86,43     | 95,98       | 96,60        | 96,5      | 98,00    |
| 13.       | Pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini | %        | 28,9      | 29          | 29,31        | 56,24     | 56,24    |
| 14.       | Pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar             | %        | 88,9      | 89          | 89,07        | 91,72     | 91,71    |
| 15.       | Pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan     | %        | 10,48     | 10,49       | 10,5         | 10,99     | 10,99    |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Capaian indikator Pendidikan selama kurun waktu 2016 – 2020 fluktuatif. APK maupun APM baik untuk tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Blora, menunjukkan gejala fluktuatif sehingga perlu mendapatkan perhatian karena target SDGs APM SD maupun SMP harus mencapai 100% pada tahun 2030. Selain itu walaupun kecil angka putus sekolah perlu endapatkan perhatian



karena masih ada anak peserta didik SD dan SMP mengalami putus sekolah. Angka putus sekolah akan berpengaruh pada APM karena termasuk penduduk usia sekolah yang tidak sekolah atau utus sekolah.

Sedangkan rasio ketersediaan guru dan kualifikasi guru belum semua guru baik jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP sesuai kualifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kualifikasi pendidikan guru adalah D IV atau S1 (Sarjana). Kualifikasi guru belum mencapai 100 guru S1/D IV.

Pendidikan sebagai urusan wajib berpelayanan dasar, memiliki Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan terhadap indikator SPM di Kabupaten Blora baru mencapai 91,72 % dari cakupan indikator pelayanan minimal Pendidikan SMP, Walaupun kondisinya meningkat dibandingkan dengan tahun 2018.

## **2. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Indikator bahwa suatu wilayah memiliki tingkat kesehatan yang baik dalam sebuah konsep Indonesia Sehat adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya angka kematian dan angka kesakitan.

Dunia saat ini termasuk Indonesia mengalami pandemi yang cukup panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pandemi yang dimaksud adalah pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 yang terjadi awal Tahun 2020 di Indonesia menyebabkan permasalahan kesehatan disamping masalah sosial dan ekonomi. Hingga akhir Tahun 2020 telah terjadi kasus covid 19 di Kabupaten Blora sebanyak 3.174 kasus, dengan kasus kematian sebanyak 141 kematian dan tingkat kesembuhan sebesar 86,4 %. Diharapkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui kegiatan preventif dan promotif daripada kegiatan kuratif dan rehabilitatif lebih di prioritaskan.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kesehatan perorangan (UKP) dan kesehatan masyarakat



(UKM). Dalam mewujudkan UKP dan UKM diperlukan kualitas sarana prasarana kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Blora telah tersedia sampai tingkat Desa. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.13.**

**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Sarana Kesehatan       | Satuan | Tahun |      |      |      |       |
|-----|------------------------|--------|-------|------|------|------|-------|
|     |                        |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| 1.  | Posyandu               | Unit   | 1.280 | 1289 | 1289 | 1289 | 1.303 |
| 2.  | Polindes/PKD           | Unit   | 207   | 207  | 207  | 207  | 214   |
| 3.  | Puskesmas              |        |       |      |      |      |       |
|     | - Induk                | Unit   | 26    | 26   | 26   | 26   | 26    |
|     | - Pembantu             | Unit   | 58    | 58   | 58   | 58   | 56    |
|     | - Keliling             | Unit   | 36    | 37   | 38   | 39   | 32    |
| 4.  | Poliklinik             | Unit   | 21    | 22   | 22   | 22   | 22    |
| 5.  | RSU Daerah             |        |       |      |      |      |       |
|     | - Tipe C               | Unit   | 2     | 2    | 2    | 2    | 2     |
|     | - Tipe D               | Unit   | -     | -    | -    | -    | -     |
| 6.  | RSU Swasta (Tipe D)    | Unit   | 2     | 3    | 3    | 3    | 3     |
| 7.  | Klinik/Praktek Dokter  | Unit   | 410   | 415  | 417  | 418  | 418   |
| 8.  | Laboratorium Kesehatan |        |       |      |      |      |       |
|     | - Pemerintah           | Unit   | 1     | 1    | 1    | 1    | 1     |
|     | - Swasta               | Unit   | 6     | 6    | 6    | 6    | 6     |

Sumber : Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk belum mencapai target Indonesia Sehat (45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000 penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk). Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Blora rasio dokter umum pada tahun 2020 sebesar 16,9 per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000 (masih jauh dari target Indonesia sehat). Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.14.**  
**Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Tenaga Kesehatan    | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|---------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                     |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Dokter Umum         | Orang  | 108   | 102  | 86   | 157  | 199  |
| 2.  | Dokter Spesialis    | Orang  | 54    | 52   | 42   | 67   | 77   |
| 3.  | Dokter Gigi         | Orang  | 23    | 21   | 22   | 26   | 32   |
| 4.  | Perawat             | Orang  | 694   | 560  | 792  | 966  | 966  |
| 5.  | Bidan               | Orang  | 241   | 183  | 676  | 741  | 748  |
| 6.  | Ahli Kes. Masy.     | Orang  | 10    | 15   | 37   | 42   | 35   |
| 7.  | Ahli Penyeh. Lingk. | Orang  | 19    | 23   | 20   | 42   | 52   |
| 8.  | Apoteker            | Orang  | 21    | 55   | 95   | 35   | 47   |
| 9.  | Ahli Gizi           | Orang  | 40    | 44   | 48   | 61   | 73   |
| 10. | Analisis Lab.       | Orang  | 52    | 53   | 79   | 80   | 94   |
| 11. | Bidan Desa          | Orang  | 295   | 284  | 192  | 295  | 295  |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan turunnya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dan dilaksanakan melalui petunjuk teknis Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, capaian indikator dalam SPM di Kabupaten Blora tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.15.**  
**Capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator SPM Bidang Kesehatan   | Satuan | Tahun |      |       |       |       |
|-----|--|--------|-------|------|-------|-------|-------|
|     |  |        | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                     | %      | 96    | 96,3 | 96,80 | 99,05 | 98,83 |
| 2.  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan   | %      | 93    | 93,1 | 90,69 | 100   | 100   |
| 3.  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                         | %      | 98    | 98,7 | 94,27 | 99,55 | 99,48 |
| 4.  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar  | %      | 94    | 94,1 | 91,35 | 97,58 | 98,09 |
| 5.  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar          | %      | 100   | 100  | 100   | 100   | 100   |
| 6.  | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar             | %      | 42,5  | 42,9 | 67,23 | 89,38 | 30,41 |
| 7.  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar | %      | 22,3  | 22,6 | 66,92 | 81,21 | 75,70 |



| No. | Indikator SPM Bidang Kesehatan  | Satuan | Tahun |      |       |        |       |
|-----|---|--------|-------|------|-------|--------|-------|
|     |   |        | 2016  | 2017 | 2018  | 2019   | 2020  |
| 8.  | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %      | 78    | 78,8 | 97,53 | 71,606 | 33,54 |
| 9.  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | %      | 32    | 32,5 | 63,38 | 99,425 | 96,51 |
| 10. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | %      | 80    | 100  | 100   | 87,101 | 98,18 |
| 11. | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 95    | 95,9 | 100   | 100    | 58,98 |
| 12. | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 40    | 40,1 | 100   | 100    | 81,47 |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pada data diatas dapat digambarkan bahwa belum semua masyarakat Blora mendapat pelayanan kesehatan minimal sebagaimana tercantum dalam Permenkes No 4 tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Blora memiliki 2 (dua) rumah sakit rujukan yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu. Kinerja layanan kedua RSUD tersebut dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.16.**  
**Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora**  
**Tahun 2018-2020**

| Indikator                     | Tahun      |           |           |            |           |           |            |           |           |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                               | 2018       |           |           | 2019       |           |           | 2020       |           |           |
|                               | RSUD Blora | RSUD Cepu | Rata-Rata | RSUD Blora | RSUD Cepu | Rata-Rata | RSUD Blora | RSUD Cepu | Rata-Rata |
| BOR (%)                       | 75,83      | 66,23     | 71,54     | 65,87      | 76,49     | 71,18     | 53         | 62,76     | 57,88     |
| LOS (hari)                    | 5,5        | 3,62      | 4,56      | 4,26       | 4,66      | 4,46      | 4,63       | 6,04      | 5,3       |
| TOI (hari)                    | 1,75       | 1,85      | 1,88      | 2,78       | 1,43      | 2,105     | 4,1        | 3,59      | 3,8       |
| BTO (kali)                    | 50,33      | 66,88     | 41,28     | 52,24      | 59,90     | 56,07     | 41,2       | 37,91     | 39,6      |
| NDR (per 1.000 pasien keluar) | 0,025      | 1,24      | 1,63      | 1,18       | 0,02      | 0,60      | 0,026      | 2,07      | 1,04      |

Sumber: Sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Kinerja pembangunan kesehatan yang lain adalah kondisi gizi masyarakat, pelaksanaan imunisasi, antisipasi kejadian luar biasa dan kondisi Puskesmas. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.17.**

**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020**

| No | Indikator SPM Bidang Kesehatan   | Satuan           | Tahun |       |      |      |      |
|----|--|------------------|-------|-------|------|------|------|
|    |  |                  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.   |                  |       |       |      |      |      |
|    | <input type="checkbox"/> Sangat Kurang   | %                | 1,43  | 1,42  | 1,52 | 1,57 | 1,98 |
|    | <input type="checkbox"/> Kurang  | %                | 7,4   | 8,1   | 7,9  | 8,1  | 8,1  |
| 2  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (24 - 59 bulan)      | %                | N.A   | 10,46 | 5,82 | 5,8  | 5,8  |
| 3  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (0-23 bulan)          | %                | N.A   | 5,1   | 2,43 | 2,4  | 4,3  |
| 4  | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe    | 0 - 59 bulan (%) | 0,12  | 0,1   | 0,11 | 0,17 | 0,15 |
|    |  | 1 - 3 tahun      | 1     | 3,3   | 2,5  | 2,8  | 0,12 |
|    |  | 4-5 tahun        | 0,5   | 0,3   | 0,2  | 0,1  | 0,03 |
| 5  | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (0-5 bulan)                      | %                | 69,51 | 67    | 68,7 | 70,3 | 7,19 |
| 6  | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan   | %                | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |
| 7  | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin                     | %                | 100   | 100   | 100  | 100  | 98,2 |
| 8  | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)   | %                | 3,75  | 3,96  | 4,2  | 5,2  | 5,7  |
| 9  | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  | %                | 53,4  | 63,4  | 49,9 | 44,4 | 100  |
| 10 | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | %                | 84    | 81    | 98   | 82   | 79   |
|    |  | %                | 8,8   | 10,8  | 9,82 | 12   | 12   |
| 11 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam                   | %                | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |
| 12 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk  | %                | 1,41  | 1,47  | 2,83 | 5,09 | 3,95 |



| No | Indikator SPM Bidang Kesehatan  | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|
|    |   |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 14 | Persentase pelayanan rujukan kegawat daruratan di puskesmas                 | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 15 | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas                        | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 16 | Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | %      | 70    | 80   | 80   | 80   | 85   |

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620 / 293 / 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84 km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km. Panjang jalan kabupaten sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi hampir semuanya rusak berat. Hal ini menyebabkan kondisi jalan baik secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2015 sebesar 65,7 % menjadi 33,59 % pada tahun 2016.

Pada tahun 2020, jalan kabupaten dengan kondisi baik sebesar 22,29 %, menurun sebesar 25,83 % dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan jalan kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan untuk tahun-tahun mendatang diprioritaskan dengan metode betonisasi (rigid beton). Dengan metode ini diharapkan umur jalan akan lebih lama. Hal ini yang menyebabkan prosentase kondisi jalan baik peningkatannya tidak terlalu banyak, mengingat kondisi anggaran yang terbatas. Sementara itu jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 158 unit dengan panjang 2.500,90 m. Kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora tahun 2019 sebesar 86,06 % atau 2.152,3 m dari total panjang jembatan.

Kondisi drainase di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan. Panjang drainase kondisi baik tahun 2016 sebesar 201,5 km meningkat tahun 2020 menjadi 580 km.

Kondisi embung dalam keadaan baik di Kabupaten Blora sebanyak 63%, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat. Kabupaten Blora juga memiliki sarana prasarana sumber daya air berupa waduk. Tahun 2020 jumlah waduk di Kabupaten Blora sebanyak 2 unit yaitu Waduk Tempuran dan Waduk Greneng. Waduk ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi kedua waduk tersebut sebesar 95 % dalam kondisi yang baik.



Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2020 sebesar 89%, kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk cakupan pelayanan sanitasi sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar 95%

Pada bidang tata ruang, Pemerintah Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031. Perda tersebut saat ini dalam proses revisi. Kabupaten Blora juga telah menyusun RDTR kecamatan, yang hingga tahun 2019 telah tersusun sebanyak 13 kecamatan meskipun belum ditetapkan dalam Perda. Sementara itu kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah Kecamatan Bogorejo, Sambong, dan Jati.

Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL / HGB Kabupaten Blora sebesar 1,10 %. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Blora. Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18.**

**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |       |       |       |       |
|-----|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |        | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Panjang jembatan baru yang terbangun                       | Km     | 0,394   | 0,162 | 0,148 | 0,018 | 1     |
| 2.  | Persentase jalan kondisi baik                              | %      | 33,59   | 35,56 | 43,55 | 48,12 | 22,29 |
| 3.  | Persentase jembatan kondisi baik                           | %      | 75      | 80,77 | 86,06 | 90    | 86,06 |
| 4.  | Panjang saluran drainase dalam kondisi baik                | Km     | 201,5   | 240   | 500   | 560*) | 580*) |
| 5.  | Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik | %      | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6.  | Persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik    | %      | 24      | 31,5  | 33,79 | 43,51 | 44,13 |
| 7.  | Persentase embung kondisi baik                             | %      | 53,6    | 55    | 57,75 | 63    | 51,67 |



| No. | Indikator  | Satuan   | Capaian |       |                      |  |      |
|-----|--|----------|---------|-------|----------------------|--|------|
|     |  |          | 2016    | 2017  | 2018                 | 2019   | 2020 |
| 8.  | Persentase waduk kondisi baik  | %        | 90      | 90    | 90                   | 90   | 90   |
| 9.  | Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)   | %        | 50      | 60    | 70                   | 80   | NA   |
| 10. | Panjang jalan lingkungan /lokal  | Km       | 2.961   | 2.961 | 2.961                | 2.961  | NA   |
| 11. | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.   | Doku men | 1       | 1     | 11 analog, 7 digital | 11 analog, 7 digital                               | 1    |
| 12. | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan   | %        | 100     | 100   | 100                  | 100  | 100  |
| 13. | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. | %        | 80      | 81    | 89,68                | 88,03 (tanpa poin kontinuitas dan kemudahan akses) | 89   |
| 14. | Cakupan pelayanan sanitasi   | %        | 88,71   | 92,75 | 94                   | 95%  | NA   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2020

#### 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Capaian kinerja pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Blora pada tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: 1) Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan, dengan capaian selama lima tahun (2016-2021), mengalami penurunan dari 66, 11 Ha di tahun 2016 menjadi 18,01 Ha di tahun 2019. Penurunan luas kawasan kumuh di Kabupaten Blora dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku); 2) Pemakaman umum yang terpelihara di Kabupaten Blora capaian selama 5 tahun terakhir (2016-2020) relatif tetap, yaitu di 24 kawasan; 3) Indikator Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir,



dari 85 unit di tahun 2017 menjadi 1.770 unit di tahun 2019. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni kebuddi Kabupaten Blora diselesaikan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri juga sinergi dengan pihak ke-3 dengan kerjasama CSR dengan perusahaan-perusahaan besar.

Untuk capaian kinerja indikator urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan  | Capaian |       |       |       |       |
|-----|---|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |         | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan   | Ha      | 66,11   | 65,86 | 29,44 | 18,01 | NA    |
| 2.  | Pemakaman Umum yang terpelihara   | Kawasan | 24      | 24    | 24    | 24    | NA    |
| 3.  | Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH  | Unit    | N.A     | 85    | 822   | 1.770 | NA    |
| 4.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten (SPM)                                       | %       | NIHIL   | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5.  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten (SPM) | %       | NIHIL   | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

### 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dimana persentase capaian selama lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 80% tahun 2016 menjadi 85% di tahun 2020; Angka kriminalitas di Kabupaten Blora cenderung meningkat dari sebesar 62 kasus menjadi 135 kasus di tahun 2020;



Cakupan patroli petugas satpol PP semakin meningkat yaitu dari sebesar 37,5% meningkat menjadi sebesar 56,25%; adapun jumlah Polisi Pamong Praja juga cenderung meningkat dari sejumlah 167 orang menjadi sebanyak 181 orang; jumlah Linmas meningkat dari sejumlah 7.273 orang menjadi 7.318 orang; jumlah Pos Kamling tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 yaitu sejumlah 2.559 unit.

Teradapat 7 indikator yang sudah mencapai 100% pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat antara lain Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana; Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi; Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%); Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana; Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana; Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Sedangkan pada layanan kebakaran yaitu pada indikator Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengalami kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2016 sebesar 75% menurun menjadi sebesar 55,67% pada tahun 2020 dan Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah baru mencapai 1%.

Untuk capaian kinerja indikator urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | %      | 80    | 80    | 85    | 85    | 85    |
| 2.  | Angka kriminalitas  | Kasus  | 62    | 22    | 64    | 151   | 135   |
| 3.  | Cakupan patroli petugas Satpol PP   | %      | 37,5  | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |



| No. | Uraian  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 4.  | Jumlah Polisi Pamong Praja  | Orang  | 167   | 198   | 222   | 189   | 181   |
| 5.  | Jumlah Linmas   | Orang  | 7.273 | 7.248 | 7.248 | 7.288 | 7.318 |
| 6.  | Jumlah Pos Siskamling   | Unit   | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 |
| 7.  | Kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada yang akan diganti rugi          | %      | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8.  | Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada                    | %      | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9.  | Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal                                    | %      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 10. | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana              | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 11. | Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal                                  | %      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 12. | Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal  | %      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 13. | Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi   | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 14. | Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana   | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 15. | Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 16. | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)  | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 17. | Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana   | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 18. | Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan  | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |



| No. | Uraian  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|     | dievakuasi terhadap kejadian bencana  |        |       |       |       |       |       |
| 19. | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | %      | 75    | 76,56 | 55,67 | 76,56 | 55,67 |
| 20. | Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | %      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Untuk kegiatan penanggulangan kebencanaan di kabupaten Blora terdapat 4 indikator yaitu Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana selama lima tahun (2016-2020) terdapat 56 Desa yang sudah dilatih simulasi kebencanaan; sedangkan untuk Kelurahan ada sebanyak 10 keurahan yang telah mendapatkan pelatihan simulasi penanggulangan bencana dan ada 16 Kecamatan di Tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah orang yang dilatih sejak tahun 2016 meningkat dari sebanyak 160 orang menjadi 445 orang di tahun 2020. Adapun perkembangan datanya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan    | Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|-----------|---------|------|------|------|------|
|     |  |           | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah Desa yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana      | Desa      | 15      | 12   | 18   | 8    | 3    |
| 2.  | Jumlah Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana | Kelurahan | 7       | 0    | 3    | 0    | 0    |
| 3.  | Jumlah Kecamatan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana | Kecamatan | 4       | 3    | 7    | 7    | 16   |
| 4.  | Jumlah Orang yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana     | Orang     | 160     | 160  | 320  | 440  | 445  |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



## 6. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya untuk mengurangi jumlah PPKS di Kabupaten Blora dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun demikian persentase PPKS yang mampu tertangani dengan baik memang masih relative sedikit. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase PPKS yang tertangani baru mencapai 2%. Bentuk-bentuk penanganan PPKS antara lain adalah pemberian bantuan social untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS, pemeberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE), pelayanan terhadap penyadanag disabilitas, dan juga pelayanab kepada kelompok-kelompok PPKS yang menjadi sasaran dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora dalam menangani PPKS juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang terlibat aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di tahun 2020 mencapai 80%. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2017-2018.

Selain penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS, kewenangan kabupaten dalam urusan sosial adalah penanganan sosial korban bencana, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial di masa tanggap darurat dari tahun 2016-2020 semakin meningkat, dimana pada tahun 2020 capaiannya telah mampu 100%. Sedangkan untuk pemeliharaan TMP, kebutuhan sarana dan prasarana TMP yang memenuhi standar pada tahun 2020 juga baru mencapai 80%.

Lebih rinci capaian indikator urusan sosial tersaji dalam tabel berikut.



**Tabel 2.22.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |       |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|-------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 |
| 1.  | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial  | %      | 0,55    | 0,67 | 0,7   | 2,08 | 2    |
| 2.  | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | %      | 100     | 67   | 70    | 1    | 50   |
| 3.  | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | %      | 100     | 23   | 90    | 7    | 7    |
| 4.  | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat   | %      | 75      | 100  | 100   | 100  | 100  |
| 5.  | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial  | %      | 50      | 10   | 42,58 | 7    | 7    |
| 6.  | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi  | %      | 26      | 25   | 21    | 22   | 22   |
| 7.  | Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial   | %      | 90      | 90,1 | 90,2  | 100  | 100  |
| 8.  | Jumlah Panti Sosial   |        |         |      |       |      |      |
|     | - Panti Sosial Asuhan   | Buah   | 26      | 25   | 21    | 21   | 21   |
|     | - Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis   | Buah   | 1       | 1    | 1     | 1    | 1    |
|     | - Panti Sosial Bina Karya   | Buah   | 1       | 0    | 0     | 0    | 0    |
| 9.  | Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                         | %      | 90      | 100  | 100   | 75   | 80   |



| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10. | Persentase<br>1. Penyandang disabilitas terlantar<br>2. Anak terlantar<br>3. Lanjut usia terlantar<br>4. Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | %      | 2       | 2    | 3    | 6    | 3    |
| 11. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                   | %      | 80,1    | 80,3 | 80,4 | 100  | 100  |
| 12. | Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar  | %      | N.A     | N.A  | 100  | 100  | 80   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2020

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja/berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah



penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Blora sejak tahun 2016 sampai 2020 kondisinya fluktuatif dengan capaian meningkat di tahun 2020. Di tahun 2016 TPT sebesar 4%, kemudian menurun menjadi 2,85% di tahun 2017 lalu semakin meningkat dan di tahun 2020 menjadi 4,89%. Meningkatnya TPT, juga diikuti dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2016 TPAK sebesar 71% kemudian tahun 2020 turun menjadi 69,05%.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan tahun 2016 sebanyak 400 orang, dan terbanyak ada di tahun 2019 yakni 747 orang, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 500 orang. Dari total tersebut sebagian besar mampu diserap oleh pasar kerja yang ada. Di tahun 2020, 80% peserta pelatihan mampu diterima di pasar kerja.

Dilihat dari sisi kesejahteraan pekerja, UMK Kabupaten Blora dari tahun ke tahun semakin meningkat. Proporsi UMK mencapai 95% dari kebutuhan hidup layak di Kabupaten Blora.

**Tabel 2.23.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |       |       |      |      |
|-----|--|--------|---------|-------|-------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) | %      | 53      | 60    | 64,11 | 65   | 80   |
| 2.  | Jumlah peserta pelatihan   | Orang  | 400     | 520   | 520   | 747  | 500  |
| 3.  | Jumlah peserta pelatihan yang diterima kerja   | Orang  | 212     | 312   | 333   | 333  | NA   |
| 4.  | Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)                                     | %      | 95,4*)  | 82,24 | 96,74 | 95   | NA   |



| No. | Indikator  | Satuan        | Capaian   |           |           |           |           |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |               | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 5.  | Tingkat partisipasi angkatan kerja   | %             | 71,0*)    | 70,21     | 72,81     | 68,35     | 69,05     |
| 6.  | Tingkat pengangguran terbuka   | %             | 4,0       | 2,85      | 3,26      | 3,89      | 4,89      |
| 7.  | Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) | %             | 60        | 35,63     | 64,11     | 57,08     | NA        |
| 8.  | Jumlah Penawaran Tenaga Kerja  | Pena<br>waran | 1.300     | 3.724     | 3.724     | 5.238     | NA        |
| 9.  | Rasio UMK terhadap KHL (%)   | %             | 98,01     | 99        | 92,4      | 95        | NA        |
| 10. | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan        | Orang         | 7.500     | 6.688     | 6.676     | 9.116     | NA        |
| 11. | UMK Kab. Blora   | Rp            | 1.328.000 | 1.438.100 | 1.564.000 | 1.690.000 | 1.834.000 |
| 12. | Kebutuhan Hidup Layak  | Rp            | 1.301.573 | 1.420.000 | 1.445.136 | 1.450.000 | NA        |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

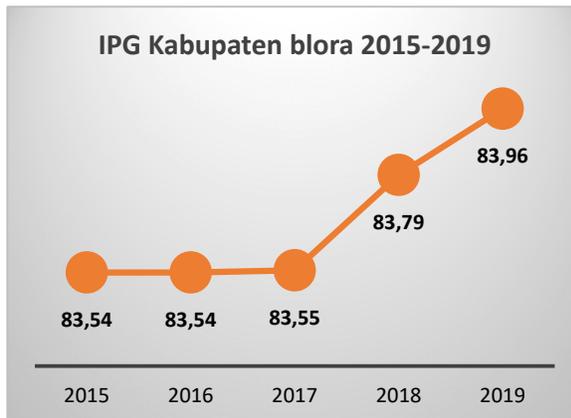
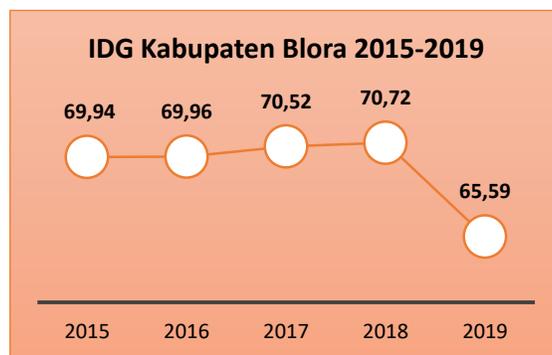
## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari tahun ke tahun, meskipun relative rendah peningkatannya dan berada dibawah angka Jawa Tengah. IPG Kabupaten Blora menempati ranking 35 di Jawa Tengah. Rendahnya IPG dikontribusikan oleh rata-rata lama sekolah perempuan yang baru mencapai 6,06 tahun, dan rata-rata pengeluaran perkapita perempuan hanya sepertiga dibandingkan laki-laki yaitu Rp5.968,00 sedangkan laki-laki sudah mencapai Rp14.382,00.



Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019. Capaian IDG tahun 2019 berada dibawah Jawa Tengah maupun Nasional. Kabupaten Blora berada di ranking 25 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Rendahnya capaian

IDG dikontribusikan oleh semua indikator pembentuk yaitu persentase perempuan di legislative (13,33%), Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (39,92 % terendah di Jawa Tengah) dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (34,76%).



Capaian IPD dan IDG yang cenderung rendah berada pada persoalan ketrampilan dan keberdayaan perempuan. Hal ini dapat disimak dari rata-rata lama sekolah, rata-rata pengeluaran, persentase perempuan dilegislatif, persentase perempuan yang menduduki jabatan strategis dan

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang rendah.

Menilik dari prasyarat pengarusutamaan gender (PUG), dapat ditelusuri persoalan yang mengelayut adalah berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini bisa disimak belum adanya kebijakan respinsif gender setingkat Perda, serta belum optimalnya kelompok kerja, maupun focal point di OPD.

Menilik dari urusan yang diampu, permasalahan yang masih adalah dirasakan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kekerasan anak tahun 2016-2019, terinci sebagai berikut : data kekerasan seksual tahun 2016 terdapat 8 kasus, 2017 meningkat menjadi 9 kasus, 2018 naik kembali sebanyak 11 kasus dan tahun 2019 menurun 6 kasus. Kasus tersebut berada di Kecamatan Blora, Sambong, Cepu, Kedungtuban, Randublatung, Jati, Kunduran, Ngawen dan Japah. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2016-2017 tidak ditemukan, tahun 2018 ditemukan 8 kasus dan tahun 2019



menurun hanya 3 kasus. Kasus tersebut ditemukan di kecamatan Jiken, Cepu, Sambong, Kedungtuban, Kunduran, Todanan, Banjarejo, Ngawen dan Japah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus, tahun 2017 menurun menjadi 4 kasus, tahun 2018 ditemukan 2 kasus dan tahun 2019 menjadi 5 kasus. KDRT ditemukan di kecamatan yaitu Blora, Jepon, Sambong, Randublatung, Jati, Ngawen, Kunduran, Todanan, Banjarejo dan Tunjungan.

Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Blora dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan salah satunya sistem penanganan terpadu berupa Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) agar bisa lebih cepat dan bisa melakukan deteksi sejak dini khususnya dalam menangani kekerasan. Selain itu kiprah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani berbagai kerentanan perempuan dan anak juga tidak dapat disisihkan.

Keberhasilan Kabupaten Blora dalam pemenuhan hak anak adalah dengan memperolehnya penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama Tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, hal tersebut akan terus ditingkatkan statusnya menjadi Nindya melalui rencana pembentukan desa layak anak di semua desa. Secara rinci perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.24.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Program/Indikator  | Satuan | Capaian |       |       |       |         |
|-----|--|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
|     |  |        | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020    |
| 1.  | Jumlah Focal point aktif   | Unit   | 8       | 40    | 41    | 43    | 43      |
| 2.  | Indeks Pembangunan Gender  | %      | 83      | 83,55 | 83,79 | 83,96 | 84,05*) |
| 3.  | Indeks Pemberdayaan Gender   | %      | 70      | 70,52 | 70,72 | 65,59 | 66,05*) |
| 4.  | Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten | Unit   | 1       | 4     | 7     | 2     | 2       |
| 5.  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah   | %      | 4,69    | 4,9   | 5,0   | 5,0   | 5       |



| No. | Program/Indikator   | Satuan   | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|----------|---------|------|------|------|------|
|     |   |          | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6.  | Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD  | %        | 20      | 90   | 90   | 90   | 90   |
| 7.  | Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak   | Kasus    | 5       | 12   | 38   | 14   | 0    |
| 8.  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan   | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 9.  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS  | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 10. | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu       | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 11. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                               | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 12. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum  | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 13. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 14. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 15. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 16. | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur   | %        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 17. | Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang   | Kelompok | 1       | 4    | 8    | 5    | 16   |



| No. | Program/Indikator                              | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|--------|---------|------|------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     | ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan |        |         |      |      |      |      |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

\*) angka prediksi

Ketidaktercapaian indikator persentase perempuan di legislative disebabkan karena penetapan calon legislative perempuan bukan hanya berada pada calon itu sendiri, namun juga keijakan partai politik dan partisipasi masyarakat memilih perempuan sebagai wakil rakyat. Persoalan lain adalah kualitas anggota legislative perempuan belum terekspose sehingga kinerja anggota legislative belum dapat dinilai oleh masyarakat.

Ketidak tercapaian indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan karena aksesibilitas perempuan terhadap sumber informasi yang terbatas, stereotype bahwa perempuan lemah masih mengakar serta budaya paternalistic yang tidak dihilangkan, sehingga perempuan yang rentan, selalu memposisikan dirinya sebagai kaum lemah yang mudah ditindas.

### 3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terkamin. Ketersediaan pangan di suatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Berdasar hasil analisis FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) atau peta ketahanan dan kerentanan pangan yang merupakan hitungan dari komposit antara lain akses ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Blora tahun 2019 di dapat bahwa ada beberapa desa yang masih menjadi prioritas dalam penanganan pangan antara lain Desa Gempol dan Desa Tobo Kecamatan Jati, Desa Ngliron dan Desa Bodeh Kecamatan Randublatung.

Dilihat dari aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Blora yang dapat dilihat dari produki pangan utama antara lain produksi padi, dan jagung di Kabupaten Blora sudah cukup meningkat (produksi padi pada Tahun 2020 menurun sebesar 59.701 ton dari tahun 2019 dikarenakan kurangnya curah hujan sehingga banyak petani yang gagal panen) produksi jagung meningkat 84.404 ton dari tahun 2019. Produksi kedelai meningkat sebesar 1.211 ton dari tahun 2019.

Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Blora tahun 2020



meningkat sebesar 5,4% dari tahun 2019, hal ini karena konsumsi masyarakat atas sumber pangan yang cukup beragam. Pencapaian produksi pertanian dan ketahanan pangan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan ke 2 (dua) yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada:

**Tabel 2.25.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan pangan**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                                 | Satuan                   | Capaian |         |          |           |         |
|-----|---|--------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|
|     |   |                          | 2016    | 2017    | 2018     | 2019      | 2020    |
| 15. | Jumlah desa rawan pangan                  | Desa                     | 3       | 3       | 4        | 8         | 4       |
| 16. | Jumlah desa rentan pangan yang tertangani | Desa                     | 4       | 3       | 4        | 4         | 0       |
| 17. | Skor Pola Pangan Harapan                  | %                        | 62,0    | 70,5    | 84,6     | 85,1      | 90,5    |
| 18. | Tingkat Konsumsi protein hewani           | gram/<br>kapita/<br>hari | 54,39   | 45      | 56,73    | 61,23     | 16,4    |
| 19. | Tingkat konsumsi energi                   | kkal/<br>kap/hari        | 2.890   | 1.842,2 | 1.898,79 | 2.225,178 | 2.178,2 |

#### 4. Pertanian

Kinerja urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memiliki kewenangan terkait sub urusan: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; dan penggunaan tanah. Sampai dengan tahun 2020 untuk pemberian izin lokasi masih dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik.

#### 5. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pada urusan Lingkungan Hidup di kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: 1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai



100 %; 2) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100 %. Hal ini berarti bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup sudah tertangani dengan baik; 3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100 %; 4) Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah, selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 2,5 % di tahun 2016 menjadi 5 % di tahun 2019, terdapat penambahan 2,5 % luas RTH di Kabupaten Blora; 5) Luas lahan kritis di Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 600 Ha, menurun 21,90 Ha dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berkisar 621,90 Ha; 6) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa capaian tahun 2016-2020 bersifat tetap setiap tahunnya dan mencapai 100 %. Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.26.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |        |        |      |      |
|-----|--|--------|---------|--------|--------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
| 1.  | Pelayanan pencegahan pencemaran air  | %      | 100     | 100    | 100    | 100  | 100  |
| 2.  | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | %      | 100     | 100    | 100    | 100  | 100  |
| 3.  | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak   | %      | 100     | 100    | 100    | 100  | 100  |
| 4.  | Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah  | %      | 2,5     | 2,5    | 2,5    | 5    | NA   |
| 5.  | Luas lahan kritis (ha)   | Ha     | 621,90  | 621,90 | 621,90 | 600  | NA   |
| 6.  | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)                            | %      | 100     | 100    | 100    | 100  | 100  |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu: pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk; Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan: Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; Profile Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas/ administrasi kependudukan. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP menunjukkan peningkatan, dari sebesar 92,5 ditahun 2016 menjadi 96,92 ditahun 2020.

Bayi yang memiliki akte kelahiran juga menunjukkan kenaikan, dari sebesar 97,85% ditahun 2016 menjaadi 99,5% ditahun 2020. Kondisi ini selaras dengan capaian indikator kepemilikan akte kelahiran sebesar 47% ditahun 2016 meningkat menjadi sebesar 97,57% ditahun 2020.

Indikator yang menunjukkan realisasi yang optimal terjadi pada indikator rasio pesangan berakte nikah yang capaian indikatornya dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 100%. Adapun dua indikator selajutnya yaitu ketersediaan database kependuduk dan persentase kepemilikan KK bagi setiap anggota keluarga di Kabupaten Blora menunjukkan kondisi ketercapain yang dapat disebut 100% dan ketersediaan database kependudukan sudah tersebar di seluruh Kecamatan (16 kecamatan). Indikator Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) juga menunjukkan peningkatan dari 15,14% tahun 2017 menjadi 48,84% tahun 2020. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan database dalam bilang kependudukan di Kabupaten Blora dapat dipertahankan dengan baik. Perkembangan kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.27.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan    | Capaian |       |       |       |       |
|-----|---|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |           | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Kepemilikan KTP bagi wajib KTP                                    | %         | 92,5    | 83,61 | 98,78 | 96,62 | 96,92 |
| 2.  | Rasio bayi berakte kelahiran                                      | %         | 97,85   | 99,2  | 99,41 | 99,72 | 99,5  |
| 3.  | Kepemilikan akta kelahiran  | %         | 47      | 94,49 | 98,17 | 96,95 | 97,57 |
| 4.  | Rasio pasangan berakte nikah                                      | %         | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5.  | Ketersediaan database kependudukan                                | Kecamatan | 16      | 16    | 16    | 16    | 16    |
| 6.  | Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora | %         | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7   | Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)                            | %         | -       | 15,14 | 18,68 | 29,99 | 48,84 |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan desa, baik dari sisi manajemen SDM maupun administrasi, adalah keberadaan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas akan mampu menerjemahkan kekuatan dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa menjadi sebuah kebijakan yang mampu membawa masyarakat desa menuju kesejahteraan. Salah satu peningkatan kualitas SDM tersebut melalui pelatihan aparatur desa. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada aparatur desa telah mencakup 100% dari total desa yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman serta media sosialisasi tentang berbagai kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan desa.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembinaan desa dari sisi ekonomi adalah telah terbangunnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Blora. Sebanyak 233 Unit BUMDes kini telah terbangun dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan pembangunan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian Desa secara menyeluruh serta mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. Dari sisi masyarakat, BUMDes dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Dan yang tidak kalah penting, BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.



Dari sisi kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mendorong pelaksanaan posyandu yang aktif di Masyarakat. Posyandu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau memeriksakan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu kelembagaan yang bergerak di akar rumput dalam rangka mengurangi terjadinya kematian bayi, balita dan anak serta menurunkan angka kematian Ibu Melahirkan, Ibu Hamil dan Nifas. Seluruh posyandu di Kabupaten Blora telah berstatus aktif sejak tahun 2016-2020.

**Tabel 2.28.**

**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan   | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|----------|---------|------|------|------|------|
|     |   |          | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Posyandu aktif  | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2.  | Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih                                | Kelompok | 6       | 70   | 75   | 80   | 85   |
| 3.  | Jumlah BUMDes   | Unit     | 6       | 90   | 159  | 175  | 233  |
| 4.  | Jumlah Posyantek Aktif  | Unit     | 2       | 4    | 5    | 7    | 7    |
| 5.  | Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan | %        | 2,01    | 98   | 100  | 100  | 100  |
| 6.  | Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan                              | %        | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |

**8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana**

Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Target pengendalian penduduk dalam program KB adalah total *fertility rate* yakni jumlah kelahiran dalam satu keluarga sekitar 1,2 artinya bahwa dalam satu keluarga diharapkan memiliki anak 1 atau 2 anak. Pada akhir tahun 2020 TFR di Kabupaten Blora adalah 2,2 % dari target 2,28 % yang ditetapkan, sehingga hal ini tercapai karena dibawah target yang telah ditetapkan.

Cakupan kepesertaan KB di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar 74,33% meningkat dari Tahun 2019 yang hanya sebesar 73,28 %, sedangkan untuk cakupan PUS yang ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed) di tahun 2020 ini belum tercapai karena diatas target dengan capaian sebesar 11,89% dari target sebesar 9,7%. Hal ini karena



terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan masyarakat tidak aktif untuk melakukan program KB, khususnya peserta KB MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang) yang menurun, hal ini disebabkan adanya biaya rapid test, biaya perlengkapan APD, serta masyarakat cenderung takut tindakan operasi masa pandemi covid 19.

Disamping pengendalian penduduk diharapkan pula program KB juga mengatasi permasalahan lain seperti kemiskinan dalam Program KKBPK (Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga), Program Kampung KB merupakan program integrasi dalam pelaksanaan tersebut. Di Kabupaten Blora sampai Tahun 2020 telah terbentuk 185 kampung KB.

Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

**Tabel 2.29.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan   | Capaian |       |       |       |       |
|-----|--|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |          | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun                                   | %        | 1,2     | 1,2   | 6,9   | 1,56  | 1,56  |
| 2.  | Cakupan peserta KB aktif   | %        | 81,16   | 83,19 | 78,92 | 73,28 | 74,33 |
| 3.  | Total Fertiity Rate (TFR)  | %        | 2,25    | 2,3   | 2,24  | 2,21  | 2,20  |
| 4.  | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmetneed</i> )                                 | %        | 7,9     | 7,01  | 9,8   | 9,79  | 11,89 |
| 5.  | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | %        | 65,8    | 65    | 79,52 | 78    | 80,38 |
| 6.  | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)     | %        | 78,83   | 96,96 | 78,92 | 73,28 | 74,33 |
| 7.  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  | %        | 68,1    | 67,35 | 78,47 | 79    | 82,24 |
| 8.  | Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB   | Kelompok | 6       | 6     | 6     | 6     | 6     |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



## 9. Perhubungan

Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan atau menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan. (Permenhub No PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan). Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2020 sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal Tipe A (dikelola Kemenhub RI), 1 terminal tipe B (dikelola Provinsi Jawa Tengah), dan 4 terminal tipe C (dikelola Kabupaten). Terminal tipe C yaitu Terminal Ngawen, Terminal Kunduran, Terminal Wulung dan Terminal Todanan. Dari keempat terminal tipe C tersebut yang berkondisi cukup baik adalah Terminal Ngawen (60 % baik), sisanya dalam kondisi memprihatinkan (70 % rusak). Walaupun demikian hingga saat ini semua terminal masih beroperasi melayani angkutan umum. Untuk terminal Ngawen melayani angkutan sekelas terminal tipe A, karena terminal ini menjadi pangkalan bus antar kota jurusan Blora-Jakarta. Sedangkan 3 terminal yang lain melayani angkutan perdesaan. Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dibandingkan jumlah kebutuhan tahun 2020 mencapai 68 %.

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Kabupaten Blora telah melengkapi jalan dengan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2020 sebesar 75%, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik 85% pada tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain peningkatan penyediaan rambu lalu lintas, Pemerintah Kabupaten Blora juga melaksanakan uji kir. Pelaksanaan uji kir dilakuka untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Persentase kendaraan yang lolos uji tahun 2019 sebesar 85%, menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 90%. Kepemilikan KIR angkutan umum tahun 2019 sebesar 4.200 unit.

Kabupaten Blora juga memiliki Bandar Udara yang dibangun di Kecamatan Cepu. Bandar Udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas



penunjang lainnya. Pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sudah selesai dilaksanakan. Bandara ini sebelumnya milik Kementerian ESDM dan sudah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dikembangkan dari bandara khusus menjadi bandara umum. Kondisi lahan eksisting saat ini 21,743 hektar dan memerlukan tambahan lahan sebesar 76,819 hektar sehingga menjadi seluas 98,562 hektar.

Secara umum, Capaian kinerja urusan bidang perhubungan selengkapnya sebagai berikut ini:

**Tabel 2.30.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan                                   | Capaian |       |      |      |      |
|-----|---|--|---------|-------|------|------|------|
|     |   |  | 2016    | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Terminal  |  |         |       |      |      |      |
|     | * Tipe A  | Unit                                     | 1       | 1     | 1    | 1    | 1    |
|     | * Tipe B  | Unit                                     | 1       | 1     | 1    | 1    | 1    |
|     | * Tipe C  | Unit                                     | 4       | 4     | 4    | 4    | 4    |
| 2.  | Jumlah terminal Tipe C yang beroperasi  | Unit                                     | 4       | 4     | 4    | 4    | 4    |
| 3.  | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek                         | %  | 71,42   | 71,42 | 68   | 70   | NA   |
| 4.  | Jumlah pemasangan rambu-rambu   | Unit                                     | 710     | 820   | 856  | 856  | NA   |
| 5.  | Jumlah kasus Kecelakaan lintas  | Kasus                                    | 508     | 386   | 421  | 500  | NA   |
| 6.  | Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik  | %  | 85      | 87    | 75   | 85   | NA   |
| 7.  | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal | Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor | 1       | 1     | 1    | 1    | 1    |
|     |   | Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | 11      | 11    | 11   | 11   | 11   |



| No. | Indikator  | Satuan         | Capaian   |           |         |         |      |
|-----|--|----------------|-----------|-----------|---------|---------|------|
|     |  |                | 2016      | 2017      | 2018    | 2019    | 2020 |
|     | 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.   |                |           |           |         |         |      |
| 8.  | Jumlah angkutan kota   | Unit           | 16        | 16        | 16      | 16      | 16   |
| 9.  | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | %              | 8         | 8         | 8       | 8       | 8    |
| 10. | Jumlah orang melalui terminal per tahun  | Orang          | 5.736.056 | 5.920.654 | 322.462 | 325.500 | NA   |
| 11. | Rasio ijin trayek  | %              | 29        | 29        | 55      | 55      | NA   |
| 12. | Jumlah uji KIR angkutan umum (Persentase kendaraan yang lolos uji)   | %              | 90,84     | 91        | 90      | 85      | NA   |
| 13. | Kepemilikan KIR angkutan umum (Jumlah kendaraan yang mengajukan uji KIR)   | Unit           | 4.072     | 4.134     | 4.017   | 4.200   | NA   |
| 14. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)   | Menit          | 20        | 20        | 20      | 20      | NA   |
| 15. | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum  | JBB: 0 - 5000  | 39.000    | 39.000    | 39.000  | N.A     | NA   |
|     |  | JBB: 5001-8000 | 44.000    | 44.000    | 44.000  | N.A     | NA   |
|     |  | JBB: >8000     | 49.000    | 49.000    | 49.000  | N.A     | NA   |
| 16. | Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)                                 | %              | 100       | 100       | 100     | 100     | NA   |
| 17. | Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek                            | Unit           | 9         | 9         | 14      | 14      | NA   |



| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 18. | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | %      | 70      | 70   | 70   | 70   | NA   |
| 19. | Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas  | %      | 85      | 87   | 61   | 75   | NA   |
| 20. | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) Kabupaten/Kota                             | %      | 80      | 84,5 | 75   | 75   | NA   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 10. Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/ prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi *digital, mobile, virtual*, serta *personal* dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi, dan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, muthakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,



mudah diakses, dan dibagikan serta di kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan Amanat Peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Blora telah memiliki 1 website utama dari tahun 2016 hingga 2020. Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya di ukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membantu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Sementara jumlah OPD yang memiliki website menunjukkan peningkatan dari 28 OPD ditahun 2016 menjadi 44 OPD ditahun 2020. Kondisi meningkatnya OPD yang memiliki website masih perlu menjadi catatan terkait dengan updating atau pembaharuan informasi yang ada dalam website tersebut. Jumlah jaringan komunikasi juga menunjukkan peningkatan dari 146 unit ditahun 2016 menjadi 187 unit ditahun 2020.

Sarana prasarana yang tak kalah penting adalah radio/TV. Jumlah penyiaran radio/TV yang melakukan penyiaran di Kabupaten Blora ditahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 9 menjadi 13 ditahun 2019, namun tahun 2020 menurun menjadi 10 unit. Penurunan tersebut kemungkinan terjadi karena adanya alih minat masyarakat dari radio/TV kepada chanel Youtube atau media lain yang lebih mudah di akses memalui smart phone, perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan media pencaian informasi yang digunakan masyarakat. Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.31.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                          | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
|     |                                    |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah jaringan komunikasi         | Unit   | 146     | 146  | 168  | 183  | 187  |
| 2.  | Jumlah SKPD telah memiliki website | SKPD   | 28      | 42   | 42   | 43   | 44   |
| 3.  | Website milik pemerintah daerah    | Unit   | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4.  | Jumlah surat kabar nasional/lokal  | Buah   | 9       | 9    | 11   | 32   | 38   |



| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|--------|---------|------|------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5.  | Jumlah penyiaran radio/TV  | Buah   | 9       | 9    | 12   | 13   | 10   |
| 6.  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | %      | 13      | 15   | 38   | 50   | 0    |
| 7.  | Fasilitasi Pembinaan PPID SKPD   | %      | 39      | 40   | 100  | 100  | 0    |
|     | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:                   |        |         |      |      |      |      |
| 8.  | Media massa seperti majalah, radio, dan televisi   | Kali   | 9       | 9    | 9    | 13   | 12   |
| 9.  | Media baru seperti website (media online)  | Kali   | -       | -    | -    | 16   | 365  |
| 10. | Media tradisional seperti pertunjukan rakyat   | Kali   | 1       | 1    | 9    | 13   | 0    |
| 11. | Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya                     | Kali   | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 12. | Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho    | Kali   | 12      | 12   | 47   | 48   | 53   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masyarakat di kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Jumlah koperasi, dimana persentase capaian selama lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan yaitu dari sebanyak 649 unit pada tahun 2016 menjadi 714 unit di tahun 2020; Persentase koperasi aktif cenderung menurun dari sebesar 79,96% pada tahun 2016 menjadi sebesar 39,92% di tahun 2020; Persentase koperasi sehat cenderung meningkat dari 24% pada tahun 2016 menjadi sebesar 37,54% pada tahun 2020.

Adapun Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana pada tahun 2016 sebanyak 924 unit mengalami peningkatan pada 2020 menjadi sebesar 13.224 unit; Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 28,1% meningkat menjadi 32,54% pada 2020; Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2016-2019, yaitu sebesar 1,65% pada 2016 menjadi sebesar 3,01% pada 2019. Sementara, capaian tahun 2020 adalah 0%.

Capaian kinerja indikator urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di kabupaten Blora di tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.32.**

**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha  
Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |       |       |       |        |
|-----|---|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|     |   |        | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
| 1.  | Jumlah koperasi   | Unit   | 649     | 667   | 693   | 702   | 714    |
| 2.  | Persentase koperasi aktif                                   | %      | 79,96   | 82,5  | 37,52 | 38,89 | 39,92  |
| 3.  | Persentase koperasi sehat                                   | %      | 24      | 26    | 44,23 | 45,42 | 37,54  |
| 4.  | Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)                | Unit   | 5.924   | 6.500 | 6.760 | 6.950 | 13.224 |
| 5.  | Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum  | %      | 28,1    | 29    | 30,43 | 31,24 | 32,54  |
| 6.  | Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk | %      | 1,65    | 2,04  | 2,7   | 3,01  | 0      |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 12. Penanaman Modal

Urusan kewenangan penanaman modal sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 4 sub urusan adalah (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Kerja Sama Penanaman Modal; (3) Promosi Penanaman Modal; dan (4) Pelayanan Penanaman Modal. Peningkatan investasi dalam bentuk penanaman modal sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Investasi yang meningkat diharapkan akan menggerakkan perekonomian lokal.

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Blora. Nilai investasi PMDN sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 6,9 Trilyun rupiah. Peningkatan investasi di Kabupaten Blora masih mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya dari sarana transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, dan pelayanan perijinan yang kurang optimal. Penyederhanaan perijinan bagi para investor dalam berinvestasi akan mendorong semakin bertambahnya investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Blora. Sampai dengan saat ini tahun 2020 ada 89 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara online. Perkembangan kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:



**Tabel 2.33.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan     | Capaian |       |       |       |      |
|-----|--|------------|---------|-------|-------|-------|------|
|     |  |            | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
| 1.  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)   | PMA        | 9       | 9     | 9     | 9     | 0    |
|     |  | PMDN       | 120     | 125   | 349   | 589   | 854  |
|     |  | US \$      | 4,6 T   | 4,6 T | 4,2 T |       |      |
| 2.  | Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional(PMDN/PMA)   | Trilyun Rp | 1,6 T   | 3,2 T | 4,7 T | 5,3 T | 6,9  |
|     |  | PMA        | 9       | 9     | 9     | 9     | 0    |
| 3.  | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha        | Kali       | 1       | 2     | 4     | 4     | 3    |
| 4.  | Jumlah jenis pelayanan secara online   | Jenis      | 4       | 4     | 36    | 89    | 89   |
| 5.  | Sistem informasi Pelayanan Perijinan   |            | Ada     | Ada   | Ada   | Ada   | Ada  |
| 6.  | Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | %          | 8       | 8     | 8     | 0     | 0    |

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olah raga sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan yaitu Sub Urusan Kepemudaan, Kewenangan Kabupaten meliputi Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Sub urusan keolahragaan, Kewenangan Kabupaten meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Sub urusan kepramukaan, kewenangan Kabupaten adalah pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Peningkatkan kualitas Sumber daya manusia dilakukan dengan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi. Pemerintah



Kabupaten Blora telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang kepemudaan dan olahraga untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Namun pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada pemuda yang tidak bisa mengembangkan kemampuannya dalam berusaha, selain itu banyak event olahraga yang dibatalkan. Pembinaan terhadap pemuda juga dilakukan melalui kepramukaan, pembinaan ini dilakukan oleh pembina pramuka yang telah mengikuti dan lulus dalam Kursus Mahir Dasar (KMD).

**Tabel 2.34.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah raga**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan           | Capaian |         |      |      |      |
|-----|---|------------------|---------|---------|------|------|------|
|     |   |                  | 2016    | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase organisasi pemuda yang aktif   | %                |         |         |      |      |      |
| 2.  | Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader                                   | orang            |         |         |      |      |      |
| 3.  | Prestasi Olahraga   | medali/<br>piala |         |         |      |      |      |
| 4.  | Jumlah pemuda berprestasi   | Orang            | 60      | 120     | 99   | 95   | 0    |
| 5.  | Presentase organisasi kepemudaan yang telah dibina                                    | %                | 53      | 43      | 54   | 64   | 64   |
| 6.  | Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten | Organi<br>sasi   | 53      | 53      | 54   | 35   | 35   |
| 7.  | Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha   | Orang            | 350.105 | 420.116 | 170  | 195  | 0    |
| 8.  | Jumlah Kelompok Pemuda produktif (KUPP)   | Kelompok         | 70      | 90      | 90   | 35   | 0    |
| 9.  | Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh   | Orang            | 12      | 164     | 129  | 45   | 0    |
| 10. | Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)  | Gelanggang       | 2       | 2       | 2    | 2    | 2    |
| 11. | Lapangan olahraga   | Unit             | 600     | 750     | 755  | 760  | 760  |
| 12. | Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD                               | %                |         | 65      | 67   | 68   | 70   |



## 14. Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Perangkat daerah yang diamanatkan untuk menyusun profil/statistik seluruhnya telah menyusun profil sebagaimana dimaksud kendati Ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date belum maksimal dikarenakan ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Indonesia Satu Data, Pemerintah Kabupaten Blora belum secara optimal mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.35.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|--------|---------|------|------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan | Buah   | 5       | 5    | 2    | 2    | 2    |
| 2.  | Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD                       | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 15. Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota. Capaian urusan Persandian diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait yang capaiannya ditahun 2016 hingga 2020 sudah sebesar 100%.



**Tabel 2.36.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 16. Kebudayaan

Capaian kinerja pada urusan Kebudayaan di kabupaten Blora pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1 kali; Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah semakin menurun dimana pada tahun 2020 tidak ada kegiatan tersebut; Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya semakin meningkat yaitu pada tahun 2016 sebanyak 8% menjadi 10% pada tahun 2020; Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya semakin sedikit yaitu di tahun 2016 ada 9 unit kemudian pada tahun 2020 menjadi 7 unit; Jumlah grup kesenian juga mengalami penurunan yang signifikan menjadi 105 grup saja pada tahun 2020; cakupan organisasi seni meningkat dari sebesar 75% menjadi 87% di tahun 2020; Cakupan Gelar seni tiap tahunnya sebesar 100% dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 78% menurun drastis menjadi 35% pada tahun 2020. Beberapa indikator dengan realisasi 0 pada tahun 2020 antara lain Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitasi Seni dan Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian. Penurunan ketercapaian indikator pada urusan Kebudayaan besar dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pencapaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.37.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|--------|---------|------|------|------|------|
|     |  |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Kali   | 2       | 4    | 3    | 3    | 1    |
| 2.  | Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah        | Kali   | 10      | 10   | 12   | 4    | -    |



| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |       |       |       |      |
|-----|---|--------|---------|-------|-------|-------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
| 3.  | Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya          | %      | 8       | 8     | 9     | 10    | 10   |
| 4.  | Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya           | Unit   | 9       | 9     | 9     | 10    | 7    |
| 5.  | Jumlah grup kesenian                                    | Grup   | 1.700   | 1.710 | 1.720 | 1.720 | 105  |
| 6.  | Cakupan Kajian Seni                                     | %      | 90      | 90    | 90    | 91    | 0    |
| 7.  | Cakupan Fasilitasi Seni                                 | %      | 75      | 75    | 78    | 78    | 0    |
| 8.  | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian                    | %      | 100     | 100   | 100   | 100   | 0    |
| 9.  | Cakupan Organisasi seni                                 | %      | 75      | 74    | 88    | 85    | 87   |
| 10. | Cakupan Gelar Seni                                      | %      | 100     | 100   | 100   | 100   | 100  |
| 11. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | %      | 78      | 78    | 30    | 32,5  | 35   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 17. Perpustakaan

Kondisi capaian kinerja urusan perpustakaan dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yang mewakili masing-masing sub urusan. Indikator tersebut antara lain: Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun, Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina, serta Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai 611 unit. Jumlah perpustakaan tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya berjumlah 450 unit. 611 unit perpustakaan di Kabupaten Blora terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling, perpustakaan milik masyarakat (TBM), perpustakaan khusus, dan perpustakaan milik instansi pemerintah lainnya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora adalah pembuatan aplikasi iBlora. iBlora adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora. iBlora merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook serta dilengkapi dengan fitur-fitur media sosial. Pengunjung dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengunjung yang lain serta dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang dibaca, menyampaikan ulasan buku serta mendapatkan teman baru.

Salah satu perpustakaan yang memiliki koleksi paling lengkap di Kabupaten Blora adalah Perpustakaan Daerah. Perpustakaan ini pada tahun 2020 mendapatkan penambahan koleksi buku yang cukup besar.



Pada tahun 2020 jumlah koleksi Perpustakaan Daerah mencapai 32.022 eksemplar dengan jumlah kunjungan mencapai 92,935. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 dan 2019 disebabkan oleh adanya proses pembangunan dan renovasi pada Perpustakaan Daerah yang menyebabkan ketidaknyamanan pada pengunjung sehingga berakibat pada menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun tersebut. Selain itu, sejak adanya wabah Covid-19 sejak bulan Februari hingga Desember 2020 juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Blora.

Selain menjalankan fungsi pelayanan pada Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan pembinaan kepada perpustakaan sekolah dan desa yang ada di Kabupaten Blora. Pada tahun 2020 terdapat 320 perpustakaan desa dan sekolah yang telah di latih terkait dengan pengelolaan perpustakaan. Pembinaan tersebut meliputi pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa, meliputi koleksi, sarana dan prasarana, Layanan, Tenaga, Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Teknologi Informasi.

Adapun jumlah pelestarian karya cetak dan rekam di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai 998 eksemplar, yang terdiri dari penyelamatan karya cetak dan rekam kuno serta digitalisasi terhadap karya cetak dan rekam tersebut. Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja indikator urusan dibawah ini:

**Tabel 2.38.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian |        |         |         |        |
|-----|--|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
|     |  |        | 2016    | 2017   | 2018    | 2019    | 2020   |
| 1.  | Jumlah perpustakaan                                      | Unit   | 450     | 515    | 600     | 611     | 611    |
| 2.  | Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun          | Orang  | 118.098 | 97.568 | 134.778 | 123.913 | 92.935 |
| 3.  | Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Buah   | 22.755  | 26.088 | 28.838  | 31.322  | 32.022 |
| 4.  | Jumlah Perpustakaan                                      | Unit   | 173     | 210    | 263     | 310     | 320    |



| No. | Indikator                               | Satuan    | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|-----------|---------|------|------|------|------|
|     |   |           | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     | sekolah dan desa yang dibina            |           |         |      |      |      |      |
| 5.  | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam | Eksemplar | 500     | 720  | 726  | 952  | 998  |

### 18. Kearsipan

Kondisi capaian kinerja urusan kearsipan dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja. Indikator tersebut antara lain: Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik; Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik; Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik; dan Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Blora secara umum dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, mengingat hampir seluruh capaian kinerja telah mencapai 100%. Seluruh arsip tekstual Pemerintah Daerah di masing-masing Perangkat Daerah telah terkelola dan tersimpan dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh ketatnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora serta pembinaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Blora pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja indikator urusan dibawah ini:

**Tabel 2.39.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik                      | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2.  | Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik | %      | 80      | 80   | 90   | 95   | 100  |
| 3.  | Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik            | %      | 70      | 70   | 80   | 85   | 95   |
| 4.  | Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku                | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |



### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 1. Kelautan Dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blora tahun 2020 mengalami penurunan produksi sebesar 328.559 kg dari tahun 2019, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menghentikan produksinya akibat pandemi covid 19. Ikan lele produksinya paling besar karena pemeliharannya mudah dan memiliki daya tahan yang baik. Dari produksi tersebut ternyata masih belum mencukupi konsumsi masyarakat sehingga perlu intensifikasi benih dan perluasan kolam.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

**Tabel 2.40.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan perikanan**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                                 | Satuan    | Capaian |         |        |         |         |
|-----|---|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
|     |   |           | 2016    | 2017    | 2018   | 2019    | 2020    |
| 13. | Produksi perikanan                        | Kg        | 180.641 | 348.500 | 211.05 | 672.509 | 343.950 |
| 14. | Tingkat cakupan bina kelompok ikan        | %         | 37      | 33      | 92,85  | 96,08   | 100     |
| 15. | Tingkat konsumsi ikan penduduk            | Kg/kapita | 8,7     | 15,62   | 17,64  | 20,14   | 13,67   |
| 16. | Jumlah produksi hasil olahan ikan         | Kg        | 27.001  | 612,183 | 785,23 | 790,52  | 554.510 |
| 17. | Jumlah industri pengolahan ikan           | Unit      | 25      | 25      | 25     | 25      | 25      |
| 18. | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | %         | 24,51   | 23,33   | 23,33  | 23,33   | N.A     |

#### 2. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk



daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut. Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Blora melaunching ikon “Dolan Blora” yang merupakan ikon untuk menarik wisatawan datang ke Blora. Kabupaten Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang beragam, meliputi Makam, Taman dan Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi Perkemahan, Wana Wisata (loco tour), Bendungan, dan wisata Geologi. Secara umum daya saing obyek wisata di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis di kabupaten sekitar, dikarenakan kurangnya promosi dan agenda kegiatan yang mendukung pariwisata. Jenis obyek wisata lainnya yang cukup potensial adalah obyek wisata geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat dari daerah Yogyakarta dan Bandung untuk keperluan penelitian atau memperoleh pengetahuan. Obyek wisata yang dikembangkan adalah Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong, dan obyek wisata sayuran. Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan restoran.

Selama pandemi covid 19 tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blora yang semula 226.990 orang pada tahun 2019 menjadi 221.949 pengunjung tahun 2020, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar di tahun 2021 kunjungan wisata meningkat kembali. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut:



**Tabel 2.41.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                                 | Satuan   | Capaian |         |         |         |         |
|-----|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |   |          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1.  | Kunjungan wisatawan                       | Orang    | 135.522 | 170.000 | 363.730 | 226.990 | 221.949 |
| 2.  | Persentase obyek wisata yang dipromosikan | %        | 42      | 80      | 100     | 87      | 100     |
| 3.  | Jumlah obyek wisata unggulan              | Obyek    | 12      | 13      | 22      | 16      | 22      |
| 4.  | Jumlah Pokdarwis Aktif                    | Kelompok | 3       | 8       | 7       | 15      | 8       |
| 5.  | Jumlah restoran                           | Unit     | 55      | 75      | 75      | 85      | 95      |
| 6.  | Jumlah penginapan / hotel                 | Unit     | 33      | 34      | 33      | 33      | 40      |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

### 3. Pertanian

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Blora cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah produksi padi sawah menurun dari tahun 2019 yang mencapai 556.438 ton sedangkan tahun 2020 hanya menjadi 517.835 ton, produksi padi ladang menurun sekitar 21.098 ton pada tahun 2020.

Komoditas perkebunan yang cukup menonjol peningkatan produksinya pada tahun 2020 adalah tembakau (naik sekitar 21,6% atau 435,03 ton), sedangkan produksi tebu turun sekitar 3.824,73 ton atau 18,9% dari tahun 2019.

Sedangkan perkembangan pada bidang peternakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi sapi potong, dan kambing dari tahun 2019 sedangkan jumlah kerbau dan domba menurun. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, program SIWAB dari pemerintah pusat, pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit menular pada ternak. Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya sebagai berikut berikut:



**Tabel 2.42.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Satuan | Capaian   |         |           |           |           |
|-----|--|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |        | 2016      | 2017    | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1.  | Cakupan bina kelompok petani   | %      | 78        | 90      | 80        | 84        | 86        |
| 2.  | Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebunan                            | Kali   | 3         | 3       | 6         | 6         | 0         |
| 3.  | Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan             | %      | 73        | 95      | 78        | 81        | 83        |
| 4.  | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB                                      | %      | 24,51     | 23,30   | 22,91     | 21,82     | N.A       |
| 5.  | Produksi pertanian:  |        |           |         |           |           |           |
|     | Padi sawah   | Ton    | 444.069   | 525.670 | 542.076   | 556.438   | 517.835   |
|     | Padi ladang  | Ton    | 55.155    | 95.104  | 92.858    | 102.937   | 81.839    |
|     | Jagung   | Ton    | 349.201   | 348.370 | 392.057   | 345.865   | 430.269   |
|     | Kedelai  | Ton    | 11.012    | 10.418  | 7.423     | 3.230     | 4.441     |
|     | Ubi kayu   | Ton    | 45.151    | 57.179  | 21.608    | 20.745    | 42.914    |
|     | Cabe Merah   | Ton    | 64,174    | 107.245 | 11.340    | 33.097    | 9.601,3   |
|     | Cabe Rawit   | Ton    | 18,076    | 25.517  | 2.843,7   | 8.952     | 1.516,9   |
|     | Bawang merah   | Ton    | 16,359    | 17.287  | 19.664    | 15.404    | 1.473,4   |
|     | Jeruk siam   | Ton    | 6,582     | 15.161  | 13.483    | 63.363    | 976,8     |
| 6.  | Produksi perkebunan:   |        |           |         |           |           |           |
|     | Tembakau   | Ton    | 193,68    | 432,6   | 1.123,49  | 2.012,22  | 2.447,25  |
|     | Tebu   | Ton    | 16.740,76 | 16.522  | 19.369,81 | 20.220,77 | 16.396,04 |
|     | Kelapa   | Ton    | 66,19     | 71,45   | 92,47     | 65,14     | 61,65     |
|     | Metre  | Ton    | 167,87    | 172,26  | 185,79    | 431,88    | 367,823   |
| 7.  | Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan | %      | 100       | 100     | 100       | 100       | 100       |
| 8.  | Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi                                       | %      | 38        | 37      | 37        | 38        | 39        |
| 9.  | Angka prevalensi BEF pada sapi   | %      | 25        | 24      | 24        | 26        | 25        |
| 10. | Populasi Ternak  |        |           |         |           |           |           |
|     | Sapi Potong  | Ekor   | 222.718   | 231.045 | 247.429   | 255.688   | 267.193   |
|     | Kerbau   | Ekor   | 1.528     | 1.528   | 1.678     | 1.860     | 1.701     |
|     | Kambing  | Ekor   | 130.473   | 133.582 | 141.259   | 142.250   | 143.622   |
|     | Domba  | Ekor   | 17.118    | 17.696  | 18.218    | 19.765    | 18.121    |
| 11. | Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan                    | Kali   | 2         | 2       | 2         | 2         | 0         |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari sebanyak 23 indikator kinerja program yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2020 terdapat sebanyak 9 indikator dengan status capaian telah mencapai target akhir RPJMD, 4 indikator berstatus akan tercapai dan sebanyak 10 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Jika dibandingkan target tahun 2020 dapat diketahui ada beberapa indikator yang belum mencapai target tahun 2020. Ketidaktercapaian indikator Jumlah promosi produk unggulan pertanian /perkebunan di sebabkan



Karena pandemi Covid-19 sehingga pameran Tk. Kab dan Prov di tiadakan, sedangkan untuk indikator Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan juga berstatus perlu upaya keras dalam mencapai tarhet RPJM dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pameran Tk. Kab dan Prov tidak dilaksanakan.

#### **4. Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kabupaten Pekalongan diantaranya melakukan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat; pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global.

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Blora dari tahun ke tahun selalalu menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Maka dari itu dalam rangka mendukung dan mengembangkan iklim perdagangan bagi masyarakat, banyak hal yang telah dilakukan oleh



Pemerintah Kabupaten Blora. Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.43.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian      |              |           |                                       |           |
|-----|---|--------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|     |   |        | 2016         | 2017         | 2018      | 2019                                  | 2020      |
| 1.  | Jumlah Pasar  | Unit   | 160          | 160          | 160       | 160                                   | 16        |
| 2.  | Jumlah Pasar yang Diawasi   | Unit   | 160          | 160          | 160       | 160                                   | 16        |
| 3.  | Persentase Pasar yang Diawasi   | %      | 100          | 100          | 100       | 100                                   | 100       |
| 4.  | Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan                  | %      | 26,67        | 43,75        | 56,25     | 65,25                                 | 80        |
| 5.  | Persentase Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) yang telah mengikuti pameran/ promosi produk. | %      | 1,65         | 1,73         | 1,85      | 60% (dalam daerah), 30% (luar daerah) | 0,00      |
| 6.  | Nilai Ekspor Bersih   | US\$   | 2.932.952,46 | 2.932.952,46 | 3.856.673 | 3.550.258                             | 2.622.492 |
| 7.  | Jumlah Produk yang Diterima Pasar Internasional   | Produk | 5            | 5            | 5         | 5                                     | 7         |
| 8.  | Persentase PDRB Sektor Perdagangan  | %      | 16,7         | 14,96        | 15,16     | 15,39                                 | 15,39     |
| 9.  | Persentase lokasi PKL yang tertata  | %      | 8            | 14,06        | 15,63     | 27,77                                 | 36,84     |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 5. Perindustrian

Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling besar pendapatan sektor industri.

Kabupaten Blora saat ini memiliki 5 kluster industri. Dari jumlah tersebut yang berkembang sudah mencapai 3 kluster. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.44.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator       | Satuan | Capaian |        |        |        |      |
|-----|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|
|     |                 |        | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 |
| 1.  | Jumlah Industri | Unit   | 11.801  | 11.900 | 11.998 | 11.990 | NA   |
| 2.  | Jumlah IKM      | Unit   | 11.796  | 11.801 | 11.801 | 11.800 | NA   |



| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3.  | Persentase Pertumbuhan Industri   | %      | 0,51    | 4,67 | 9,74 | 3,39 | NA   |
| 4.  | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB                                  | %      | 10,83   | 9,67 | 9,74 | 9,93 | NA   |
| 5.  | Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri                               | %      | N.A     | 15,6 | 15,6 | 15   | NA   |
| 6.  | Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal | %      | N.A     | 41,5 | N.A  | 50   | NA   |
| 7.  | Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk                | %      | 0,25    | 0,51 | 0,51 | 0,60 | NA   |
| 8.  | Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM                         | %      | 0,66    | 0,87 | 0,89 | 0,90 | NA   |
| 9.  | Persentase klaster industri yang berkembang                               | %      | 87,5    | 89,5 | 90,1 | 91   | NA   |
| 10. | Cakupan bina kelompok pengrajin   | %      | 30,01   | 40,1 | 50   | 53   | NA   |
| 11. | Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi        | %      | 30      | 32   | 34   | 36   | NA   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Capaian kinerja urusan Transmigrasi di Kabupaten Blora diukur melalui indikator banyaknya jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK). Tahun 2019 sebanyak 5 KK dari Kabupaten Blora diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Penentuan jumlah KK yang diberangkatkan adalah kewenangan Provinsi, dan pihak Kabupaten berupaya untuk memenuhi kuota tersebut.



**Tabel 2.45.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi  
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                         | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
|     |                                   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah Transmigran diberangkatkan | KK     | 10      | 1    | 7    | 5    | NA   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

### 2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada skala daerah, dan perencanaan di tingkat OPD (sektoral). Secara umum perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2016-2021 dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perencanaan tingkat OPD yakni rencana strategis OPD. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah juga sudah dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD. Perlu upaya peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala OPD lainnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS) maupun perencanaan dan penganggaran pada level OPD (Renstra, Renja dan RKA), sehingga ada keselarasan antar dokumen perencanaan. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.46.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan  | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|---------|---------|------|------|------|------|
|     |   |         | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah                    | Dokumen | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2.  | Ketersediaan hasil evaluasi RKPD  | Dokumen | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.  | Ketersediaan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh               | Dokumen | 2       | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 4.  | Persentase perencana OPD yang memahami penyusunan dokumen perencanaan OPD | %       | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |



| No. | Indikator   | Satuan  | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|---------|---------|------|------|------|------|
|     |   |         | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5.  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA                 | Dokumen | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 6.  | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA / PERKADA      | Dokumen | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 7.  | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA               | Dokumen | 1       | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8.  | Persentase OPD memiliki Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD                       | %       | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 9.  | Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah                   | Dokumen | 2       | 4    | 2    | 4    | 4    |
| 10. | Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah             | Dokumen | 2       | 3    | 2    | 5    | 3    |
| 11. | Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah | Dokumen | 1       | 2    | 2    | 1    | 1    |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 2. Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Blora berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 memperoleh opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini akan dipertahankan terus pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.47.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah  
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator  | Capaian         |                 |                 |                 |        |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|     |  | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020   |
| 1.  | Jumlah PAD (Rupiah)                              | 142.700.580.944 | 228.015.569.565 | 216.402.953.797 | 218.052.934.811 |        |
| 2.  | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah       | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | Proses |
| 3.  | Persentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat | 45,42           | 51,67           | 57,92           | 70              | 86     |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,76%, pada tahun 2020 belum dilakukan perhitungan realisasi Pendapatan Asli Daerah, namun diperkirakan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19. Sementara itu untuk predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah diperkirakan akan mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK. Dalam pengelolaan asset terutama berupa tanah pada tahun 2020 sebesar 86% tanah milik Pemerintah Kabupaten Blora sudah bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengamanan asset Pemerintah Kabupaten Blora berupa tanah semakin baik.

### **3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pengembangan sumber daya aparatur menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga sasaran utama yaitu mewujudkan birokrasi yang kapabel, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Maka Kabupaten Blora perlu mewujudkan standar kompetensi bagi aparatur yang pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan semakin profesional.

Perincian ASN di Kabupaten Blora pada tahun 2020 sebanyak 7.688 orang, dengan perincian ASN sebagai berikut:



**Tabel 2.48.**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No.       | Kriteria Pegawai            | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |                             |        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>A.</b> | <b>Berdasarkan Golongan</b> |        |       |       |       |       |       |
| 1.        | Golongan I                  | orang  | 284   | 246   | 190   | 182   | 179   |
| 2.        | Golongan II                 | orang  | 1.297 | 1.288 | 1.131 | 1.095 | 1.179 |
| 3.        | Golongan III                | orang  | 3.915 | 3.475 | 3.467 | 3.807 | 4.053 |
| 4.        | Golongan IV                 | orang  | 3.706 | 3.144 | 2.941 | 2.575 | 2.277 |
|           | Jumlah                      | orang  | 9.202 | 8.153 | 7.729 | 7.659 | 7.688 |
| <b>B.</b> | <b>Pejabat Struktural</b>   |        |       |       |       |       |       |
| 1.        | Eselon I                    | orang  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2.        | Eselon II                   | orang  | 26    | 29    | 24    | 25    | 20    |
| 3.        | Eselon III                  | orang  | 147   | 148   | 149   | 148   | 132   |
| 4.        | Eselon IV                   | orang  | 664   | 685   | 609   | 604   | 564   |
| 5.        | Eselon V                    | orang  | 48    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|           | Pejabat Fungsional          | orang  | 5.038 | 5.038 | 4.800 | 4.767 | 4.583 |
|           | Pensiunan                   | orang  | 474   | 433   | 483   | 481   | 568   |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

#### 4. Penelitian dan pengembangan

Kebijakan pembangunan dalam rangka mengembangkan daya saing wilayah perlu diarahkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan efektif. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019 tentang Inovasi daerah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi yang ada di daerah yang akan dan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu memberikan manfaat bagi Daerah atau masyarakat serta tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat direplikasi. Inovasi Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tata kelola pemerintahan daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, inovasi pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Implementasi inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri akan dinilai, diberikan skor dan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasi daerah akan dipilih pemenang inovasi dan diberikan penghargaan serta selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan. Kategori skor indeks inovasi daerah dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.81**  
**Skor dan Kriteria Penilaian Indeks Inovasi daerah**

| No | Skor/Nilai     | Kategori             |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | 1.001 keatas   | Sangat Inovatif      |
| 2. | 501-1000       | Inovatif             |
| 3. | 1-500          | Kurang Inovatif      |
| 4. | Belum Ada Data | Belum Menginput Data |

Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Blora berpedoman pada Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang telah tersusun pada tahun 2016. Pengembangan SIDa di Kabupaten Blora diarahkan mempunyai tema tertentu sehingga mampu meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat. Beberapa produk yang telah dihasilkan dalam skala laboratorium antara lain omah setrum.



### Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

| No. | Indikator   | Satuan     | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|------------|---------|------|------|------|------|
|     |   |            | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah penelitian daerah yang difasilitasi (RUD)                    | Penelitian | 6       | 7    | 10   | 12   | 0    |
| 2.  | Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik | Inovasi    | 29      | 36   | 24   | 67   | 6    |
| 3.  | Jumlah Inovasi OPD yang dikembangkan                                | Inovasi    | -       | -    | 9    | 8    | 7    |
| 4.  | Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana)     |            | 1       | -    | 1    | -    | 1    |
| 5.  | Jumlah Tenant yang difasilitasi                                     | Tenant     | -       | 1    | 4    | 2    | 0    |
| 6.  | Jumlah penelitian di Bappeda lintas bidang                          | Penelitian | -       | 3    | 3    | 3    | 9    |
| 7.  | Teknologi tepat guna dari masyarakat yang difasilitasi              | Unit TTG   | -       | 1    | 1    | 1    | 3    |

#### 5. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan administrasi.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat diukur dengan delapan indikator kinerja, meliputi 1) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, 2) Presentase produk hukum yang ditetapkan, 3) Persentase produk hukum yang dipublikasikan, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang tata pemerintahan, 5) Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD, 6) Persentase Jumlah MoU yang dihasilkan, 7) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang kesra, dan 8) Persentase usulan hibah keagamaan yang terverifikasi. Kinerja pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan



masyarakat sampai dengan tahun 2020 tercapai dengan baik dengan kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.

Capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan ditunjukkan dengan sepuluh indikator, meliputi 1) Jumlah Pemda yang mengintegrasikan, 2) penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP), 3) Persentase BUMD sehat, 4) Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi, 5) Persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan, 6) Persentase realisasi anggaran pengadaan dibagi anggaran dalam RUP, 7) Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik, 8) Nilai Kematangan Organisasi, 9) Persentase UPP yang telah melakukan SKM, dan 10) Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B. Dari kesepuluh indikator tersebut, ada beberapa indikator yang pencapaiannya termasuk belum optimal sampai dengan tahun 2019, yaitu Nilai Kematangan Organisasi sebesar 76,44, Persentase UPP yang telah melakukan SKM sebesar 86,11%. Sementara itu, nilai SAKIP dengan target minimal B sampai dengan tahun 2020 tercapai sesuai target. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.49.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 16.6.2.(a) | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2.  | Persentase produk hukum yang ditetapkan   | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3.  | Persentase produk hukum yang dipublikasikan                                       | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4.  | Persentase pemenuhan fasilitasi bidang tata pemerintahan                          | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5.  | Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD                 | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6.  | Persentase Jumlah MoU yang dihasilkan   | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7.  | Persentase pemenuhan fasilitasi bidang kesra                                      | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 8.  | Persentase usulan hibah keagamaan yang terverifikasi                              | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |



| No. | Indikator  | Satuan      | Capaian |       |         |         |      |
|-----|--|-------------|---------|-------|---------|---------|------|
|     |  |             | 2016    | 2017  | 2018    | 2019    | 2020 |
| 9.  | Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP)               | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 10. | Persentase BUMD sehat  | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 11. | Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi   | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 12. | Persentase penyerapan anggaran program dan kegiatan  | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 13. | Persentase realisasi anggaran pengadaan dibagi anggaran dalam RUP  | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 14. | Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik | %           | 100     | 100   | 100     | 100     | 100  |
| 15. | Nilai Kematangan Organisasi  | nilai/angka | Na      | Na    | Na      | 76,44   | 18   |
| 16. | Persentase UPP yang telah melakukan SKM  | %           | Na      | Na    | 76,38 % | 86,11 % | 100  |
| 17. | Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B   | %           | Na      | 36,36 | 84,61   | 95,23   | 50   |
|     | Nilai SAKIP Daerah   |             | CC      | CC    | B       | B       | B    |
| 18. | Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum   | %           | 100     | 100   | 100     | 100     |      |

Sumber : Isian Data Sekretariat Daerah Kab. Blora. 2021

## 6. Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Capaian kinerja sub bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel berikut:



**Tabel 2.50.**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Satuan | Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|--------|---------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal & eksternal yang telah ditindaklanjuti    | %      | 100     | 90   | 94   | 95   | 96   |
| 2.  | Persentase laporan hasil pemeriksaan dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun | %      | 100     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3.  | Tingkat Maturitas SPIP  | Level  | 2       | 3,2  | 3    | 3    | 3    |
| 4.  | Tingkat Kapabilitas SPIP  | Level  | 2       | 2,9  | 3    | 3    | 3    |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pengawasan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat mengalami peningkatan. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada bidang pelaksanaan kegiatan dan penatakelolaan keuangan pada masing-masing OPD. Hal ini didukung dengan aparatur pengawas yang handal dengan tingkat maturitas sudah mencapai level 3 pada tahun 2020.

## 7. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan OPD lainnya. Dalam UU. No 23 Tahun 2014 Pasal 204 menyatakan Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 215 menyatakan Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD, mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; b. menyelenggarakan administrasi keuangan; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Tugas berat sekretariat DPRD adalah melayani anggota DPRD yang memiliki dinamika yang cukup tinggi dan beban tugas yang berat. Untuk



itu dibutuhkan sumberdaya yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Seperti diketahui aparatur yang bertugas di sekretariat DPRD Kabupaten Blora, 34,37 persen belum sarjana, 6,25 sarjana muda, 43,75 persen sarjana S-1 dan 21,875 persen sarjana S-2. Memperhatikan perkembangan aktivitas DPRD, kondisi tersebut masih kurang memadai, terlebih di era teknologi informasi ini kebutuhan akan SDM berkualitas mutlak di sediakan.

Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan juga menjadi persoalan tersendiri. Selain itu masih juga dibutuhkan kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter yang selama ini tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

Meskipun dalam keterbatasan sekretariat DPRD Kabupaten Blora mengukir prestasi dengan membuat aplikasi website DPRD guna mempercepat respon time pengaduan masyarakat. Ini bukan hanya membanggakan lingkup sekretariat DPRD saja melainkan seluruh rakyat Kabupaten Blora.

## **8. Kewilayahan (Kecamatan)**

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Implementasi penyelenggaraan kecamatan di Kabupaten Blora dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan di Kabupaten Blora ditunjukkan dengan besaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dimasing-masing kecamatan. Perkembangan nilai indeks kecamatan dalam tiga tahun terakhir setiap tahunnya mengalami perbaikan. Jika dilihat nilai rata-rata dari seluruh kecamatan, pada tahun 2018 memiliki nilai rata-rata indeks sebesar 79,74, naik ditahun 2019 menjadi sebesar 80,49 dan ditahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 84,21. Indeks kepuasan masyarakat kecamatan paling tinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 89,05 berada di Kecamatan Kedungtuban, dan nilai indeks terendah sebesar 64,33 yaitu Kecamatan Tunjungan. Pada tahun 2019, indeks kepuasan kecamatan paling tinggi adalah sebesar 86,26, yaitu di Kecamatan Jiken, sedangkan



terendah sebesar 77,29 di Kecamatan Kunduruan. Sementara itu, indeks kecamatan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 98,10 yaitu di Kecamatan Blora, sedangkan terendah berada di Kecamatan Kradenan dengan nilai indeks 80,00.

Penilaian indeks kepuasan masyarakat ditingkat kecamatan ditahun 2020 belum seluruh kecamatan, tercatat baru sebanyak 9 kecamatan yang sudah mengeluarkan nilai indeksnya. Capaian indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap layanan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 2.51.**  
**Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan (Kecamatan)**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Kecamatan               | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tahun |      |       |       |       |
|-----|-------------------------|---|------|-------|-------|-------|
|     |                         | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Tunjungan               | NA  | NA   | 64,33 | 77,41 | NA    |
| 2.  | Cepu                    | NA  | NA   | 74,51 | 81,08 | NA    |
| 3.  | Jati                    | NA  | NA   | 74,70 | 80,28 | NA    |
| 4.  | Kunduruan               | NA  | NA   | 77,29 | 77,29 | NA    |
| 5.  | Sambong                 | NA  | NA   | 78,56 | 78,56 | NA    |
| 6.  | Jepon                   | NA  | NA   | 78,70 | 78,72 | 81,54 |
| 7.  | Banjarejo               | NA  | NA   | 79,85 | 81,00 | 81,75 |
| 8.  | Kradenan                | NA  | NA   | 79,66 | 79,66 | 80,00 |
| 9.  | Japah                   | NA  | NA   | 80,79 | 80,79 | NA    |
| 10. | Ngawen                  | NA  | NA   | 80,95 | 80,95 | 80,97 |
| 11. | Blora                   | NA  | NA   | 81,47 | 81,47 | 81,47 |
| 12. | Randublatung            | NA  | NA   | 81,75 | 81,75 | 83,24 |
| 13. | Jiken                   | NA  | NA   | 82,60 | 86,26 | 82,36 |
| 14. | Bogorejo                | NA  | NA   | 84,17 | 78,44 | 80,45 |
| 15. | Todanan                 | NA  | NA   | 87,45 | 81,47 |       |
| 16. | Kedungtuban             | NA  | NA   | 89,05 | 82,72 | 89,5  |
|     | Rata-rata Kecamatan IKM | NA  | NA   | 79,74 | 80,49 | 82,36 |

## 9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan fasilitasi bagi partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan yang lain mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan kondusivitas di daerah agar aktivitas sosial, ekonomi dan budaya dapat terselenggara dengan baik. Kabupaten Blora selalu



berupaya agar pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat belum optimal, hal ini disebabkan lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan domisili lembaga. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik, melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan / pelajar, ormas, LSM dan masyarakat.

Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.52.**  
**Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Dalam Negeri Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian  | Satuan | Tahun |      |      |       |      |
|-----|---|--------|-------|------|------|-------|------|
|     |   |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 |
| 1.  | <b>Jumlah Anggota DPRD</b>  | Orang  | 45    | 45   | 45   | 45    | 45   |
|     | a. Laki-Laki  | Orang  | 37    | 37   | 37   | 39    | 40   |
|     | b. Perempuan  | Orang  | 8     | 8    | 8    | 6     | 5    |
| 2.  | Jumlah Fraksi DPRD  | Fraksi | 7     | 7    | 7    | 7     | 7    |
| 3.  | <b>Partai Politik</b>   |        |       |      |      |       |      |
|     | a. Jumlah Parpol Daerah   | Partai | 12    | 12   | 14   | 12    | 13   |
|     | b. Jumlah Parpol Peserta Pemilu   | Partai | 12    | 12   | 14   | 13    | 13   |
| 4.  | <b>Organisasi Kemasyarakatan</b>  |        |       |      |      |       |      |
|     | a. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi  | Buah   | 17    | 5    | 10   | 10    | 10   |
|     | b. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama  | Buah   | 17    | 15   | 9    | 11    | 11   |
| 5.  | <b>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</b>   |        |       |      |      |       |      |
|     | a. Jumlah LSM Lokal   | Buah   | 60    | 60   | 42   | 49    | 52   |
|     | b. Jumlah LSM Nasional  | Buah   | 10    | 3    | 1    | 1     | 1    |
|     | c. Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah                                      | Buah   | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 6.  | Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)   | Orang  | 220   | 180  | 180  | 180   | 160  |
| 7.  | Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan | Orang  | 300   | 450  | 475  | 1.770 | 650  |



| No. | Uraian   | Satuan | Tahun |      |      |       |       |
|-----|--|--------|-------|------|------|-------|-------|
|     |  |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
| 8.  | Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM  | Kali   | 2     | 4    | 6    | 8     | 6     |
| 9.  | Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara.  | Orang  | 135   | 300  | 180  | 300   | 75    |
| 10. | Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba | Orang  | 400   | 500  | 100  | 540   | 400   |
| 11. | Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM   | Kali   | 2     | 9    | 9    | 19    | 15    |
| 12. | Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu   | %      | 85    | 71,6 | 71,6 | 80,37 | 77,47 |
| 13. | Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara                | Orang  | 135   | 300  | 185  | 300   | 300   |
| 14. | Terpeliharanya konduktivitas wilayah melalui kerjasama Kominda                                       | Kali   | 12    | 12   | 12   | 12    | 12    |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Konsumsi Rumah Tangga perkapita

Konsumsi Rumah Tangga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya penambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan



jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.

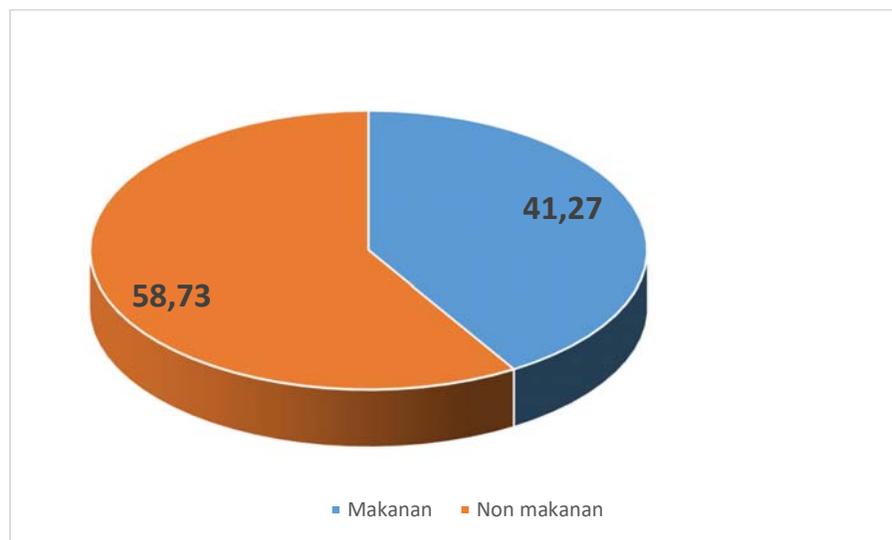
**Tabel 2.53.**  
**Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Blora**  
**Tahun 2017-2019**

| No. | Uraian                             | 2017          | 2018       | 2019       |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1.  | Total Pengeluaran RT ADHB (Rupiah) | 12.229.797,14 | 15.775.120 | 16.894.337 |
| 2.  | Jumlah RT                          | 245.080       | 245.080    | 246.955    |
| 3.  | Rasio                              | 0,020         | 0,016      | 0,015      |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2019 sebesar 2,61 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 1,86. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan pendapatan rumah tangga.

Bila dilihat dari pembentuknya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua, konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan total penjumlahan dari seluruh konsumsi masyarakat di suatu wilayah, jika dibagi dengan jumlah penduduk akan merupakan konsumsi rata-rata perkapita.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2020

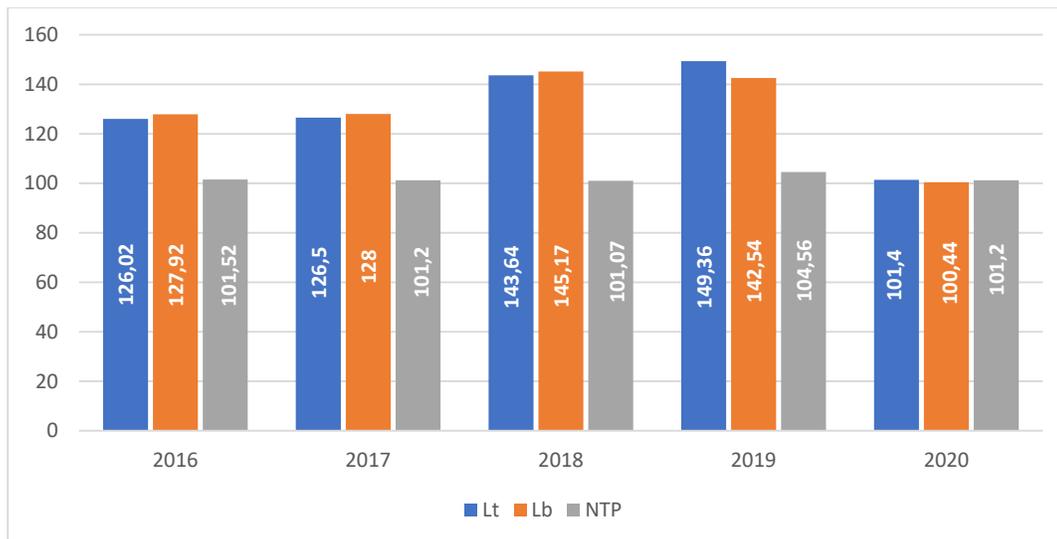
**Gambar 2.9 Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2019**



Pada tahun 2019, konsumsi non makanan menunjukkan peran yang dominan, yaitu sebesar 58,73 %, sedangkan konsumsi makanan perannya tercatat sebesar 41,27 %.

## 2. Nilai Tukar Petani

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2020 masih menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

**Gambar 2.10 Perbandingan Lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah / infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi prasarana transportasi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri dan fasilitas lainnya.

Kabupaten Blora dilalui oleh jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-Blora-Cepu sepanjang 38,48 km yang ditetapkan sejak tahun 2016. Dengan adanya status jalan nasional ini membuat akses transportasi semakin ramai dan volume maupun jenis kendaraan yang lewat semakin banyak.



Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu saat ini sedang dalam proses pengembangan menjadi Bandara umum. Pembangunan bandara ini diharapkan akan melayani kebutuhan transportasi udara dari 5 wilayah yaitu Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Grobogan. Ke depannya Kabupaten Blora akan semakin berkembang dengan adanya bandara. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mendapatkan multiplier effect dari keberadaan bandara.

Kabupaten Blora juga mempunyai pusat pendidikan migas yaitu PUSDIKLAT MIGAS dan PEM AKAMIGAS di Kecamatan Cepu yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Banyaknya warga Indonesia maupun ekspatriat yang mengikuti pendidikan juga mendorong pertumbuhan sektor lain diantaranya sektor perdagangan dan jasa.

Pada tahun 2016-2017 telah dibangun jaringan air bersih atau Proyek SPAM Strategis dari Bengawan Solo ke Blora Kota melewati 5 kecamatan. Diharapkan sebanyak 8.000 SR baru akan tersambung dengan pembangunan fasilitas ini.

Dalam rangka menyongsong era industrialisasi, disediakan sebanyak 13 lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Blora baik yang sudah ada kegiatan industri maupun yang belum ada kegiatan industri. Hal ini juga untuk menampung melonjaknya kebutuhan pembangunan industri menyusul ditetapkannya Kabupaten Rembang sebagai zona industri di Jawa Tengah.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah lainnya, diantaranya bank, perusahaan asuransi, hotel dan penginapan, restoran, ketersediaan listrik, sarana telekomunikasi dan destinasi wisata. Keberadaan infrastruktur tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.3 Fokus Iklim Investasi**

Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.54.**  
**Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi**  
**Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator                        | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                  |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah kasus kriminalitas        | Kasus  | 278   | 278  | 172  | 155  | 135  |
| 2.  | Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun | Kasus  | 6     | 6    | 2    | 2    | 2    |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar 0,42 ini berarti bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung 42 penduduk non produktif. Perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55.**  
**Angka Kergantungan Penduduk Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Penduduk Usia 0-14 th (Jiwa) | Penduduk Usia > 65 th (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Penduduk Usia 15 - 64 th (Jiwa) | Rasio Ketergantungan |
|-------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 2016  | 252.278                      | 64.748                       | 317.026       | 667.822                         | 0,47                 |
| 2017  | 264.261                      | 63.050                       | 327.331       | 663.890                         | 0,49                 |
| 2018  | 203.820                      | 92.856                       | 296.676       | 701.156                         | 0,42                 |
| 2019  | 177.014                      | 81.419                       | 258.433       | 647.947                         | 0,40                 |
| 2020  | 181.719                      | 96.232                       | 277.951       | 660.863                         | 0,42                 |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020



## 2.5 Analisis Capaian Hasil Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

### 2.5.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok Daerah

Capaian indikator sasaran pokok pembangunan yang merepresentasikan pencapaian masyarakat yang sejahtera Kabupaten Blora hingga tahun 2020 sebagai berikut:

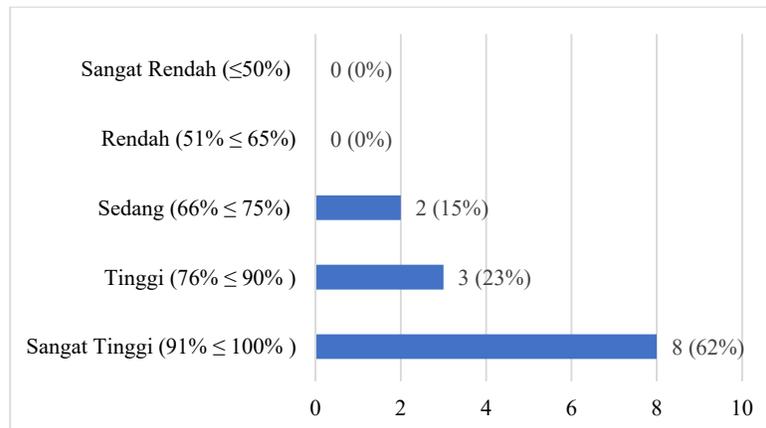
**Tabel 2.56**  
**Capaian Indikator Sasaran Makro Kabupaten Blora 2016-2020**

| Indikator Kinerja                    | Satuan  | Target Akhir RPJMD | Target RPJMD 2020                 | Capaian |       |       |       |        | Proporsi Capaian         | Status |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|
|                                      |         |                    |                                   | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |                          |        |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi               | %       | 5,4-5,7            | 5,3-5,4 (2020)<br>5,0 -5,3 (2019) | 23,53   | 5,84  | 4,40  | 4,05  | 1**    | 76% (2019)<br>19% (2020) | ▲      |
| 2. Inflasi                           | %       | 3-7                | 3-7                               | 2,14    | 2,98  | 2,78  | 2,62  | 2,62   | 87%                      | ▲      |
| 3. Indeks Gini                       | Skala   | 0,38               | 0,38                              | 0,39    | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39*  | 97%                      | ▲      |
| 4. Indeks ketimpangan williamson     | Skala   | 0,300-0,400        | 0,300-0,400                       | 0,42    | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415* | 72%                      |        |
| 5. Persentase penduduk miskin        | %       | 9-10               | 10-10,5                           | 13,33   | 13,04 | 11,90 | 11,32 | 11,96  | 88%                      | ▲      |
| 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Indeks  | 68,84              | 68,34                             | 66,61   | 67,52 | 67,95 | 68,65 | 68,84  | 101%                     | ●      |
| 7. Angka Usia Harapan Lama Sekolah   | Tahun   | 12,85              | 12,65                             | 11,92   | 12,13 | 12,14 | 12,19 | 12,2   | 96%                      | ▲      |
| 8. Rata-rata lama sekolah            | Tahun   | 6,6                | 6,5                               | 6,18    | 6,45  | 6,46  | 6,58  | 6,83   | 105%                     | ●      |
| 9. Usia Harapan Hidup                | Tahun   | 74,00              | 73,98                             | 73,88   | 73,99 | 74,12 | 74,23 | 74,41  | 101%                     | ●      |
| 10. Pengeluaran Riil Perkapita       | Ribu Rp | 9.485              | 9.354                             | 8.846   | 9.065 | 9.385 | 9.795 | 9.571  | 102%                     | ●      |
| 11. Tingkat pengangguran terbuka     | %       | 3,4                | 3,5                               | 4,00    | 2,85  | 3,26  | 3,82  | 4,89   | 72%                      | ▲      |
| 12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | Skor    | 82,77              | 83,32                             | 83      | 83,55 | 83,79 | 83,96 | 84,05* | 101%                     | ●      |
| 13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Skor    | 68,84              | 68,59                             | 70      | 70,52 | 70,72 | 65,59 | 66,05* | 96%                      | ▲      |

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2021

\*\*\*) = angka sangat sementara; \*) Angka Sementara

Interpretasi hasil capaian kinerja sasaran makro Kabupaten Blora 2016-2021 dengan basis data capaian kinerja tahun 2020, disajikan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 2.11 Capaian Sasaran Makro Daerah**



**Gambar 2.12 Pencapaian Sasaran Makro Daerah**

Berdasar Gambar diatas secara umum kinerja pencapaian sasaran makro pembangunan kabupaten Blora berada pada interval kategori sangat tinggi (sebesar 62%), disusul kategori kategori tinggi (23%), dan sedang (15%). Namun demikian jika dibandingkan dengan penetapan target daerah basis tahun 2020 sebagian besar (62%) masih di bawah target (belum tercapai).

Faktor penyebab belum tercapainya sasaran makro daerah dikarenakan terjadinya bencana wabah virus Covid-19. Bencana ini meningkatkan pengangguran karena pemutusan hubungan kerja atau penurunan produksi. Senada dengan kondisi nasional dan provinsi Jawa Tengah, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (- 3,93 %), demikian pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora juga diproyeksikan mengalami penurunan sehingga menjadi 1%. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan lemahnya konsumsi atau daya beli masyarakat karena penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu, aktivitas investasi dan produksi masyarakat juga terganggu sebagai akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Meskipun kondisi berat namun



Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) berupaya menjaga tingkat inflasi tetap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat, seperti melakukan operasi pasar, pada beberapa komoditas pertanian dilakukan gerakan membeli produk pertanian bagi OPD di lingkungan Pemda Kab Blora.

Angka kemiskinan kabupaten Blora masih belum mencapai target, meskipun pemerintah Kabupaten Blora sudah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, misalnya: pembangunan RTLH, dan program satu OPD untuk intervensi 5 Penduduk miskin. Bencana pandemi Covid-19 memperberat kondisi bertambahnya penduduk terjatuh dalam kerentanan kemiskinan.

Di sisi lain, faktor pendorong keberhasilan pencapaian target indikator IPM dan IPG, dimana didalamnya ada komponen indikator rata-rata lama sekolah, disebabkan oleh implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Blora terkait pendidikan. Kebijakan yang dimaksud adalah pembangunan/pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboratorium sekolah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pembangunan perpustakaan daerah dan sekolah, penambahan buku bacaan perpustakaan. Hal ini terkonfirmasi dengan data capaian kinerja dari OPD yang menangani urusan pendidikan dan urusan Perpustakaan yang sesuai target RPJMD.

Komponen lain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah unsur kesehatan, yang diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup, juga mencapai target RPJMD. Intervensi kebijakan pendorong pencapaian target ini antara lain: (i) Pembangunan/rehabilitasi Rumah Sakit dan Puskesmas, (ii) Peningkatan mutu layanan kesehatan dengan mendorong peningkatan akreditasi RS dan Puskesmas.

Target (IPG) telah tercapai. Salah satu komponen IPG adalah pengeluaran riil per kapita. Indikator pengeluaran per kapita juga sudah mencapai target. Intervensi pemerintah Blora yang mendukung pencapaian ini antara Pembangunan sarana prasarana secara berkelanjutan seperti: revitalisasi/ Pemindehan pasar, pembangunan/rehabilitasi jalan, pembangunan waduk/embung, serta penyediaan layanan terpadu satu pintu dalam mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha. IPG memenuhi target RPJMD berarti kabupaten Blora sudah peduli pada pengarusutamaan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum mencapai target, meskipun partisipasi perempuan di sektor publik baik sebagai anggota dewan maupun pada posisi struktural di Pemerintahan sudah baik. Diduga



komponen perolehan pendapatan perempuan sebagai salah satu variabel pembentuk IDG masih rendah.

### 2.5.1 Pencapaian Kinerja Program

#### 1. Capaian Kinerja Misi 1: Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Misi ini mengampu 3 tujuan dan 7 sasaran daerah, dengan 20 Program. Pencapaian kinerja Misi 1 disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.57**  
**Capaian Kinerja Misi 1**

| No  | Program   | Indikator  | OPD   | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | status         |
|---|---|--|-------|-------|-------------------|-------|------|-------|------|------|----------------|----------------|
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara</b>                                      |   |  |       |       |                   |       |      |       |      |      |                |                |
| <b>Sasaran 1. Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi</b>                  |   |  |       |       |                   |       |      |       |      |      |                |                |
| 1.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            | 1.1 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional                                      | BKD   | Org   | 1.115             | 150   | 243  | 190   | 258  | 149  | 990 (89%)      | Belum Tercapai |
| 2.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                   | 2.1 Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi   | BKD   | %     | 55,48             | 48,81 | 40   | 40,35 | 69,8 | 76   | 76 (137%)      | Melampaui      |
|   |   | 2.2 Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian | BKD   | %     | 100               | 100   | 100  | 100   | 100  | 100  | 100 (100%)     | Tercapai       |
|   |   | 2.3 Jumlah ASN yang pindah tugas dan Pensiun (Satuan orang)  | BKD   | Org   | 2.850             | 1.294 | 642  | 674   | 735  | 708  | 4.053 (142%)   | Melampaui      |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik</b>                                       |   |  |       |       |                   |       |      |       |      |      |                |                |
| <b>Sasaran 2. Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik</b> |   |  |       |       |                   |       |      |       |      |      |                |                |
| 3.  | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 3.1 Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)                 | Setda | Nilai | B                 | CC    | CC   | B     | B    | B    | 100%           | Tercapai       |
| 4.  | Program Ketatalaks  | 4.1 Persentase   | Setda | %     | 100               | 100   | 100  | 100   | 100  | 100  | 100%           |                |



| No   | Program  | Indikator  | OPD         | Sat | Target RPJMD 2020    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | status         |
|--|--|--|-------------|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
|  | Perangkat Daerah                                       | perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik"                            |             |     |                      |       |       |       |       |       |                | Tercapai       |
| 5.   | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi   | 5.1 Persentase organisasi perangkat daerah dengan skor nilai pelayanan publik "baik" | Setda       | %   | 80                   | 40    | 90    | 65    | 50    | 80    | 80 (100%)      | Tercapai       |
| 6.   | Program Kelembagaan Perangkat Daerah                   | 6.1 Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya  | Setda       | org | 24                   | 27    | 24    | 24    | 20    | 24    | 24 (100%)      | Tercapai       |
| 7.   | Program Peningkatan Aparatur Daerah                    | 7.1 Persentase aparat sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja    | Setda       | %   | 80                   | 40    | 60    | 70    | 60    | 90    | 90 (113%)      | Melampaui      |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik</b>  |  |  |             |     |                      |       |       |       |       |       |                |                |
| <b>Sasaran 3 Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil</b>          |  |  |             |     |                      |       |       |       |       |       |                |                |
| 8.   | Penataan administrasi kependudukan                     | 8.1 Rasio penduduk berKTP  | Disdukcapil | %   | 98                   | 95,62 | 92,74 | 98,78 | 96,62 | 96,92 | 96,92 (99%)    | Belum Tercapai |
|  |  | 8.2 Rasio bayi berakte kelahiran   | Disdukcapil | %   | 99                   | 97,81 | 99,2  | 99,41 | 99,72 | 99,53 | 99,53 (101%)   | Melampaui      |
|  |  | 8.3 Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun                                  | Disdukcapil | %   | 97                   | 95,69 | 99,2  | 98,17 | 96,95 | 97,57 | 97,57 (101%)   | Melampaui      |
|  |  | 8.4 Rasio pasangan berakte nikah   | Disdukcapil | %   | 100                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 (100%)     | Tercapai       |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik</b>  |  |  |             |     |                      |       |       |       |       |       |                |                |
| <b>Sasaran 4. Meningkatkan kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi</b> |  |  |             |     |                      |       |       |       |       |       |                |                |
| 9.   | Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah | 9.1 Persentase Keterisian data SIPD  | Diskominfo  | %   | 90 Atau 85 (Th 2019) | 75    | 80    | 85    | 85    | 0     | Refocusing     | Belum Tercapai |
| 10.  | Program Sandi dan Telekomun                            | 10.1 Persentase informasi pemerintah daerah  | Diskominfo  | %   | 100                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 (100%)     |                |

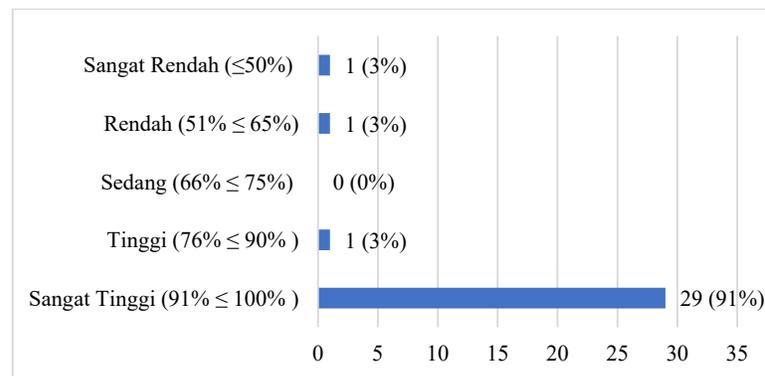


| No  | Program   | Indikator  | OPD          | Sat    | Target RPJMD 2020 | 2016    | 2017   | 2018    | 2019    | 2020          | % Capaian 2020 | status        |
|---|---|--|--------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------------|----------------|---------------|
|   |   | melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait |              |        |                   |         |        |         |         |               |                | Tercapai<br>  |
| 11.   | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah         | 11.1 Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik                        | DPK          | %      | 100               | 100     | 100    | 100     | 100     | 100           | 100%           | Tercapai<br>  |
| 11.2 Jumlah Arsip Non Tekstual yang Terolah dengan baik   |   | DPK  | buah         | 600    | 0                 | 100     | 500    | 550     | 2,216   | 3,366 (561%)  | Melampaui<br>  |               |
| 11.3 Jumlah Arsip/Dokumen yang telah di duplikat dalam bentuk informatika                           |   | DPK  | buah         | 24,000 | 0                 | 43      | 7,000  | 9,987   | 28,987  | 56,017 (233%) | Melampaui<br>  |               |
| 12.   | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 12.1 Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik                         | DPK          | Buah   | 153,000           | 178,000 | 28,800 | 134,000 | 118,000 | 136,815       | 595,615 (389%) | Melampaui<br> |
| 13.   | Program Transmigrasi Regional                                     | 13.1 Jumlah Transmigran diberangkatkan   | Disperinaker | KK     | 20                | 4       | 5      | 7       | 12      | 12            | 40 (200%)      | Melampaui<br> |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik</b> |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |
| <b>Sasaran 5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK</b>                            |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |
| 14.   | Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa        | 14.1 Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet                    | Diskominfo   | buah   | 46                | 28      | 42     | 42      | 43      | 44            | 100%           | Melampaui<br> |
| 14.2 Persentase SKPD telah memiliki website (%)   |   | Diskominfo   | %            | 100    | 60,87             | 86,36   | 86,36  | 97,72   | 100     | 100%          | Tercapai<br>   |               |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik</b> |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |
| <b>Sasaran 6. Meningkatnya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.</b>    |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |
| 16.   | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah    | 16.1 Tersusunnya Ranperda  | Setwan       | %      | 15                | 3       | 3      | 3       | 3       | 3             | 15 (100%)      | Tercapai<br>  |
| <b>Tujuan 3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</b> |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |
| <b>Sasaran 7. Meningkatnya pendapatan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>           |   |  |              |        |                   |         |        |         |         |               |                |               |

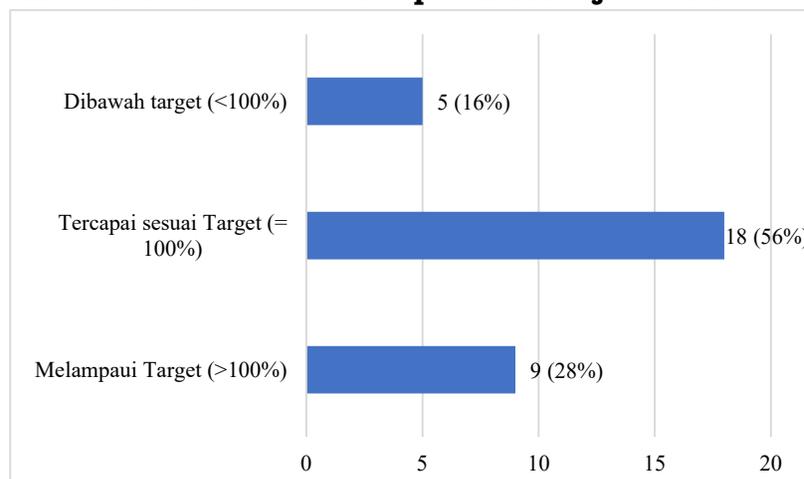


| No  | Program   | Indikator  | OPD             | Sat        | Target RPJMD 2020 | 2016      | 2017      | 2018                   | 2019      | 2020      | % Capaian 2020 | status         |
|-----|---|--|-----------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | 17.1<br>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah                       | BPPKAD          | Status     | WTP               | WT<br>P   | WT<br>P   | WT<br>P                | WTP       | WTP       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 17.2<br>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun          | BPPKAD          | Perse<br>n | 2.92              | 30.<br>1  | 18.<br>04 | 11.<br>08              | 13.<br>7  | -8.28     | -<br>(362%)    |                |
|     |   | 17.3<br>Opini Pemeriksa atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)   | BPPKAD          | Statu<br>s | WTP               | WT<br>P   | WT<br>P   | WT<br>P                | WTP       | WTP       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 17.4<br>Prosentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat                 | BPPKAD          | Perse<br>n | 70.42             | 27.0<br>3 | 29.1<br>6 | 31.9<br>9              | 35.2<br>6 | 40.7<br>3 | 57.8%          | Belum Tercapai |
| 18. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 18.1<br>Opini BPK  | Inspektora<br>t | WTP        | WTP               | WT<br>P   | WT<br>P   | WT<br>P                | WTP       | WTP       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 18.2<br>Tingkat maturitas SPIP   | Inspektora<br>t | Level      | Level 3           | 2.<br>2   | 2.<br>8   | 3<br>dengan<br>catatan | 3         | 3         | 100 %          | Tercapai       |
|     |   | 18.3<br>Persentase Jumlah Temuan Internal Eksternal yang ditindaklanjuti | Inspektora<br>t | Perse<br>n | 100%              | 100       | 100       | 100                    | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
| 19. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              | 19.1<br>Tingkat kapabilitas APIP   | Inspektora<br>t | Level      | Level 3           | 2         | 3         | 3                      | 3         | 3         | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 19.2<br>Terselesaikan-nya penanganan pengaduan masyarakat                | Inspektora<br>t | Perse<br>n | 100%              | 100       | 100       | 100                    | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |

Interpretasi hasil capaian kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021 dengan basis data capaian kinerja tahun 2020, disajikan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 2.13 Interval Pencapaian Kinerja Misi 1**



**Gambar 2.14 Status Pencapaian Kinerja Misi 1**

Dari aspek Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 1, tercapai sangat tinggi (93%). Hal ini bermakna Pemerintah yang Efektif Bersih KKN, dan Demokratis, Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di kabupaten Blora selama 2016-2021 sudah tercapai dengan sangat baik. Dari aspek perbandingan target daerah sebesar 84,4% sudah mencapai target hingga melampaui target. Indikator kinerja pendukung pencapaian misi 1 yang belum mencapai target sebesar 15,6%.

Beberapa indikator yang tercatat kategori rendah atau belum mencapai target daerah beserta alasan penyebabnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah ASN (89%) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional oleh OPD Badan Kepegawaian Daerah, diintervensi dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, belum mencapai target. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan diklat fungsional.



2. Rasio penduduk berKTP (96,92%) oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diintervensi dengan Program Penataan administrasi kependudukan. Belum tercapainya target ini karena ada pengaruh keaktifan masyarakat untuk mengurus KTP. Kondisi pandemi tahun 2020 berkontribusi pada ketidaktercapaian target. Namun demikian di akhir tahun 2021 kemungkinan besar bisa tercapai sesuai target RPJMD, karena sudah ditargetkan dalam RKPD 2021.
3. Indikator Persentase Keterisian data SIPD oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, diintervensi melalui Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah, belum mencapai target di tahun 2020 (85%). Faktor penyebabnya adalah:
  - (1) Kurangnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan hingga integrasi monitoring evaluasi data;
  - (2) Keterbatasan SDM yang ditugaskan secara khusus dengan keahlian Analisis data dan informasi serta admin media
  - (3) Adanya Kejadian Luar Biasa (Covid-19) yang menyebabkan anggaran harus di refocusing dan diutamakan untuk penanggulangan Covid-19, kesehatan dan pemulihan ekonomi;
  - (3) Gangguan data hilang karena gangguan *cyber attack*.
4. Persentase Keterisian data SIPD oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, diintervensi melalui Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah, belum mencapai target di tahun 2020 karena terkena refocusing anggaran masa pandemi dan data hilang karena gangguan *cyber attack*.
5. Sementara itu Indikator Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa tercatat belum mencapai target, namun sebenarnya secara riil sudah mencapai target, karena ada pergeseran jumlah OPD. Pada awal RPJMD (2016) ada 46 OPD, namun sejak tahun 2017 ada penggabungan OPD sehingga menjadi 44 OPD
6. Indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai target dikarenakan (1) Pandemi covid : tempat hiburan harus tutup dan kebijakan pembatasan sosial daerah sehingga pendapatan hotel dan resto turun.
7. Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat masih di bawah target dikarenakan dokumen administratif asal usul tanah yang sulit ditemukan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama.



## 2. Capaian Kinerja Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan

Misi ini mengampu 3 Tujuan, 9 sasaran daerah, dicapai melalui 22 Program dengan pencapaian kinerja sebagai berikut.

**Tabel 2.58**  
**Capaian Kinerja Misi 2**

| No   | Program   | Indikator   | OPD       | Sat         | Target RPJMD 2020 | 2016       | 2017   | 2018     | 2019     | 2020       | % Capaian 2020 | Status    |
|--|---|---|-----------|-------------|-------------------|------------|--------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.</b>        |   |   |           |             |                   |            |        |          |          |            |                |           |
| <b>Sasaran 1. Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri.</b>              |   |   |           |             |                   |            |        |          |          |            |                |           |
| 1.   | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial                                 | 1.1 Jumlah Industri   | Disperina | Unit        | 11,825            | 11,802     | 11,905 | 11,998   | 11,990   | 12,085     | 102%           | Melampaui |
| 2.   | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                                      | 2.1 Prosentase industri yang telah menerapkan teknologi       | Disperina | %           | 47                | 30         | 35     | 35       | 43       | 47         | 100%           | Tercapai  |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.</b>        |   |   |           |             |                   |            |        |          |          |            |                |           |
| <b>Sasaran 2. Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil menengah</b> |   |   |           |             |                   |            |        |          |          |            |                |           |
| 3.   | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi                                     | 3.1. Presentase koperasi sehat                                | Disdagkop | %           | 32                | 31,60      | 43,72  | 44,23    | 43,07    | 37,54      | 117,3%         | Melampaui |
| 4.   | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah | 4.1. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)             | Disdagkop | Unit        | 6,800             | 6.092      | 6.729  | 6.760    | 6.950    | 13.224     | 194,5%         | Melampaui |
| 5.   | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                      | 5.1. Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk (perajin) | Disperina | Pengrajin   | 15                | 4          | 17     | 29       | 37       | 37         | 246,7%         | Melampaui |
|  |   | 5.2. Nilai produksi industri                                  | Disperina | Ribu Rupiah | 1.322.659.364     | 1.205.988. | 1.251. | 1.325.90 | 1.448.70 | 1.363.496. | 103,1%         |           |



| No  | Program  | Indikator   | OPD            | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | % Capaian 2020 | Status         |
|---|--|---|----------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|   |  |   |                |       |                   | 337       | 145.586   | 2.442     | 2.171     | 923       |                | Melampaui      |
|   |  | 5.3. Cakupan kelompok pengrajin yang dibina (IKM)                               | Disperinaker   | Klp   | 978               | 328       | 761       | 871       | 951       | 1121      | 114.6%         | Melampaui      |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.</b> |  |   |                |       |                   |           |           |           |           |           |                |                |
| <b>Sasaran 3. Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional</b>            |  |   |                |       |                   |           |           |           |           |           |                |                |
| 6.  | Program peningkatan dan pengembangan ekspor            | 6.1. Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora                            | Disdagkop UMKM | US \$ | 2.913.544         | 2.932.953 | 4.043.714 | 3.856.673 | 3.550.258 | 2.622.492 | 90%            | Belum Tercapai |
| 7.  | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 7.1. Presentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan | Disdagkop UMKM | %     | 60                | 26,67     | 43,75     | 56,25     | 73,33     | 80,00     | 133.3%         | Melampaui      |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.</b> |  |   |                |       |                   |           |           |           |           |           |                |                |
| <b>Sasaran 4. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah</b>      |  |   |                |       |                   |           |           |           |           |           |                |                |
| 8.  | Program pengembangan pemasaran pariwisata              | 8.1. Jumlah Kunjungan wisata  | Dinporabudpar  | Orang | 250,000           |           | 201.635   | 363.730   | 378.750   | 221.949   | 88.8%          | Belum Tercapai |
|   |  | 8.2. Presentase obyek wisata yang dipromosikan                                  | Dinporabudpar  | %     | 90                |           | 80        | 133       | 87        | 100       | 111%           | Melampaui      |
| 9.  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata              | 9.1. Jumlah obyek wisata unggulan   | Dinporabudpar  | buah  | 22                |           | 13        | 22        | 22        | 22        | 100%           | Tercapai       |
|   |  | 9.2. Jumlah pokdarwis aktif   | Dinporabudpar  | buah  | 6                 |           | 8         | 7         | 15        | 15        | 250%           | Melampaui      |
|   |  | 9.3. Jumlah restoran  | Dinporabudpar  | buah  | 95                |           | 75        | 75        | 85        | 95        | 100%           | Tercapai       |



| No   | Program   | Indikator   | OPD             | Sat     | Target RPJMD 2020 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | % Capaian 2020 | Status         |
|--|---|---|-----------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
|  |   | 9.4. Jumlah penginapan/hotel  | Dinpo rabud par | buah    | 40                |         | 34      | 33      | 33      | 40      | 100 %          | Tercapai       |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan</b> |   |   |                 |         |                   |         |         |         |         |         |                |                |
| <b>Sasaran 5. Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak</b>                          |   |   |                 |         |                   |         |         |         |         |         |                |                |
| 10.  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan      | 10.1 Produktivitas Pangan Utama (Padi Sawah)                          | Disper tatangan | Ton/ ha | 51.61             | 56,7    | 56,58   | 86,07   | 86,8    | 87,2    | 168 %          | Melampaui      |
|  |   | 10.2 Produksi Padi sawah  | Disper tatangan | ton     | 417,373           | 474.806 | 504.711 | 542.076 | 556.438 | 517.835 | 123 %          | Melampaui      |
|  |   | 10.3 Produksi Padi ladang   | Disper tatangan | ton     | 36,264            | 56.985  | 95.608  | 92.859  | 102.937 | 81.839  | 225 %          | Melampaui      |
|  |   | 10.4 Produksi Jagung  | Disper tatangan | ton     | 273,966           | 353.866 | 350.905 | 392.017 | 345.865 | 430.269 | 155 %          | Melampaui      |
| 11.  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan           | 11.1 Populasi Sapi Potong   | Disn kikan      | ekor    | 257.394           | 222.718 | 231.045 | 239.339 | 247.914 | 267.193 | 103.8 %        | Melampaui      |
|  |   | 11.2 Kambing  | Disn kikan      | Eko r   | 143.323           | 130.473 | 133.582 | 136.004 | 139.034 | 143.622 | 100.2 %        | Melampaui      |
| 12.  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  | 12.1. Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit | Disn kikan      | eko r   | 12,000            | 4.825   | 5.723   | 4.796   | 6.077   | 0       | 178.5 %        | Melampaui      |
| 13.  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 13.1. Jumlah promosi pemasaran hasil peternakan                       | Disn kikan      | keg     | 3                 | 2       | 2       | 2       | 2       | -       | 66.6 %         | Belum Tercapai |



| No  | Program  | Indikator  | OPD        | Sat      | Target RPJMD 2020 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | % Capaian 2020 | Status         |
|---|--|--|------------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
|   |  | unggulan daerah  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan.</b> |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| <b>Sasaran 6. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya</b>  |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| 14.   | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                          | 14.1. Produksi perikanan budidaya                                  | Disnakan   | Kg       | 435               | 180,64 | 348,50 | 211,05 | 312,65 | 258,38 | 59.4 %         | Belum Tercapai |
|   |  | 14.2. Tingkat cakupan bina kelompok budidaya ikan                  | Disnakan   | kelompok | 61                | 37     | 33     | 55     | 58     | 61     | 100 %          | Tercapai       |
| 15.   | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                           | 15.1. Produksi perikanan tangkap                                   | Disnakan   | Ton      | 298               | 280,23 | 162,48 | 263,55 | 350,86 | 171,03 | 61%            | Belum Tercapai |
| 16.   | Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 16.1 Tingkat konsumsi ikan penduduk                                | Disnakan   | %        | 10,5              | 15,62  | 17,62  | 20,14  | 25,00  | 13,76  | 131 %          | Melampaui      |
|   |  | 16.2 Jumlah produksi hasil olahan ikan                             | Disnakan   | Ton      | 960               | 27.001 | 612,18 | 785,23 | 790,52 | 554,51 | 57.8 %         | Belum Tercapai |
| <b>Tujuan 2. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan</b>  |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| <b>Sasaran 7. Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat</b>   |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| 17.   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                             | 17.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                | Disperatan | Angka    | 67.4              | 79,4   | 70,5   | 84,6   | 85,1   | 90,5   | 134 %          | Melampaui      |
| <b>Tujuan 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup</b>  |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| <b>Sasaran 8. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.</b>                       |  |  |            |          |                   |        |        |        |        |        |                |                |
| 18.   | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan         | 18.1 Standart IKLH Kabupaten Blora                                 | DLH        | %        | 69.46             | 63.75  | 66.46  | 71.67  | 74.63  | 70.25  | 101.1%         | Melampaui      |
|   |  | 18.2 Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan | DLH        | %        | 100               | 100    | 85     | 100    | 100    |        | 0              | Belum          |

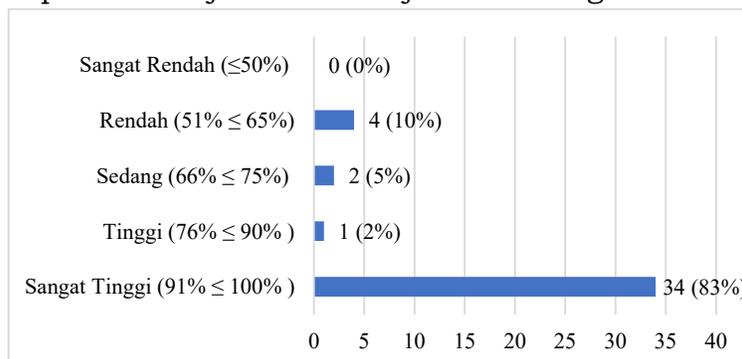


| No  | Program   | Indikator  | OPD | Sat  | Target<br>RPJMD<br>2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | %<br>Capaian<br>2020 | Status    |
|-----|---|--|-----|------|-------------------------|------|------|------|------|------|----------------------|-----------|
|     |   |  |     |      |                         |      |      |      |      |      |                      |           |
|     |   | administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup   |     |      |                         |      |      |      |      |      |                      | Tercapai  |
|     |   | 18.3 Rasio capaian pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan  | DLH | %    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 %                | Tercapai  |
|     |   | 18.4 Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | DLH | %    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 %                | Tercapai  |
| 19. | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam        | 19.1 Rasio cakupan penghijauan di wilayah sumber mata air  | DLH | %    | 1.4                     | 0.06 | 0.08 | 1    | 1.2  | 1.4  | 100 %                | Tercapai  |
|     |   | 19.2 Prosentase jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang berhasil dimanfaatkan                                     | DLH | %    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 %                | Tercapai  |
|     |   | 19.3 Prosentase desa yang menerapkan program desa berwawasan lingkungan  | DLH | %    | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 %                | Tercapai  |
| 20. | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH | 20.1 Institusi pendidikan yang menerapkan program sekolah berwawasan lingkungan/ sekolah adiwiyata                             | DLH | buah | 7                       | 1    | 0    | 18   | 17   | 40   | 571 %                | Melampaui |

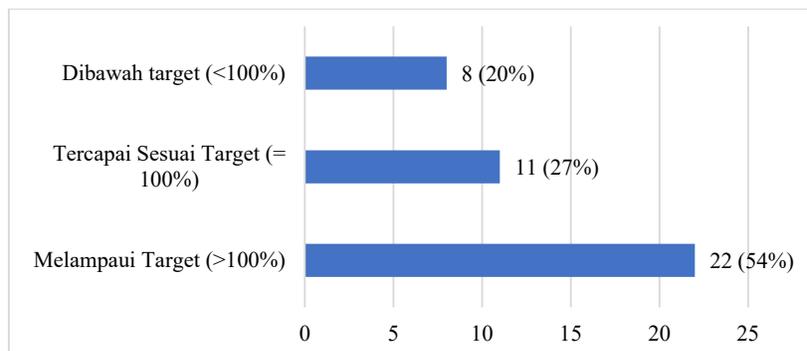


| No  | Program                                 | Indikator  | OPD | Sat          | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | 2020                     | % Capaian 2020 | Status         |
|---|---|--|-----|--------------|-------------------|------|-------|------|-------|--------------------------|----------------|----------------|
|   |   |  |     |              |                   |      |       |      |       |                          |                |                |
| 21.   | Program Pengendalian Peningkatan Polusi | 21.1 Prosentase jumlah instalasi pengolahan limbah cair yang berhasil dimanfaatkan | DLH | %            | 100               | 100  | 100   | 85   | 100   | 100                      | 100            | Tercapai       |
|   |   | 21.2 Pemantauan uji kualitas udara   | DLH | Titik sampel | 30                | 12   | 8     | 8    | 33    | 47                       | 156.7%         | Melampaui      |
|   |   | 21.3 Pemantauan uji kualitas limbah cair   | DLH | Titik sampel | 50                | 19   | 15    | 10   | 46    | 33                       | 66%            | Belum Tercapai |
| <b>Tujuan 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup</b>                  |   |  |     |              |                   |      |       |      |       |                          |                |                |
| <b>Sasaran 9. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan</b> |   |  |     |              |                   |      |       |      |       |                          |                |                |
| 22.   | Program Kinerja Pengelolaan Persampahan | 22.1. <u>Persentase sampah yang terangkut</u>                                      | DLH | %            | 86,39             | NA   | 87.92 | 73   | 80    | 48,53 (kab)<br>89 (kota) | 56.2%          | Belum Tercapai |
|   |   | 22.2. Persentase pengurangan sampah di perkotaan                                   | DLH | %            | 25                |      | 18    | 20   | 20.47 | 30                       | 120%           | Melampaui      |

Ringkasan Capaian kinerja Misi 2 disajikan dalam gambar bawah ini.



**Gambar 2.15 Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 2**



**Gambar 2.16 Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 2**

Secara umum sebesar 83% pada interval sangat tinggi. Dari aspek pencapaian target sebesar 81% telah tercapai 100% dan lebih dari 100%. Hal ini bermakna selama tahun 2016-2020 pemerintah kabupaten Blora berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Pada misi 2 ada, masih ada komponen yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Komponen yang belum tercapai dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah Kunjungan wisata pada tahun 2020 baru tercapai 88.8% dikarenakan masa pandemi dan kebijakan pembatasan fisik untuk mengurangi resiko penyebaran Covi-19.
2. Jumlah produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan produksi hasil pengolahan ikan di Kabupaten Blora tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2020, sehingga belum mencapai target RPJMD. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menghentikan produksinya akibat pandemi covid 19.
3. Indikator Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai karena tahun 2020 terkena refocusing sehingga tidak ada anggaran kegiatan monev. Namun sebelum tahun 2020 target kinerja indikator ini sudah tercapai
4. Indikator pemantauan uji kualitas limbah cair belum mencapai target (66%) dikarenakan beberapa sumber masalah, antara lain:
  - a. Sumber pencemaran dari luar daerah yang mengalir ke wilayah kabupaten Blora;
  - b. Sumber pencemaran teroneksi dengan bidang urusan OPDD lain yang di luar kewenangan DLH, misalnya penegakan Peraturan



Daerah terkait limbah perusahaan dan limbah rumah tangga;  
pembuangan sampah di sungai.

5. Indikator Persentase sampah yang terangkut belum mencapai target (56,2% disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
  - a. Kekurangan sarana dan tukang pengangkutan sampah
  - b. Belum memiliki Sanitaryland belum standar (sanitary landfill) karena biayanya sangat mahal. Saat ini baru memiliki controled land fill. Masa pandemi menyebabkan bantuan dari APBN yang semula sudah mulai dikonstruksi untuk pembuatan *sanitary landfill* terhenti karena refocusing anggaran.

### 3. Capaian Kinerja Misi 3: Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi

Misi 3 mengampu 2 Tujuan, 2 sasaran daerah, dan 6 Program, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut

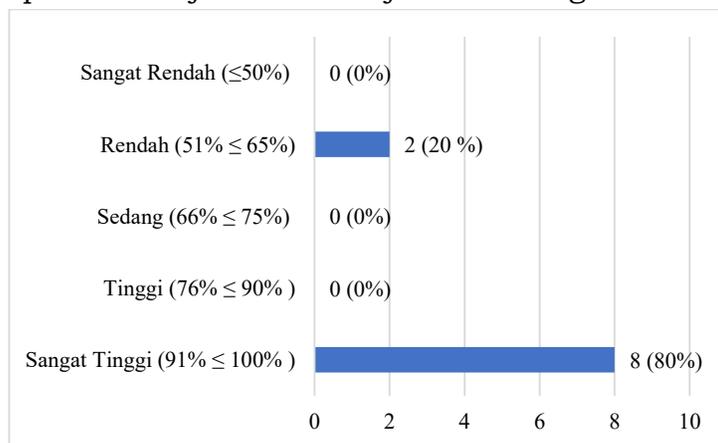
**Tabel 2.59**  
**Capaian Kinerja Misi 3**

| No   | Program   | Indikator   | OPD          | Sat      | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | status   |
|--|---|---|--------------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|--|
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kabupaten Blora</b> |   |   |              |          |                   |      |      |      |      |      |                |  |
| <b>Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi</b>          |   |   |              |          |                   |      |      |      |      |      |                |  |
| 1.   | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi         | 1.1 Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)  | DMPTSP       | Rp. (M)  | 4,7               | 3,8  | 3,2  | 4,7  | 5,3  | 6,9  | 146.8 %        | <br>Melampaui |
| 2.   | Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | 2.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)  | DMPTSP       | investor | 300               | 624  | 125  | 349  | 598  | 854  | 284.7%         | <br>Melampaui |
| 3.   | Program Pelayanan Dan Perizinan Terpadu                     | 3.1 Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu | DMPTSP       | %        | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100%           | <br>Tercapai  |
| <b>Tujuan 2: Menurunkan pengangguran</b>                                       |   |   |              |          |                   |      |      |      |      |      |                |  |
| <b>Sasaran 2: Meningkatnya penempatan tenaga kerja</b>                         |   |   |              |          |                   |      |      |      |      |      |                |  |
| 4.   | Program peningkatan Kesempatan Kerja                        | 4.1 Tingkat pengangguran terbuka (%)  | Disperinaker | %        | 3.50              |      | 2,85 | 3,26 | 3,89 | 4,89 | 60.3%          | <br>Belum     |

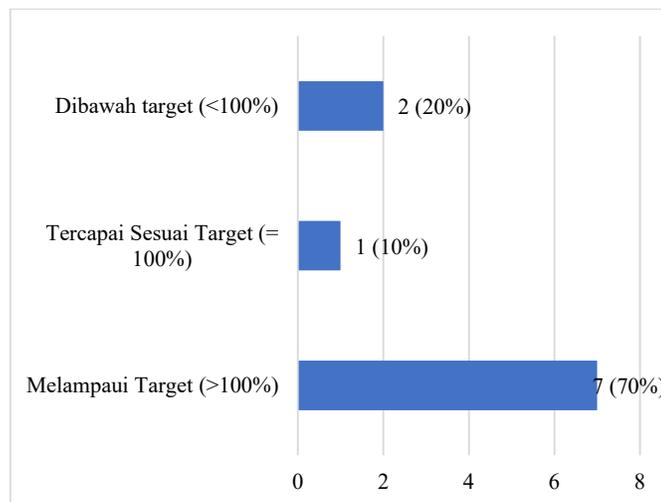


| No | Program  | Indikator   | OPD          | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | status         |
|----|--|---|--------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
|    |  |   |              |       |                   |       |       |       |       |       |                | Tercapai       |
| 5. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja    | 5.1 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (%)                                       | Disperinaker | %     | 78                | 45,19 | 49,29 | 14,82 | 57,08 | 44,25 | 56.7%          | Belum Tercapai |
|    |  | 5.2 Persentase tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)           | Disperinaker | %     | 9                 | 3,59  | 3,21  | 6,75  | 6,95  | 11,32 | 125.8%         | Melampaui      |
|    |  | 5.3 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)                | Disperinaker | %     | 10                | 3,92  | 3,21  | 4,91  | 7,56  | 10,4  | 104%           | Melampaui      |
| 6. | Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan | 6.1 Angka keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)                                 | Disperinaker | %     | 91                | 83    | 85    | 85    | 92    | 93    | 102.2%         | Melampaui      |
|    |  | 6.2 Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)               | Disperinaker | %     | 50                | 100   | 100   | 100   | 100   | 75    | 150%           | Melampaui      |
|    |  | 6.3 Buruh/ pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan (orang) | Disperinaker | orang | 9000              | 6500  | 6500  | 6676  | 9480  | 12085 | 134.3%         | Melampaui      |

Ringkasan Capaian kinerja Misi 3 disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.17 Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 3



**Gambar 2.18 Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 3**

Kinerja Misi 3 Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi sangat baik, dengan capaian **80%** sesuai dan melampaui target.

Hal yang perlu ditingkatkan adalah Tingkat pengangguran terbuka (60.3%) dan Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (56.7%). Kedua indikator tersebut ditangani oleh Dinas Perindustrian dan tenaga kerja melalui Program peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja. Perlambatan pencapaian kinerja indikator ini berkelindan kondisi pandemi. Dampak pandemi membuat banyak industri mengurangi tenaga kerja hingga menutup usaha. Akibatnya, lowongan kerja menjadi menyempit dan menambah pengangguran.

**4. Capaian Kinerja Misi 4: Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.**

Misi 4 mengampu 4 Tujuan dengan 8 sasaran daerah, dieksekusi melalui 45 program. Pencapaian kinerja Misi 4 sebagai berikut:



**Tabel 2.60**  
**Capaian Kinerja Misi 4**

| No   | Program                                  | Indikator   | OPD    | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   | % Capaian 2020 | Status             |
|--|--|---|--------|-------|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------|--------------------|
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</b>  |  |   |        |       |                   |        |        |       |        |        |                |                    |
| <b>Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan</b> |  |   |        |       |                   |        |        |       |        |        |                |                    |
| 1.   | <b>Program Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>  | 1.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI  | Disdik | Angka | 100               | 100    | 100    | 100   | 100    | 100    | 100%           | Tercapai<br>       |
|  |  | 1.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                      | Disdik | Angka | 100               | 100    | 99,8   | 100   | 100    | 100    | 100%           | Tercapai<br>       |
| 2.   | <b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b> | 2.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 0-6 Tahun               | Disdik | Angka | 51.58             | 33,61  | 58,31  | 42,74 | 46,39  | 46,39  | 89.9%          | Belum Tercapai<br> |
|  |  | 2.2 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 3-6 Tahun               | Disdik | Angka | 77.41             | 54,23  | 52,66  | 53,67 | 73,98  | 62,10  | 80.2%          | Belum Tercapai<br> |
|  |  | 2.3 Presentase lembaga pendidikan Anak usia dini yang terakreditasi   | Disdik | %     | 62.31             |        | 2,68   | 12,9  | 32,4   | 32,4   | 52%            | Belum Tercapai<br> |
| 3.   | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>     | 3.1 Anak lulus sekolah yang melanjutkan dan terlayani paket A,B dan C | Disdik | Angka | 53.7              |        | 35     |       | 38,16  | 38,16  | 71.1%          | Belum Tercapai<br> |
|  |  | 3.2 Prosentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi.      | Disdik | %     | 61.31             |        | 54,56  |       | 22,65  | 39,13  | 63.8%          | Belum Tercapai<br> |
| 4.   | <b>Program Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>  | 4.1 APK SD//MI  | Disdik | Angka | 109               | 111,96 | 103,61 | 111,5 | 107,20 | 102,62 | 94.1%          | Belum Tercapai<br> |
|  |  | 4.2 APM SD / MI   | Disdik | angka | 92.8              | 94,9   | 94,26  | 96,1  | 94,47  | 95,20  | 102.6%         | Melampaui<br>      |
|  |  | 4.3 APK SMP / MTs   | Disdik | angka | 104.85            | 84,36  | 104,34 | 102,6 | 100,71 | 102,62 | 97.9%          | Belum Tercapai<br> |
|  |  | 4.4 APM SMP / Mts   | Disdik | angka | 73.5              | 82,1   | 85,38  | 76,5  | 74,46  | 80,01  | 108.9%         | Melampaui<br>      |
|  |  | 4.5 APtS SD / MI  | Disdik | angka | 0.25              | 0      | 0,07   |       | 0,02   | 0,04   | 184%           | Melampaui<br>      |



| No   | Program  | Indikator   | OPD    | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | % Capaian 2020 | Status         |
|--|--|---|--------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|----------------|
|  |  |   |        |       |                   |         |         |         |         |        |                | Melampaui      |
|  |  | 4.6<br>Angka Putus Sekolah SMP / Mts                        | Disdik | angka | 0.15              | 25,2    | 0,3     |         | 0,08    | 0,09   | 140%           | Melampaui      |
|  |  | 4.7<br>Rata-Rata Nilai UN SD / MI                           | Disdik | Nilai | 6.85              |         | 7,78    |         | 7,01    | 7,01   | 102.3%         | Melampaui      |
|  |  | 4.8<br>Rata-Rata Nilai UN SMP / MTs                         | Disdik | nilai | 6.65              | 52,6    | 48,45   | 51,96   | 5,19    | 5,19   | 78%            | Belum Tercapai |
|  |  | 4.9<br>Presentase Ruang Kelas SD / MI Dalam kondisi Baik    | Disdik | %     | 88                | 96      | 88,91   |         | 90,46   | 92,10  | 104.7%         | Melampaui      |
|  |  | 4.10<br>Presentase Ruang Kelas SMP / MTs Dalam kondisi Baik | Disdik | %     | 83                | 92      | 88,4    |         | 82,4    | 93,86  | 113.1%         | Melampaui      |
| 5.   | <b>Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b> | 5.1<br>Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4              | Disdik | %     | 82                |         | 71      |         | 62      | 62     | 75.6%          | Belum Tercapai |
|  |  | 5.2<br>Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4           | Disdik | %     | 91.75             | 93,2    | 94,79   | 95,8    | 95,5    | 87,15  | 95%            | Belum Tercapai |
|  |  | 5.3<br>Guru SMP /MTs yang memenuhi kualifikasi S1 / D4      | Disdik | %     | 98.75             | 93,2    | 95,98   | 96,7    | 96,5    | 90,76  | 91.9%          | Belum Tercapai |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</b>        |  |   |        |       |                   |         |         |         |         |        |                |                |
| <b>Sasaran 2: Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah</b> |  |   |        |       |                   |         |         |         |         |        |                |                |
| 6.   | <b>Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>       | 6.1.<br>Jumlah pengunjung perpustakaan                      | DPK    | orang | 72,000            | 118,098 | 128,328 | 134,778 | 123,913 | 92,935 | 129.1%         | Melampaui      |
|  |  | 6.2.<br>Jumlah Perpustakaan sekolah & Desa yang terbina     | DPK    | buah  | 235               | 180     | 210     | 263     | 310     | 320    | 136.2%         | Melampaui      |
|  |  | 6.3.<br>Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan   | DPK    | buah  | 33,451            | 22,755  | 26,088  | 28,838  | 31,322  | 32,022 | 95.7%          | Belum Tercapai |
| 7  | Program penyelamatan dan   | 7.1.<br>Jumlah bahan pustaka yang                           | DPK    | buah  | 950               | 720     | 720     | 726     | 952     | 998    | 105.1%         |                |



| No  | Program   | Indikator   | OPD    | Sat                         | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | Status    |
|---|---|---|--------|-----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
|   | pelestarian koleksi pustaka                             | sudah diselamatkan/dilestarikan                             |        |                             |                   |       |       |       |       |       |                | Melampaui |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</b>                                     |   |   |        |                             |                   |       |       |       |       |       |                |           |
| <b>Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk</b> |   |   |        |                             |                   |       |       |       |       |       |                |           |
| 8   | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 8.1. Angka Kematian Bayi (AKB)                              | Dinkes | Per 1000 kelahiran Hidup    | 11,5              | 14,27 | 14,70 | 13,12 | 12,09 | 11,5  | 100%           | Tercapai  |
|   |   | 8.2. Angka Kematian Balita                                  | Dinkes | Per 1000 kelahiran Hidup    | 13,00             | 16,76 | 15,67 | 14,6  | 13,15 | 13,00 | 100%           | Tercapai  |
|   |   | 8.3. Angka Kematian Ibu                                     | Dinkes | Per 100.000 kelahiran Hidup | 10                | 22    | 15    | 13    | 11    | 10    | 100%           | Tercapai  |
| 9   | Program perbaikan gizi masyarakat                       | 9.1. Presentase Gizi Buruk                                  | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%           | Tercapai  |
| 10  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                      | 10.1 Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil             | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 97,45 | 100   | 100   | 100   | 100%           | Tercapai  |
| 11  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                       | 11.1 Cakupan pelayanan persalinan sesuai standart           | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 99,99 | 100   | 100   | 100   | 100%           | Tercapai  |
|   |   | 11.2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%           | Tercapai  |
|   |   | 11.3 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan                    | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 100   | 85    | 67,03 | 100   | 100%           | Tercapai  |
|   |   | 11.4 Cakupan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar | Dinkes | %                           | 100               | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100            | 100%      |
| 12  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                   | 12.1 Persentase rumah tangga yang memenuhi kualitas         | Dinkes | %                           | 71                | 71    | 100   | 73    | 100   | 75    | 105.6%         |           |



| No  | Program   | Indikator  | OPD        | Sat               | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019      | 2020      | % Capaian 2020 | Status         |
|-----|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|     |   | kesehatan lingkungan   |            |                   |                   |       |       |       |           |           |                | Melampaui      |
|     |   | 12.2 Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan                                | Dinkes     | %                 | 70                | 91    | 70    | 92    | 54,90     | 93        | 132.9%         | Melampaui      |
| 13  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                | 13.1 Cakupan penemuan kasus TB   | Dinkes     | %                 | 91                | 70    | 70    | 100   | 100       | 100       | 109.9%         | Melampaui      |
|     |   | 13.2 Cakupan Desa dengan UCI   | Dinkes     | %                 | 100               | 100   | 100   | 100   | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 13.3 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV            | Dinkes     | %                 | 100               | 100   | 100   | 100   | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
| 14  | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  | 14.1 Prosentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi | Dinkes     | %                 | 100               | 100   | 100   | 100   | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 14.2 Persentase prasarana puskesmas yang sesuai standart                       | Dinkes     | %                 | 100               | 25    | 100   | 100   | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 14.3 Persentase sarana puskesmas yang sesuai standart                          | Dinkes     | %                 | 100               | 60    | 90    | 80    | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
| 15  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan   | 15.1 Persentase ketersediaan obat di Puskesmas                                 | Dinkes     | %                 | 100               | 60    | 90    | 80    | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 15.2 Persentase ketersediaan vaksin di Puskesmas                               | Dinkes     | %                 | 100               | 100   | 42,9  | 100   | 100       | 100       | 100%           | Tercapai       |
| 16. | Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit | 16.1 Status Akreditasi RSUD Blora versi KARS                                   | RSUD Blora | Status Akreditasi | Paripurna         | Madya | Madya | Madya | Paripurna | Paripurna | 100%           | Tercapai       |
|     |   | 16.2 Prosentase kepuasan pasien (%)  | RSUD Blora | %                 | 85                | 72    | 73,77 | 79    | 78,94     | 76,74     | 90.3%          | Belum Tercapai |



| No | Program   | Indikator  | OPD      | Sat       | Target RPJMD 2020 | 2016      | 2017      | 2018              | 2019      | 2020      | % Capaian 2020 | Status         |
|----|---|--|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 17 | Program peningkatan pelayanan BLUD                        | 17.1 Status Akreditasi Rumah Sakit Versi KARS                        | RSU Cepu | Status    | Paripurna         | Ma<br>dya | Uta<br>ma | Ut<br>a<br>m<br>a | Uta<br>ma | Uta<br>ma | 75%            | Belum Tercapai |
|    |   | 17.2 BOR (60-85%)  |          | range     | <b>63.49</b>      | 65,13     | 65,65     | 66,79             | 65,87     | 62,76     | 100%           | Tercapai       |
|    |   | 17.3 LOS (6-9 Hri)   |          | range     | 4.46              | 3,91      | 4,72      | 4,49              | 4,26      | 6,04      | 135%           | Tercapai       |
|    |   | 17.4 TOI (1-3 hari)  |          | range     | 2.53              | 2,1       | 2,47      | 2,23              | 2,79      | 3,59      | (-153%)        | Belum Tercapai |
|    |   | 17.5 BTO Rentang: 40-50 kali   |          | range     | 63.50             | 60,91     | 50,75     | 54,32             | 52,24     | 37,91     | 59%            | Belum Tercapai |
|    |   | 17.6 NDR 25/1000 (standar 0,025)                                     |          |           | 0.02              | 1,4       | 1,25      | 1,56              | 1,18      | 2,07      | (-103.5%)      | Belum Tercapai |
|    |   | 17.7 Jumlah Kunjungan Rawat Inap                                     |          | Kunjungan | 10,531            | 9,675     | 9,835     | 11,321            | 10,365    | 6,358     | 60.4%          | Belum Tercapai |
|    |   | 17.8 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan                                    |          | Kunjungan | 27,257            | 61,461    | 64,343    | 74,058            | 67,804    | 25,891    | 95%            | Belum Tercapai |
|    |   | 17.9 Tingkat Kepuasan Pasien   |          | %         | 78.58             | 72,6      | 76,02     | 77,55             | 78,32     | 80,04     | 101.9%         | Melampaui      |
| 18 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah | 18.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit | RSU Cepu | %         | 100%              | 100%      | 100%      | 100%              | 100%      | 100%      | 100%           | Tercapai       |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No  | Program   | Indikator   | OPD               | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020       | % Capaian 2020 | Status             |
|---|---|---|-------------------|-----|-------------------|-------|-------|-------|------|------------|----------------|--------------------|
|   | Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata               |   |                   |     |                   |       |       |       |      |            |                |                    |
| 19  | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD                      | 19.1 Cakupan pengobatan bagi pasien Rumah Sakit kurang mampu  | RSU Cepu          | %   | 100               | 76,75 | 67,86 | 13,52 | 0    | Masuk BPJS | 100 %          | <br>Tercapai       |
| 20  | Program Keluarga Berencana  | 20.1 Cakupan peserta KB aktif   | Dinas Dalduk & KB | %   | 65                | 81,16 | 83,19 | 78,92 | 69   | 71         | 109.2 %        | <br>Tercapai       |
|   |   | 20.2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet)                              | Dinas Dalduk & KB | %   | 6.2               | 7,9   | 7,1   | 9,8   | 9,91 | 9,7        | 43.5%          | <br>Belum Tercapai |
|   |   | 20.3 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)     | Dinas Dalduk & KB | %   | 82.5              | 78,83 | 83,19 | 78,92 | 69   | 74,33      | 90.1%          | <br>Belum Tercapai |
| 21  | Program Kesehatan Reproduksi Remaja   | 21.1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun                                   | Dinas Dalduk & KB | %   | 6.8               | 1,2   | 1,27  | 1,52  | 1,6  | 1,6        | 176.5 %        | <br>Melampaui      |
| 22  | Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | 22.1 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Dinas Dalduk & KB | %   | 80                | 65,8  | 65    | 79,53 | 76   | 80         | 100%           | <br>Tercapai       |
|   |   | 22.2 Jumlah kelompok Masyarakat Peduli KB   | Dinas Dalduk & KB | Klp | 6                 | 6     | 6     | 6     | 6    | 6          | 6              | 100%               |
| 23  | Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU                    | 23.1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  | Dinas Dalduk & KB | %   | 55                | 55    | 67,35 | 78,47 | 75   | 76         | 138.2 %        | <br>Melampaui      |
| <b>Tujuan 2: Meningkatkan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b> |   |   |                   |     |                   |       |       |       |      |            |                |                    |
| Sasaran 4: Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)            |   |   |                   |     |                   |       |       |       |      |            |                |                    |
| 24  | Program   | 24.1  | Dinsos            | %   | 0.30              | 0.15  | 0.37  |       |      |            | 123.3          |                    |



| No | Program  | Indikator  | OPD        | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 (basis 2017) | Status  |
|----|--|--|------------|-----|-------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------|---|
|    | pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)         | Persentase penurunan Jumlah PMKS   | P3A        |     |                   |       |       |       |      |      | % (basis 2017)              | Melampaui   |
| 25 | Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 25.1 Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                      | Dinsos P3A | %   | 0.70              | 0.55  | 0.18  | 0.98  | 0.11 | 5.41 | 772.9%                      | <br>Melampaui        |
| 26 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma   | 26.1 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                  | Dinsos P3A | %   | 4.79              | 10,78 | 10,07 | 42,58 | 10   | 2    | 41.8%                       | <br>Belum Tercapai |
| 27 | Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  | 27.1 Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                  | Dinsos P3A | %   | 80                | 80    | 100   | 100   | 100  | 100  | 125%                        | <br>Melampaui      |
| 28 | Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo  | 28.1 Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                            | Dinsos P3A | %   | 100               | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  | 100%                        | <br>Tercapai       |
| 29 | Program pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial  | 29.1 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Dinsos P3A | %   | 100               | 100   | 100   | 100   | 75   | 100  | 100%                        | <br>Tercapai       |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No   | Program  | Indikator  | OPD       | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | % Capaian 2020 | Status    |
|--|--|--|-----------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 30   | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial            | 30.1<br>Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | BPBD      | %     | 100               | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100%           | Tercapai  |
|  |  | 30.2<br>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  |           | %     | 100               | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100%           | Tercapai  |
| 31   | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam     | 31.1<br>Jumlah relawan   | BPBD      | org   | 150 orang         | 150 orang | 160 orang | 320 orang | 440 orang | 445 orang | 296.7 %        | Melampaui |
|  |  | 31.2<br>Tingkat waktu tanggap (respon time rata ) daerah layanan   | BPBD      | menit | 60 menit          | 60 menit  | 60 menit  | 60 menit  | 60 menit  | 60 menit  | 100%           | Tercapai  |
|  |  | 31.3<br>Persentase aparatur Penanggulangan Bencana yang memenuhi standar kualifikasi                       | BPBD      | %     | 85%               | 85 %      | 100 %     | 100 %     | 100%      | 100%      | 117.6 %        | Melampaui |
|  |  | 31.4<br>Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora  | BPBD      | %     | 97%               | 97 %      | 100%      | 100%      | 100%      | 100 %     | 103.1 %        | Melampaui |
| <b>Tujuan 3: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta keberdayaan masyarakat</b>                               |  |  |           |       |                   |           |           |           |           |           |                |           |
| Sasaran 5: Meningkatnya ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi |  |  |           |       |                   |           |           |           |           |           |                |           |
| 32   | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                      | 32.1<br>Jumlah BUMDes  | Dinas PMD | buah  | 45                | 0         | 19        | 70        | 175       | 233       | 518%           | Melampaui |
| 33   | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan | 33.1<br>Prosentase Aparatur Desa/Kelurahan yang telah dilatih manajemen pengelolaan Desa/Kelurahan         | Dinas PMD | %     | 100%              |           | 100%      | 100%      | 100%      | 100 %     | 100%           | Tercapai  |
| 34   | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                    | 34.1<br>Posyandu Aktif   | Dinas PMD | %     | 100%              |           | 100%      | 100%      | 100%      | 100 %     | 100%           | Tercapai  |
|  |  | 34.2<br>Jumlah Usaha Ekonomi Produktif perempuan yang terlatih   | Dinas PMD | buah  | 85                |           | 6         | 75        | 80        | 85        | 100%           | Tercapai  |



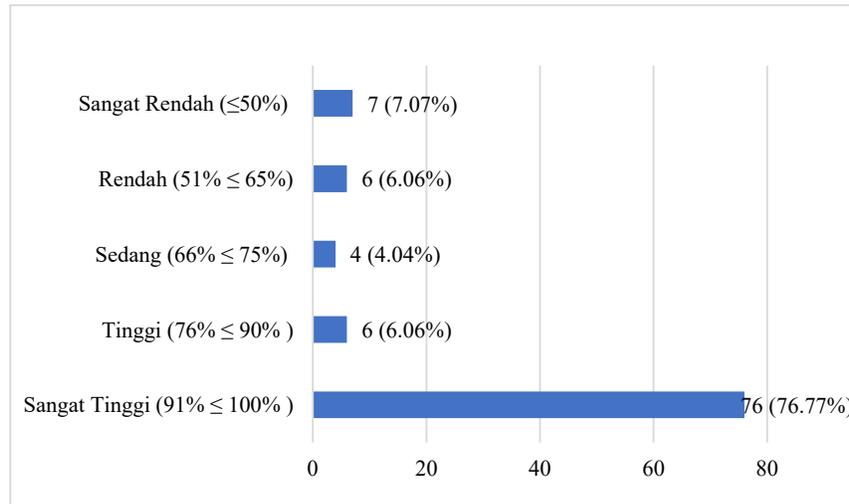
| No  | Program  | Indikator   | OPD            | Sat    | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | Status         |
|---|--|---|----------------|--------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| 35  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                 | 35.1 Jumlah Posyantek Aktif   | Dinas PMD      | buah   | 1                 |      | 1    | 1    | 7    | 0    | 0%             | Belum Tercapai |
| 36  | Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat Dan Sosial Budaya              | 36.1 Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan                                       | Dinas PMD      | %      | 100%              |      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%           | Tercapai       |
| 37  | Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan        | 37.1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan              | Dinsos P3A     | %      | 45                |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 222.2%         | Melampaui      |
|   |  | 37.2 Kasus kekerasan terhadap perempuan   | Dinsos P3A     | Kasus  | 0                 |      | 25   | 20   | 38   | 14   | 5%             | Belum Tercapai |
| 38  | Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak        | 38.1 Persentase Focal point aktif   | Dinsos P3A     | %      | 87.5              |      | 35   | 60   | 41   | 60   | 68.6%          | Belum Tercapai |
|   |  | 38.2 Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan | Dinsos P3A     | Klp    | 8                 |      | 4    | 5    | 4    | 5    | 62.5%          | Belum Tercapai |
| 39  | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan | 39.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah   | Dinsos P3A     | %      | 9                 |      | 6    | 49   | 5    | 5    | 55.6%          | Belum Tercapai |
|   |  | 39.2 Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD       | Dinsos P3A     | %      | 45                |      | 20   | 90   | 90   | 90   | 200%           | Melampaui      |
| Tujuan 4: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta apresiasi seni dan budaya daerah |  |   |                |        |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| Sasaran 7: Meningkatnya kegiatan pemuda dan olahraga  |  |   |                |        |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| 40  | Program Peningkatan peran serta kepemudaan                           | 40.1 Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh  | Dinpora budpar | medali | 94                | NA   | 164  | 135  | 45   | 0    | 366%           | Melampaui      |
|   |  | 40.2 Jumlah organisasi pemuda yang memiliki legalitas   | Dinpor abudpar | buah   | 56                | NA   | 53   | 54   | 35   | 45   | 333.9%         | Melampaui      |



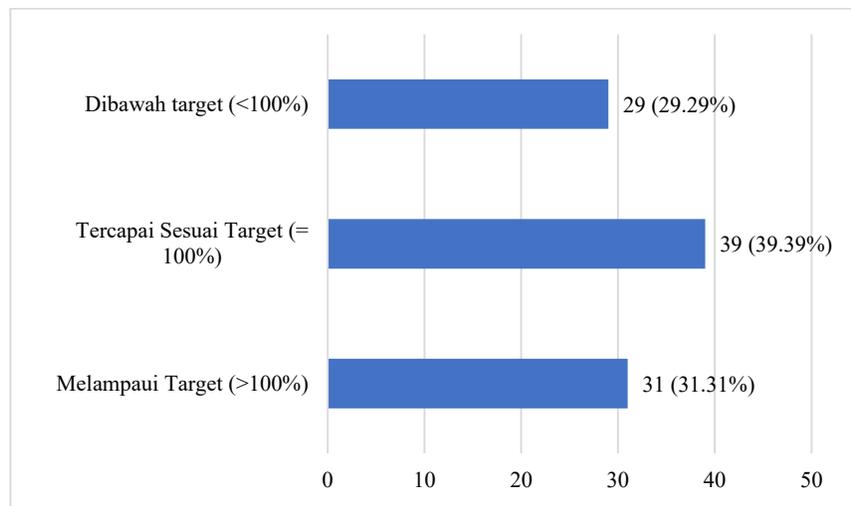
| No   | Program   | Indikator   | OPD             | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | Status         |
|--|---|---|-----------------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|  |   | organisasi dari pemerintah  |                 |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
|  |   | 40.3 Jumlah pemuda berprestasi (Paskibra, lomba TUBB)               | Dinpora budpar  | Orang | 99                | NA   | 120  | 99   | 95   | 0    | 317.2%         | Melampaui      |
| 41   | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 41.1 Jumlah Pemuda yang mampu berwirausaha                          | Dinpo rabud par | orang | 180               | NA   | 160  | 170  | 35   | 0    | 202.8%         | Melampaui      |
| 42   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                             | 42.1 Gelanggang olahraga  | Dinpo rabud par | buah  | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 100%           | Tercapai       |
|  |   | 42.2 Lapangan Olahraga  |                 | buah  | 765               | 750  | 755  | 760  | 765  | 770  | 100.7%         | Melampaui      |
| <b>Tujuan 4: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta apresiasi seni dan budaya daerah</b> |   |   |                 |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| <b>Sasaran 8: Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah</b>                    |   |   |                 |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| 43   | Program pengelolaan kekayaan budaya   | 43.1 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan        | Dinpo rabud pa  | %     | 40                |      | 30   | 30   | 32,5 | 35   | 87.5%          | Belum Tercapai |
| 44   | Program Pengembangan Nilai Budaya   | 44.1 Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Dinpo rabud pa  | keg   | 3                 |      | 4    | 3    | 3    | 0    | 0%             | Belum Tercapai |
| 45   | Program pengelolaan keragaman budaya  | 45.1 Cakupan kajian seni  | Dinpo rabud pa  | %     | 91                |      | 90   | 91   | 91   | 0    | 100%           | Tercapai       |
|  |   | 45.2 Cakupan fasilitas seni   | Dinpo rabud pa  | %     | 78                |      | 75   | 78   | 78   | 0    | 100%           | Tercapai       |
|  |   | 45.3 Cakupan gelar seni   | Dinpo rabud pa  | %     | 100               |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100%           | Tercapai       |
|  |   | 45.4 Cakupan sumber daya manusia kesenian                           | Dinpo rabud pa  | %     | 90                |      | 100  | 85   | 90   | 0    | 100%           | Tercapai       |



Ringkasan Capaian kinerja Misi 4 disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.19** Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 4



**Gambar 2.20** Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 4

Capaian kinerja Misi 4 sebesar 76.77% berpredikat sangat tinggi, dan 70,1% mencapai target. Hal ini berarti selama tahun 2016-2021 Upaya pencapaian kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal sudah baik. Beberapa indikator yang belum tercapai di tahun 2020 masih memungkinkan terpenuhi karena sudah termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021.



Beberapa indikator dari misi 4 yang belum tercapai sebagai berikut.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (89,9%). Hambatan yang ditemui adalah sinkronisasi data, untuk anak-nak yang bersekolah di luar wilayah Blora tidak dapat tercatat, sehingga berpengaruh pada akurasi data
2. Lembaga pendidikan Anak usia dini yang terakreditasi (52%), dipengaruhi oleh kesulitan memenuhi persyaratan akreditasi dari aspek ketersediaan guru PAUD yang memenuhi standar.
3. Anak lulus sekolah yang melanjutkan dan terlayani paket A,B dan C (71,1%). Hambatan yang ditemui adalah sinkronisasi data, untuk anak-nak yang bersekolah di luar wilayah Blora tidak dapat tercatat, sehingga berpengaruh pada akurasi data
4. Prosentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi (63,8%). Hambatannya adalah beberapa lembaga yang sudah tidak aktif tidak melaporkan penutupannya sehingga masih tercatat sebagai bilangan pembagi untuk akreditasi. Akibatnya proporsi lembaga terakreditasi menjadi rendah.
5. APK SD//MI (94,1%) dan Rata-Rata Nilai UN SMP / MTs (78%). Faktor pengambatnya adalah sinkronisasi data, karena data atas indikator ini dihitung gabungan dengan MI dan MTs, namun secara kewenangan MI dan MTs di luar otoritas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, tetapi di bawah Kementerian Agama.
6. Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (75,6%). Hambatan pemenuhan indikator ini karena guru-guru PAUD yang lama bukan sarjana dari program studi pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan khusus program studi PAUD masih sedikit.
7. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (95%) dan Guru SMP /MTs yang memenuhi kualifikasi S1 / D4 (91,9%). Penyebab belum tercapainya target diduga karena para guru yang sudah selesai studi dari izin belajar S1 belum mencatatkan ijasah kelulusannya karena belum mengajukan kenaikan pangkat, sehingga tidak tercatat sebagai update data kualifikasi pendidikannya.
8. Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan (95,7%). Hambatan pemenuhan target ini karena adanya refocusing anggaran dampak pandemi.
9. Prosentase kepuasan pasien (90,3%), dalam program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit, oleh RSUD Blora. Hasil survey bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hambatan pencapaiannya diantaranya : prosedur pelayanan dan persyaratan dari BPJS kurang sederhana, kecepatan pelayanan berkurang dikarenakan dalam situasi pandemi.



10. Status Akreditasi Rumah Sakit Versi KARS (masih Utama, belum paripurna), dalam Program peningkatan pelayanan BLUD oleh RSUD Cepu. Faktor penghambatnya adalah kondisi beberapa indikator pelayanan RSUD belum mencapai standar. Antara lain sarana prasarana, kecukupan SDM spesialis belum memenuhi, dan belum ada perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran. Namun saat ini perjanjian kerjasama ini sudah dimiliki untuk pengajuan akreditasi berikutnya.
11. Indikator pelayanan RSUD Cepu yang masih dibawah target. Secara umum karena kelengkapan SDM spesialis dan sarana prasarana RSUD Cepu masih perlu ditingkatkan.
  - a. TOI (3,59 hari dari 1-3 hari), Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Di RSUD Cepu masih di atas 3 hari.
  - b. BTO (masih 37,91 dari Rentang: 40-50 kali atau 59%) dikarenakan pasien yang masuk ke RSUD
  - c. NDR 25/1000 (masih 2,07 dari standar 0,025). Penyebabnya adalah rujukan dari RS lain biasa setelah kondisi pasien kritis, sehingga probabilitas kesembuhan rendah, dan akibatnya NDR tinggi
  - d. Jumlah Kunjungan Rawat Inap (60,4%) dan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (95%) karena pandemi dan kepercayaan masyarakat pada RSUD Cepu masih perlu ditingkatkan. Mulai tahun 2019 tidak ada alokasi khusus anggaran bagi pasien Rumah Sakit kurang mampu, karena sudah dialokasikan ke DKK untuk pembayaran BPJS warga kurang mampu.
12. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet) (43,5%) dan Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern) (90,1%) dari Program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian penduduk dan KB. Hambatan pencapaian target ini adalah adanya penyesuaian target oleh karena penetapan target di awal RPJMD terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu, dampak refocusing anggaran karena pandemi juga mengurangi kemampuan pencapaian target.
13. Indikator Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (41,8%), dikarenakan jumlah yang dinamis dan potensi penafsiran pengukuran indikator pada saat pendataan dapat berbeda-setiap tahun sehingga berdampak pada penghitungan jumlah capaian.
14. Jumlah Posyantek Aktif (0% pada tahun 2020) yang ditangani dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan oleh



Dinas PM tidak tercaai pada tahun 2020 karena refocusing anggaran dan masih ada perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan terkait perihal ukuran pencapaian kinerja Pusyantek menyebabkan data penilaian capaian dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, antara tahun 2016-2017 Posyatek tercapai 1 buah, namun pada tahun 2018 tercapai 7 buah.

15. Indikator Kasus kekerasan terhadap perempuan belum tercapai (5%) karena: (i) penetapan target awal RPJMD terlalu tinggi; (ii) penanganan isu kekerasan terhadap perempuan meibatkan banyak variabel di luar kewenangan Dinas, sehingga keberhasilannya tidak hanya dipengaruhi oleh intervensi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
16. Indikator Persentase Focal point aktif belum tercapai (68,9%) disebabkan oleh belum utuhnya pemahaman tentang peran focal point gender untuk mendorong kebijakan daerah yang respnsif gender. Refocusing anggaran dampak pandemi menambah kurangnya ketercapaian target Focal point aktif.
17. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan belum tercapai (62,5%), hambatannya karena kurnagnya sumberdaya untuk mengaktifkan forum anak, beban sekolah dan kurang minatnya anak pada kegiatan sosial di masyarakat menyebabbbkan target kierja tidak tercapai. Refocusing anggaran dampak pandemi menambah kurangnya ketercapaian target.
18. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah belum mencapai target (55,6%). Penyebabnya adalah pemenuhan persyaratan administrasi dan kecakapan profesi yang harus dipenuhi membuat prosentase perempuan belum bisa meningkat banyak terutama di level pengambil keputusan di eselon jabatan yang tinggi.
19. **Indikator** Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum tercapai (87,5%) dikarenakann kesulitan mengukur hasil karena dinamika perubahan pengukuran di lapangan terkait definisi obyek, dan jumlah obyek. Oleh karena itu direkomendasikan ada perubahan indikator pengukuran kinerja terkait program Pengelolaan kekayaan Budaya
20. Indikator Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah pada tahun 2020 belum tercappai (0%) karena refocusing anggaran untuk penanganan pandmei Covid-19, namun sebenarnya pada tahun 2017-2019 target sudah tercapai.



### 5. Capaian Kinerja Misi 5: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.

Misi 5 mengampu 2 Tujuan, 6 Sasaran Daerah, dan 21 Program dengan pencapaian kinerja sebagai berikut.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Kinerja Misi 5**

| No  | Program  | Indikator  | OPD   | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017   | 2018    | 2019      | 2020     | % Capaian 2020 | status         |
|---|--|--|-------|-----|-------------------|-------|--------|---------|-----------|----------|----------------|----------------|
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur</b>                    |  |  |       |     |                   |       |        |         |           |          |                |                |
| <b>Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan</b>              |  |  |       |     |                   |       |        |         |           |          |                |                |
| 1.  | Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan                                      | 1.1 Persentase Jalan kondisi baik                      | DPUPR | %   | 58.74             | 33,81 | 37,86  | 43,55   | 48,12     | 22,29    | 37.9%          | Belum Tercapai |
|   |  | 1.2 Persentase Jembatan dalam kondisi baik             | DPUPR | %   | 80                |       | 80,77  | 86,08   | 86        | 86,06    | 107.6%         | Melampaui      |
| 2.  | Program pembangunan jalan dan jembatan   | 2.1 Panjang Jalan yang dibangun (m)                    | DPUPR | M   | 244,780           |       | 37.902 | 103.152 | 75.104,03 | 55.494,7 | 111%           | Melampaui      |
|   |  | 2.2 Panjang jembatan yang dibangun (m)                 | DPUPR | m   | 200               |       | 27,7   | 148,1   | 63,10     | 0        | 119.5%         | Melampaui      |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur</b>                    |  |  |       |     |                   |       |        |         |           |          |                |                |
| <b>Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi</b> |  |  |       |     |                   |       |        |         |           |          |                |                |
| 3.  | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya          | 3.1 Panjang saluran drainase dalam kondisi baik        | DPUPR | Km  | 225.6             | 201,5 | 240    | 500     | 560       | 580      | 257.09%        | Melampaui      |
|   |  | 3.2 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik     | DPUPR | %   | 45.03             | 24,0  | 31,50  | 38,18   | 43,51     | 47,81    | 106.17%        | Melampaui      |
| 4.  | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | 4.1 Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian ( | DPUPR | %   | 47.00             | 44,16 | 48,33  | 49,16   | 50,32     | 51,67    | 109.9%         | Melampaui      |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur</b>                    |  |  |       |     |                   |       |        |         |           |          |                |                |



| No   | Program  | Indikator   | OPD          | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | status         |
|--|--|---|--------------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|
| <b>Sasaran 3: Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang</b>       |  |   |              |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| 5.   | Program perencanaan tata ruang                                     | 5.1 Perda RDTR yang ditetapkan  | DPUPR        | Perda | 1                 |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              | Belum Tercapai |
|  |  | 5.2 Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital (%) | DPUPR        | %     | 21                | 56   | 56   | 56   | 56   | 1    | 271.4%         | Melampaui      |
| 6.   | Program pemanfaatan ruang  | 6.1 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB   | DPUPR        | %     | 10                | 0,01 | 0,01 | 5,63 | 3,78 | 0,01 | 94%            | Belum Tercapai |
| 7.   | Program pengendalian pemanfaatan ruang                             | 7.1 Ruang publik yang berubah peruntukannya   | DPUPR        | %     | 0                 |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 100            | Tercapai       |
| <b>Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur</b> |  |   |              |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| <b>Sasaran 4: Meningkatnya pelayanan perhubungan darat</b>         |  |   |              |       |                   |      |      |      |      |      |                |                |
| 8.   | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmagaan             | 8.1 Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik   | DPUPR        | %     | 100               |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100%           | Tercapai       |
| 9.   | Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | 9.1 Prosentase perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL dll) dalam kondisi baik   | Disrumkimhub | %     | 96%               | 75%  | 76%  | 77%  | 78,5 | 80%  | 83.3%          | Belum Tercapai |
| 10.  | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                    | 10.1 Prosentase Prasarana keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik  | Disrumkimhub | %     | 95%               | 85%  | 86%  | 87%  | 89%  | 90%  | 94.7%          | Belum Tercapai |



| No  | Program   | Indikator  | OPD          | Sat      | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | status         |
|---|---|--|--------------|----------|-------------------|------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|
| 11.   | Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan       | 11.1 "Tersedianya halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek."                               | Disrumkimhub | halte    | 15                | 11   | 12    | 14   | 16    | 16    | 106.7%         | Melampaui      |
|   |   | 11.2 Tersedianya Dokumen Informasi Perhubungan   | Disrumkimhub | Dok      | 1                 | 1    | 1     | 1    | 1     | 1     | 100%           | Tercapai       |
| 12.   | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                        | 12.1 Prosentase peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan raya  | Disrumkimhub | %        | 91%               | 82%  | 84%   | 86%  | 90%   | 90%   | 98.9%          | Belum Tercapai |
| 13.   | Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan          | 13.1 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam Kabupaten/Tra yek | Disrumkimhub | terminal | 10                | 6    | 6     | 6    | 6     | 6     | 60%            | Belum Tercapai |
|   |   | 13.2 Jumlah halte terbangun  | Disrumkimhub | halte    | 1                 | 0    | 0     | 2    | 1     | 1     | 400%           | Melampaui      |
| 14.   | Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 14.1 Prosentase Kendaraan yang lulus Uji   | Disrumkimhub | %        | 91%               | 82   | 85    | 90   | 90    | 90    | 98.9%          | Belum Tercapai |
| <b>Tujuan 2: Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan agar masyarakat hidup layak</b> |   |  |              |          |                   |      |       |      |       |       |                |                |
| <b>Sasaran 5: Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.</b>                            |   |  |              |          |                   |      |       |      |       |       |                |                |
| 15.   | Program pengembangan perumahan                                | 15.1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni   | Disrumkimhub | %        | 68%               | 63%  | 63,2% | 64%  | 64,2% | 64,5% | 94.9%          | Belum Tercapai |
| 16.   | Program Lingkungan sehat perumahan                            | 16.1 Persentase berkurangnya permukiman  | Disrumkimhub | %        | 63%               |      | 15%   | 25%  | 25%   | 17%   | 130.2%         | Melampaui      |

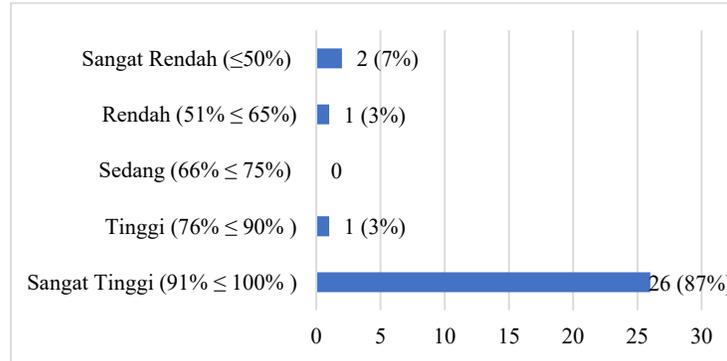


| No  | Program   | Indikator   | OPD            | Sat  | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | % Capaian 2020 | status    |
|---|---|---|----------------|------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
|   |   | kumuh di perkotaan  |                |      |                   |       |       |        |        |        |                | ui        |
|   |   | 16.2 Luas Kawasan Kumuh di Kawasan perkotaan  | Disru mkim hub | %    | 45                | 55    | 51    | 48     | 25     | 18     | 160%           | Melampaui |
|   |   | 16.3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni  | Disru mkim hub | RTLH | 66,547            | 69347 | 68047 | 66.847 | 65.569 | 64.291 | 103.4%         | Melampaui |
| 17.   | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh           | 17.1 Persentase luas bangunan/ gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh | Disru mkim hub | %    | 0,2%              | 0,2%  | 0,2%  | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 100%           | Tercapai  |
| 18.   | Program pengelolaan areal pemakaman                               | 18.1 Jumlah Pemakaman Umum yang terpelihara   | Disru mkim hub | TPU  | 24                | 24    | 24    | 24     | 24     | 24     | 100%           | Tercapai  |
| 19.   | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                     | 19.1 Prosentase Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Perkotaan | Disru mkim hub | %    | 20%               | 8%    | 8%    | 8%     | 8%     | 8%     | 200%           | Melampaui |
| 20.   | Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum                         | 20.1 Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum  | Disru mkim hub | %    | 52,5%             | 47%   | 55%   | 61%    | 63%    | 65%    | 123.8%         | Melampaui |
| <b>Tujuan 2: Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan agar masyarakat hidup layak</b> |   |   |                |      |                   |       |       |        |        |        |                |           |
| <b>Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi</b>                                 |   |   |                |      |                   |       |       |        |        |        |                |           |
| 21.   | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 21.1 Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman                               | Disru mkim hub | %    | 70,05 %           | 65%   | 72%   | 78%    | 85%    | 86%    | 122%           | Melampaui |
|   |   | 21.2 Cakupan Pelayanan Sanitasi   | Disru mkim hub | %    | 97,98 %           | 89,9% | 91%   | 93%    | 95%    | 95,5%  | 97.5%          | Belum     |

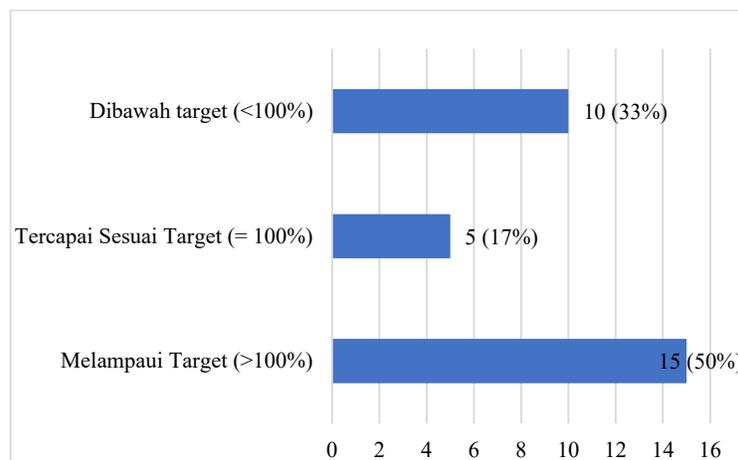


| No | Program | Indikator | OPD | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | status   |
|----|---------|-----------|-----|-----|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|----------|
|    |         |           |     |     |                   |      |      |      |      |      |                | Tercapai |

Ringkasan Capaian kinerja Misi 5 disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.21** Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 5



**Gambar 2.22** Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 5

Capaian kinerja Misi 5 sebesar 87% berpredikat sangat tinggi, dan 67% mencapai target. Hal ini berarti selama tahun 2016-2021 Upaya pencapaian kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal sudah baik. Beberapa indikator yang belum tercapai di tahun 2020 masih memungkinkan terpenuhi karena sudah termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021.



**6. Capaian Kinerja Misi 6: Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*), *pro job, pro growth, pro environment dan pro gender***

Misi ini mengampu 1 Tujuan, 1 Sasaran daerah, dengan 12 program, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.62**  
**Capaian Kinerja Misi 6**

| No   | Program  | Indikator  | OPD     | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | Status         |
|--|--|--|---------|-----|-------------------|------|------|--------|------|------|----------------|----------------|
| <b>Tujuan 1.</b> Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah |  |  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |                |
| <b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan                |  |  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |                |
| 1.   | Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK                                | 1.1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDA            | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 91.74% | 100% | 100% | 100%           | Tercapai       |
| 2.   | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh      | 2.1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 99%  | 99%            | Belum Tercapai |
| 3.   | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar            | 3.1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar       | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 87.54% | 100% | 91%  | 91%            | Belum Tercapai |
| 4.   | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.1 Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 87.38% | 90%  | 97%  | 97%            | Belum Tercapai |
| 5.   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                   |  | Bappeda | %   | 91.8%             | 79%  | 93%  | 86.81% | 85%  | 100% | 108.9%         | Melampaui      |
|  |  | 5.1 Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD   |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |                |
|  |  | 5.2 Kesesuaian Progran RKPd dengan Program RPJMD   |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |                |

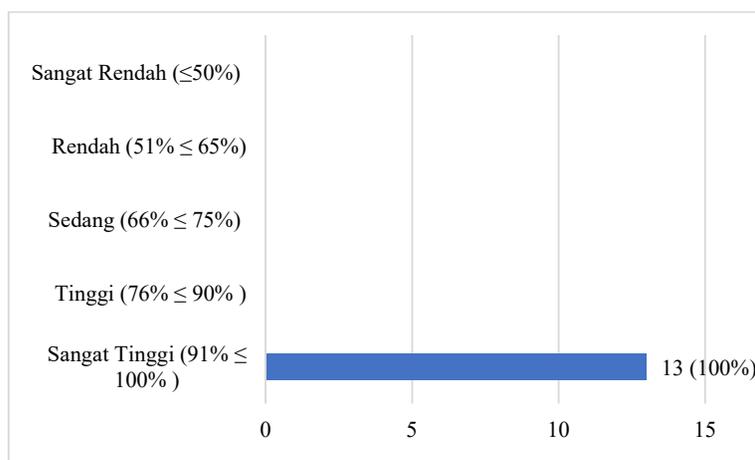


| No  | Program   | Indikator   | OPD     | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | Status   |
|-----|---|---|---------|-----|-------------------|------|------|--------|------|------|----------------|----------|
|     |   | 5.3 Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD                                    |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
|     |   | 5.4 Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD                                 |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
|     |   | 5.5 Kesesuaian Program di APBD dengn Program di RKPD  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
|     |   | 5.6 Kesesuaian Program di APBD dengn Program di RKPD  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
|     |   | 5.7 Realisasi Kinerja RKPD  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
|     |   | 5.8 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD   |         |     |                   |      |      |        |      |      |                |          |
| 6.  | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi   | 6.1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan                        | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 95.47% | 93%  | 100% | 100%           | Tercapai |
| 7.  | Program Perencanaan Sosial Dan Budaya   | 7.1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan                  | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 98.47% | 100% | 100% | 100%           | Tercapai |
| 8.  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam                                      | 8.1 Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 91.83% | 88%  | 100% | 100%           | Tercapai |
| 9.  | Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber Dari Pemerintah Provinsi Serta Pendampingannya | 9.1 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi  | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 94.43% | 100% | 100% | 100%           | Tercapai |
| 10. | Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber Dari Pemerintah                                | 10.1 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber                          | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 92%    | 99%  | 85%  | 100%           | Tercapai |

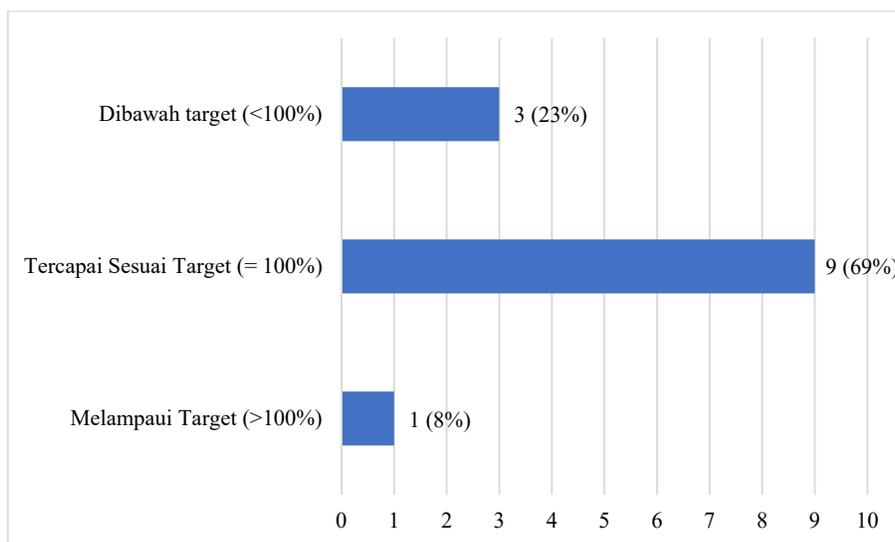


| No  | Program   | Indikator  | OPD     | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | % Capaian 2020      | Status   |
|-----|---|--|---------|-----|-------------------|------|------|--------|------|------|---------------------|----------|
|     | Pusat Beserta Pendampingannya                         | dari pemerintah pusat  |         |     |                   |      |      |        |      |      |                     |          |
| 11. | Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK             | 11.1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDA | Bappeda | %   | 100%              | 100% | 100% | 91.74% | 100% | 100% | 100%                | Tercapai |
| 12. | Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah | 12.1 Persentase Keterisian data SIPD   | Bappeda | %   | 90%               | 75%  | 80%  | 0%     | 0%   | 0%   | 0 (pindah OPD)      | Tercapai |
|     |   | 12.2 Ketersediaan dokumen IKK  | Bappeda | %   | 1                 | 1    | 1    | 0      | 0    | 0    | 0 (sudah terpenuhi) | Tercapai |

Ringkasan Capaian kinerja Misi 6 disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.23** Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 6



**Gambar 2.24** Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 6

Capaian kinerja Misi 6 sebesar 100 % berpredikat sangat tinggi, dan 77 % mencapai target. Hal ini berarti selama tahun 2016-2021 Upaya mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender* baik. Beberapa indikator yang belum tercapai di tahun 2020 masih memungkinkan terpenuhi karena sudah termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021.

### 7. Capaian Kinerja Misi 7: Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Misi ini mengampu 1 Tujuan, 1 Sasaran daerah, dan 12 Program, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.63**  
**Capaian Kinerja Misi 7**

| No  | Program  | Indikator  | OPD       | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | % Capaian 2020 | status  |
|---|--|--|-----------|-----|-------------------|-------|-------|-------|------|------|----------------|---|
| <b>Tujuan 1.</b> Meningkatkan Ketenteraman, ketertiban umum |  |  |           |     |                   |       |       |       |      |      |                |   |
| <b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya penegakan Perda              |  |  |           |     |                   |       |       |       |      |      |                |   |
| 1.  | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiba, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten) | Satpol PP | %   | 80                | 80    | 80    | 85    | 85   | 85   | 100%           | <br>Tercapai |
|   |  | 1.2  | Satpol PP | %   | 86.05             | 86,05 | 98,15 | 98,16 | 98,2 | 81   | 100%           |   |



| No | Program   | Indikator  | OPD       | Sat   | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | status   |
|----|---|--|-----------|-------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|----------------|----------|
|    |   | Cakupan penegakan Perda  |           |       |                   |      |      |       |       |       |                | Tercapai |
| 2. | Program pemeliharaan Ketramtibmas dan pencegahan tindak kriminal      | 2.1 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP  | Satpol PP | %     | 37.5              | 37,5 | 37,5 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 150%           | Melampau |
| 3. | Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 3.1 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten                             | Satpol PP | %     | 1.33              | 1,33 | 1,33 | 1,33  | 1,33  | 1,33  | 100%           | Tercapai |
| 4. | Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat                 | 4.1 Penyuluhan tentang miras, narkoba dan perjudian kepada masyarakat di kecamatan | Satpol PP | kali  | 2                 | 2    | 2    | 16    | 16    | 0     | 0%             | Tercapai |
| 5. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam        | 5.1 Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannya dalam penanganan bencana  | Satpol PP | org   | 75                | 75   | 132  | 100   | 120   | 0     | 0%             | Tercapai |
| 6. | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran         | 6.1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Blora                         | Satpol PP | %     | 21                | 21   | 58   | 60    | 55,67 | 52,17 | 248%           | Melampau |
|    |   | 6.2 Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan WMK                    | Satpol PP | menit | 15                | 15   | 15   | 15    | 15    | 15    | 100%           | Tercapai |
|    |   | 6.3 Persentase Aparatur  | Satpol PP | %     | 0                 | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0%             |          |

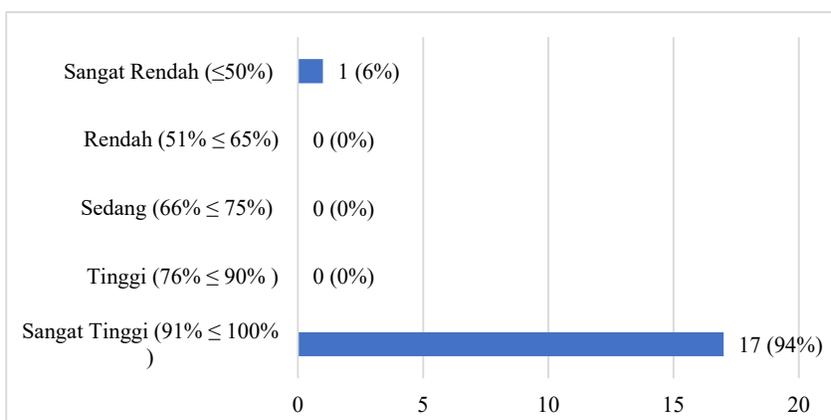


| No  | Program   | Indikator   | OPD               | Sat  | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | % Capaian 2020 | status  |
|-----|---|---|-------------------|------|-------------------|------|------|------|-------|------|----------------|---|
|     |   | Damkar yang menemui Standar Kualifikasi   |                   |      |                   |      |      |      |       |      |                | Belum Tercapai  |
|     |   | 6.4 Jumlah Damkar   | Satpol PP         | unit | 2                 | 2    | 1    | 0    | 0     | 0    | 150%           | <br>Melampau   |
|     |   | 6.5 Jumlah alat pemadam ringan  | Satpol PP         | unit | 2                 | 2    | 10   | 10   | 18    | 19   | 950%           | <br>Melampau   |
| 7.  | Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan        | 7.1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan   | Kantor Kesbangpol | keg  | 200               | 220  | 180  | 180  | 180   | 280  | 140%           | <br>Melampau   |
| 8.  | Program Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | 8.1 Terpeliharanya kondusivitas wilayah melalui kerjasama KOMINDA   | Kantor Kesbangpol | keg  | 12                | 12   | 12   | 12   | 12    | 12   | 100%           | <br>Tercapai |
| 9.  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                       | 9.1 Jumlah Toga Tomas yang memahami Toleransi Kerukunan Umat Beragama, Nilai sosial dan solidaritas dikalangan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa | Kantor Kesbangpol | Org  | 300               | 400  | 450  | 475  | 1.770 | 670  | 1255%          | <br>Melampau |
| 10. | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan             | 10.1 Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatn  | Kantor Kesbangpol | Org  | 200               | 135  | 300  | 180  | 300   | 300  | 607.5%         | <br>Melampau |

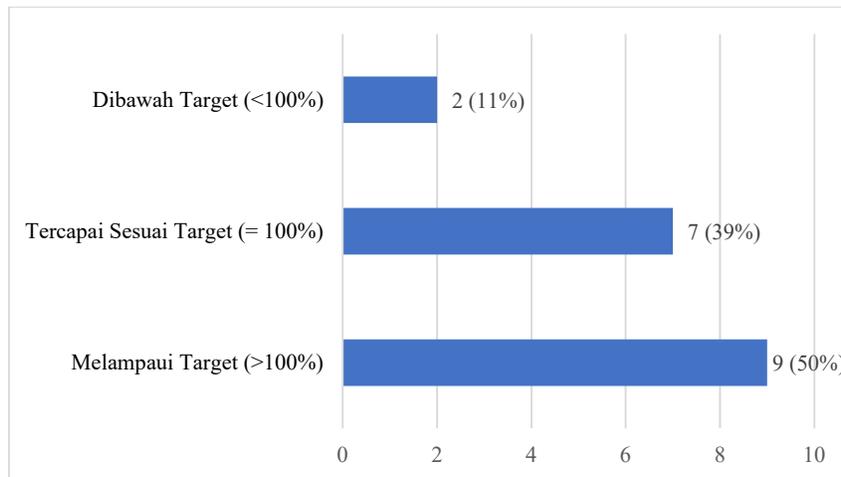


| No  | Program   | Indikator  | OPD               | Sat | Target RPJMD 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | % Capaian 2020 | status  |
|-----|---|--|-------------------|-----|-------------------|------|------|------|-------|-------|----------------|---|
|     |   | wawasan kebangsaan dan bela negara   |                   |     |                   |      |      |      |       |       |                |   |
| 11. | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 11.1 Jumlah Tokoh masyarakat, Pemuda dan pelajar yang mendapatkan Penyuluhan Narkoba | Kantor Kesbangpol | Org | 500               | 400  | 500  | 100  | 540   | 460   | 400%           | <br>Melampaui      |
| 12. | Program Pendidikan Politik Masyarakat                         | 12.1 Kegiatan pembinaan politik daerah   | Kantor Kesbangpol | Keg | 5                 | 2    | 9    | 9    | 19    | 15    | 300%           | <br>Melampaui      |
|     |   | 12.2 Prosentase Partisipasi Politik masyarakat                                       | Kantor Kesbangpol | %   | 80.00             | 71.6 | 71.6 | 66.7 | 80.37 | 77.47 | 96.8%          | <br>Belum Tercapai |

Ringkasan Capaian kinerja Misi 7 disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2.25 Kategori Nilai Capaian Kinerja Misi 7**



**Gambar 2.26 Status Ketercapaian Target Kinerja Misi 7**

Capaian kinerja Misi 7 sebesar 94 % berpredikat sangat tinggi, dan 89 % mencapai target. Hal ini berarti selama tahun 2016-2021 Upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah baik. Beberapa indikator yang belum tercapai di tahun 2020 masih memungkinkan terpenuhi karena sudah termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021.



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

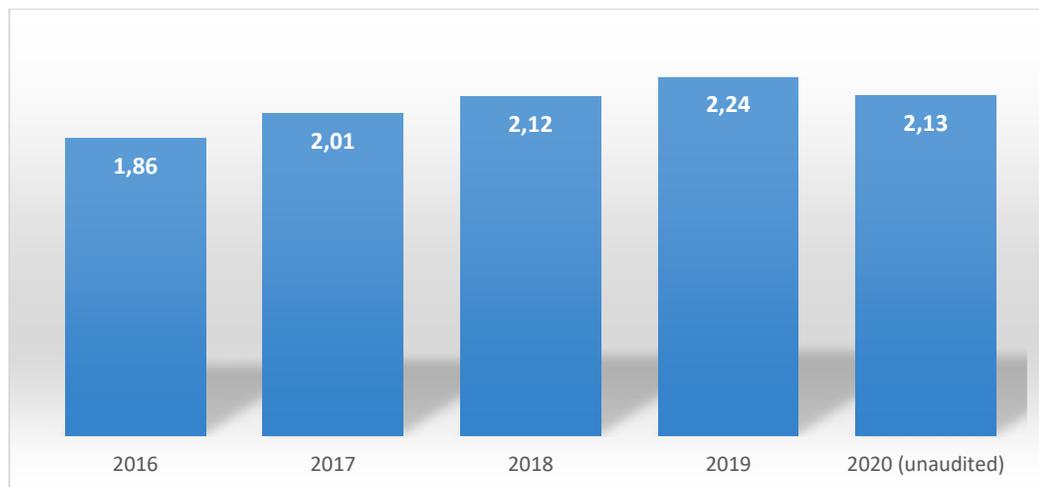
Kuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

#### **3.1 Kinerja Kinerja Keuangan Masa Lalu**

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,86 trilyun pada tahun 2016 menjadi 2,13 trilyun rupiah. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)**

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 5,40%. Pertumbuhan pendapatan daerah fluktuatif, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 12,70% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -5,04%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 17,70%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 0,88%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,14%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Blora tahun 2016-2019 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2020**

|          | Uraian   | Pertumbuhan |         |         |       |        | Rata-rata |
|----------|--|-------------|---------|---------|-------|--------|-----------|
|          |  | 2016        | 2017    | 2018    | 2019  | 2020   |           |
| <b>A</b> | <b>PENDAPATAN</b>  | 12,70       | 8,38    | 5,31    | 5,67  | (5,04) | 5,40      |
| <b>1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | 9,51        | 63,50   | (27,45) | 21,50 | 21,46  | 17,70     |
|          | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 30,10       | 18,04   | 11,08   | 13,94 | (8,48) | 12,94     |
|          | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | (0,09)      | (14,41) | 3,21    | 7,25  | (1,15) | (1,04)    |
|          | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15,70       | 166,27  | (62,41) | 70,16 | 476,96 | 133,34    |

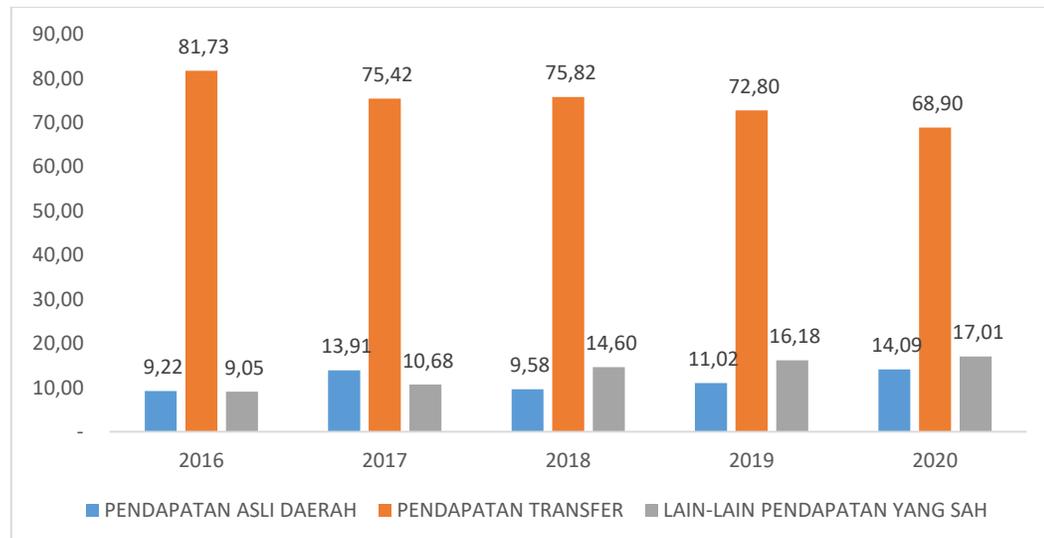


|           | Uraian  | Pertumbuhan |         |          |         |         | Rata-rata |
|-----------|---|-------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
|           |   | 2016        | 2017    | 2018     | 2019    | 2020    |           |
|           | Lain-lain PAD yang Sah                              | 3,97        | 79,48   | (34,23)  | 22,51   | (4,66)  | 13,41     |
| <b>2</b>  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                          | 7,21        | 0,01    | 5,86     | 1,47    | (10,14) | 0,88      |
| <b>a.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b> | 30,59       | 1,26    | 2,01     | 4,81    | (12,66) | 5,20      |
|           | Dana Bagi Hasil Pajak                               | 31,03       | 7,50    | 18,61    | (17,09) | 2,15    | 8,44      |
|           | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                    |             |         |          |         |         |           |
|           | Dana Alokasi Umum                                   | 11,13       | (1,76)  | (0,01)   | 4,30    | (9,86)  | 0,76      |
|           | Dana Alokasi khusus                                 | 182,75      | 11,18   | 7,96     | 6,70    | (19,98) | 37,72     |
| <b>b.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>          | (99,34)     | 452,05  | 250,00   | 30,29   | 39,50   | 134,50    |
|           | Dana Otonomi Khusus                                 |             |         |          |         |         |           |
|           | Dana Penyesuaian                                    | (100,00)    |         | 250,00   | 30,29   | 39,50   | 54,95     |
| <b>c.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                 | (3,58)      | (12,31) | 26,53    | (24,47) | 2,32    | (2,30)    |
|           | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                         | (5,63)      | 17,04   | 2,04     | 8,32    | (5,74)  | 3,20      |
|           | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                       | (1,73)      | (37,64) | 66,18    | (57,08) | 22,55   | (1,54)    |
| <b>3</b>  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                | 121,92      | 27,80   | 44,02    | 17,09   | (0,13)  | 42,14     |
|           | Pendapatan Hibah                                    | (64,21)     | 153,30  | 8.827,16 | 18,03   | 0,74    | 1.787,00  |
|           | Pendapatan Dana Desa                                | 124,38      | 27,54   | 7,30     | 16,77   | (0,44)  | 35,11     |
|           | Pendapatan Dana Darurat                             |             |         |          |         |         |           |
|           | Pendapatan Lainnya                                  |             |         |          |         |         |           |
|           | <b>Jumlah</b>                                       | 12,70       | 8,38    | 5,31     | 5,67    | (5,04)  | 5,40      |

Pendapatan daerah Kabupaten Blora didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 81,73% pada tahun 2016 menjadi 68,90% pada tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 9,22% pada tahun 2016

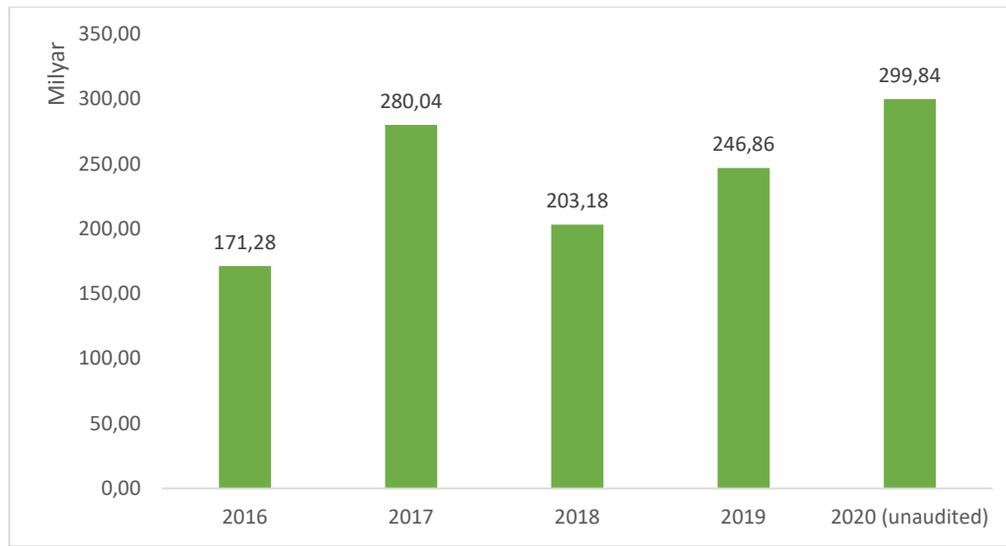


menjadi 14,09% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar 9,05% pada tahun 2016 menjadi 17,01% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



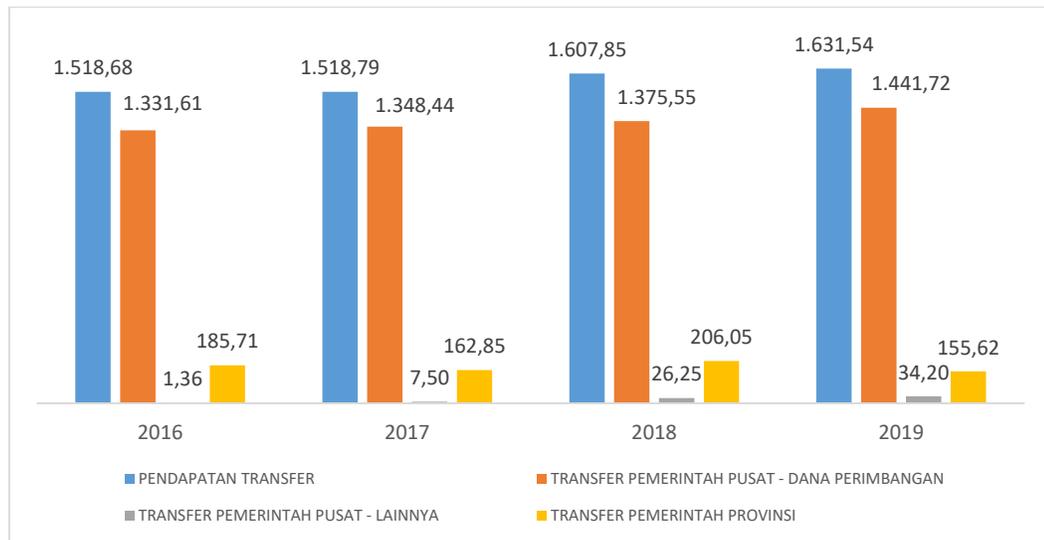
**Gambar 3.2 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)**

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari sebesar 171,28 milyar pada tahun 2016 menjadi 299,84 milyar rupiah pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

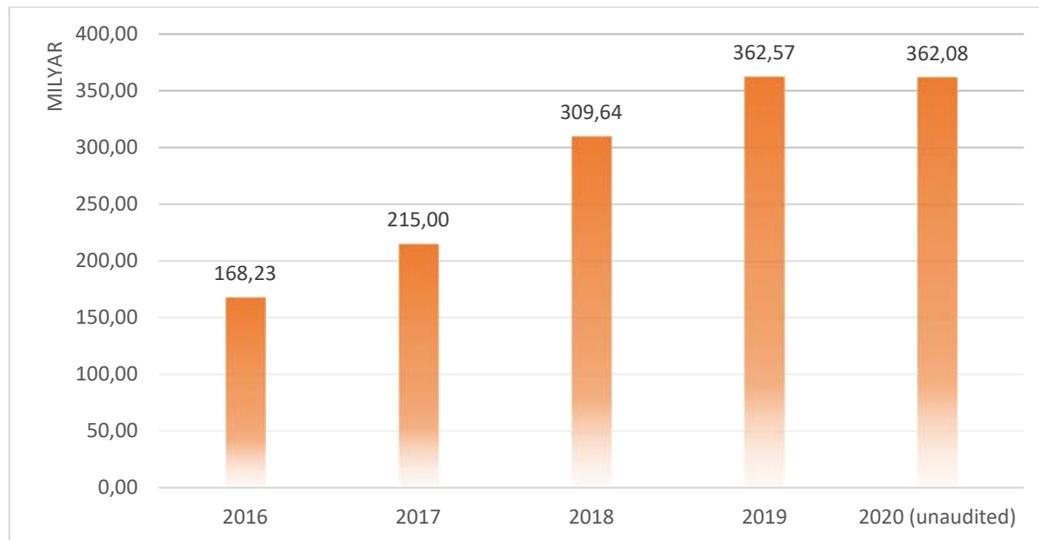
Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 1.518,68 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.631,54 milyar rupiah pada tahun 2020. Transfer dana perimbangan meningkat dari 1.331,61 milyar pada tahun 2016 menjadi 1.441,72 milyar rupiah pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target Lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 75,8 milyar menjadi Rp 362,57 milyar rupiah.

Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Berdasarkan realisasi tahun 2016-2020, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

- Belum optimalnya implementasi transaksi non tunai dalam penarikan obyek pajak dan obyek retribusi, perlu terus dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.
- Kurangnya akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah masih kurang.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya.
- Belum optimalnya penegakan hukum dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora**  
**Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

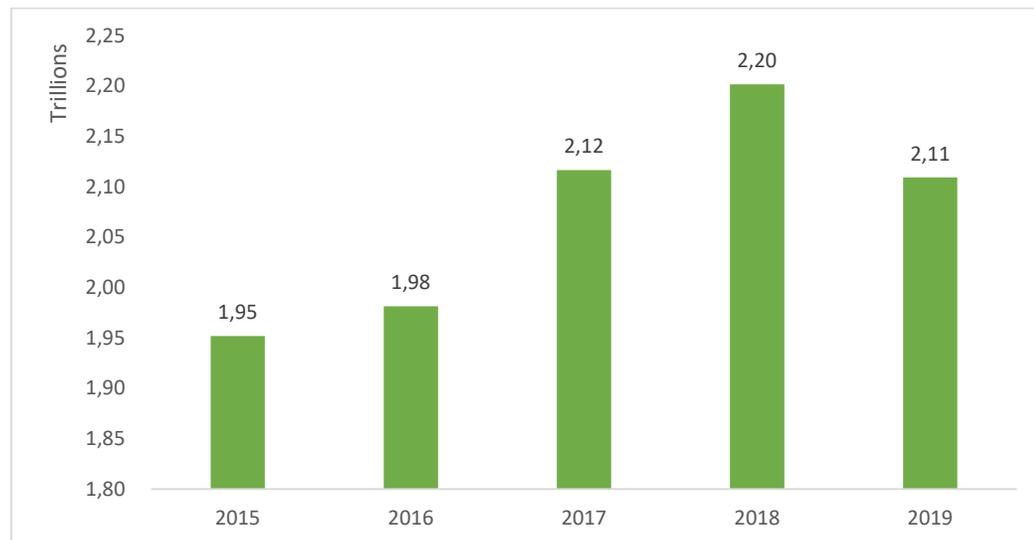
|           | Uraian   | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020 (unaudited)         |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A</b>  | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>1.858.187.916.237</b> | <b>2.013.829.444.230</b> | <b>2.120.671.434.967</b> | <b>2.240.970.020.181</b> | <b>2.128.096.502.114</b> |
| <b>1</b>  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>171.277.522.706</b>   | <b>280.042.019.102</b>   | <b>203.182.795.054</b>   | <b>246.863.066.484</b>   | <b>299.837.200.880</b>   |
|           | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 41.046.674.606           | 48.450.528.271           | 53.816.734.848           | 61.320.811.636           | 56.120.881.472           |
|           | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 9.778.925.650            | 8.370.133.408            | 8.638.971.957            | 9.265.329.919            | 9.158.755.406            |
|           | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.105.618.518            | 21.582.775.295           | 8.112.978.480            | 13.805.331.392           | 79.651.157.568           |
|           | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 112.346.303.932          | 201.638.582.128          | 132.614.109.769          | 162.471.593.537          | 154.906.406.434          |
| <b>2</b>  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.518.683.687.233</b> | <b>1.518.790.298.934</b> | <b>1.607.847.575.930</b> | <b>1.631.536.944.197</b> | <b>1.466.178.491.234</b> |
| <b>a.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>          | <b>1.331.611.361.558</b> | <b>1.348.442.240.943</b> | <b>1.375.550.409.408</b> | 1.441.716.460.262        | <b>1.259.239.750.269</b> |
|           | Dana Bagi Hasil Pajak  | 77.523.014.477           | 83.336.482.499           | 98.847.733.591           | 81.955.082.770           | 83.713.200.002           |
|           | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                             | 33.327.730.081           | 29.903.508.129           | 17.015.980.402           | 37.893.211.206           | 19.929.386.773           |
|           | Dana Alokasi Umum  | 943.325.498.000          | 926.754.302.000          | 926.682.649.031          | 966.559.787.000          | 871.294.279.000          |
|           | Dana Alokasi khusus  | 277.435.119.000          | 308.447.948.315          | 333.004.046.384          | 355.308.379.286          | 284.302.884.494          |
| <b>b.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                   | 1.358.580.000            | <b>7.500.000.000</b>     | <b>26.250.000.000</b>    | <b>34.200.765.000</b>    | <b>47.710.729.000</b>    |
|           | Dana Otonomi Khusus  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|           | Dana Penyesuaian   | -                        | 7.500.000.000            | 26.250.000.000           | 34.200.765.000           | 47.710.729.000           |
| <b>c.</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                          | 185.713.745.675          | <b>162.848.057.991</b>   | <b>206.047.166.522</b>   | <b>155.619.718.935</b>   | <b>159.228.011.965</b>   |
|           | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 86.019.445.675           | 100.677.858.991          | 102.733.000.522          | 111.276.869.935          | 104.884.482.965          |
|           | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | 99.694.300.000           | 62.170.199.000           | 103.314.166.000          | 44.342.849.000           | 54.343.529.000           |
| <b>3</b>  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>168.226.706.298</b>   | <b>214.997.126.194</b>   | <b>309.641.063.983</b>   | <b>362.570.009.500</b>   | <b>362.080.810.000</b>   |
|           | Pendapatan Hibah   | 353.377.298              | 895.102.194              | 79.907.226.983           | 94.316.163.500           | 95.009.470.000           |
|           | Pendapatan Dana Desa   | 167.873.329.000          | 214.102.024.000          | 229.733.837.000          | 268.253.846.000          | 267.071.340.000          |
|           | Pendapatan Dana Darurat                                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|           | Pendapatan Lainnya   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Jumlah</b>  | <b>1.858.187.916.237</b> | <b>2.013.829.444.230</b> | <b>2.120.671.434.967</b> | <b>2.240.970.020.181</b> | <b>2.128.096.502.114</b> |



### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

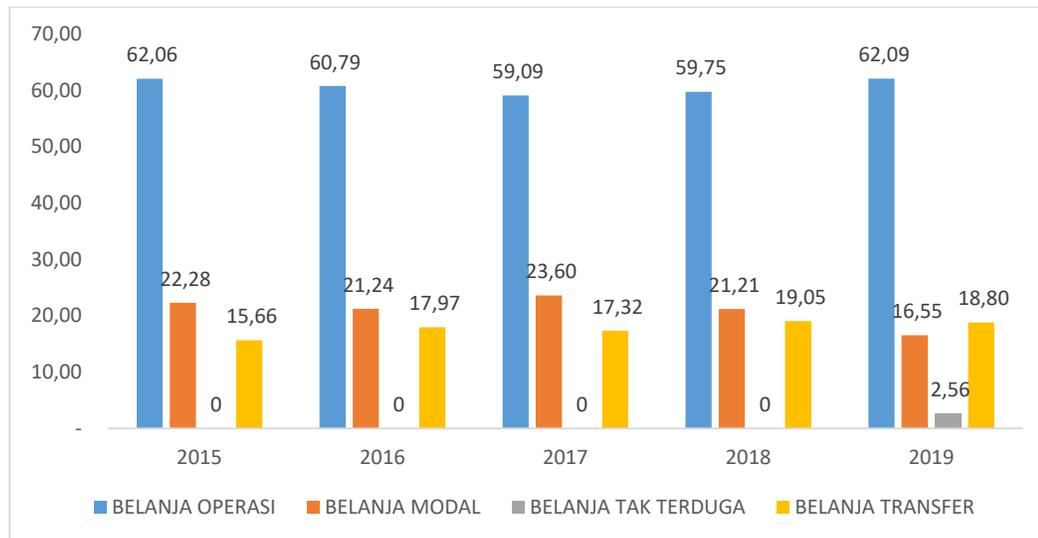
#### 3.2.1. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Blora menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 1,95 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,11 trilyun rupiah pada tahun 2020.



**Gambar 3.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)**

Belanja daerah Kabupaten Blora memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 62,06% pada tahun 2016 dengan kecenderungan sedikit meningkat menjadi 62,09% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung menurun dari sebesar 22,28% pada tahun 2016 menjadi 16,55% pada tahun 2020. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 15,66% pada tahun 2016 menjadi 18,80% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Blora tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.7 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana.
2. Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun.
3. Adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

|          | <b>Uraian</b>                       | <b>2016</b>              | <b>2017</b>              | <b>2018</b>              | <b>2019</b>              | <b>2020 (unaudited)</b>  |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>1.211.271.036.299</b> | <b>1.204.466.244.336</b> | <b>1.250.536.779.326</b> | <b>1.315.350.841.895</b> | <b>1.309.660.390.007</b> |
|          | Belanja Pegawai                     | 964.603.085.691          | 898.801.735.230          | 907.414.544.888          | 924.532.293.909          | 869.645.016.510          |
|          | Belanja Barang dan jasa             | 213.375.491.306          | 283.511.244.049          | 306.144.209.238          | 357.028.347.986          | 367.349.929.497          |
|          | Belanja Bunga                       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          | Belanja Subsidi                     | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          | Belanja Hibah                       | 31.053.916.647           | 21.284.317.057           | 35.541.525.200           | 29.535.200.000           | 68.879.944.000           |
|          | Bantuan Sosial                      | 2.238.542.655            | 868.948.000              | 1.436.500.000            | 4.255.000.000            | 3.785.500.000            |
|          | Belanja Bantuan keuangan            |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>434.953.823.988</b>   | <b>420.864.556.022</b>   | <b>499.439.779.133</b>   | <b>466.887.346.008</b>   | <b>349.000.751.409</b>   |
|          | Belanja Tanah                       | 999.762.500              | 1.013.625.240            | 1.291.794.500            | 13.969.177.820           |                          |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin         | 75.066.884.787           | 73.146.321.613           | 83.619.034.319           | 89.508.670.291           |                          |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan         | 114.655.089.905          | 119.526.613.519          | 136.540.415.855          | 134.689.914.700          |                          |
|          | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 241.904.979.308          | 225.981.820.750          | 273.758.728.009          | 225.917.880.879          |                          |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 635.825.888              | 1.017.961.900            | 4.033.333.450            | 2.664.601.954            |                          |
|          | Belanja Aset Lainnya                | 1.691.281.600            | 178.213.000              | 196.473.000              | 137.100.364              |                          |
|          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>3</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>          | -                        | -                        | -                        | -                        | 53.941.665.170           |
|          | Belanja Tak Terduga                 | -                        | -                        | -                        | -                        | 53.941.665.170           |
| <b>4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>             | <b>305.591.594.000</b>   | <b>356.016.681.000</b>   | <b>366.499.003.000</b>   | <b>419.301.748.000</b>   | <b>396.553.076.500</b>   |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



|          | Uraian  | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020 (unaudited)         |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>a</b> | <b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>          | <b>6.093.261.000</b>     | <b>5.426.200.000</b>     | <b>5.788.000.000</b>     | <b>5.941.900.000</b>     | 7.469.600.000            |
|          | Bagi Hasil Pajak                              | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          | Bagi Hasil Retribusi                          | 6.093.261.000            | 5.426.200.000            | 5.788.000.000            | 5.941.900.000            | 7.469.600.000            |
|          | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          |   |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>b</b> | <b>TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN</b>            | 299.498.333.000          | 350.590.481.000          | 360.711.003.000          | <b>413.359.848.000</b>   | 389.083.476.500          |
|          | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 299.498.333.000          | 350.590.481.000          | 360.711.003.000          | 413.359.848.000          | 389.083.476.500          |
|          | Bantuan Keuangan Keuangan ke Desa             | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          | Bantuan Keuangan Lainnya                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|          |   |                          |                          |                          |                          |                          |
|          | <b>BELANJA</b>                                | <b>1.951.816.454.287</b> | <b>1.981.347.481.358</b> | <b>2.116.475.561.459</b> | <b>2.201.539.935.903</b> | <b>2.109.155.883.086</b> |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                        | <b>(93.628.538.050)</b>  | <b>32.481.962.872</b>    | <b>4.195.873.508</b>     | <b>39.430.084.278</b>    | <b>18.940.619.028</b>    |



### 3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

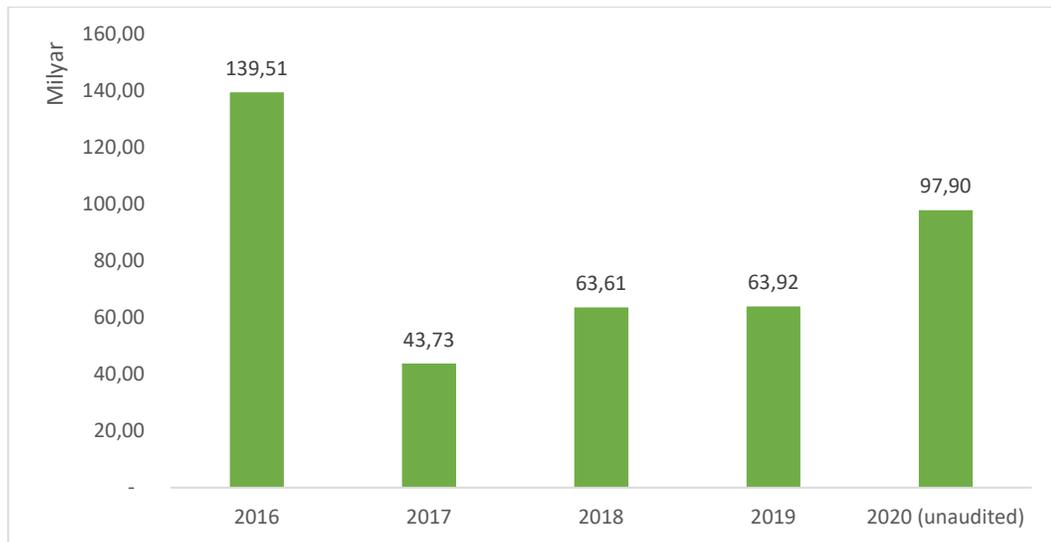
Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 49,36% pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,14%.

**Tabel 3.4**  
**Analisis Proporsi Belanja Pegawai**

| No | Uraian   | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Total Belanja Pegawai  | 964.603.085.691   | 898.801.735.230   | 907.414.544.888   | 924.532.293.909   | 869.645.016.510   |
| 2  | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran + Pembiayaan)       | 1.954.049.454.287 | 1.994.078.481.358 | 2.120.475.561.459 | 2.207.039.435.903 | 2.113.670.883.086 |
|    | <b>Persentase Belanja Pegawai terhadap total pengeluaran</b> | <b>49,36</b>      | <b>45,07</b>      | <b>42,79</b>      | <b>41,89</b>      | <b>41,14</b>      |

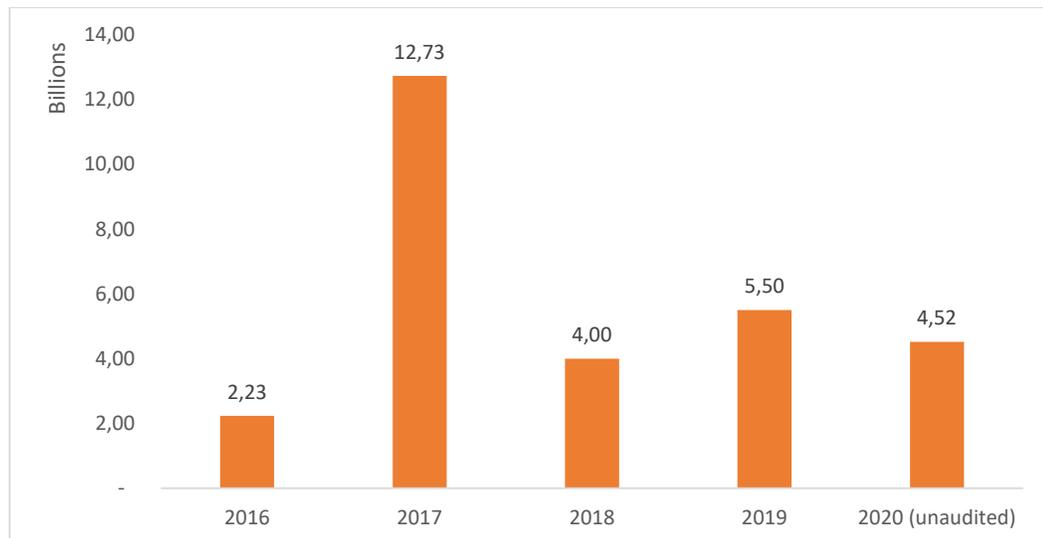
### 3.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Blora berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Blora menunjukkan penurunan dari sebesar 139,51 milyar pada tahun 2016 menjadi 97,90 milyar pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.8 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Blora berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar 2,23 milyar rupiah mengalami fluktuasi menjadi 4,52 milyar rupiah pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**



Defisit riil anggaran Kabupaten Blora selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 95.861.538.050,00 sedangkan tahun 2017-2020 terjadi surplus anggaran.

**Tabel 3.5**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| NO | Uraian                        | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020<br>(unaudited) |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah   | 1.858.187.916.237 | 2.013.829.444.230 | 2.120.671.434.967 | 2.240.970.020.181 | 2.128.096.502.114   |
|    | Dikurangi realisasi:          |                   |                   |                   |                   |                     |
| 2. | Belanja Daerah                | 1.951.816.454.287 | 1.981.347.481.358 | 2.116.475.561.459 | 2.201.539.935.903 | 2.109.155.883.086   |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2.233.000.000     | 12.731.000.000    | 4.000.000.000     | 5.499.500.000     | 4.515.000.000       |
|    | Defisit riil                  | (95.861.538.050)  | 19.750.962.872    | 195.873.508       | 33.930.584.278    | 14.425.619.028      |

Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dan sebagian kecil dari Penerimaan Kembali Dana Bergulir dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

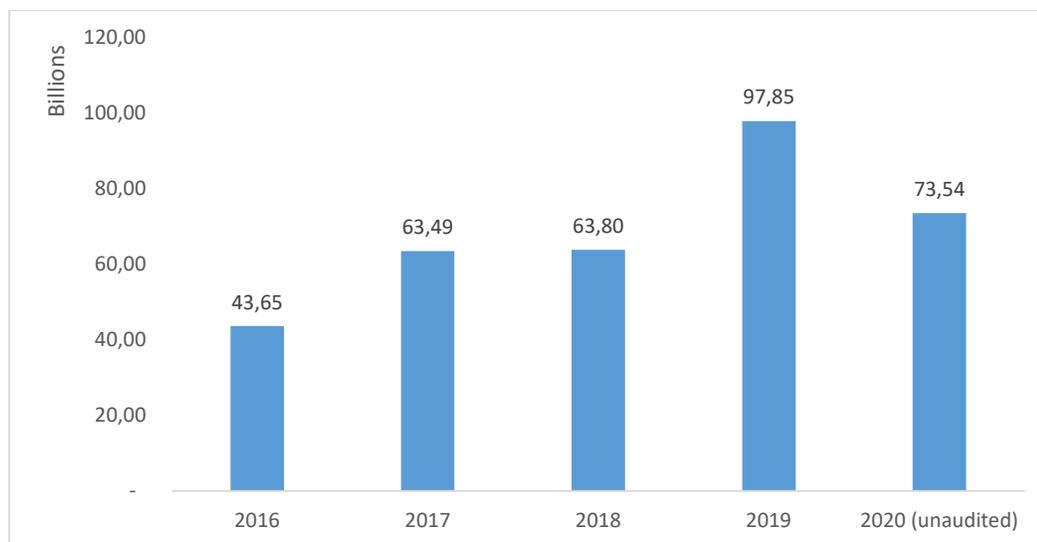
**Tabel 3.6**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian  | 2016                   | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020<br>(unaudited)   |
|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.  | Penggunaan SiLPA                                | 139.318.488.840        | 43.648.225.790        | 63.485.678.762        | 63.802.556.826        | 97.852.691.370        |
| 2.  | Pencairan Dana Cadangan                         | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3.  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 5.  | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah              | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.  | Penerimaan Piutang Daerah                       | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7.  | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                | 191.275.000            | 86.490.100            | 122.351.948           | 119.550.266           | 43.500.000            |
|     | <b>Jumlah</b>                                   | <b>139.509.763.840</b> | <b>43.734.715.890</b> | <b>63.608.030.710</b> | <b>63.922.107.092</b> | <b>97.896.191.370</b> |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Blora menunjukkan kecenderungan peningkatan dari



sebesar 43,65 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 73,54 milyar rupiah pada tahun 2020.



**Gambar 3.10 Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 fluktuatif, dari sebesar Rp 43.648.225.790 pada tahun 2016 menjadi Rp 97.852.691.370,00 pada tahun 2019 dan Rp 58.251.292.268,00 pada tahun 2020. Secara rinci Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020 (unaudited) |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Pelampauan penerimaan PAD                                  | (3.922.477.294)  | 11.738.126.946   | 3.982.982.054    | 28.810.131.673   | 22.373.772.698   |
| 2   | Pelampauan penerimaan pendapatan transfer                  | (79.890.572.129) | (59.969.903.066) | (24.365.539.070) | (53.443.028.803) | (39.061.186.865) |
| 3   | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | (1.030.194.802)  | (21.486.406)     | (2.583.067.694)  | (4.951.025.177)  | (12.035.259.065) |
| 4   | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya               | 128.399.195.015  | 111.652.418.188  | 86.647.176.980   | 126.376.048.503  | 116.945.465.500  |
| 5   | Pelampauan penerimaan pembiayaan                           | 92.275.000       | 86.490.100       | 122.351.948      | 60.065.174       | (14.971.500.000) |
| 6   | Sisa pengeluaran pembiayaan                                | -                | -                | -                | 1.000.500.000    | (15.000.000.000) |
|     | Jumlah SILPA   | 43.648.225.790   | 63.485.678.762   | 63.803.904.218   | 97.852.691.370   | 58.251.292.268   |



Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

| No       | Uraian  | 2016                   | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020<br>(unaudited)   |
|----------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>139.509.763.840</b> | <b>43.734.715.890</b> | <b>63.608.030.710</b> | <b>63.922.107.092</b> | <b>97.896.191.370</b> |
|          | Penggunaan SiLPA                                | 139.318.488.840        | 43.648.225.790        | 63.485.678.762        | 63.802.556.826        | 97.852.691.370        |
|          | Pencairan Dana Cadangan                         | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah              | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Penerimaan Piutang Daerah                       | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                | 191.275.000            | 86.490.100            | 122.351.948           | 119.550.266           | 43.500.000            |
| <b>2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   | <b>2.233.000.000</b>   | <b>12.731.000.000</b> | <b>4.000.000.000</b>  | <b>5.499.500.000</b>  | <b>4.515.000.000</b>  |
|          | Pembentukan Dana Cadangan                       | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 2.233.000.000          | 12.731.000.000        | 4.000.000.000         | 5.499.500.000         | <b>4.515.000.000</b>  |
|          | Pembayaran Pokok Utang                          | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Pemberian Pinjaman Daerah                       | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga            | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Dana Talangan                                   | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | Pemberian Pinjaman Dana Bergulir                | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                         | <b>137.276.763.840</b> | <b>31.003.715.890</b> | <b>59.608.030.710</b> | <b>58.422.607.092</b> | <b>54.602.894.000</b> |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>           | <b>43.648.225.790</b>  | <b>63.485.678.762</b> | <b>63.803.904.218</b> | <b>97.852.691.370</b> | <b>73.543.513.028</b> |



### 3.3. Kerangka Pendanaan

#### 3.2 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya pajak dan retribusi kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan new normal selama masa Pandemi Covid-19, sehingga hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan PMK No. 35/PMK.07/2020. Kemudian untuk tahun 2022-2024 diproyeksikan pendapatan daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021. Diharapkan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 dapat meningkat, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka peningkatan fiskal daerah, direncanakan melakukan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pinjaman daerah tersebut termasuk kategori pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pengembalian pinjaman daerah direncanakan sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib, mendesak dan prioritas utama meliputi:

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai
2. Belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
3. Belanja yang bersifat *earmarking* bersumber dari pendapatan transfer yang telah diatur secara jelas penggunaannya, seperti DAK, dan bantuan keuangan provinsi.

Dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi diatas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026**

| No       | Uraian  | Proyeksi Tahun 2021      | Proyeksi Tahun 2022      | Proyeksi Tahun 2023      | Proyeksi Tahun 2024      | Proyeksi Tahun 2025      | Proyeksi Tahun 2026      |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Pendapatan Daerah</b>                                | 2.036.752.914.965        | 2.098.568.560.024        | 2.163.105.617.942        | 2.230.505.764.448        | 2.300.919.754.033        | 2.374.508.121.341        |
| <b>1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| a        | Hasil Pajak Daerah                                      | <b>259.398.747.100</b>   | <b>274.891.925.263</b>   | <b>291.424.382.757</b>   | <b>309.074.940.305</b>   | <b>327.929.058.011</b>   | <b>348.079.437.569</b>   |
| b        | Hasil Retribusi Daerah                                  | 54.086.714.000           | 59.495.385.400           | 65.444.923.940           | 71.989.416.334           | 79.188.357.967           | 87.107.193.764           |
| c        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan       | 10.117.033.100           | 10.441.789.863           | 10.776.971.317           | 11.122.912.096           | 11.479.957.575           | 11.848.464.213           |
| d        | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah               | 51.000.000.000           | 53.550.000.000           | 56.227.500.000           | 59.038.875.000           | 61.990.818.750           | 65.090.359.688           |
|          |   | 144.195.000.000          | 151.404.750.000          | 158.974.987.500          | 166.923.736.875          | 175.269.923.719          | 184.033.419.905          |
| <b>2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>a</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                        | <b>1.698.530.326.965</b> | <b>1.744.852.793.861</b> | <b>1.792.857.394.285</b> | <b>1.842.606.983.243</b> | <b>1.894.166.855.122</b> | <b>1.947.604.842.872</b> |
| 1)       | Dana Perimbangan  | <b>1.450.206.909.000</b> | <b>1.491.682.585.810</b> | <b>1.534.576.730.766</b> | <b>1.578.937.855.480</b> | <b>1.624.816.130.659</b> | <b>1.672.263.442.850</b> |
| a)       | Dana Transfer Umum                                      | 1.183.135.569.000        | 1.215.477.405.982        | 1.248.925.333.788        | 1.283.517.180.725        | 1.319.292.068.828        | 1.356.290.458.104        |
| b)       | Dana Transfer Khusus                                    | 892.172.280.000          | 922.684.571.976          | 954.240.384.338          | 986.875.405.482          | 1.020.626.544.349        | 1.055.531.972.166        |
| (1)      | Dak Fisik   | 290.963.289.000          | 292.792.834.006          | 294.684.949.450          | 296.641.775.243          | 298.665.524.479          | 300.758.485.937          |
| (2)      | Dak Non Fisik   | 53.495.468.000           | 55.325.013.006           | 57.217.128.450           | 59.173.954.243           | 61.197.703.479           | 63.290.664.937           |
| 2)       | Dana Insentif Daerah                                    | 237.467.821.000          | 237.467.821.000          | 237.467.821.000          | 237.467.821.000          | 237.467.821.000          | 237.467.821.000          |
| 3)       | Dana Desa   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| b        | <b>Transfer Antar Daerah</b>                            | 267.071.340.000          | 276.205.179.828          | 285.651.396.978          | 295.420.674.755          | 305.524.061.831          | 315.972.984.746          |
| 1)       | Pendapatan Bagi Hasil                                   | 248.323.417.965          | 253.170.208.051          | 258.280.663.519          | 263.669.127.763          | 269.350.724.462          | 275.341.400.022          |
| 2)       | Bantuan Keuangan Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 89.095.406.000           | 93.942.196.086           | 99.052.651.554           | 104.441.115.798          | 110.122.712.497          | 116.113.388.057          |
|          |   | 159.228.011.965          | 159.228.011.965          | 159.228.011.965          | 159.228.011.965          | 159.228.011.965          | 159.228.011.965          |
| <b>3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|          | Pendapatan Hibah  | 78.823.840.900           | 78.823.840.900           | 78.823.840.900           | 78.823.840.900           | 78.823.840.900           | 78.823.840.900           |
|          | Dana Darurat  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|          | Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No | Uraian  | Proyeksi Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 | Proyeksi Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|    |   | 78.823.840.900      | 78.823.840.900      | 78.823.840.900      | 78.823.840.900      | 78.823.840.900      | 78.823.840.900      |
| B  | <b>Belanja Daerah</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1  | <b>Belanja Operasi</b>                                  | 2.362.786.048.000   | 2.122.112.310.024   | 2.185.960.774.192   | 2.252.689.541.792   | 2.322.448.936.943   | 2.395.399.074.678   |
| a  | Belanja Pegawai   | 1.287.504.654.399   | 1.156.359.238.969   | 1.191.150.876.097   | 1.227.512.018.038   | 1.265.524.577.838   | 1.305.275.803.707   |
| b  | <b>Belanja Barang Dan Jasa</b>                          | 635.000.000.000     | 635.000.000.250     | 635.000.000.500     | 635.000.000.750     | 635.000.001.000     | 635.000.001.250     |
| c  | <b>Belanja Bunga</b>                                    | 637.297.048.399     | 505.771.442.569     | 540.173.384.543     | 576.135.088.958     | 613.738.225.300     | 653.069.792.131     |
| d  | Belanja Subsidi   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| e  | Belanja Hibah   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| f  | Belanja Bantuan Sosial                                  | 13.287.906.000      | 13.620.103.650      | 13.960.606.241      | 14.309.621.397      | 14.667.361.932      | 15.034.045.981      |
|    |   | 1.919.700.000       | 1.967.692.500       | 2.016.884.813       | 2.067.306.933       | 2.118.989.606       | 2.171.964.346       |
| 2  | <b>Belanja Modal</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| a  | Belanja Modal Tanah                                     | 597.710.053.601     | 539.641.035.424     | 556.027.771.164     | 573.153.738.017     | 591.057.516.731     | 609.780.200.899     |
| b  | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin                       | 1.600.000.000       | 1.444.556.021       | 1.488.421.398       | 1.534.265.611       | 1.582.191.936       | 1.632.310.375       |
| c  | Belanja Modal Gedung Dan Bangunan                       | 49.085.385.857      | 44.316.618.549      | 45.662.336.664      | 47.068.762.214      | 48.539.063.544      | 50.076.615.357      |
| d  | Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi               | 200.743.380.744     | 181.240.662.068     | 186.744.214.688     | 192.496.041.119     | 198.509.098.865     | 204.797.189.376     |
| e  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                        | 344.087.867.000     | 310.658.874.995     | 320.092.340.124     | 329.951.363.523     | 340.258.155.239     | 351.036.371.903     |
|    |   | 2.193.420.000       | 1.980.323.792       | 2.040.458.290       | 2.103.305.548       | 2.169.007.147       | 2.237.713.889       |
| 3  | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|    |   | 15.000.000.000      | 5.000.000.000       | 5.000.000.000       | 5.000.000.000       | 5.000.000.000       | 5.000.000.000       |
| 4  | <b>Belanja Transfer</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| a  | Belanja Bagi Hasil                                      | 468.871.340.000     | 421.112.035.630     | 433.782.126.930     | 447.023.785.737     | 460.866.842.373     | 475.343.070.072     |
| b  | Bantuan Keuangan Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 6.300.000.000       | 5.658.281.064       | 5.828.523.022       | 6.006.444.860       | 6.192.447.393       | 6.386.957.542       |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No | Uraian  | Proyeksi Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 | Proyeksi Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Jumlah Belanja                                  | 462.571.340.000     | 415.453.754.566     | 427.953.603.908     | 441.017.340.877     | 454.674.394.981     | 468.956.112.529     |
|    | Surplus / Defisit                               | 2.362.786.048.000   | 2.122.112.310.024   | 2.185.960.774.192   | 2.252.689.541.792   | 2.322.448.936.943   | 2.395.399.074.678   |
|    |   | -24.250.000.000     | -23.543.750.000     | -22.855.156.250     | -22.183.777.344     | -21.529.182.910     | -20.890.953.337     |
| C  | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1  | Penggunaan SILPA                                | 28.250.000.000      | 27.543.750.000      | 26.855.156.250      | 26.183.777.344      | 25.529.182.910      | 24.890.953.337      |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                         | 28.250.000.000      | 27.543.750.000      | 26.855.156.250      | 26.183.777.344      | 25.529.182.910      | 24.890.953.337      |
| 3  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5  | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7  | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|    |   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1  | Pembentukan Dana Cadangan                       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       |
| 2  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3  | Pembayaran Pokok Utang                          | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       | 4.000.000.000       |
| 4  | Pemberian Pinjaman Daerah                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5  | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6  | Dana Talangan                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7  | Pemberian Pinjaman Dana Bergulir                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|    |   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|    | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|    |   | 24.250.000.000      | 23.543.750.000      | 22.855.156.250      | 22.183.777.344      | 21.529.182.910      | 20.890.953.337      |



**RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026**



| No | Uraian                                | Proyeksi Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 | Proyeksi Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan merupakan suatu kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, dan membandingkan dengan target capaian kinerja baik RPJMD, SPM maupun SDGs. Permasalahan pembangunan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan berikut ini.

##### **4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. APK PAUD masih cukup rendah bila dibandingkan dengan target SDGs yang harus mencapai 100% pada tahun 2030. APK PAUD pada tahun 2020 sebesar 55%.
- b. APM SD/MI belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, APM SD/MI pada tahun 2020 sebesar 95,20%.
- c. APM SMP/MTs belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, APM SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 80,01%.
- d. Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 0,04% dan untuk SMP sebesar 0,09%.
- e. Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PUAD, SD dan SMP memenuhi kualifikasi S1/D IV. Pada tahun 2020 Guru PAUD berkualifikasi S1/D IV sebesar 82% Guru SD/MI sebesar 92% dan Guru SMP/MTs sebesar 98%.
- f. Sampai dengan tahun 2020 pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan belum mencapai 100%. Pada tahun 2020 pencapaian pemenuhan SPM untuk jenjang Pendidikan PAUD sebesar 56,24%; Pendidikan dasar sebesar 91,72% dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 10,99%.



## 2. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sebagaimana SPM Kesehatan yaitu Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 98,83%, Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 99,48 %, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 98,09, Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 89,38, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 72,3 %, Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 71,606%, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 99,425, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 87,101%
- b. Masih adanya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting pada balita, terlihat dari persentase balita gizi buruk 0,17% pada tahun 2019, Persentase balita gizi kurang (BB/TB) 5,1%, dan persentase balita stunting 5,8%
- c. Masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian DBD, terlihat dari Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 331 kasus pada tahun 2019, dan Angka kematian DBD 1,9%.
- d. Tingginya kasus HIV/AIDS sebanyak 208 kasus pada tahun 2019.
- e. Belum optimalnya GERMAS dalam implementasi PHBS di masyarakat, terlihat dari Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS 85% pada tahun 2019.
- f. Belum optimalnya cakupan penemuan TB, terlihat dari Cakupan penemuan TB sebesar 85% pada tahun 2019.
- g. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan, terlihat dari rasio dokter umum sebesar 16,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2019, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000 (masih jauh dari target Indonesia sehat).
- h. Belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit, ditunjukkan dengan Net Death Rate (NDR) belum mencapai target tahun 2019, terlihat dari Net Death rate (NDR) 0,021 dari target 0,01%.

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas jalan. Hal ini terlihat dari persentase jalan kondisi baik tahun 2020 sebesar 22,29 %.



- b. Belum optimalnya pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat. Tahun 2020 persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada baru mencapai 55%, dan persentase air embung untuk irigasi pertanian tahun 2020 sebesar 60%.
- c. Kondisi drainase banyak yang rusak dan banyaknya sungai yang perlu penanganan untuk mengendalikan banjir, terlihat dari Panjang saluran drainase dalam kondisi baik hanya 580 km.
- d. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum, terlihat dari Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 89% pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya cakupan pelayanan sanitasi, terlihat dari cakupan pelayanan sanitasi yang capaiannya baru mencapai 95% pada tahun 2019.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung.
- g. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya.
- h. Perda RDTR belum ditetapkan karena terhambat Revisi RTRW yang belum ditetapkan.
- i. Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terlihat dari Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 13,65% pada tahun 2019.

#### **4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Blora, dilihat dari capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2019 sebesar 64,78 %, hal ini berarti masih terdapat 35,22 % atau sekitar 65.569 unit rumah layak huni yang belum tertangani di Kabupaten Blora;
- b. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, sebesar 24 Ha;
- c. Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal;
- d. Cakupan pelayanan sanitasi yang belum optimal, tahun 2019 sebesar 95 %, hal ini berarti masih ada 5 % masyarakat Kabupaten Blora yang memperoleh layanan sanitasi;



## 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum, terlihat dari penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) baru mencapai 85% di tahun 2020, Cakupan patroli petugas Satpol PP 56,25% pada tahun 2020, dan cenderung meningkatnya angka/kasus kriminalitas di Kabupaten Blora dari 63 kasus menjadi 135 kasus tahun 2020.
- b. Belum tersedianya rencana penanggulangan bencana, terlihat dari Persentase (%) penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal dan Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal 0% pada tahun 2020, dan Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal 0%.
- c. Masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran, terlihat dari Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 55,67%, dipengaruhi oleh masih kurangnya SDM dan sarpras pemadam kebakaran, dan Masih terbatasnya alat pemadam ringan (APAR).
- d. Masih terbatasnya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan Kader FKDM), terlihat dari realisasi Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan Kader FKDM) sampai dengan tahun 2019 sebanyak 960 orang dari target akhir RPJMD sebesar 1.200 orang.
- e. Masih kurangnya tingkat kerjasama untuk memelihara kondusifitas, dilihat dari Terpeliharanya kondusifitas wilayah melalui kerjasama KOMINDA sampai dengan tahun 2019 baru sebanyak 48 kali dari target akhir sebanyak 72 kali.
- f. Masih rendahnya tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan narkoba, terlihat dari Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan narkoba hanya 450 orang pada tahun 2019.
- g. Masih terbatasnya desa/kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana, terlihat dari Jumlah desa/Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana pada tahun 2020 hanya 3 Desa dan tidak ada Kelurahan yang mendapat pelatihan simulasi penanggulangan bencana.



## 6. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan penanganan, terlihat dari Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya 2% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya pemenuhan target SPM, yakni rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Hal ini terlihat dari Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebesar 3% pada tahun 2020. Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 8%, dan Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 1%.
- c. Masih terbatasnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) potensial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau sejenisnya, terlihat dari Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 7% pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terlihat dari Persentase PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 50% pada tahun 2020.
- e. Rendahnya cakupan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, tahun 2020 hanya sebesar 7% dari total yang ada.
- f. Belum terpenuhinya standar pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan, di tahun 2020 baru mencapai 80%.

### 4.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,89% pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja yang ada, yakni baru mencapai 57,08%.



- c. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 71% menjadi 69,05%.
- d. Belum optimalnya peserta pelatihan kerja yang diterima di pasar kerja, yakni baru mencapai 80% di tahun 2020.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Capaian IPG meningkat tipis namun berada di posisi terendah di Jawa Tengah.
- b. Capaian IDG ranking 25, dengan tingkat kinerja menurun, berada dibawah Jawa Tengah dan Nasional.
- c. Partisipasi perempuan di legislative rendah hanya 13,33%
- d. Rata-rata pengeluaran perkapita perempuan hanya sepertiga dibandingkan laki-laki yaitu Rp 5.968 sedangkan laki-laki sudah mencapai Rp 14.382.
- e. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (39,92 % terendah di Jawa Tengah).
- f. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (34,76%).
- g. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, terakumulasi hingga 2019 terdapat 30 kasus.

## **3. Pangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya desa rawan pangan dan belum semuanya tertangani, terlihat dari jumlah desa rawan pangan sebanyak 8 desa pada tahun 2019, yang tertangani sebanyak 4 desa di tahun 2020.
- b. Terdapat beberapa bahan pangan yang produksinya belum memenuhi kebutuhan pangan, seperti ubi kayu, kedelai, bawang merah, dan gula pasir.
- c. Belum optimalnya stabilitas harga dan pasokan pangan, terlihat dari Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 95% pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya pola pangan harapan, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Hal ini terlihat dari Skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,50% pada tahun 2020.

## **4. Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu



## 5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blora, capaian tahun 2020 sebesar 70,25 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 74,63
- b. Belum optimalnya pengangkutan sampah, capaian tahun 2019 sebesar 48,53 %;
- c. Belum optimalnya pengurangan sampah di perkotaan, tahun 2019 baru 20,47 %;

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu

- a. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020 Kepemilikan KTP baru sebesar 96,92%.
- b. Belum semua penduduk memiliki akta kelahiran. Tahun 2020 baru 97,57 penduduk ber akte kelahiran
- c. Belum semua anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2020 baru sebesar 48,84% yang memiliki KIA

## 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 38 desa di Kabupaten Blora yang belum memiliki BUMDes.
- b. Terbatasnya kelompok usaha usaha ekonomi produktif masyarakat desa, terlihat dari jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih sebanyak 85 kelompok pada tahun 2020.
- c. Kurangnya keaktifan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), terlihat dari jumlah posyantek aktif sebanyak 7 unit pada tahun 2020.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di desa

## 8. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, terlihat dari cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) sebesar 11,89% pada tahun 2020



- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Program KB, terlihat dari cakupan peserta KB aktif sebesar 74,33% pada tahun 2020.
- c. Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (usia dini), terlihat dari cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 1,56% pada tahun 2020.

## **9. Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C.
- b. Belum adanya terminal angkutan barang (pangkalan truk).
- c. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 85% pada tahun 2019. Selain itu untuk fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) baru mencapai sebesar 75% pada tahun 2019.
- d. Masih banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas, terlihat dari Jumlah kasus Kecelakaan lintas 500 kejadian pada tahun 2019.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2019 baru mencapai 85%.
- f. Belum optimalnya pengelolaan parkir kendaraan.
- g. Belum selesainya pembangunan bandara Ngloram dan reaktivasi jalur kereta api Rembang – Blora – Cepu dan Blora – Purwodadi – Semarang

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Perlu optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat dilihat dari capaian Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ditahun 2020 capaiannya 0 %.
- b. Masih rendahnya pemberian informasi kebijakan kepada masyarakat, dilihat dari capaian tahun 2020 hanya 12 dokumen yang semula ditargetkan 13 dokumen.



### **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya keaktifan koperasi di Kabupaten Blora, terlihat dari realisasi capaian persentase koperasi aktif yang baru mencapai 39,92% pada tahun 2020.
- b. Tidak terselenggaranya Persentase pameran untuk promosi produk UMKM karena mewabahnya pandemi COVID-19 dari bulan maret 2019 hingga saat ini.

### **12. Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi 6,9 Trilyun rupiah pada tahun 2020 dan nilai realisasi investasi PMA 9 trilyun rupiah.
- b. Kurangnya promosi peluang penanaman modal, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan. Hal ini terlihat dari Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha pada tahun 2020 tingkat kabupaten 3 kali.

### **13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pembinaan organisasi olahraga, terlihat dari persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina 64% pada tahun 2020.
- b. Terbatasnya wirausaha muda, terlihat dari Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha hanya 195 orang pada tahun 2019.
- c. Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar. Hal ini terlihat dari jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh sebanyak 45 medali pada tahun 2019.

### **14. Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan *single data* melalui aplikasi satu data Kabupaten Blora belum optimal.



### **15. Persandian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu

- a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan.

### **16. Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- d. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Cagar Budaya, terlihat dari Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan sebesar 35% pada tahun 2020.
- e. Masih rendahnya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dimana pada tahun 2020 hanya ada 1 kegiatan.
- f. Terhentinya aktifitas kesenian ditandai dengan tidak adanya pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah pada tahun 2020; Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitasi Seni; Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 0%.
- g. Menurunnya SDM dan sarana kesenian ditandai dengan jumlah group kesenian yang mengalami penurunan sangat drastis menjadi sejumlah 105 group dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang lebih dari 1000 group; jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga hanya tinggal 7 unit saja lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10 unit.

### **17. Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya minat baca masyarakat disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kunjungan perpustakaan menurun dari 123.913 orang menjadi 92.935 orang. Jumlah tersebut sebagian besar merupakan kunjungan virtual yang dilakukan melalui aplikasi iBlora.
- b. Kurangnya pelestarian bahan pustaka dan koleksi perpustakaan, terlihat Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam baru mencapai 998 eksemplar.
- c. Masih terbatasnya perpustakaan yang dibina perpustakaan umum kabupaten, terlihat dari Persentase perpustakaan yang dibina sebesar 52,37% pada tahun 2020.



- d. Masih belum tercapainya target pemenuhan buku koleksi perpustakaan daerah disebabkan oleh adanya refocussing anggaran akibat adanya Covid-19.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan di lembaga kearsipan daerah maupun perangkat daerah, terlihat dari capaian yang mencapai 95%.

### **4.1.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **1. Kelautan Dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan umum, terlihat dari produksi perikanan sebanyak 343.950 kg pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya produksi hasil olahan ikan, pada tahun 2020 hanya mencapai 554,510 kg.
- c. Masih kurangnya tingkat konsumsi ikan, terlihat dari tingkat konsumsi ikan penduduk hanya 13,76 kg/kapita pada tahun 2020.

#### **2. Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengembangan destinasi wisata menjadi destinasi wisata yang menarik, terlihat infrastruktur / sarana pendukung objek wisata yang belum tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari Jumlah obyek wisata unggulan 16 obyek wisata, dan persentase obyek wisata yang dipromosikan 86,9%, Jumlah restoran 85 buah, dan Jumlah penginapan / hotel 33 buah pada tahun 2019.
- b. Kurangnya peran kelembagaan (stakeholders) pariwisata. Hal ini terlihat dari Jumlah pokdarwis aktif sebanyak 6 kelompok pada tahun 2020.

#### **3. Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kehandalan pasokan air untuk mendukung sistem irigasi pertanian (sebagian besar tadah hujan), terlihat dari luas sawah tadah hujan sebesar 29.522,191 hektar.



- b. Belum optimalnya produksi pertanian, dipengaruhi oleh masih terbatasnya sarana produksi pertanian (saprota), alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana lain seperti saluran irigasi dan sarana jalan usaha tani ke areal pertanian; meningkatnya intensitas serangan hama (OPT) tanaman; dan penanganan hasil pertanian belum sepenuhnya memperhatikan penanganan yang baik (good handling practices). Beberapa jenis komoditas belum mencapai target akhir RPJMD, seperti kedelai dan ubi kayu.
- c. Belum optimalnya produksi perkebunan, khususnya tebu. Hal ini terlihat dari hasil perkebunan tebu baru mencapai 16.396,04 ton pada tahun 2020 dari total 18.600 ton yang di targetkan hingga akhir RPJMD.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi peternakan, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan sebanyak 12 ekor pada tahun 2019.

#### **4. Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya nilai ekspor bersih, terlihat dari Nilai Ekspor Bersih tahun 2020 sebesar 2.622.492US\$ dari tahun 2018 sebesar 3.856.673 US\$.
- b. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata, terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata 54,54%% pada tahun 2020.

#### **5. Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan industri terlihat dari persentase pertumbuhan industri 3,39% pada tahun 2019, persentase peningkatan omset penjualan produk IKM 0,90%, dan Persentase klaster industri yang berkembang 91%.
- b. Kualitas industri belum memenuhi standar, terlihat dari persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi baru mencapai 36% pada tahun 2019, dan Persentase industri yang telah menerapkan teknologi baru mencapai 43%.
- c. Banyaknya IKM yang belum memiliki Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan Halal), terlihat dari Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal 50% pada tahun 2019.



## **6. Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi adalah:

- a. minimnya Transmigran yang diberangkatkan karena alokasi yang terbatas, terlihat dari Jumlah Transmigran diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 5 KK

### **4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi SAKIP yang merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran

#### **2. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan daerah dari sumber PAD cenderung turun karena adanya Pandemi Covid 19. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2019 pendapatan daerah dari sumber PAD hanya tumbuh sebesar 0,76%.
- b. Asset daerah berupa tanah belum semuanya dilakukan pensertifikatan. Tanah yang bersertifikat pada tahun 2020 baru sebesar 86%.

#### **3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN
- b. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah (OPD).
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN

#### **4. Penelitian dan pengembangan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya fasilitasi terhadap pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG. Hal ini terlihat dari tidak adanya inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenalkan ke publik pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak



diperbolehkannya kegiatan pemeran serta anggaran yang mengalami pengalokasian focus.

- b. Kurangnya fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), terlihat dari jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi (Paket sederhana) pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak nol.

## 5. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah, pada tahun 2020 skor nilai pelayanan publik “Baik“ pada organisasi perangkat daerah masih diangka 80% yang menunjukkan masih terdapat perangkat daerah dengan pelayanan publik belum baik.
- b. Masih rendahnya pencapaian kerjasama antar pemerintah daerah dibidang ekonomi, hal tersebut terlihat dari tidak tercapainya target kerjasama selamalima tahun terakhir hanya 5 kerjasama dari yang ditargetkan sebanyak 11 bentuk kerjasama.
- c. Belum optimalnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan daerah, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan target penetapan perda, penyusunan berbagai peraturan bupati dan peningkatan kapasitas SDM bidang hukum ditahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target.
- d. Belum semua perangkat daerah menyusun menyusun SOP, SPP dan SKM dengan baik, terlihat dari persentase organisasi perangkat daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM "baik" baru mencapai 80% pada tahun 2020.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan persentase kegiatan fisik yang dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan pada tahun 2020 sebesar 80%.
- f. Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi ditahun 2020 dari target tenaga kerja konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi/lulus sertifikasi ketrampilan hanya tercapai 50 orang dari yang ditargetkan sebanyak 300 orang.
- g. Masih rendahnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020.



## **6. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua rekomendasi hasil pemeriksaan internal selesai ditindaklanjuti. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2020 rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti baru mencapai 96,5%.
- b. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan. Tingkat Maturitas dan kapabilitas SPIP perlu ditingkatkan sehingga mencapai level 4.

## **7. Sekretariat DPRD**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat DPRD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan DPRD, karena kualitas SDM yang masih rendah. Tercatat 34,37 persen aparat sekretariat DPRD belum sarjana.
- b. Beratnya beban sekretariat dan kebutuhan akan teknologi yang memadai belum seimbang dengan kondisi SDM yang ada.

## **8. Kewilayahan (Kecamatan)**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kewilayahan (kecamatan) adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan.
- b. Belum optimalnya implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat

## **9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM terdaftar di Kesbangpol;
- b. Belum optimalnya pendidikan kesatuan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan Lembaga swdaya masyarakat.

## **4.2 Isu strategis**

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan utama pembangunan yang mengemuka dan berdasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah serta permasalahan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang teridentifikasi. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan



signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

#### 4.2.1 Perumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis, sebagaimana tercantum pada skema berikut.



**Gambar 4.1 Lingkungan Strategis yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora**

Perincian kondisi isu aktual dan tantangan global, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis RPJPD Kabupaten Blora dapat diuraikan berikut ini.

#### 1. Isu Aktual dan Tantangan Global (Internasional)

##### a. Tantangan yang termuat dalam Kesepakatan Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

- 1) **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan



- 3) **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) **Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) **Pemakaian yang Bertanggungjawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) **Kehidupan di Bawah Air:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 15) **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
- 16) **Perdamaian dan Keadilan:** Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
- 17) **Kemitraan:** Memperkuat sarana pelaksanaan dan



menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

#### **b. Isu Penting Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)***

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memberikan dampak tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga bidang-bidang lain, termasuk ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Wabah covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perluantisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak Pandemi Covid-19 ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial budaya yang sangat dirasakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit
- b. Menurunnya kunjungan wisatawan dan terganggunya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)
- c. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
- d. Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor
- e. Terhambatnya pasokan bahan pangan pokok
- f. Meningkatnya inflasi
- g. Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif
- h. Menurunnya pendapatan tenaga kerja
- i. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja
- j. Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin
- k. Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih.
- l. Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

#### **2. Isu Strategis Nasional yang Tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024**

Permasalahan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
  - 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam



- 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
  - 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
  - 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
  - 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
  - 3) Pemenuhan Layanan Dasar
  - 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
  - 5) Pengentasan Kemiskinan
  - 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- 1) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
  - 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
  - 3) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
  - 4) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
  - 5) Belum Optimalnya Peran Keluarga
  - 6) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar
  - 2) Infrastruktur Ekonomi
  - 3) Infrastruktur Perkotaan
  - 4) Energi dan Ketenagalistrikan
  - 5) Transformasi Digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon



- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
  - 1) Konsolidasi Demokrasi
  - 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
  - 3) Penegakan Hukum Nasional
  - 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
  - 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

### **3. Isu Strategis Skala Provinsi yang Termuat dalam Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Isu Strategis daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 meliputi sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung
- e. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
- f. Kedaulatan pangan dan energi
- g. Kesenjangan wilayah
- h. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

### **4. Isu Strategis Skala Kabupaten yang termuad dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025**

Isu Strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025 meliputi:

- a. Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar apabila tidak segera diatasi bisa mengganggu suasana aman, tentram dan damai karena bisa memunculkan banyak penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat.
- b. Aksesibilitas, pemerataan dan peningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan yang masih rendah.
- c. Merebaknya beberapa penyakit utamanya demam berdarah, HIV/AIDS, kasus kurang gizi yang masih sering terjadi memerlukan peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis, dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah kesehatan.



- d. Pengaruh dan dampak negatif globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi yang semakin mudah dan tanpa batas semakin mempertipis nilai-nilai moral, budaya dan agama serta nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.
- e. Minimnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan terjadinya alih fungsi lahan.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian, antara lain pasar-pasar tradisional, pasar-pasar desa yang berdampak pada keterbatasan dan kelemahan untuk memasarkan potensi ekonomi daerah.
- h. Kesadaran akan pentingnya kreativitas dan inovasi masyarakat di bidang iptek perlu ditingkatkan
- i. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pokok yaitu ketersediaan air, baik untuk irigasi maupun air minum. Perlu pembangunan sarana prasarana sumber daya air meliputi embung, waduk serta pemeliharaan jaringan irigasi.
- j. Kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan dan ketersediaan sarana transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung mobilitas penduduk dan pemasaran produk pertanian.
- k. Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- l. Upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dengan berbasas pada norma-norma tata pemerintahan yang baik, dan transparansi disemua lini utamanya aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
- m. Upaya meningkatkan kondusivitas wilayah dalam suasana sejuk, aman dan tertib.
- n. Kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan perlu secara bertahap dikurangi, baik itu kesenjangan kualitas lahan/hunian maupun tingkat kesejahteraan masyarakat
- o. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya pelestarian serta kurangnya konservasi akan menurunkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain bahan tambang galian golongan C, dan air bawah tanah.



## **5. Isu Strategis Prioritas yang Dihasilkan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)- RPJMD Kabupaten Bloro Tahun 2021-2026**

Berdasarkan analisis capaian target kinerja dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bloro, dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bloro 2021-2026 dirumuskan isu strategis TPB berdasarkan program-kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), indikator yang terdapat datanya tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD (TT) dan indikator yang belum memiliki data (NA). Penentuan isu strategis KLHS Kabupaten Bloro didahului dengan penentuan isu panjang pembangunan berkelanjutan, kemudian dilakukan penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas.

Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, isu strategis prioritas Kabupaten Bloro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kawasan Rawan Bencana Alam
- b. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- c. Kesenjangan Antar Wilayah Karena Terbatasnya Sarana dan Prasarana
- d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Daerah
- e. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusivitas wilayah



**Tabel 4.2**  
**Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026**

| Isu Global SDGs  | Isu Global Covid-19  | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023   | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025  | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026  | Rumusan Isu Strategis RPJMD                              |
|--|--|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan Yang Baik: <b>Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.</b></li> <li>• Pendidikan Berkualitas: <b>Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.</b></li> <li>• Kesetaraan Gender: <b>Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya pendapatan tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya pemutusan hubungan kerja</li> <li>• Meningkatnya penyandang masalah sosial dan penduduk miskin</li> <li>• Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit</li> </ul> | <p><b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Berdaya Saing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan</li> <li>• Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk</li> <li>• Pemenuhan Layanan Dasar</li> <li>• Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda</li> <li>• Pengentasan Kemiskinan</li> <li>• Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing</li> </ul> | <p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Penanggulangan Kemiskinan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar.</li> <li>• Aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan yang masih rendah.</li> <li>• Merebaknya beberapa penyakit utamanya demam berdarah, HIV/AIDS, kasus kurang gizi yang masih sering.</li> <li>• Kesadaran akan pentingnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas SDM</li> <li>• Pengendalian Penduduk</li> <li>• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul> | <p><b>Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</b></p> |



| Isu Global SDGs   | Isu Global Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025                                     | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026 | Rumusan Isu Strategis RPJMD |
|---|---------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>anak perempuan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Ada Kemiskinan: <b>Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.</b></li> <li>• Menghapuskan Kelaparan: <b>Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan</b></li> </ul> |                     | <p><b>Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa</li> <li>• Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia</li> <li>• Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama</li> <li>• Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan</li> <li>• Belum Optimalnya Peran Keluarga</li> <li>• Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas</li> </ul> |  | <p>keativitas dan inovasi masyarakat di bidang iptek perlu ditingkatkan</p> |                                    |                             |



| Isu Global SDGs   | Isu Global Covid-19   | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023   | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025  | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026   | Rumusan Isu Strategis RPJMD  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: <b>Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.</b></li> <li>• Pemakaian Yang Bertanggungjawab: <b>Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya kunjungan wisatawan dan berhentinya aktivitas industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)</li> <li>• Berkurangnya pasokan impor bahan baku industry</li> <li>• Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor</li> <li>• Meningkatnya inflasi</li> <li>• Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif</li> </ul> | <p><b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</b></p> <p>Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan Sumber Daya Alam</li> <li>• Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi</li> <li>• Transformasi Struktural Berjalan Lambat</li> <li>• Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</li> <li>b. Kedaulatan pangan dan energi</li> </ol> | <p>Minimnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Ekonomi Lokal</li> <li>• Pengentasan Kemiskinan</li> <li>• Pengangguran</li> </ul> | <p><b>Dampak Covid 19 dan Daya Saing Ekonomi Daerah di Era Revolusi Industri 4.0</b></p> |



| Isu Global SDGs   | Isu Global Covid-19   | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023  | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026   | Rumusan Isu Strategis RPJMD                                |
|---|---|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri, Inovasi dan Infrastruktur: <b>Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</b></li> <li>• Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: <b>Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.</b></li> <li>• Air Bersih dan Sanitasi: <b>Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih.</li> </ul> | <p><b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b><br/><i>Infrastruktur Pelayanan Dasar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau</li> <li>• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman</li> <li>• Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan</li> <li>• Keselamatan dan Keamanan Transportasi</li> <li>• Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam</li> <li>• Kesenjangan wilayah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah penduduk menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pokok yaitu ketersediaan air, baik untuk irigasi maupun air minum.</li> <li>• Kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan dan ketersediaan sarana transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung mobilitas penduduk dan pemasaran produk pertanian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar</li> </ul> | <p><b>Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah</b></p> |



| Isu Global SDGs  | Isu Global Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025  | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026 | Rumusan Isu Strategis RPJMD |
|--|---------------------|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energi Terbarukan: <b>Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.</b></li> <li>• Berkurangnya Ketidaksetaraan: <b>Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.</b></li> </ul> |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi</li> </ul> <p><i>Infrastruktur Ekonomi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektivitas Jalan</li> <li>• Konektivitas Kereta Api</li> <li>• Konektivitas Laut</li> <li>• Konektivitas Udara</li> <li>• Konektivitas Darat</li> </ul> <p><i>Infrastruktur Perkotaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi Perkotaan</li> <li>• Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan</li> <li>• Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan</li> <li>• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perekonomian, antara lain pasar-pasar tradisional, pasar-pasar desa.</li> <li>• Kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan perlu secara</li> </ul> |                                    |                             |



| Isu Global SDGs | Isu Global Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026 | Rumusan Isu Strategis RPJMD |
|-----------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
|                 |                     | <p>yang Layak dan Aman di Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan</li></ul> <p><i>Energi dan Ketenagalistrikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan</li><li>• Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan</li><li>• Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan</li><li>• Transformasi Digital</li><li>• Penuntasan Infrastruktur TIK</li></ul> |  | <p>bertahap dikurangi, baik itu kesenjangan kualitas lahan/hunian maupun tingkat kesejahteraan masyarakat</p> |                                    |                             |



| Isu Global SDGs  | Isu Global Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023   | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026  | Rumusan Isu Strategis RPJMD  |
|--|---------------------|---|--|---|---|--|
|  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Infrastruktur TIK</li> <li>Fasilitas Pendukung Transformasi Digital</li> </ul> <p><b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</b><br/>Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah</p> |  |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aksi Iklim: <b>Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya</b></li> <li>Kehidupan di Bawah Air: <b>Mengambil tindakan segera untuk</b></li> </ul> | -                   | <p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Peningkatan Ketahanan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan terjadinya alih fungsi lahan.</li> <li>Eksplorasi sumber daya alam yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resiko Bencana</li> <li>Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> </ul> | <b>Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan</b> |



| Isu Global SDGs  | Isu Global Covid-19   | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026   | Rumusan Isu Strategis RPJMD                |
|--|---|--|--|---|--|--|
| <p><b>memberantas perubahan iklim dan dampaknya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehidupan di Darat : <b>Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.</b></li> </ul> |   | <p>Bencana dan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Rendah Karbon</li> </ul> |  | <p>berlebihan tanpa memperhatikan upaya pelestarian serta kurangnya konservasi akan menurunkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain bahan tambang galian golongan C, dan air bawah tanah.</p> |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdamaian dan Keadilan: <b>Menggalakkan</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya aktivitas pelayanan publik</li> </ul> | <p><b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan</b></p>   | <p>Tata kelola pemerintahan dan</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya peningkatan pelayanan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola Pemerintahan</li> </ul> | <p><b>Tata kelola pemerintahan dan</b></p> |



| Isu Global SDGs   | Isu Global Covid-19                                 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026   | Rumusan Isu Strategis RPJMD        |
|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| <p><b>masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan: <b>Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.</b></li> </ul> | <p>dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan</p> | <p><b>Transformasi Pelayanan Publik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidasi Demokrasi</li> <li>• Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</li> <li>• Penegakan Hukum Nasional</li> <li>• Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</li> <li>• Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</li> </ul> | <p>kondusivitas wilayah</p>                        | <p>publik yang prima dengan berasas pada norma-norma tata pemerintahan yang baik, dan transparansi disemua lini utamanya aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh dan dampak negatif globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi yang semakin mudah dan tanpa batas semakin mempertipis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kondusivitas wilayah</li> <li>• Pengembangan Teknologi</li> </ul> | <p><b>kondusivitas wilayah</b></p> |



| Isu Global SDGs | Isu Global Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 | Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 | Isu Strategis RPJPD Kab Blora 2005-2025   | Isu Strategis KLHS RPJMD 2021-2026 | Rumusan Isu Strategis RPJMD |
|-----------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
|                 |                     |  |  | nilai-nilai moral, budaya dan agama serta nilai-nilai kearifan lokal. <ul style="list-style-type: none"><li>• Upaya meningkatkan kondusivitas wilayah dalam suasana sejuk, aman dan tertib.</li></ul> |                                    |                             |



#### 4.2.2 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Berdasarkan isu dan tantangan global (internasional), isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, dan isu strategis RPJPD Kabupaten Blora, maka ditetapkan isu strategis RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.



**Gambar 4.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026**

Gambaran rinci atas masing-masing isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

##### 1. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Kondisi kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Blora dihadapkan pada capaian IPM yang masih rendah. Walaupun capaian IPM Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,61 menjadi 68,84 pada tahun 2020, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 71,94 dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 71,81 pada tahun 2020. IPM Kabupaten



Blora Tahun 2020 masih menempati peringkat ke-29 dari sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2020 telah mencapai 74,41 tahun, rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,83 tahun, Harapan Lama Sekolah baru mencapai 12,2 tahun, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan baru mencapai Rp 9.571.000,00.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari sebesar 83,55 pada tahun 2017 menjadi 83,96 pada tahun 2019. Kabupaten Blora menempati ranking terakhir diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Terkait pemberdayaan gender, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blora pada tahun 2019 baru mencapai 65,59 dan berada pada peringkat ke-26 dari sejumlah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Keteringgalan kualitas SDM Kabupaten Blora dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat terkait dengan beberapa permasalahan seperti: (1) akses dan kualitas pendidikan inklusif bagi semua orang; (2) derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dan pengendalian kasus covid-19; (3) pemenuhan hak perempuan dan anak, dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) kualitas pemuda, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga. Oleh karena itu pembangunan manusia perlu menjadi prioritas pembangunan yang harus diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan secara terpadu dan berkelanjutan.

## **2. Dampak Covid-19 dan daya saing ekonomi daerah di era Revolusi Industri 4.0**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian daerah, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Blora. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah secara nyata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang diproyeksikan pada tahun 2020 hanya mencapai 1%. Dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 tentunya perlu diantisipasi agar kedepan perekonomian daerah tetap dapat berkembang dan mampu berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi akan sangat terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Blora,



seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah. Isu peningkatan daya saing ekonomi untuk mengatasi permasalahan utama terkait: (1) daya saing investasi daerah; (2) kunjungan wisata dan ekonomi kreatif; (3) perdagangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok; (4) omset usaha mikro, kecil dan menengah; (5) revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital; dan (6) keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 11,96 persen, meningkat 0,64 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 103,73 ribu orang, meningkat 5,88 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora 2020 tercatat mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Blora pada 2020 bahkan lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah (11,41 persen). Meningkatnya persentase penduduk miskin pada 2020 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara absolut menjadi 103,73 ribu jiwa. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya meningkatnya harga-harga bahan pokok, harga BBM, serta dipicu adanya awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020. Isu kemiskinan perlu menjadi prioritas pembangunan yang penanganannya bersifat lintas sektor yang mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, peningkatan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta dan verifikasi dan validasi data fakir miskin.

Dari sisi ketenagakerjaan, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 menjadi 4,89% dari sebesar 3,82% pada tahun 2019. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 6.932 orang pengangguran baru karena Covid-19, sebanyak 2.286 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi Covid-19. Isu pengangguran sangat terkait dengan peluang kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pengurangan pengangguran perlu menjadi



prioritas pembangunan dengan mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.

### **3. Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah**

Pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah yang berkualitas, pemenuhan sarana dasar perumahan dan kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas infrastruktur sumberdaya air.

Kondisi infrastruktur penunjang konektivitas dapat dilihat dari kualitas jalan. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620 / 293 / 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84 km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km dari sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi hampir semuanya rusak berat. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Blora hanya sebesar 22,29% pada tahun 2020. Selain jalan, layanan transportasi juga perlu ada perbaikan, termasuk upaya peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.

Kabupaten Blora masih dihadapkan pada pencapaian universal acces di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2020 belum mencapai target nasional (100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi). Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani dari keseluruhan luasan SK Bupati Blora No. 663/886/2014 sebesar 18,01 ha yang terletak di Kecamatan Cepu, Blora, Randublatung, Kunduran, dan Ngawen. Cakupan pelayanan sanitasi baru mencapai 95% pada tahun 2019, dan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebesar 89%. Persoalan lain terkait akses perumahan dan permukiman layak dan aman adalah keberadaan rumah tidak layak huni yang perlu penanganan agar masyarakat dapat hidup secara layak.

Infrastruktur sumberdaya air terutama terkait pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi pertanian, terlihat dari persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian tahun 2020 sebesar 44,13%, persentase embung kondisi baik sebesar 51,67%, dan persentase waduk kondisi baik sebesar 90%.



#### **4. Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan**

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 70,25 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air sebesar 67,87, Indeks Kualitas Udara sebesar 60,37 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 75,81. Isu lingkungan terutama terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai upaya pemulihan lingkungan serta perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan lainnya yaitu terkait pengelolaan sampah. Persentase sampah yang terangkut pada tahun 2020 baru mencapai 80%. Dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah Blora (di Kecamatan Blora dan Cepu) hanya mampu menampung 15 persen beban dari keseluruhan sampah warga Kabupaten Blora. Kedua TPA tersebut perlu ditingkatkan sarana dan prasarannya agar sistem pengolahannya lebih baik dan mampu menampung keseluruhan sampah yang ada di kabupaten Blora. Pengelolaan sampah melalui bank sampah juga kurang optimal. Hingga tahun 2020 hanya terdapat sebanyak 45 bank sampah di Kabupaten Blora.

#### **5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah**

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi baru mencapai predikat “B” nilai 62,22. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya



peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

Perwujudan birokrasi yang kapabel perlu didukung upaya yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN berbasis sistem merit. Peningkatan pelayanan publik yang prima perlu terus ditingkatkan mengingat rata-rata kepuasan masyarakat baru mencapai 83,52% pada tahun 2020.

Kondusifitas wilayah memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jika kondisi wilayah dan masyarakatnya kondusif, maka semua kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan lancar. Kondusifitas daerah harus terus ditingkatkan dengan menjaga kekompakan dalam masyarakat dan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, POLRI dan masyarakat mulai dari tingkat terendah hingga tingkat kabupaten, termasuk menciptakan kesadaran dan solidaritas dalam kehidupan beragama. Isu kondusifitas wilayah terutama terkait dengan antisipasi potensi konflik sosial dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.



## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah:



### Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

#### 1. **Sesarengan Mbangun Blora**

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora**



## 2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.2 Makna Frase Visi Unggul**

## 3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.3 Makna Frase Visi Daya Saing**



## 5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi **Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi RPJMD Kabupaten Blora memiliki keselarasan dengan : (1) Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora 2005-2025; (2) Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, dan (3) Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:



**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Blora dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2005, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 , dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2028-2023**

| Sasaran Pokok RPJPD Kab Blora Tahun 2005-2025                        | Misi RPJMN Tahun 2020-2024   | 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024   | Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023   | Misi RPJMD Kab. Blora Tahun 2021-2026  |
|--|--|--|---|--|
| 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas                  | 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia<br>5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li> </ul>  | 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan           | 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. |
| 3. Terwujudnya pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana | 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</li> </ul> | 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. | 2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan     |
| 5. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan                     | 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li> </ul>   | 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke                                     | 3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.       |



| Sasaran Pokok RPJPD Kab Blora Tahun 2005-2025  | Misi RPJMN Tahun 2020-2024  | 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024  | Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023   | Misi RPJMD Kab. Blora Tahun 2021-2026   |
|--|---|---|---|---|
| yang baik dan demokratis   | 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan   |   | pemerintah kabupaten/kota.  |   |
| 6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tenteram, tertib dan aman                      | 6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya<br>7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li> </ul>  | 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia | 4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.   |
| 2. Terwujudnya Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat<br>4. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan | 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing<br>3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</li> <li>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li> </ul> | 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.       | 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. |



### **5.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blera Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blera tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Blera Tahun 2021-2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.2**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026**

| No | Misi RPJMD  | Tujuan RPJMD   | Sasaran RPJMD   | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                | Satuan | Kondisi      | Target Kinerja |       |       |       |       |       |
|----|---|--|---|---|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |  |   |   |        | Awal<br>2020 | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1  | Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. | Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia                 |   | 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)         | Indeks | 68,84        | 69,04          | 69,24 | 69,44 | 69,64 | 69,84 | 70,04 |
|    |   |  |   | 2. Indeks Pembangunan Gender                | Indeks | 83,89        | 83,94          | 83,99 | 84,04 | 84,09 | 84,14 | 84,19 |
|    |   |  | Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan                | a. Rata-rata Lama Sekolah                   | Tahun  | 6,83         | 6,95           | 7,07  | 7,19  | 7,31  | 7,43  | 7,55  |
|    |   |  |   | b. Angka Harapan Lama Sekolah               | Tahun  | 12,2         | 12,25          | 12,3  | 12,35 | 12,4  | 12,45 | 12,5  |
|    |   |  | Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat                | c. Usia Harapan Hidup                       | Tahun  | 74,41        | 74,52          | 74,63 | 74,74 | 74,85 | 74,96 | 75,07 |
|    |   |  | Meningkatnya kualitas hidup perempuan                     | d. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)         | Indeks | 65,61        | 65,63          | 65,65 | 65,67 | 65,69 | 65,71 | 65,73 |
| 2  | Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan     | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup |   | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | Indeks | 70,25        | 67,56          | 68,28 | 68,38 | 69,11 | 69,21 | 69,93 |
|    |   |  |   | 2. Tingkat pembangunan infrastruktur daerah | %      | 81,24        | 82,96          | 84,40 | 85,60 | 86,79 | 86,55 | 87,49 |
|    |   | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur                      | a. Persentase rumah layak huni                            | %   | 64,5   | 66           | 67,5           | 69    | 70,5  | 72    | 73,5  |       |
|    |   |  | b. Persentase kawasan perkotaan non kumuh                 | %   | 99,62  | 99,67        | 99,71          | 99,76 | 99,81 | 99,86 | 99,90 |       |
|    |   |  | c. Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman | %   | 87     | 89           | 91             | 93    | 95    | 96    | 98    |       |
|    |   |  | d. Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman  | %   | 96     | 97           | 98             | 99    | 100   | 100   | 100   |       |



**RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026**



| No       | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD                                   | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | Satuan | Kondisi      | Target Kinerja |         |           |         |          |        |
|----------|--|---|---|--|--------|--------------|----------------|---------|-----------|---------|----------|--------|
|          |  |   |   |  |        | Awal<br>2020 | 2021           | 2022    | 2023      | 2024    | 2025     | 2026   |
|          |  |   |   | e. Persentase jalan mantap   | %      | 70           | 75             | 77      | 79        | 81      | 83       | 85     |
|          |  |   |   | f. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi                | %      | 47,81        | 50,03          | 52      | 54        | 56      | 58       | 60     |
|          |  |   |   | g. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | %      | 100          | 100            | 100     | 100       | 100     | 100      | 100    |
|          |  |   |   | h. Persentase sarana perhubungan kondisi baik                          | %      | 85           | 87             | 90      | 91        | 92      | 93       | 94     |
|          |  |   | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup          | i. Indeks Kualitas Air   | Indeks | 50,00        | 50,00          | 51,00   | 51,10     | 52,00   | 52,10    | 53,00  |
|          |  |   |   | j. Indeks Kualitas Udara   | Indeks | 76,46        | 76,56          | 77,46   | 77,56     | 78,46   | 78,56    | 79,46  |
|          |  |   |   | k. Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                       | Indeks | 80,77        | 80,87          | 80,97   | 81,07     | 81,17   | 81,27    | 81,37  |
| <b>3</b> | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi wilayah yang kondusif | Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah |   | Indeks Reformasi Birokrasi   | Indeks | 55,98 (CC)   | 62 (B)         | 64 (B)  | 67 (B)    | 71 (B)  | 73 (B)   | 75 (A) |
|          |  |   | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | a. Nilai SAKIP   | Skor   | B            | B              | 70 (BB) | 72,5 (BB) | 75 (BB) | 77,5(BB) | 80 (A) |
|          |  |   |   | b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Opini  | WTP          | WTP            | WTP     | WTP       | WTP     | WTP      | WTP    |
|          |  |   |   | c. Indeks persepsi Anti Korupsi  | indeks |              | 64,51          | 66,51   | 68,51     | 70,51   | 72,51    | 74,51  |
|          |  |   | Terwujudnya birokrasi yang kapabel              | d. Indeks Maturitas Kelembagaan  | level  |              | 3              | 3       | 3         | 3       | 3        | 4      |
|          |  |   |   | e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)               | Indeks | 2,62         | 2,86           | 2,96    | 3         | 3,05    | 3,1      | 3,15   |
|          |  |   |   | f. Indeks Profesionalitas ASN  | Indeks | 70           | 72             | 72      | 73        | 73      | 74       | 74     |



**RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026**



| No | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD   | Sasaran RPJMD   | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                            | Satuan | Kondisi      | Target Kinerja |       |       |       |       |       |
|----|--|--|---|---|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |  |   |   |        | Awal<br>2020 | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|    |  |  | Meningkatnya kualitas Pelayanan publik                    | g. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat                 | Indeks | 70           | 71,5           | 73,0  | 74,0  | 74,5  | 75    | 75,5  |
| 4  | Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif  | Terciptanya kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat |   | Indeks kerukunan antar umat beragama (indeks toleransi) | Indeks |              | 74,6           | 74,8  | 75    | 75,2  | 75,4  | 75,6  |
|    |  |  | Menurunnya konflik dan pelanggaran peraturan daerah       | Persentase konflik sosial tertangani                    | %      | 100          | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |  |  |   | Persentase Pelanggaran Perda/perkada tertangani         | %      | 100          | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5  | Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. | Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi      |   | 1. Pertumbuhan Ekonomi                                  | %      | 2-4          | 2-4            | 2-4   | 2-4   | 2-4   | 2-4   | 2-4   |
|    |  |  |   | 2. Laju Inflasi   | %      | 2,05         | 2,5-6          | 2,5-6 | 2,5-6 | 2,5-6 | 2,5-6 | 2,5-6 |
|    |  |  | Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah    | a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan      | %      | 1,79         | 1,79           | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  | 1,79  |
|    |  |  |   | b. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan          | %      | 10,02        | 10,02          | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
|    |  |  |   | c. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan                  | %      | 10,82        | 10,82          | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
|    |  |  |   | d. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata                    | %      | -32,60       | 3,00           | 3,00  | 4,00  | 4,20  | 4,35  | 4,50  |
|    |  |  | Meningkatnya investasi daerah dan penyerapan tenaga kerja | e. Pertumbuhan Investasi                                | %      |              | 4              | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No | Misi RPJMD | Tujuan RPJMD               | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | Satuan | Kondisi      | Target Kinerja |        |        |        |        |        |
|----|------------|----------------------------|--|--|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |                            |  |  |        | Awal<br>2020 | 2021           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|    |            | Menurunkan penduduk miskin |  | 3. Persentase Penduduk Miskin  | %      | 11,96        | 11,68          | 11,4   | 11,12  | 10,84  | 10,56  | 10,28  |
|    |            |                            | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja                 | a. Tingkat Pengangguran Terbuka  | %      | 5            | 6-7            | 5,5    | 5,4    | 5,3    | 5,2    | 5,1    |
|    |            |                            | Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial | b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani | %      | 0,7          | 0,72           | 0,73   | 0,74   | 1,74   | 1,74   | 1,74   |
|    |            |                            | Meningkatnya kemandirian desa.                       | c. Indeks Desa Membangun   | Indeks | 0,6500       | 0,6505         | 0,6510 | 0,6515 | 0,6520 | 0,6525 | 0,6530 |



## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 6.1**  
**Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026**

| No | Misi RPJMD  | Tujuan RPJMD                             | Sasaran RPJMD                              | Strategi RPJMD  |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. | Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia | Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan | Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;</li> <li>b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;</li> <li>c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;</li> <li>d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul>  |
|    |   |  | Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat<br>Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana<br>Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.<br>Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.<br>Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau. |
|    |   |  | Meningkatnya kualitas hidup perempuan      | Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.   |
|    |   |  |  |   |



| No | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD                                   | Strategi RPJMD   |
|----|--|---|---|--|
| 2  | Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan    | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan hidup                | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur             | <p>Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru</p> <p>Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah.</p> <p>Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan</p> <p>Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan.</p> |
|    |  |   | Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup          | <p>Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara</p> <p>Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p>  |
| 3  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi wilayah yang kondusif | Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusifitas Wilayah | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | <p>Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.</p> <p>Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek</p> <p>Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit (Merit System).</p>   |
|    |  |   |   | <p>Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah.</p>  |
|    |  |   | Terwujudnya birokrasi yang kapabel              | <p>Pengembangan e-government untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open government) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau.</p> <p>Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian</p>  |



| No | Misi RPJMD                                | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD                                       | Strategi RPJMD  |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   |   | Peningkatan implementasi <i>single data</i> didukung teknologi informasi terintegrasi   |
|    |   |   | Meningkatnya kualitas Pelayanan publik              | Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan  |
|    |   |   |   | Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka cetak dan rekam.  |
|    |   |   |   | Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan.   |
|    |   |   |   | Peningkatan kualitas pelayanan transmigran, melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar transmigrasi yang layak   |
|    |   |   |   | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan.            |
|    |   |   |   | Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur.   |
| 4  | Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif | Terciptanya koheisi sosial dalam kehidupan masyarakat | Menurunnya konflik dan pelanggaran peraturan daerah | Peningkatan kondusivitas daerah pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan, danantisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.  |
|    |   |   |   | Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.   |
|    |   |   |   | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. |
| 5  | Memperkuat ekonomi kerakyatan             | Meningkatkan pertumbuhan                              | Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor              | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian  |



| No  | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD   | Strategi RPJMD  |
|---|--|---|-----------------|---|
|   | berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. | dan daya saing Ekonomi  | unggulan daerah | Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner |
| Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan                     |  |   |                 |   |
| Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.  |  |   |                 |   |
| Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah   |  |   |                 |   |
| Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru                                    |  |   |                 |   |
| Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum. |  |   |                 |   |
| Meningkatnya investasi daerah   |  | Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi  |                 |   |
| Menurunkan penduduk miskin  | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja   | Mengarungi pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.   |                 |   |
|   | Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial   | Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.              |                 |   |
|   | Meningkatnya kemandirian desa.   | Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa. |                 |   |

## 6.2 Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.



Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

### 1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: **“Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Infrastruktur Wilayah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat
- Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif
- Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan



## 2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **“Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- d. Peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
- e. Reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
- f. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

## 3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **“Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan”**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
- c. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- d. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- f. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

## 4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **“Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”**

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing



- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.

#### **5. Arah Kebijakan Tahun 2025**

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **“Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”**

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- b. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
- d. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

#### **6. Arah Kebijakan Tahun 2026**

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: **“Perwujudan Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”**

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

### **6.3 Program Unggulan Kabupaten Blora**

Program unggulan daerah Kabupaten Blora merupakan 45 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Blora Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam lima tahun kedepan dengan penjabaran kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada Tabel berikut ini.



**Tabel 6.1**  
**Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Blora**  
**Kedalam Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri**  
**Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui**  
**Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020**

| Program Kerja   | Urusan                                  | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   |
| 1. Mbangun Dalam Dadi Alus :<br>a. Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan – Kabupaten;<br>b. Pembangunan Jalan Penghubung Desa – Kecamatan;<br>c. Pembangunan Jalan penghubung antar desa;<br>d. Pembangunan Jalan Lingkar; | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Penyelenggaraan Jalan  | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Pembangunan Jalan  |
| e. Penerangan jalan;  | 2.15. Perhubungan                       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  |
| 2. Banyune Lancar Terus :<br>Sumur resapan / penampungan air di daerah rawan kekeringan;<br>Konservasi Sumber Daya Air;<br>Pembangunan Embung dan Waduk;  | 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku<br>Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                 |
| 3. Golek Gawean Gampang :   |   |  |  |  |
| a. Pelatihan dan peningkatan ketrampilan  | 2.07. Ketenagakerjaan;                  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                       | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |



| Program Kerja   | Urusan                                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020       |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  |
| b. Menciptakan petani muda dan peternak sapi yang handal<br>c. Mendukung Program LMDH dan Perhutanan Sosial | 3.27. Pertanian;                       | Program Penyuluhan Pertanian   | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   |
| d. Mendampingi dan fasilitasi industri rumah tangga, UKM dan UMKM   | 3.31. Perindustrian.                   | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |
| e. Pembangunan Sentra UKM dan UMKM<br>f. Membentuk lapak perdagangan online (market place)                  | 2.17. Koperasi dan UKM;                | Program Pengembangan UMKM  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil   | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi |
| g. Membentuk inkubasi bisnis dan start up ekonomi kreatif   | 3.26. Pariwisata;                      | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif  |
| h. Pembangunan dan fasilitasi pasar rakyat dan pasar pertanian  | 3.30. Perdagangan                      | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  |
| i. Fasilitasi dan penguatan BUMD dan BUMDes   | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa   |
| 4. Mbantukan Kadang Tani:   |  |  |   |   |
| a. Mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk;<br>b. Membentuk Gubug Pupuk;                                 | 3.27. Pertanian;                       | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                           |



| Program Kerja   | Urusan                  | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |  |
|---|-------------------------|--|--|--|
|   |                         | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   |
| c. Modernisasi pertanian untuk menopang penguatan ketahanan pangan (urban farming);   |                         |  |  | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Masalah pengawasan pupuk.   |
| d. Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian;   |                         |  | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   |
| e. Pembangunan Jalan Usaha Tani;  |                         |  | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  |
| 5. Ayo Dolan Blora:   |                         |  |  |  |
| a. Pembangunan Kawasan Kars Edupark;<br>b. Membentuk Desa Wisata, Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Religi, Wisata Edukasi, Wisata Sejarah dan Wisata Kuliner;<br>c. Membangun Kebun Raya; | 3.26. Pariwisata        | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                              | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| d. Mendorong terwujudnya Desa Budaya;   | 2.22. Kebudayaan        | Program Pengembangan Kebudayaan  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional  |
| 6. Ngopeni Kadang Kekurangan :  |                         |  |  |  |
| a. Bantuan paket sembako penduduk rentan;   | 1.06. Sosial            | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |
| b. 1 Desa 2 Sarjana untuk warga tidak mampu;  | 4.01 Sekretariat Daerah | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Fasilitasi Kerjasama Daerah  | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   |



| Program Kerja  | Urusan                                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan  |
| c. Gerakan ngedekke omah layak huni;   | 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman | Program Kawasan Permukiman   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  |
|  |  | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh   | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota       | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |
| 7. Dukungan operasional PAUD dan insentif guru dan pengelola PAUD;   | 1.01. Pendidikan                       | Program Pengelolaan Pendidikan   | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                       | Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD   |
| 8. Kartu Blora Mengaji, dukungan operasional dan insentif guru MADIN, Taman Pendidikan Al-Qurán, Pondok Pesantren dan Sekolah Minggu, serta sekolah keagamaan lainnya; | 4.01. Sekretariat Daerah               | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |
| 9. Satu Desa Satu Hafidh;  | 4.01. Sekretariat Daerah               | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |
| 10. Beasiswa pelajar/mahasiswa dan santri berprestasi;   | 1.01. Pendidikan                       | Program Pengelolaan Pendidikan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar   |
|  |  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                    | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama  |
|  |  |  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD  |



| Program Kerja   | Urusan                   | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--|
|   |                          | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   |
|   |                          |  | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan   |
| 11. Mendorong dan mendukung lahirnya perguruan tinggi di Blora yang berstatus institut atau universitas;              | 4.01 Sekretariat Daerah  | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Fasilitasi Kerjasama Daerah                          | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   |
| 12. Insentif dan fasilitasi GTT, PTT dan honorer;   | 1.01. Pendidikan         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |
| 13. Dukungan operasional dan fasilitasi pembangunan tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan; | 4.01. Sekretariat Daerah | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat           | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   |
| 14. Fasilitasi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;   | 1.01. Pendidikan         | Program Pengelolaan Pendidikan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas |
|   |                          |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas |
|   |                          |  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       |



| Program Kerja  | Urusan           | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |   |  |
|--|------------------|--|---|--|
|  |                  | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan   |
|  |                  |  |   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  |
|  |                  |  | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |
|  | 1.02. Kesehatan  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 15. Fasilitasi biaya pendidikan dan kesehatan warga tidak mampu dalam bentuk Kartu Blora Pintar dan Kartu Blora Sehat; | 1.01. Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar  |
|  |                  |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama   |
|  |                  |  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   |
|  | 1.02. Kesehatan  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |



| Program Kerja  | Urusan                                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan  |
| 16. Mandeng sedulur meteng (percepatan penurunan stunting, Angka Kematian Bayi, Ibu dan Anak); | 1.02. Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| 17. Mengembangkan kegiatan seni dan budaya dalam rangka mendorong ekonomi kreatif;             | 2.22. Kebudayaan;                      | Program Pengembangan Kesenian Tradisional  | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional   |
| 18. Fasilitasi kelompok kesenian dan kebudayaan;   | 2.22. Kebudayaan;                      | Program Pengembangan Kebudayaan  | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional   |
| 19. Blora Mengaji;   | 4.01. Sekretariat Daerah               | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |
| 20. Ngopi Bareng, upacara kenegaraan, kerja bhakti bareng tanggalan kanca beda agama;          | 2.13. Pemberdayaan masyarakat dan Desa | Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat          | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  |



| Program Kerja  | Urusan  | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  |   | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan  |
| 21. Musrenbang Lansia, Kelompok Rentan, Difabel, Pemuda, Perempuan dan Anak;       | 5.01<br>Perencanaan                                   | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                            | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   |
| 22. Pembangunan Responsif Gender;  | 2.08.<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                    | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   |
|  |   |  | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                        |
| 23. Mendukung dan fasilitasi pembangunan Bandara Ngloram;                          | 2.10.<br>Pertanahan                                   | Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum   |  |   |
| 24. Fasilitasi sarana prasarana transportasi, komunikasi, listrik dan perhubungan; | 2.15.<br>Perhubungan                                  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                        |
| 25. Percepatan pembangunan kawasan peruntukan industri dan mempermudah perijinan;  | 3.31.<br>Perindustrian                                | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                   |
|  | 2.18.<br>Penanaman Modal                              | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan           | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |



| Program Kerja  | Urusan                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |   |
|--|------------------------|--|--|---|
|  |                        | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan  |
|  |                        |  | Daerah Kabupaten/ Kota   |   |
| 26. Menata lingkungan ijo royo-royo;   | 2.11. Lingkungan Hidup | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                               | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   |
| 27. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam meliputi :<br>a. Migas dan tambang;<br>b. Pembangunan kawasan industri berbasis migas;   | 3.31. Perindustrian    | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| c. Pemantapan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan untuk mendukung kegiatan produktif berbasis lahan hutan;<br>d. Pengembangan usaha produktif berbasis lahan hutan dengan sistem agroforestri modern melalui penerapan teknologi Smart Farming untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa hutan; | 3.27. Pertanian        | Program Penyuluhan Pertanian   | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     |
| e. Pengembangan industri pengolahan  | 3.31. Perindustrian    | Program Perencanaan Dan  | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan   |



| Program Kerja   | Urusan  | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan  |
| hasil pertanian dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan petani dan PAD.   |   | Pembangunan Industri   | Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |
| 28. Menanam pohon buah-buahan dan sayuran di lingkungan rumah dan lahan kosong;   | 3.27. Pertanian   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   |
| 29. Penanggulangan dan penanganan bencana alam;   | 1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat | Program Penanggulangan Bencana   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  |
|   |   |  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota<br>Respon Cepat Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit  |
| 30. Tata Kelola Sampah Produktif, Tempat Pembuangan Akhir dan Rumah Kompos;   | 2.11. Lingkungan Hidup  | Program Pengelolaan Persampahan  | Pengelolaan Sampah  | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| 31. Peningkatan mutu layanan Fasilitas Kesehatan (Posyandu, Pusat Kesehatan Desa, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah) serta | 1.02. Kesehatan   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                  | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |



| Program Kerja   | Urusan                                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan   |
| peningkatan status puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;   |  |  |  |  |
| 32. Pembangunan RSUD wilayah selatan dan barat;   | 1.02. Kesehatan                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  |
| 33. Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik;   | 2.18. Penanaman Modal                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |
| 34. Bantuan keuangan Desa Maju dan Desa Mandiri;  | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   |
| 35. Membangun stadion, sarana prasarana olah raga dan membangun industri atlet berprestasi (Olah raga Profesional / Sport Talent Scouting); | 2.19. Kepemudaan dan Olahraga          | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                       | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota   |
|   |  |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   | Seleksi Atlet Daerah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota |
| 36. Aplikasi Kota Cerdas, percepatan implementasi Smart City berbasis Teknologi Informasi;  | 2.16 Komunikasi dan Informatika        | Program Aplikasi Informatika   | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan                       |



| Program Kerja   | Urusan                                 | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020 |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | Program  | Kegiatan   | Sub Kegiatan  |
|   |  |  |  | Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas   |
| 37. Reformasi birokrasi;  | 4.01. Sekretariat Daerah               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Penataan Organisasi  | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                 |
|   | 6.01. Pengawasan                       | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                                      | Pendampingan dan Asistensi   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  |
| 38. Mendukung dan fasilitasi insan media;                       | 2.16 Komunikasi dan Informatika        | Program Informasi Dan Komunikasi Publik  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  |
| 39. Satu Data Blora;  | 2.20. Statistik                        | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Membangun Metadata Statistik Sektoral Pengembangan Infrastruktur |
| 40. Pendampingan dan konsultasi hukum aparatur pemerintah desa; | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa   |
| 41. Memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian perangkat;    | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Penataan Desa  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa      | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  |
| 42. Insentif RT, RW, dan linmas;                                | 2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat                                    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan     | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,  |



| Program Kerja   | Urusan                           | Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020               |   |  |
|---|----------------------------------|--|---|--|
|   |                                  | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan   |
|   |                                  | Dan Masyarakat Hukum Adat  | Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  |
| 43. Fasilitasi dan dukungan untuk menunjang kondusifitas dan keamanan daerah; | 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 44. Pembangunan Rumah Potong Hewan Modern;                                    | 3.27. Pertanian                  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Pengembangan Prasarana Pertanian  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan  |
| 45. Penanganan dampak covid-19 bidang sosial dan ekonomi.                     | 1.06. Sosial                     | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |

## 6.4 Arah Pengembangan Wilayah

### 6.3.1 Kebijakan Umum

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2020-2040. Arah pengembangan wilayah ditujukan untuk mewujudkan Daerah sebagai wilayah pengembangan agroindustri dan wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan pengembangan wilayah sesuai Kebijakan Penataan Ruang Daerah meliputi:

- a. pengembangan wilayah berbasis agroindustri dengan tetap



- memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem;
- b. pengembangan wilayah berbasis wanatani;
  - c. pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan;
  - d. penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan;
  - e. pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
  - f. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
  - g. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan
  - h. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Strategi dan program penataan ruang daerah dikelompokkan berdasarkan kebijakan penataan ruang Daerah sebagai berikut:

- (1) Strategi pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem meliputi:
  - a. menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan;
  - b. mengembangkan industri berbasis pertanian;
  - c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal;
  - d. meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi pertanian dan perikanan; dan
  - e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Strategi pengembangan wilayah berbasis wanatani meliputi:
  - a. memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - b. mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
- (3) Strategi pengendalian dan peningkatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
  - a. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
  - b. mengendalikan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi;
  - c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
  - e. mengoptimalkan sistem insentif dan disinsentif terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan



- daya dukung lingkungan meliputi:
- a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;
  - b. mengembangkan pusat pelayanan baru;
  - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK;
  - d. mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa;
  - e. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana dan daya dukung lahan; dan
  - f. menetapkan kawasan strategis kabupaten.
- (5) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan meliputi:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi darat dan udara;
  - b. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah mendukung kawasan industri dan wanatani;
  - c. meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
  - d. pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.
- (6) Strategi pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup meliputi:
- a. mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak terbarukan;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
  - c. mengembangkan pengelolaan sumber daya hutan, mineral, minyak dan gas bumi;
  - d. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
  - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
  - b. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
  - c. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi;
  - d. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan



- bencana;
  - e. memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
  - f. mengembangkan kawasan budi daya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah longsor dan kekeringan;
  - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
  - h. menetapkan ruang evakuasi bencana; dan
  - i. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- (8) Strategi pengembangan kawasan budi daya meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
  - b. memantapkan kawasan budi daya pertanian sebagai ketahanan pangan berkelanjutan;
  - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, dan peternakan;
  - d. mengembangkan industri strategis di dalam satu kawasan yang saling teraglomerasi dan memperhatikan lingkungan hidup; dan
  - e. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

### **6.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah yang dilaksanakan diarahkan pada:

- a. Program pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, meliputi :Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial; Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan
- b. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peningkatan prasarana dan sarana kawasan dasar kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial; dan Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan



- c. Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi: Penataan permukiman pedesaan; Mendorong pertumbuhan kawasan pedesaan; Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan; dan Pengembangan aksesibilitas menuju desa tertinggal

Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi diarahkan pada:

- a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Jalan, meliputi: Penyusunan rencana induk sistem transportasi; penyusunan Rencana Induk Rencana Pembangunan Jangka Sedang (RPJM) jalan dan jembatan; Penyusunan Rencana Induk Detail Engineering Design (DED) dan Studi Kalayakan Jalan Lingkar Kota maupun Kabupaten; Pengembangan rencana jalan strategis kabupaten meliputi: Ruas jalan Blora-Randublatung-Getas-Banjarejo (Kabupaten Ngawi); dan Ruas jalan Peting-Menden-Medalem-Ngraho (Kabupaten Bojonegoro); Peningkatan jalan kolektor menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, kawasan perbatasan, dan bandar udara; Pengembangan jalan lingkar meliputi: Kecamatan Tunjungan-Kecamatan Blora-Kecamatan Jepon; Pengembangan dan peningkatan jalan lokal yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan; Pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di pusat-pusat pelayanan; Peningkatan pelayanan angkutan penumpang; Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; dan Pengembangan prasarana jembatan lintas provinsi
- b. Perwujudan Sistem Telekomunikasi, meliputi: Pengembangan Jaringan Tetap, meliputi: Peningkatan kualitas jaringan distribusi; dan Pengembangan jaringan internet di pusat-pusat perkotaan; dan Pengembangan Sistem Jaringan Bergerak, yaitu Pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama
- c. Perwujudan Sistem Sumber Daya Air untuk Sumber Air, meliputi: peningkatan sistem kinerja Daerah Aliran Sungai; pelestarian sumber air dan konservasi daerah tangkapan air; pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan waduk dan bendung; pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan embung. Untuk prasarana Sumber Daya Air, meliputi: normalisasi sungai dan saluran irigasi; pengembangan dan



- pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya; peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi; dan pendayagunaan potensi mata air dan air tanah
- d. Perwujudan Sistem Pengendali Banjir, meliputi: Pembangunan tanggul penahan banjir; Pembangunan groundsill; perbaikan teknis sarana dan prasarana drainase; Pengembangan kolam penampung air hujan sebagai pengendali banjir; Pemasangan peringatan dini; dan Pemberdayaan masyarakat
  - e. Perwujudan Jaringan Air Baku untuk Air Bersih, meliputi: Pembangunan instalasi pengolahan air; Pembangunan jaringan air bersih perpipaan; Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan jaringan air bersih perpipaan mandiri di kawasan perdesaan; dan Peningkatan dan pemeliharaan mata air
  - f. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk SPAM jaringan perpipaan, meliputi: Peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum; dan Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya; dan SPAM bukan jaringan perpipaan, meliputi: Penggalan atau pemanfaatan air permukaan; dan Pengeboran air tanah secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan
  - g. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi: SPAL setempat berupa Pengembangan sub-sitem pengolahan setempat menggunakan metode septic tank; dan SPAL terpusat berupa pemantapan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri untuk kegiatan industri kecil
  - h. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3, meliputi: Pengembangan kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara Landfill; dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara Landfill
  - i. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah, meliputi: Pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPS; Pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPA; program pengelolaan sampah 3R; optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan; pengembangan layanan pengangkutan sampah pada wilayah kecamatan yang belum terlayani
  - j. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, meliputi: Pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi



- dengan sistem satuan Wilayah Sungai; Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu; penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase; pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan perkotaan; dan normalisasi saluran sungai
- k. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi: pengembangan jalur evakuasi bencana; pengembangan ruang evakuasi bencana; pembangunan teknologi penanggulangan bencana; peningkatan dan pembangunan pos kebakaran; peningkatan dan pengembangan hidran; pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.

### **6.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang**

Kebijakan Perwujudan Kawasan Lindung dilaksanakan melalui: perlindungan Kawasan Resapan Air, meliputi:

- a) pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- b) pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat
- c) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- d) penghijauan
- e) pengelolaan kawasan lindung yang melibatkan partisipasi dari masyarakat

Kebijakan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat yaitu:

- a) Sempadan Sungai, meliputi: penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi; penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan penghijauan
- b) Kawasan Sekitar Waduk atau Embung meliputi: penetapan pemanfaatan ruang sempadan waduk atau embung; penertiban bangunan di atas sempadan waduk atau embung; dan penghijauan
- c) Ruang Terbuka Hijau, meliputi: Pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH kota; pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan; pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan penataan makam sebagai RTH

Arahan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi sebagai berikut:



- a) Kawasan Cagar Alam Geologi berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam Karst Sukolilo, meliputi: pengendalian kegiatan yang dapat merusak bentang alam Karst Sukolilo; dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan
- b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah untu Kawasan Imbuan Air Tanah, meliputi: pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah; membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; kerjasama pengelolaan kawasan imbuan air tanah dengan Pemerintah Daerah Lain; dan pengelolaan kawasan imbuan air tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Untuk Kawasan Sekitar Mata Air, meliputi: Penetapan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air; Penertiban bangunan di atas kawasan sekitar mata air; penghijauan; dan Pengelolaan kawasan sekitar mata air dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Arahan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya meliputi: pelestarian bangunan cagar budaya; dan penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Kebijakan Perwujudan Kawasan Budidaya meliputi sebagai berikut

- a) Perwujudan Kawasan Pertanian untuk Tanaman Pangan, meliputi: Peningkatan, perlindungan dan pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan penyediaan jaringan irigasi yang memadai. Untuk Hortikultura, meliputi: peningkatan produktivitas komoditas hortikultura; penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen; dan pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian hortikultura
- b) Perwujudan Kawasan Pertambangan meliputi: Identifikasi potensi tambang; Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan Penanganan pasca tambang
- c) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi: Peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; Pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri kecil; dan Peningkatan kemampuan teknologi industri.



- d) Perwujudan Kawasan Permukiman untuk Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi: penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman; penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan; memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi: Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; Pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya; pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki nilai kebudayaan lokal; pengembangan ruang terbuka hijau permukiman perdesaan; dan Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.
- e) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
- 1) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dilakukan melalui Program Kawasan Strategis Kawasan Perbatasan Dukuh Singget Kecamatan Jiken, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Program Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Blora-Jepon, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan Program Kawasan Strategis Cepaka (Cepu-Padangan-Kasiman), yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
  - 2) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya berupa Kawasan Lingkungan Permukiman Sedulur Sikep, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
  - 3) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berupa Kawasan Blok Cepu dan Blok Blora, yaitu Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten



- 4) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi Program Kawasan Strategis Kawasan Prioritas yang Digunakan Melindungi Sumber Air yang ada Di Daerah Merupakan Daerah yang Dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; Program Kawasan Strategis Kawasan Rawan Bencana Alam Kekeringan, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan Program Kawasan Strategis Kawasan Lahan Kritis, yaitu: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Dalam rangka mengembangkan seluruh wilayah di Kabupaten Blora perlu diperhatikan pembangunan di wilayah selatan dan kawasan perbatasan. Beberapa pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung pengembangan wilayah antara lain:

1. Pengembangan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu.
2. Pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah.
3. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.
4. Program Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM Yogyakarta di Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Randublatung.
5. Peningkatan status jalan Randublatung – Getas – Perbatasan Kab Ngawi dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sesuai Perpres No 79 Tahun 2019



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1

Tabel 7.1

## Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

| Urusan                  | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM                                | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI |       | KONDISI AWAL |       |       |      |       | TARGET KINERJA |       |      |       |  |
|-------------------------|--------|---------------|---------|---|---|--|--------|------------------|-----------|-------|--------------|-------|-------|------|-------|----------------|-------|------|-------|--|
|                         | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |   |  |        |                  | 2016      | 2017  | 2018         | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023           | 2024  | 2025 | 2026  |  |
| <b>DINAS PENDIDIKAN</b> |        |               |         |   |   |  |        |                  |           |       |              |       |       |      |       |                |       |      |       |  |
| 1.01. Pendidikan        |        |               |         |   |   |  |        |                  |           |       |              |       |       |      |       |                |       |      |       |  |
|                         | 1      | 1             | 2       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>           | <b>APS SD</b>   | Jumlah Penduduk umur 7-12 tahun yang sekolah SD/MI dibagi Jumlah penduduk umur 7-12 tahun  | %      | SDGs             |           |       |              |       | 94,47 | 93   | 93,05 | 93,1           | 93,15 | 93,2 | 93,25 |  |
|                         |        |               |         |   | <b>APS SMP</b>  | Jumlah Penduduk umur 13-15 tahun yang sekolah SMP/MTs dibagi Jumlah penduduk umur 13-15 tahun  | %      | SDGs             | 94,9      | 87    | 95,73        | 94,47 | 74,46 | 74   | 74,05 | 74,1           | 74,15 | 74,2 | 74,25 |  |
|                         |        |               |         |   | <b>APK PAUD</b>   | Jumlah murid umur 3-6 tahun yang bersekolah di tingkat PAUD dibagi jumlah penduduk umur 3 - 6 tahun dikali 100%                                    | %      | SDGs             | 82,1      | 76,87 | 76,19        | 74,46 | 74    | 76   | 78    | 80             | 82    | 84   | 86    |  |
|                         |        |               |         |   | <b>APS Kesetaraan</b>                                   | Jumlah Penduduk umur 7-18 tahun yang sekolah pada Pendidikan Kesetaraan dibagi Jumlah penduduk umur 7 -18 yang tidak / belum sekolah dikalikan 100 | %      | SDGs             | 42,1      | 64,5  | 97           | 98,8  | 98,82 | 75   | 78    | 80             | 85    | 90   | 95    |  |
|                         | 1      | 1             | 3       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>           | Persentase sekolah mengembangkan kurikulum muatan lokal |  |        |                  |           |       |              |       |       |      |       |                |       |      |       |  |
|                         |        |               |         |   |   | Jumlah sekolah mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah sekolah dikali 100   | %      |                  | NA        | NA    | NA           | NA    | NA    | 50   | 51    | 52             | 53    | 54   | 55    |  |
|                         | 1      | 1             | 4       | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> | <b>Rasio Guru Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah</b> |  |        |                  |           |       |              |       |       |      |       |                |       |      |       |  |
|                         |        |               |         |   | <b>Persentase Guru TK yang bersertifikat pendidik</b>   | Jumlah guru pada tingkatan tertentu yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu dikali 100%              | %      | SDGs/RPJMN       |           |       |              |       | 46    | 53   | 56    | 59             | 62    | 65   | 68    |  |



| Urusan | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |      |        |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|--------|--------|---------------|---------|--|--|---|--------|------------------|-----------|--------------|------|--------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |  |   |        |                  |           | 2016         | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|        | 1      | 2             | 2       | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Utama       | <b>Jumlah Puskesmas Minimal Utama dibagi jumlah semua puskesmas dikali 100</b>  |        |                  |           |              |      | 38,5   | 38,5 | 38,5 | 50   | 50             | 61,5 | 73   | 73   |      |
|        |        |               |         |  |  | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas  | %      | SDGs             | 100       | 100          | 100  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  |      |
|        |        |               |         |  | Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK | Jumlah fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan SIK dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan dikali 100 %                                | %      | SPM              | 100       | 100          | 100  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  |      |
|        | 1      | 2             | 3       | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                 | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 3.c.1*                              | Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis dibagi jumlah seluruh populasi kemudian di kali 1.000   |        |                  |           | 71           | 61   | 72     | 72   | 74   | 75   | 76             | 77   | 78   | 79   |      |
|        | 1      | 2             | 4       | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                 | % apotek,toko obat alkes, UMOT dan optik yang berijin                          | Jumlah apotek, toko obat, alkes, UMOT dan optik yang berijin dibagi jumlah semua apotek, toko obat, alkes, UMOT dan optik yang ada dikali 100 | %      |                  | 70        | 70           | 70   | 75     | 75   | 80   | 85   | 85             | 90   | 95   | 100  |      |
|        |        |               |         |  | % PKRT yang bersertifikat  | Jumlah kumulatif item obat yang tersedia di (n) puskesmas X 100 dibagi (n X jumlah total item obat indikator                                  | %      |                  | 100%      | 100%         | 100% | 100%   | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  |      |
|        |        |               |         |  | % PIRT yang bersertifikat  | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian X 100 dibagi jumlah puskesmas  | %      |                  |           |              |      | 70     | 70   | 75   | 80   | 80             | 80   | 80   | 80   |      |
|        |        |               |         |  |  | Jumlah persentase capaian masing-masing peresepan dibagi jumlah komponen indikator peresepan  | %      |                  |           |              |      | 72,69% | 74   | 74   | 76   | 78             | 80   | 80   | 80   |      |



| Urusan                                  | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM  | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |      |       |                              |       | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|---|--------|---------------|---------|---|--|---|--------|------------------|-----------|--------------|------|-------|------------------------------|-------|----------------|------|------|------|------|
|   | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |  |   |        |                  |           | 2016         | 2017 | 2018  | 2019                         | 2020  | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1      | 3             | 2       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                        |  |   |        |                  |           |              |      |       |                              |       |                |      |      |      |      |
|   |        |               |         |   | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik   | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%   | %      |                  |           |              |      | 43,51 | 47,81                        | 50,03 | 52             | 54   | 56   | 58   | 60   |
|   |        |               |         |   | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada  | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada   |        |                  |           |              |      | 31,5  | 44,14                        | 55    | 57             | 59   | 61   | 63   | 65   |
|   | 1      | 3             | 3       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> |  |   |        |                  |           |              |      |       |                              |       |                |      |      |      |      |
|   |        |               |         |   | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak ( Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari )  | (Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum layak/aman)/(Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten) x100 %  | %      | RPJMN            | NA        | 75%          | 78%  | 85    | 87                           | 90    | 92             | 94   | 96   | 98   | 100  |
|   |        |               |         |   | persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali 100 |        | SPM              |           |              |      |       | Di Drop/ data tidak tersedia |       |                |      |      |      |      |
|   | 1      | 3             | 5       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>           | Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai  | (Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK)/(Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten)  | %      | SPM              |           |              | 94   | 95    | 96                           | 97    | 98             | 99   | 100  | 100  | 100  |

| Urusan | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM                                   | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |      |       |       |       |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|--------|--------|---------------|---------|--|--|---|--------|------------------|-----------|--------------|------|-------|-------|-------|------|----------------|------|------|------|------|
|        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |  |   |        |                  |           | 2016         | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|        |        |               |         |  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                             |   | %      | SPM              |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        | 1      | 3             | 7       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>             |  |   |        |                  |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |  | Persentase luas bangunan/gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh                  |   | %      |                  | 0,2       | 0,2          | 0,2  | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2  | 0,2            | 0,2  | 0,2  | 0,2  |      |
|        |        |               |         |  | Pesersentase drainase perkotaan dalam kondisi baik   | Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik   | km     |                  | 206,4     | 211,2        | 216  | 220,8 | 225,6 | 230,4 | 236  | 240            | 245  |      | 250  | 255  |
|        | 1      | 3             | 8       | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>            |  |   |        |                  |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |  | Persentase bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkkantoran selesai dibangun dan terevitalisasi | Jumlah bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran selesai dibangun dan terevitalisasi dibagi Jumlah bangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran dikali 100 | %      |                  | NA        | NA           | NA   | NA    | NA    | 100   | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  | 100  |
|        |        |               |         |  | Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi   | Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi dibagi jumlah gedung pemerintah dikali 100   |        |                  |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        | 1      | 3             | 9       | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b> |  |   |        |                  |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        | 1      | 3             | 10      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>               |  |   |        |                  |           |              |      |       |       |       |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |  | Persentase jalan kondisi baik  | Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten dikali 100  | %      |                  |           |              |      | 48,12 | 22,29 | 25    | 28   | 31             | 34   | 37   | 40   |      |
|        |        |               |         |  |  |   |        |                  |           |              |      |       | 65    |       |      |                |      |      |      |      |





| Urusan            | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|-------------------|--------|---------------|---------|--|---|---|--------|------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|                   | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |   |   |        |                  |           | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                   |        |               |         |  | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni  | rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni | %      | SPM              |           |              |      |      | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                   | 1      | 4             | 3       | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                    |   |   |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                   |        |               |         |  | Persentase Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan tertangani   | (Luas permukiman kumuh yang tertangani)/(Luas total permukiman kumuh yang telah ditetapkan )  | %      |                  | NA        | 1,50%        | 62%  | 72%  | 80   | 85   | 90             | 95   | 100  | 100  | 100  |
|                   |        |               |         | <b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b> |   |   |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                   |        |               |         |  | Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik   | Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/ jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu X 100  |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| 2.15. Perhubungan |        |               |         |  |   |   |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                   | 2      | 15            | 2       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>        |   |   |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                   |        |               |         |  | Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik | (Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat dalam kondisi baik)/(jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat keseluruhan)    | %      |                  | NA        | 0,8          | 0,75 | 0,8  | 82   | 85   | 87             | 90   | 92   |      |      |







| Urusan | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM  | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR    | REALISASI | KONDISI AWAL |      |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|--------|--------|---------------|---------|---|---|--|--------|---------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |   |  |        |                     |           | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|        |        |               |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                   |   |  |        |                     |           |              |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |   | Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar                                      | Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dibagi Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan dikali 100   | %      | Permendagri 86/2017 | N.A       | N.A          | 100  | 100  | 80   | 80   | 80   | 80             | 80   | 80   | 80   |      |
|        |        |               |         | <b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> |   |  |        |                     |           |              |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |   | Persentase OPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD                                    | Jumlah OPD penyusun analisis gender dibagi Jumlah OPD x100%  | %      |                     | 20        | 90           | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90             | 90   | 90   | 90   |      |
|        |        |               |         |   | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | Jumlah perempuan PNS dan anggota DPRD dibagi Jumlah perempuan x100%  | %      |                     | 4,69      | 4,9          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5              | 5    | 5    | 5    |      |
|        |        |               |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                             |   |  |        |                     |           |              |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |   | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani   | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dikali 100  | %      |                     | 100       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  |      |
|        |        |               |         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                           |   |  |        |                     |           |              |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|        |        |               |         |   | Persentase Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina | Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina dibagi jumlah Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan dikalikan 100 | Unit   |                     | 1         | 1            | 4    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1              | 1    | 1    | 1    |      |











| Urusan                 | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN                | SUMBER INDIKATOR    | REALISASI | KONDISI AWAL |       |           |           |           | TARGET KINERJA |           |           |           |           |
|------------------------|--------|---------------|---------|--|---|---|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |   |   |                       |                     |           | 2016         | 2017  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|                        |        |               |         |  | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah penyuluh dikali 100%   | %                     |                     | 100       | 100          | 100   | 100       | 100       | 100       | 100            | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                        |        |               |         |  | Cakupan bina kelompok petani                                  | Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n dibagi jumlah kelompok tani x100%   | %                     | Permendagri 86/2017 | 75        | 75           | 78    | 81        | 84        | 87        | 90             | 93        | 96        | 97        | 98        |
|                        |        |               |         |  |   |   |                       |                     |           |              |       |           |           |           |                |           |           |           |           |
|                        |        |               |         |  |   |   |                       |                     |           |              |       |           |           |           |                |           |           |           |           |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP |        |               |         |  |   |   |                       |                     |           |              |       |           |           |           |                |           |           |           |           |
| 2.11 Lingkungan Hidup  |        |               |         |  |   |   |                       |                     |           |              |       |           |           |           |                |           |           |           |           |
|                        | 2      | 11            | 2       | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                | Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup  | Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dibagi jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang wajib (RPPLH, KLHS, IKPLHD, IKLHD, DDDT) disusun, dinyatakan dengan satuan persen (%) | %                     | Permendagri 86/2017 | 40        | 40           | 40    | 40        | 50        | 60        | 70             | 75        | 80        | 90        | 100       |
|                        | 2      | 11            | 3       | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> |   |   |                       |                     |           |              |       |           |           |           |                |           |           |           |           |
|                        |        |               |         |  | Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air                         |   | indeks                | Permendagri 86/2017 | 48,46     | 54,00        | 62,00 | 51,25     | 50,00     | 50,00     | 51,00          | 51,10     | 52,00     | 52,10     | 53,00     |
|                        |        |               |         |  | Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara                       |   | indeks                | Permendagri 86/2017 | 70,00     | 87,14        | 90,62 | 91,07     | 76,46     | 76,56     | 77,46          | 77,56     | 78,46     | 78,56     | 79,46     |
|                        |        |               |         |  | Hasil Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca. 9.4.1(a)              | Tingkat Emisi = Data Aktifitas (AD) x Faktor Emisi (EF)   | Gg CO <sub>2</sub> eq | SDGs                | N/A       | N/A          | N/A   | (-242,62) | (-260,53) | (-265,53) | (-270,53)      | (-275,53) | (-280,53) | (-285,53) | (-290,53) |
|                        |        |               |         |  | Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lahan                       |   | indeks                | Permendagri 86/2017 | 66,63     | 68,10        | 68,96 | 79,83     | 80,77     | 80,87     | 80,97          | 81,07     | 81,17     | 81,27     | 81,37     |





















| Urusan | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR  | REALISASI | KONDISI AWAL |       |       |       |       | TARGET KINERJA |       |       |       |       |      |
|--------|--------|---------------|---------|--|---|--|--------|---|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|
|        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |   |  |        |   |           | 2016         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |
|        |        |               |         |  | Persentase pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat   | Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat dibagi jumlah pasar rakyat/tradisional dikali 100    | %      |   | 26,67     | 43,75        | 56,25 | 73,33 | 80    |       | 70             | 86    | 87    | 88    | 89    | 90   |
|        |        |               |         |  |   |  |        |   |           |              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |      |
|        | 3      | 30            | 4       | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> |   |  |        |   |           |              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |      |
|        |        |               |         |  | Persentase pasar yang diawasi   | Jumlah pasar yang diawasi dibagi jumlah pasar dikali 100   | %      |   | 100       | 100          | 100   | 100   | 100   |       | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  |
|        |        |               |         |  | Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat (11 bahan pokok) | Jumlah lonjakan komoditi bahan pokok dibagi total komoditi bahan pokok dikalikan 100   | %      | PERPRES NO : 71 TH 2015   | NA        | NA           | NA    | NA    | NA    |       |                | 9     | 7     | 5     | 5     | 5    |
|        |        |               |         |  | Persentase Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi                | Jumlah Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi dibagi Jumlah Kios Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) dikali 100 | %      | PERMENDAG NO. 49 TAHUN 2020, 30 DESEMBER 2020, PERMENDAG NO. 15/M-DAG/PELR/4/2013 |           |              |       |       |       |       | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  |
|        | 3      | 30            | 5       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   |   |  |        |   |           |              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |      |
|        |        |               |         |  | Persentase eksportir yang terbina   | Jumlah eksportir yang terbina dibagi Jumlah eksportir dikali 100   | %      |   |           |              |       |       |       |       |                | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  |
|        | 3      | 30            | 6       | <b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                      |   |  |        |   |           |              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |      |
|        |        |               |         |  | Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang                             | Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang  | unit   | - UU No: 2 Th 1981, Permendag No:67 Th 2018                                       | NA        | NA           | NA    | 2.400 | 4.500 | 4.000 | 4.100          | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |      |





| Urusan           | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR    | REALISASI |      | KONDISI AWAL |        |      |      |      | TARGET KINERJA |      |       |        |      |        |        |
|------------------|--------|---------------|---------|--|---|---|--------|---------------------|-----------|------|--------------|--------|------|------|------|----------------|------|-------|--------|------|--------|--------|
|                  | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |   |   |        |                     | 2016      | 2017 | 2018         | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023           | 2024 | 2025  | 2026   |      |        |        |
|                  |        |               |         |  | prosentase sarpras olahraga yang layak                  | Jumlah sarana dan prasarana olahraga (GOR, lapangan olahraga) yang layak dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana olahraga. | %      |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      | 5%    | 6%     | 7%   | 7%     | 8%     |
|                  |        |               |         |  | Jumlah atlet berprestasi                                | Jumlah atlet yang berprestasi kejuaraan tingkat karesidenan, provinsi, nasional dan internasional dalam satu tahun            | orang  | Permendagri 86/2017 |           |      |              |        |      |      |      |                |      | 34    | 36     | 38   | 40     | 42     |
|                  |        |               |         |  | Jumlah event kompetisi dan kebudayaan olahraga          | Jumlah event kompetisi dan kebudayaan olahraga  | event  |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      | 1     | 1      | 2    | 3      | 3      |
|                  | 2      | 19            | 4       | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>          |   |   |        |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      |       |        |      |        |        |
|                  |        |               |         |  | Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD | Jumlah Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD dibagi Jumlah Pembina Pramuka dikali 100                                  | %      |                     |           | 65   | 67           | 68     | 70   | 71   |      |                |      | 83%   | 84%    | 85%  | 85%    | 86%    |
|                  |        |               |         |  | Persentase Bumi Perkemahan yang layak                   | Jumlah Bumi Perkemahan yang layak dibagi Jumlah Bumi Perkemahan dikali 100  | %      |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      | 16,6  | 16,6   | 33,3 | 50     | 66,6   |
| 3.26. Pariwisata |        |               |         |  |   |   |        |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      |       |        |      |        |        |
|                  | 3      | 26            | 2       | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b> |   |   |        |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      |       |        |      |        |        |
|                  |        |               |         |  | Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha pariwisata    | jumlah pekerja pada usaha pariwisata  | orang  |                     |           |      |              |        |      |      |      |                |      | 756   | 771    | 787  | 803    | 819    |
|                  |        |               |         |  | Persentase Revitalisasi destinasi wisata                | Jumlah destinasi wisata yang Revitalisasi dibagi Jumlah destinasi wisata yang perlu direvitalisasi dikali 100                 | %      | RPJMN 2020-2024     |           |      | 26,60%       | 33,30% | 20%  | 0    |      |                |      | 6,60% | 13,30% | 20%  | 26,60% | 33,30% |
|                  |        |               |         |  | Jumlah desa wisata/jumlah DTW                           | Jumlah desa wisata  | desa   |                     |           |      |              |        |      |      | 12   |                |      | 13    | 14     | 14   |        |        |





| Urusan                                | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |       |       |       |       | TARGET KINERJA |       |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|---------------|---------|--|--|--|--------|------------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|--------|--------|
|                                       | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |  |  |        |                  |           | 2016         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021           | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|                                       |        |               |         |  | Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100                             | %      | RPJMN 2020-2024  | 100       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100            | 100   | 100    | 100    | 100    |
|                                       |        |               |         |  | Persentase arsip yang diakuisisi                                 | Jumlah arsip yang diakuisisi dibagi jumlah arsip dikali 100  | %      |                  | 60        | 60           | 60    | 60    | 100   | 60    | 60             | 60    | 60     | 60     | 60     |
|                                       |        |               |         |  | Persentase pengawasan kearsipan internal                         | Jumlah OPD yang diaudit/ jumlah OPD dikali 100   | %      |                  |           |              |       | 0     | 20    | 25    | 50             | 50    | 50     | 50     | 50     |
|                                       | 2      | 24            | 3       | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>                             |  |  |        |                  |           |              |       |       |       |       |                |       |        |        |        |
|                                       |        |               |         |  | Persentase arsip usul musnah                                     | Jumlah arsip yang dimusnahkan dibagi jumlah arsip yang seharusnya dimusnahkan dikali 100   |        |                  | 60        | 60           | 60    | 60    | 60    | 60    | 60             | 60    | 60     | 60     | 60     |
|                                       |        |               |         |  | Persentase arsip yang dialihmediakan                             | Jumlah arsip yang dialihmediakan dibagi jumlah arsip yang memenuhi kriteria alih media dikali 100                                  | %      |                  | 100       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100            | 100   | 100    | 100    | 100    |
|                                       |        |               |         |  |  |  |        |                  |           |              |       |       |       |       |                |       |        |        |        |
| <b>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b> |        |               |         |  |  |  |        |                  |           |              |       |       |       |       |                |       |        |        |        |
| Pertanian                             |        |               |         |  |  |  |        |                  |           |              |       |       |       |       |                |       |        |        |        |
|                                       | 3      | 27            | 04      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> |  |  |        |                  |           |              |       |       |       |       |                |       |        |        |        |
|                                       |        |               |         |  | Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit  | Jumlah ternak yang terlayani pengobatan tahunan ditambah jumlah ternak yang terlayani pengobatan tahun n-1                         | ekor   |                  | 4.825     | 5.723        | 4.796 | 6.077 | 2.850 | 2.875 | 5.893          | 8.911 | 11.929 | 14.947 | 17.965 |
|                                       |        |               |         |  | Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak dikonsumsi     | Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang layak konsumsi dibagi jumlah sampel produk pangan asal hewan yang diperiksa dikali 100 | %      |                  |           |              |       |       |       | 75    | 78             | 80    | 83     | 85     | 87     |

| Urusan                       | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR     | REALISASI |         | KONDISI AWAL |         |       |       |       | TARGET KINERJA |       |       |         |         |
|------------------------------|--------|---------------|---------|--|--|---|--------|----------------------|-----------|---------|--------------|---------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|---------|
|                              | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |  |   |        |                      | 2016      | 2017    | 2018         | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023           | 2024  | 2025  | 2026    |         |
|                              | 3      | 27            | 02      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>    |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              |        |               |         |  | Populasi ternak Sapi                             | Populasi ternak Sapi  | Ekor   |                      | #####     | #####   | #####        | #####   | ##### | ##### | ##### | #####          | ##### | ##### | 288.499 | 294.275 |
|                              |        |               |         |  | Populasi ternak Kambing                          | Populasi ternak Kambing   | Ekor   |                      | #####     | #####   | #####        | #####   | ##### | ##### | ##### | #####          | ##### | ##### | 158.739 | 161.955 |
|                              | 3      | 27            | 03      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b> |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              |        |               |         |  | Populasi bibit ternak                            | Populasi bibit ternak   | Ekor   |                      | 60        | 0       | 0            | 0       | 15    | 30    | 40    | 50             | 60    |       | 70      | 80      |
|                              | 3      | 27            | 06      | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                       |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              |        |               |         |  | Persentase usaha peternakan yang sudah terdaftar | Jumlah usaha peternakan yang terdaftar dibagi jumlah usaha peternakan dikali 100                  | %      |                      | 0         | 0       | 0            | 0       | 0     | 5     | 6     | 7              | 8     | 9     | 10      |         |
|                              | 3      | 27            | 07      | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                            | Cakupan bina kelompok ternak                     | Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan pemda dibagi Jumlah kelompok ternak x 100%      | %      |                      | 30        | 30      | 30           | 40      | 40    | 42    | 43    | 44             | 45    |       | 46      | 47      |
| 3.25. Kelautan dan Perikanan |        |               |         |  |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              | 3      | 25            | 2       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                   |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              | 3      | 25            | 2       |  | Jumlah produksi perikanan tangkap 14.2.1         | Jumlah produksi perikanan tangkap   | Ton    | SDGs                 | 280,23    | 162,483 | 263,551      | 350,865 | 264,3 | 288,1 | 311,9 | 335,5          | 359,2 |       | 382,9   | 406,6   |
|                              | 3      | 25            | 2       |  | Cakupan bina kelompok nelayan                    | (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n : Jumlah kelompok nelayan) x 100% | %      | Permend agri 86/2017 | -         | -       | -            | 28,57   | 28,57 | 35,71 | 42,86 | 50,00          | 57,14 |       | 64,28   | 71,42   |
|                              | 3      | 25            | 3       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                  |  |   |        |                      |           |         |              |         |       |       |       |                |       |       |         |         |
|                              | 3      | 25            | 3       |  | Produksi perikanan budidaya                      | Jumlah produksi perikanan budidaya  | ton    | Permend agri 86/2017 | 180,641   | 348,5   | 216,338      | 312,646 | 266,8 | 300   | 333,2 | 351,4          | 369,5 | 387,6 | 405,6   |         |





















| Urusan                 | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM  | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR    | REALISASI | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|------------------------|--------|---------------|---------|---|--|---|--------|---------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|                        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |  |   |        |                     |           | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                        |        |               |         |   | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan  | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100 | %      |                     | 99        | 84           | 96   | 82   | 84   | 86   | 88             | 90   | 90   | 94   | 95   |
|                        | 7      | 1             | 6       | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> |  |   |        |                     |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        |        |               |         |   | Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu   | Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100  | %      |                     |           |              |      | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Kecamatan Randublatung |        |               |         |   |  |   |        |                     |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>7.01. Kecamatan</b> |        |               |         |   |  |   |        |                     |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        | 7      | 1             | 1       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |  |   |        |                     |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        |        |               |         |   | Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100   | %      | Permendagri 86/2017 |           |              |      | 76,3 | 100  | 95   | 95             | 95   | 95   | 95   | 95   |







| Urusan          | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM  | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR    | REALISASI |      | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |  |
|-----------------|--------|---------------|---------|---|--|--|--------|---------------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|--|
|                 | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |  |  |        |                     | 2016      | 2017 | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|                 |        |               |         |   | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan  | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100% | %      |                     | 99        | 84   | 96           | 99   | 99   | 95   | 90   | 95             | 87   | 90   | 95   |  |
|                 | 7      | 1             | 6       | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> |  |  |        |                     |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |   | Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu   | Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%  | %      |                     |           |      |              | 99   | 95   | 95   | 95   | 95             | 95   | 95   | 95   |  |
| Kecamatan Cepu  |        |               |         |   |  |  |        |                     |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
| 7.01. Kecamatan |        |               |         |   |  |  |        |                     |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 | 7      | 1             | 1       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |  |  |        |                     |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |   | Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100  | %      | kelompok masyarakat |           |      |              | 80   | 85   | 85   | 88   | 90             | 95   | 96   | 97   |  |



| Urusan          | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR                | REALISASI |      | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |  |
|-----------------|--------|---------------|---------|--|--|--|--------|---------------------------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|--|
|                 | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |  |  |        |                                 | 2016      | 2017 | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 7.01. Kecamatan |        |               |         |  |  |  |        |                                 |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 | 7      | 1             | 1       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>        |  |  |        |                                 |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |  | Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100  | %      |                                 |           |      |              | 99   | 100  | 85   | 85   | 85             | 93   | 96   | 98   |  |
|                 | 7      | 1             | 2       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |  |  |        |                                 |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan   | Hasil survey IKM   | %      | Hasil Survey IKM pada Kecamatan | 100       | 99   | 98           | 96   | 100  | 87   | 85   | 80             | 85   | 90   | 90   |  |
|                 | 7      | 1             | 3       | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>      |  |  |        |                                 |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |  | Persentase lembaga masyarakat aktif  | Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100  | %      |                                 | 100       | 100  | 87           | 99   | 100  | 90   | 86   | 90             | 95   | 98   | 99   |  |
|                 | 7      | 1             | 4       | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>      |  |  |        |                                 |           |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |  |
|                 |        |               |         |  | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan  | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100% | %      |                                 | 99        | 84   | 96           | 100  | 100  | 95   | 90   | 95             | 87   | 90   | 100  |  |









| Urusan              | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM   | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR   | SATUAN | SUMBER INDIKATOR                | REALISASI | KONDISI AWAL |      |       |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|---------------------|--------|---------------|---------|--|---|---|--------|---------------------------------|-----------|--------------|------|-------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|                     | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |  |   |   |        |                                 |           | 2016         | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                     |        |               |         |  | Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu  | Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100% | %      | Mandiri                         |           |              |      | 100   | 100  | 25   | 50             | 75   | 100  | 100  | 100  |
| Kecamatan Tunjungan |        |               |         |  |   |   |        |                                 |           |              |      |       |      |      |                |      |      |      |      |
| 7.01. Kecamatan     |        |               |         |  |   |   |        |                                 |           |              |      |       |      |      |                |      |      |      |      |
|                     | 7      | 1             | 1       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>        |   |   |        |                                 |           |              |      |       |      |      |                |      |      |      |      |
|                     |        |               |         |  | Persentase kelompok masyarakat (kades/kalor/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100                             | %      |                                 |           |              |      | 75    | 75   | 80   | 83             | 86   | 90   | 93   | 95   |
|                     | 7      | 1             | 2       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |   |   |        |                                 |           |              |      |       |      |      |                |      |      |      |      |
|                     |        |               |         |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan  | Hasil survey IKM  | %      | Hasil Survey IKM pada Kecamatan | 100       | 99           | 98   | 77,41 | 77,9 | 80   | 80             | 80   | 85   | 85   | 90   |
|                     | 7      | 1             | 3       | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>      |   |   |        |                                 |           |              |      |       |      |      |                |      |      |      |      |
|                     |        |               |         |  | Persentase lembaga masyarakat aktif   | Jumlah lembaga masyarakat aktif / jumlah lembaga masyarakat x 100   | %      |                                 | 100       | 100          | 87   | 80    | 80   | 85   | 88             | 90   | 95   | 95   | 96   |







| Urusan                 | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM  | INDIKATOR   | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|------------------------|--------|---------------|---------|---|---|--|--------|------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
|                        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |   |   |  |        |                  |           | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|                        |        |               |         |   | Persentase kelompok masyarakat (kades/kalor/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100                            | %      |                  |           |              |      | 80   | 84   | 80   | 85             | 90   | 95   | 95   | 100  |
|                        | 7      | 1             | 6       | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> |   |  |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        |        |               |         |   | Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu  | Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100 | %      |                  |           |              |      | 100  | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Kecamatan Kunduran     |        |               |         |   |   |  |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
| <b>7.01. Kecamatan</b> |        |               |         |   |   |  |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        | 7      | 1             | 1       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |  |        |                  |           |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |
|                        |        |               |         |   | Persentase kelompok masyarakat (kades/kalor/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100                            |        |                  |           |              |      | -    | -    | -    | 90             | 90   | 90   | 90   | 90   |











| Urusan | KODE   |               |         | URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR  | RUMUS/FORMULA INDIKATOR  | SATUAN | SUMBER INDIKATOR | REALISASI |      | KONDISI AWAL |      |      |      |      | TARGET KINERJA |      |      |      |  |
|--------|--------|---------------|---------|------------------|--|--|--------|------------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|--|
|        | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM |                  |  |  |        |                  | 2016      | 2017 | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|        |        |               |         |                  | Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu | Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100 | %      |                  |           |      |              | 100  | 97   | 100  | 100  | 100            | 100  | 100  | 100  |  |



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### **8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Blora dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Blora sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.







| No | Indikator Kinerja Daerah   | Formulasi Indikator                                      | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD |            | Target Kinerja |            |            |            |            | Target Akhir RPJMD |
|----|----------------------------|--|--------|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
|    |                            |  |        | Tahun 2020                 | Tahun 2021 | Tahun 2022     | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                    |
| 9. | Persentase Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100 | %      | 11,68                      | 11,4       | 11,12          | 10,84      | 10,56      | 10,28      | 10,00      | 10,00              |

## 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blora tertuang pada Tabel 8.2.



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora  
Tahun 2021-2026

| No        | Indikator Kinerja Daerah                   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja |            |            |            |            |            | Perangkat Daerah                      |
|-----------|--|--------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
|           |  |        | Tahun 2020           | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                       |
| <b>A</b>  | <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>      |        |                      |                |            |            |            |            |            |                                       |
| 1)        | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)           | Indeks | 68,84                | 69,04          | 69,24      | 69,44      | 69,64      | 69,84      | 70,04      | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 2)        | Indeks Pembangunan Gender                  |        | 83,89                | 83,94          | 83,99      | 84,04      | 84,09      | 84,14      | 84,19      |                                       |
| 3)        | Tingkat pembangunan infrastruktur daerah   | %      | 81,24                | 82,96          | 84,40      | 85,60      | 86,79      | 86,55      | 87,49      |                                       |
| 4)        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup           | Indeks | 70,25                | 67,56          | 68,28      | 68,38      | 69,11      | 69,21      | 69,93      |                                       |
| 5)        | Indeks Reformasi Birokrasi                 | Indeks | 55,98 (CC)           | 62 (B)         | 64 (B)     | 67 (B)     | 71 (B)     | 73 (B)     | 75 (A)     |                                       |
| 6)        | Indeks toleransi (kerukunan umat beragama) | Indeks |                      | 74,6           | 74,8       | 75         | 75,2       | 75,4       | 75,6       |                                       |
| 7)        | Pertumbuhan Ekonomi                        | %      | 2-4                  | 2-4            | 2-4        | 2-4        | 2-4        | 2-4        | 2-4        |                                       |
| 8)        | Laju Inflasi                               | %      | 2,05                 | 2,5-6          | 2,5-6      | 2,5-6      | 2,5-6      | 2,5-6      | 2,5-6      |                                       |
| 9)        | Persentase Penduduk Miskin                 | %      | 11,96                | 11,68          | 11,4       | 11,12      | 10,84      | 10,56      | 10,28      |                                       |
| <b>B</b>  | <b>Aspek Pelayanan umum</b>                |        |                      |                |            |            |            |            |            |                                       |
| <b>1)</b> | <b>Urusan Pendidikan</b>                   |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Pendidikan                      |
| 10)       | Rata-rata Lama Sekolah                     | Tahun  | 6,83                 | 6,95           | 7,07       | 7,19       | 7,31       | 7,43       | 7,55       |                                       |
| 11)       | Angka Harapan Lama Sekolah                 | Tahun  | 12,2                 | 12,25          | 12,3       | 12,35      | 12,4       | 12,45      | 12,5       |                                       |
| <b>2)</b> | <b>Urusan Kesehatan</b>                    |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Kesehatan                       |







RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No         | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja |            |            |            |            |            | Perangkat Daerah                                   |
|------------|--|--------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|            |  |        | Tahun 2020           | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
| <b>11)</b> | <b>Urusan Lingkungan Hidup</b>   |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Lingkungan Hidup                             |
| 28)        | Indeks Kualitas Air  | Indeks | 50,00                | 50,00          | 51,00      | 51,10      | 52,00      | 52,10      | 53,00      |  |
| 29)        | Indeks Kualitas Udara  | Indeks | 76,46                | 76,56          | 77,46      | 77,56      | 78,46      | 78,56      | 79,46      |  |
| 30)        | Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | Indeks | 80,77                | 80,87          | 80,97      | 81,07      | 81,17      | 81,27      | 81,37      |  |
| <b>12)</b> | <b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                 |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               |
| 31)        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil | %      | NN                   | 88             | 88,2       | 88,4       | 88,6       | 88,8       | 90         |  |
| <b>13)</b> | <b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                               |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |
| 32)        | Indeks Desa Membangun  | Indeks | 0,6500               | 0,6505         | 0,6510     | 0,6515     | 0,6520     | 0,6525     | 0,6530     |  |
| <b>14)</b> | <b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                   |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 33)        | Total Fertility Rate (TFR)   | %      | 2,2                  | 2,26           | 2,25       | 2,24       | 2,23       | 2,22       | 2,2        |  |
| <b>15)</b> | <b>Urusan Perhubungan</b>  |        |                      |                |            |            |            |            |            |  |
| 34)        | Persentase sarana perhubungan kondisi baik                                   | %      | 85                   | 87             | 90         | 91         | 92         | 93         | 94         |  |
| <b>16)</b> | <b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>                                     |        |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Komunikasi dan Informatika                   |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No         | Indikator Kinerja Daerah  | Satuan        | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja |            |            |            |            |            | Perangkat Daerah   |
|------------|---|---------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|            |   |               | Tahun 2020           | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |  |
| 35)        | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                               | Indeks        | 2,62                 | 2,86           | 2,96       | 3          | 3,05       | 3,1        | 3,15       |  |
| <b>17)</b> | <b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                                    |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah              |
| 36)        | Persentase usaha mikro naik kelas   |               |                      |                |            |            |            |            |            |  |
| <b>18)</b> | <b>Urusan Penanaman Modal</b>   |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu |
| 37)        | Pertumbuhan Investasi   | %             |                      | 4              | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |  |
| <b>19)</b> | <b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>  |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata             |
| 38)        | Prestasi olahraga   | Medali/ Piala |                      |                |            |            |            |            |            |  |
| <b>20)</b> | <b>Urusan Statistik</b>   |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |
| 39)        | Persentase ketersediaan data pada portal open data daerah                           | %             | 25                   | 35             | 40         | 45         | 50         | 55         | 60         |  |
| <b>21)</b> | <b>Urusan Persandian</b>  |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Komunikasi dan Informatika                                 |
| 40)        | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah  | %             | 14                   | 19             | 23         | 27         | 31         | 36         | 40         |  |
| <b>22)</b> | <b>Urusan Kebudayaan</b>  |               |                      |                |            |            |            |            |            | Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata             |
| 41)        | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan | buah          |                      |                | 39         | 44         | 50         | 53         | 60         |  |





RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No         | Indikator Kinerja Daerah   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja |            |            |            |            |            | Perangkat Daerah                            |
|------------|--|--------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|            |  |        | Tahun 2020           | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |   |
|            | pengolahan   |        |                      |                |            |            |            |            |            |   |
| <b>37)</b> | <b>Sekretariat Daerah</b>  |        |                      |                |            |            |            |            |            | Sekretariat Daerah                          |
| 49)        | Nilai SAKIP  | Skor   | B                    | B              | 70 (BB)    | 72,5 (BB)  | 75 (BB)    | 77,5(BB)   | 80 (A)     |   |
| 50)        | Indeks Maturitas Kelembagaan   | level  |                      | 3              | 3          | 3          | 3          | 3          | 4          |   |
| 51)        | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 70                   | 71,5           | 73,0       | 74,0       | 74,5       | 75         | 75,5       |   |
| <b>38)</b> | <b>Sekretariat DPRD</b>  |        |                      |                |            |            |            |            |            | Sekretariat DPRD                            |
| 52)        | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD               | Indeks |                      | 65             | 65         | 65         | 70         | 70         | 70         |   |
| <b>31)</b> | <b>Unsur Penunjang Perencanaan</b>                                     |        |                      |                |            |            |            |            |            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |
| 53)        | Skor Capaian Aspek Perencanaan strategis dalam SAKIP Pemerintah Daerah | Skor   |                      | 22             | 23         | 24         | 25         | 26         | 27         |   |
| <b>32)</b> | <b>Unsur Penunjang Keuangan</b>  |        |                      |                |            |            |            |            |            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 54)        | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                  | Opini  | WTP                  | WTP            | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |   |
| <b>33)</b> | <b>Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>      |        |                      |                |            |            |            |            |            | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan |
| 55)        | Indeks Profesionalitas ASN   | Indeks | 70                   | 72             | 72         | 73         | 73         | 74         | 74         |   |
| <b>34)</b> | <b>Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>                     |        |                      |                |            |            |            |            |            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |
| 56)        | Indeks Inovasi Daerah  | Indeks | 1704                 |                |            |            |            |            |            |   |



RPJMD KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021-2026



| No         | Indikator Kinerja Daerah                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal | Target Kinerja |            |            |            |            |            | Perangkat Daerah                  |
|------------|---|--------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|            |   |        | Tahun 2020           | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                                   |
| <b>39)</b> | <b>Unsur Penunjang Pengawasan</b>                       |        |                      |                |            |            |            |            |            | Inspektorat                       |
| 57)        | Indeks Persepsi Anti Korupsi                            | Indeks |                      | 64,51          | 66,51      | 68,51      | 70,51      | 72,51      | 74,51      |                                   |
| <b>37)</b> | <b>Unsur Penunjang Kewilayahan</b>                      |        |                      |                |            |            |            |            |            | Kecamatan                         |
| 58)        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | Indeks | 82,36                | 82,51          | 82,66      | 82,81      | 82,96      | 83,11      | 83,26      |                                   |
| <b>38)</b> | <b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>               |        |                      |                |            |            |            |            |            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 59)        | Persentase konflik sosial tertangani                    | %      | 100                  | 100            | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |                                   |
|            |   |        |                      |                |            |            |            |            |            |                                   |
| <b>C</b>   | <b>Aspek Daya Saing Daerah</b>                          |        |                      |                |            |            |            |            |            |                                   |
| 60)        | Indeks Daya Saing Daerah                                | Indeks |                      |                |            |            |            |            |            | Seluruh Perangkat Daerah          |



## **BAB IX PENUTUP**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blora serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

### **9.1. Pedoman Transisi**

RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

- a. Bupati Blora berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Blora yaitu: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing” dapat terwujud.